



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 935 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selaras dengan perencanaan strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024, perlu menetapkan rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 477);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. arah kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. strategi sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan

- d. peta rencana strategis sistem pemerintahan berbasis elektronik.

KETIGA : Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dan berkesinambungan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 935 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024

RENCANA INDUK
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berikut ini adalah latar belakang perlunya penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024:

1. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah instansi pemerintah yang meningkatkan peran perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan.
2. Arah kebijakan Kementerian Perdagangan untuk periode 2020-2024 akan secara aktif meningkatkan peran diplomasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus menjawab berbagai tantangan internal maupun eksternal selama lima tahun mendatang.
3. Dalam tataran nasional, adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government memberikan dorongan dan arahan baru terkait arah pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Nasional.
4. Diperlukan adanya Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan digunakan sebagai acuan utama dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan manfaat aset-aset dan investasi teknologi informasi dan komunikasi, termasuk sumber daya manusia dan organisasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk optimalisasi peranan Pusat Data dan Sistem Informasi.

1.2. Tujuan

1. Menyusun Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Menyusun Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 sehingga dapat direalisasikan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Menjadikan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi acuan bagi arah pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Perdagangan sehingga tingkat efektifitas implementasi yang dilaksanakan dapat dirasakan nilai tambahnya oleh manajemen perusahaan

1.3. Lingkup

1. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 merujuk kepada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 -2024.
2. Desain Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan akan mencakup solusi di bidang aplikasi/sistem informasi, manajemen, organisasi dan teknologi.
3. Fokus kegiatan adalah *assessment* (bisnis dan teknologi informasi), *visioning* (prinsip dan kapabilitas), desain (arsitektur dan tata kelola teknologi informasi), *roadmap* implementasi dan *portfolio* program dan proyek teknologi informasi (termasuk valuasi).

1.4. Daftar Istilah

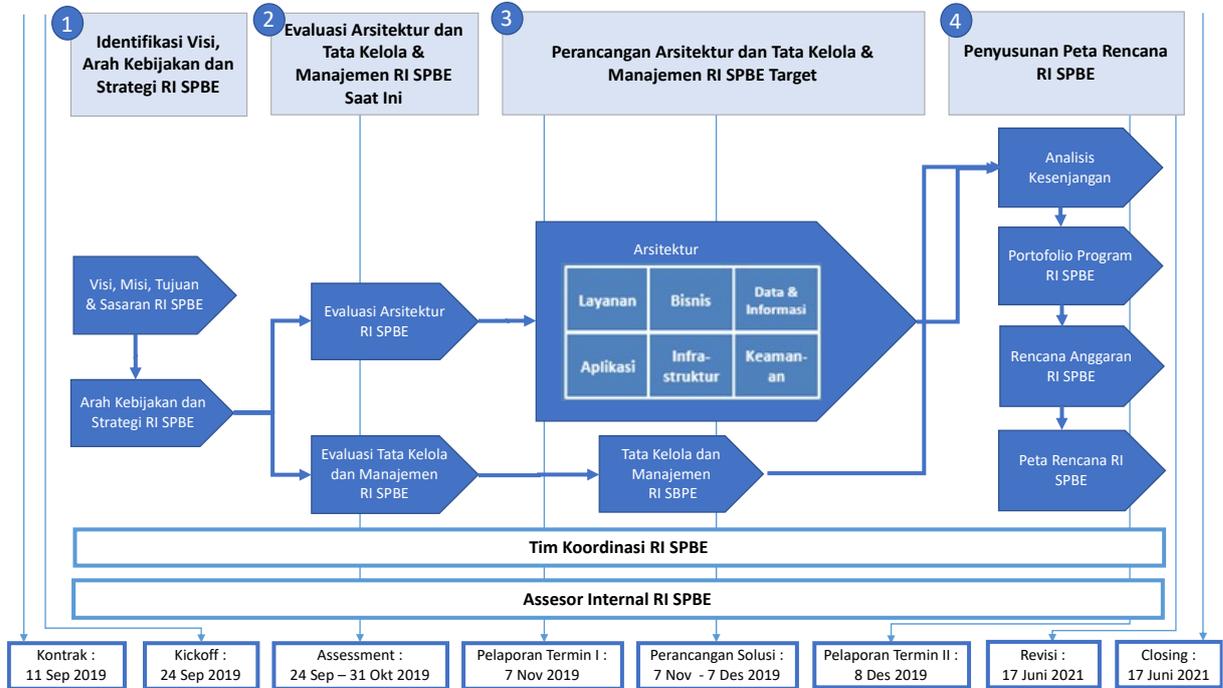
Berikut ini merupakan sejumlah istilah yang banyak digunakan dalam dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini:

Nama	Definisi
Kemendag RI	Kementrian Perdagangan Republik Indonesia adalah kementrian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan
<i>Market Intelligence</i>	Strategi yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan pengumpulan data dan analisis pasar yang sesuai dengan keadaan pasar saat ini
Perpres	Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi infromasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna
Rencana Induk SPBE (RISPBE)	Perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi organisasi
COBIT	<i>Control Objective for Information and related Technology</i> , disingkat COBIT, adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi
TOGAF	Merupakan kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberian pendekatan komprehensif untuk desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola

Nama	Definisi
	arsitektur informasi perusahaan. Arsitektur ini biasanya dimodelkan dengan empat tingkat atau domain; bisnis, aplikasi, data, dan teknologi
DAMA	<i>The Data Management Body of Knowledge</i> menyajikan pandangan komprehensif tentang tantangan, kompleksitas, dan nilai manajemen data yang efektif
ISO 20000	Merupakan standar internasional pertama untuk manajemen layanan
ISO 27001	Merupakan standar sistem manajemen yang diakui secara internasional untuk keamanan informasi. Ini bertujuan untuk membantu organisasi mengikuti praktik terbaik agar informasi mereka tetap aman
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
PBK	Perdagangan Berjangka Komoditi
SRG	Sistem Resi Gudang
PL	Pasar Lelang Komoditas
SSO	<i>Single Sign On</i> merupakan teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna
SIR	<i>Standard Indonesia Rubber</i>
UML	Unit Metrologi Legal
KSWP	Konfirmasi Status Wajib Pajak
Pokja	Kelompok Kerja

1.5. Metodologi

Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana RISPBE Kemendag 2020-2024 mengikuti metodologi yang mengacu kepada arahan Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. RISPBE Kemendag disertai dengan penggunaan artifak dari kerangka kerja *best practices* seperti TOGAF untuk arsitektur, COBIT untuk tata kelola TI, DAMA untuk tata kelola data, ISO 27001 untuk sistem manajemen pengamanan informasi serta ISO 20000 untuk sistem manajemen layanan, dengan ilustrasi sebagai berikut:



Gambar 1-1 Metodologi Pengerjaan

2. Arahan Strategis Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Berdasarkan kepada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 didapatkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kemendag:

2.2. Visi Presiden

Visi Kemendag diturunkan dari visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki visi yang sama dengan Presiden yang sedang menjabat. Pada periode 2020-2024, berikut adalah visi Presiden Republik Indonesia yang juga merupakan visi Kemendag:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

2.2.1. Misi Presiden

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagaimana visi Kemendag, misi Kemendag juga diambil dari misi Presiden Republik Indonesia. Adapun misi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

2.2.2. Tujuan Kemendag

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang sudah dipaparkan diatas. Untuk itu Kementerian Perdagangan menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Peningkatan kinerja ekspor *nonmigas* dan jasa;
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

2.2.3. Sasaran Strategis Kemendag

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Kementerian Perdagangan menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024. Kementerian Perdagangan memiliki tujuh sasaran strategis yang mewakili bidang perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri, dan bidang penunjang



Gambar 2-1 Sasaran Strategis Kemendag

Sasaran strategis Kemendag tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi bagian-bagian yang lebih detail menjadi arah kebijakan dan strategi. Berikut adalah pemetaan Sasaran Strategis Kemendag kepada arah kebijakan dan strategi:

Tabel 2-1 Sasaran Strategis Kemendag

No.	Sasaran Strategis (Kode)	Arah Kebijakan (Kode)	Strategi
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa (SS1)	Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor (SS1.01)	Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama
2.			Meningkatkan diversifikasi produk ekspor
3.			Memperluas tujuan ekspor ke pasar non-tradisional
4.			Meningkatkan pengamanan perdagangan untuk penyelamatan ekspor
5.			Meningkatkan promosi ekspor migas dan jasa
6.			Meningkatkan pelayanan perizinan dan pengembangan pemanfaatan fasilitas ekspor dan impor
7.			Meningkatkan pengelolaan impor
8.			Penguatan pencitraan Indonesia
9.			Optimalisasi peran perwakilan perdagangan di luar negeri
10.			Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional (SS1.02)
11.	Meningkatkan kemampuan diplomasi perdagangan		
12.	Meningkatkan pemanfaatan hasil kerjasama untuk kegiatan ekspor		
13.	Menyelaraskan regulasi dengan hasil kerjasama perdagangan internasional		
14.	Meningkatkan kebijakan nasional di Forum Internasional		
15.	Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Bapokting (SS2)	Penguatan Jaringan Distribusi untuk Bapokting (SS2.01)	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan di daerah untuk mengatasi kelangkaan stok
16.			Mengoptimalkan pemanfaatan Gerai Maritim dan Tol Laut
17.			Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Perdagangan Antar Provinsi

No.	Sasaran Strategis (Kode)	Arah Kebijakan (Kode)	Strategi
18.		Pengembangan dan Peningkatan Pengawasan terhadap Bapokting (SS2.02)	Mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Informasi harga Barang Kebutuhan Pokok
19.			Meningkatkan pengawasan pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok
20.			Meningkatkan koordinasi untuk pengawasan barang bapokting dengan pemerintah daerah
21.	Mewujudkan Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab (SS3)	Peningkatan Perlindungan Konsumen (SS3.01)	Menguatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen
22.			Meningkatkan pergerakan konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri
23.			Mengembangkan standarisasi, mutu produk, dan regulasi pro-konsumen
24.		Peningkatan Tertib Niaga Pelaku Usaha (SS3.02)	Mengembangkan standarisasi dan regulasi untuk pelaku usaha
25.			Meningkatkan tertib niaga untuk pelaku usaha
26.			Meningkatkan pengawasan barang beredar dan tertib ukur
27.	Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri (SS4)		Pengamanan Pasar Dalam Negeri Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional (SS4.01)
28.		Memperkuat sinergi pusat – daerah dalam membangun sarana dan prasarana perdagangan	
29.		Mengoptimalkan program revitalisasi pasar yang berkualitas, nyaman, aman, dan bersih	
30.		Mengoptimalkan kegiatan pemasaran produk dalam negeri unggulan yang berkesinambungan	

No.	Sasaran Strategis (Kode)	Arah Kebijakan (Kode)	Strategi
31.			Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dalam implementasi Sistem Logistik Nasional
32.			Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pembinaan, pelatihan usaha
33.			Membangun basis data informasi pasar domestik dan produk unggulan daerah
34.	Mengoptimalkan Peranan PBK, SRG, dan PLK (SS5)	Peningkatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan PBK, SRG, dan PLK (SS5.01)	Meningkatkan mekanisme dan manfaat pelaksanaan perdagangan berjangka
35.			Meningkatkan sinergitas Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
36.			Meningkatkan manfaat pelaksanaan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
37.			Meningkatkan sinergi pusat – daerah dalam pemanfaatan SRG dan PLK
38.			Meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen PBK, SRG, dan PLK
39.			Meningkatkan dukungan Legislasi, Penindakan dan Litigasi terkait PBK, SRG, dan PLK
40.	Meningkatkan Kinerja Kementerian	Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian	Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan
41.	Perdagangan yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional (SS6)	Perdagangan (SS6.01)	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi
42.			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan
43.			Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas

No.	Sasaran Strategis (Kode)	Arah Kebijakan (Kode)	Strategi
			kinerja aparatur Kementerian Perdagangan
44.			Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan SDM Kementerian sesuai Analisis Jabatan
45.			Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan
46.			Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan
47.		Penguatan Pelayanan Publik yang Prima	Memperkuat pelayanan publik yang responsif
48.		(SS6.02)	Meningkatkan keterbukaan informasi publik
49.		Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis & Berbasis Kajian	Meningkatkan kualitas kajian perdagangan
50.		(SS6.03)	Memperkuat dan menyelaraskan wewenang, kelembagaan, dan regulasi di Bidang Perdagangan
51.	Meningkatkan Kapabilitas SDM Perdagangan (SS7)	Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi	Mengembangkan standar kompetensi SDM Bidang Perdagangan
52.		(SS7.01)	Membangun manajemen SDM berbasis kompetensi yang terintegrasi
53.			Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan SDM Sektor Perdagangan

3. Dukungan Tugas Pokok dan Fungsi Kemendag Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 terdapat empat pilar sebagai berikut:



Gambar 3-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

3.2. Tujuh Agenda Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020 – 2024

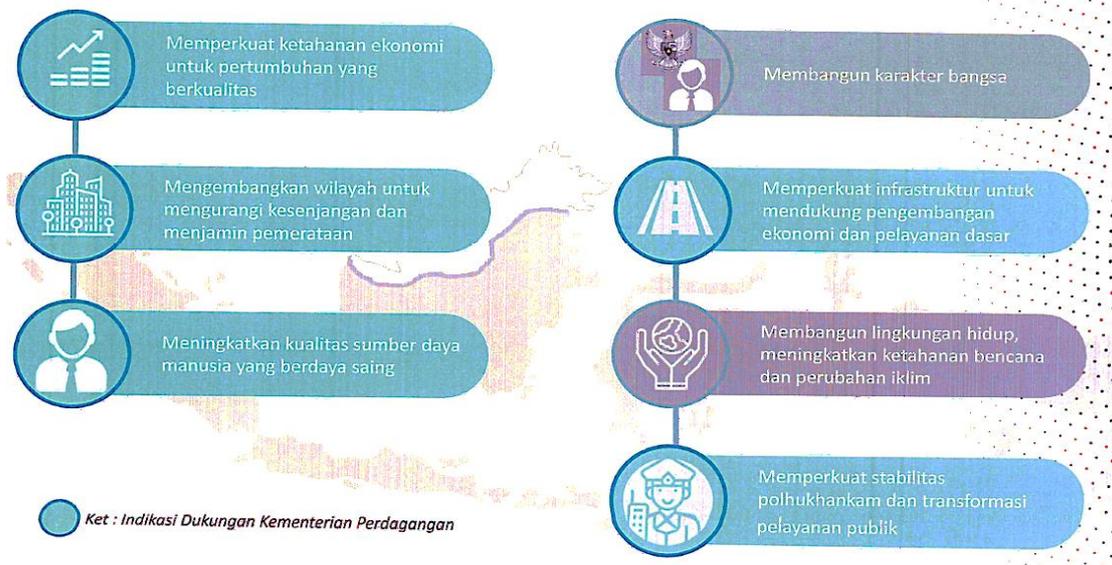
Berikut adalah Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024



Gambar 3-2 Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024

3.2.1. Tugas Pokok Kemendag terhadap Pencapaian Visi Misi Presiden

Berdasarkan 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 ada 5 aspek yang mengindikasikan perlunya dukungan Kemendag sebagai berikut:



Gambar 3-3 Tugas Pokok Kemendag terhadap Pencapaian Visi Misi Presiden

3.2.2. Visi, Misi, dan Tujuan Rencana Induk SPBE Kemendag

Berdasarkan pada rencana strategis Kementerian Perdagangan yang telah dijelaskan sebelumnya dan disesuaikan dengan pelaksanaan SPBE sesuai dengan Perpres No. 95 Tahun 2018, sehingga perlu merumuskan visi, misi, dan tujuan dari perumusan rencana induk SPBE ini.

3.2.2.1 Visi SPBE Kemendag

Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai tata kelola pemerintahan dan layanan Kementerian Perdagangan yang berkualitas dalam memperkuat ketahanan ekonomi.

3.2.2.2 Misi SPBE Kemendag

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas dalam mendukung peningkatan ekspor dan stabilisasi ekonomi; dan
3. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal.

3.2.2.3 Tujuan SPBE Kemendag

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu; dan
4. Mewujudkan SDM berbasis TIK yang kompeten dan inovatif.

3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategis Rencana Induk SPBE Kemendag:

Tata Kelola

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan RISPBE Kemendag untuk membangun RISPBE yang terpadu di dalam Kemendag dan antar instansi pemerintah.
2. Untuk mewujudkan RISPBE yang terpadu, Kemendag perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan RISPBE.
3. Keterpaduan RISPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya RISPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan RISPBE Kemendag.
4. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas yang dimaksud adalah:
 - a. Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi RISPBE Kemendag;
 - b. Membangun arsitektur RISPBE Kemendag yang terdiri atas arsitektur bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, layanan dan keamanan;
 - c. Melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam Kemendag serta dengan instansi pemerintah lainnya.
5. Penguatan kebijakan RISPBE Kemendag secara menyeluruh dan terpadu.
6. Kebijakan RISPBE Kemendag yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan RISPBE Kemendag yang perlu terharmonisasi dengan kebijakan di tingkat nasional.
7. Dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan RISPBE Kemendag perlu berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE nasional untuk menciptakan kebijakan yang terpadu.
8. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan RISPBE yang menyeluruh dan terpadu:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan masyarakat pada umumnya di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan RISPBE Kemendag;
 - b. Melakukan harmonisasi kebijakan dengan tim koordinasi SPBE Nasional serta pimpinan instansi pemerintah lainnya; dan
 - c. Melakukan evaluasi penerapan kebijakan RISPBE Kemendag.

3.2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Induk SPBE Kemendag:

Layanan

1. Pengembangan layanan RISPBE Kemendag berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna dan masyarakat tersebut dilakukan untuk melayani pengguna

dari sesama instansi pemerintah ataupun lainnya, serta melayani masyarakat dan melibatkannya dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk seluruh pemangku kepentingan.

- b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna dan membuka ruang partisipasi masyarakat tersebut adalah:
 - 1) Memastikan kebutuhan pengguna terhadap layanan SPBE dapat terpenuhi;
 - 2) Bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dalam membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE Kemendag yang berkesinambungan.
 - a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE tersebut adalah:
 - 1) Melakukan integrasi layanan di dalam Kemendag juga dengan instansi pemerintah lainnya;
 - 2) Menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan sasaran.

3.2.5. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Induk SPBE Kemendag: Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kemendag secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau pengguna, masyarakat dan sesama instansi pemerintah lainnya.
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup dukungan Kemendag dalam merealisasikan Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
 - b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kemendag dilakukan dengan cara:
 - 1) Mandiri, dengan meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non pemerintah;
 - 2) Terintegrasi, dengan mengoptimalkan keterhubungan dan pemanfaatan bersama Infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah;
 - 3) Terstandarisasi, dengan lebih menyeragamkan aspek teknis dan pengoperasian Infrastruktur SPBE; dan
 - 4) Menjangkau semua instansi pemerintah.
 - c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kemendag mendukung kebijakan pembangunan Pusat Data nasional.

- d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi lainnya adalah:
 - 1) Memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - 2) Memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagai pakai.
 - a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagai pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagai pakai dilakukan dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai seperti teknologi komputasi awan yang difasilitasi oleh Arsitektur SPBE Nasional.
3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas.
 - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengambil keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - c. Strategi untuk mencapai data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - 1) Menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - 2) Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - 3) Menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

3.2.6. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendag: Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan kepemimpinan Strategi Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendag.
 - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan implementasi Strategi Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendag melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinan. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu

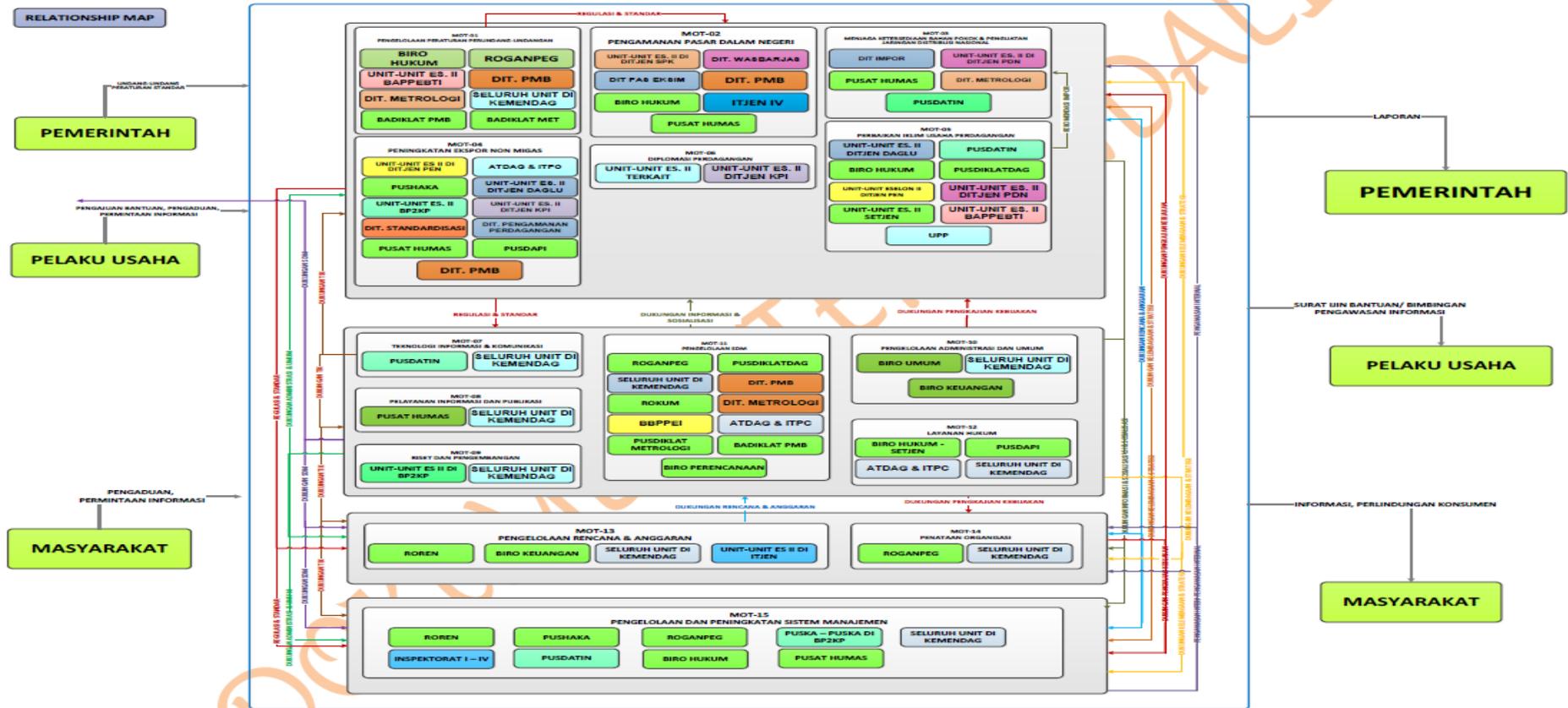
mendorong terciptanya lingkungan dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.

- b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan terkait RISPBE Kemendag adalah:
 - 1) Meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik Strategi Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bagi pimpinan di Kemendag; dan
 - 2) Membangun budaya kerja berbasis SPBE (Strategi Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) bagi seluruh pegawai ASN.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SBPE Kemendag.
 - a. Peningkatan kapasitas SDM Strategi Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis, mengembangkan kompetensi teknis, dan mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan berdasarkan Strategi Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendag dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 - 1) Mengembangkan jabatan fungsional ASN yang terkait dengan SPBE; dan
 - 2) Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan Strategi Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendag.

4. Arsitektur Bisnis

4.1. Arsitektur Bisnis Saat Ini

4.1.1. Model Proses Bisnis Saat Ini



Gambar 4-1 Model Proses Bisnis Saat Ini

4.1.2. Daftar Proses Bisnis Saat Ini

Dari gambaran **model proses bisnis** di atas terdapat detail **pemetaan proses bisnis saat ini** yang terdiri dari:

- a. Proses Bisnis - Level 0
- b. Proses Bisnis - Level 1
- c. Proses Bisnis - Level 2
- d. *Key Business Requirements*

Terkait detail dari konten tabel **daftar proses bisnis saat ini** dapat di lihat pada lampiran **1**

4.1.3. Matriks Organisasi VS Fungsi

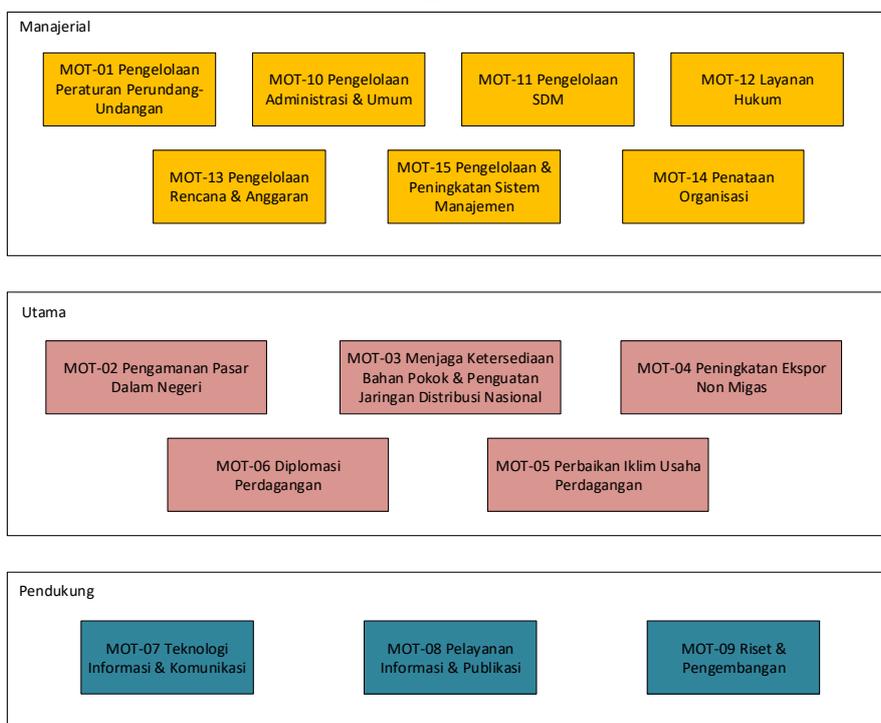
Dari gambaran proses bisnis di atas terdapat detail pemetaan proses bisnis saat ini yang terdiri dari:

- a. Proses Bisnis - Level 0
- b. Proses Bisnis - Level 1
- c. Proses Bisnis - Level 2
- d. *Key Business Requirements*

Terkait detail dari konten tabel **daftar proses bisnis saat ini** dapat di lihat pada lampiran **2**

4.2. Arsitektur Bisnis Target

4.2.1. Model Bisnis Kemendag



Gambar 4-2 Peta Proses Bisnis Kemendag

Peta proses bisnis Kemendag dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Proses Utama

Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah;

2. Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
3. Memerikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan.

b. Proses Manajerial

Proses manajerial adalah proses untuk mengelola operasional dan memastikan proses utama dapat berjalan dengan baik. Proses manajerial memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
2. Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.

c. Proses Pendukung

Proses pendukung adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses utama namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses pendukung memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses dapat berjalan lebih optimal.

4.2.2. Target Perbaikan Pada Proses Bisnis

Berdasarkan hasil pertemuan dan pengisian *form assesment* dengan satuan kerja di kemendag maka, telah dilakukan kompilasi terhadap potensi perbaikan pada proses bisnis yang dituangkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari:

- a. Proses Bisnis - Level 0
- b. Proses Bisnis - Level 1
- c. Proses Bisnis - Level 2
- d. Potensi perbaikan proses bisnis

Terkait detail dari konten tabel **target perbaikan proses bisnis** ini dapat di lihat pada lampiran 3

4.2.3. Analisis Kesenjangan Arsitektur Bisnis

Tabel 4-1 Analisis Kesenjangan Arsitektur Bisnis

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Aristektur Bisnis	Belum terpetakan ke dalam 3 <i>stream</i> yaitu: Utama, Manjerial, dan Pendukung	Perlu mengikuti pemodelan proses bisnis yang disarankan di Perpres 95 Tahun 2018 dan Permenpan 19 tahun 2018	<i>None</i>	Melaksanakan pemodelan proses bisnis yang disarankan di Perpres 95 Tahun 2018 dan Permenpan 19 tahun 2018 Pendekatan Berdasarkan FUNGSI BISNIS
2	Sumber Daya Manusia	Hampir di Seluruh Unit Kerja mengeluhkan kurangnya kuantitas dan kapabilitas SDM	Perlu untuk dilakukan rekrutasi/pengadaan sumber SDM	<i>Partially</i>	Melaksanakan rekrutasi untuk memenuhi aspek SDM dan melaksanakan <i>transfer knowledge</i> untuk menambah dan memperbaharui kapabilitas pegawai

5. Arsitektur Data

5.1. Arsitektur Data Saat Ini

5.1.1. Pemetaan Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari satuan kerja, terkait komponen data saat ini dikemendag telah dituangkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari:

- a. Unit Eselon
- b. Jenis Data
- c. Deskripsi
- d. Sumber Data
- e. Elemen Data

Terkait detail dari konten tabel **target perbaikan proses bisnis** ini dapat di lihat pada lampiran **4**

5.2. Arsitektur Data Target

5.2.1. Pemetaan Input dan Output Data

Terkait arsitektur data target, telah dilakukan kompilasi pemetaan yang memetakan langsung antara proses bisnis dan jenis data, yang telah dituangkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari:

- a. Proses Bisnis - Level 0
- b. Proses Bisnis - Level 1
- c. Proses Bisnis - Level 2
- d. Jenis data (Input/Output)

Terkait detail dari konten tabel **pemetaan input dan output data**, dapat di lihat pada lampiran **5**

5.3. Analisis Kesenjangan Arsitektur Data

Tabel 5-1 Analisis Kesenjangan Arsitektur Data

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Penetapan kebijakan satu data Kemendag	Terkait kebijakan Data dan Informasi Kemendag yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/Per/7/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan pasal 12 dan 13, belum mengacu secara keseluruhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia	Terkait arsitektur data PDSI selaku walidata pada tingkat pusat yang ditetapkan oleh Kemendag perlu untuk memastikan bahwa kebijakan terkait data telah mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia	<i>Partially</i>	PDSI selaku walidata pada tingkat pusat yang ditetapkan oleh Kemendag perlu untuk mengidentifikasi dan menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pengelolaan data kemendag - Forum data - Produsen data - Metadata
2.	Arsitektur Data	Belum terdapat kompilasi Pemetaan data berdasarkan fungsi proses bisnis, yang menggambarkan <i>input</i> dan <i>output</i> dari setiap proses bisnis yang ada	Mebutuhkan kompilasi pemetaan data berdasarkan fungsi proses bisnis yang menggambarkan <i>input</i> dan <i>output</i> dari setiap proses bisnis yang ada.	<i>None</i>	Melakukan kompilasi pemetaan berdasarkan fungsi proses bisnis yang menggambarkan input dan output dari setiap proses bisnis yang ada.

6. Arsitektur Layanan

6.1. Arsitektur Layanan Saat Ini

6.1.1. Pemetaan Fungsi Terhadap Layanan dan Proses Bisnis

Terkait arsitektur layanan saat ini telah dilakukan kompilasi yang memetakan langsung antara **fungsi** terhadap **layanan** dan **dukungan proses** bisnis yang telah dituangkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari:

- a. Fungsi
- b. Sub Fungsi
- c. Unit Bisnis
- d. Dukungan Layanan
- e. Jenis Layanan
- f. Dukungan Probis

Terkait detail dari konten tabel pemetaan fungsi terhadap layanan dan proses bisnis dapat dilihat pada lampiran 6

6.1.2. Pemetaan Fungsi Bisnis Terhadap Aplikasi dan Jenis Layanan

Terkait arsitektur layanan saat ini telah dilakukan kompilasi yang memetakan langsung **fungsi bisnis terhadap aplikasi dan jenis layanan** yang telah dituangkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari:

- a. Fungsi
- b. Sub Fungsi
- c. Nama Sistem Informasi
- d. Layanan
- e. Jenis Layanan

Terkait detail dari konten tabel pemetaan fungsi bisnis terhadap aplikasi dan jenis layanan dapat dilihat pada lampiran 7

6.3. Analisis Kesenjangan Arsitektur Layanan

Tabel 6-1 Analisis Kesenjangan Arsitektur Layanan

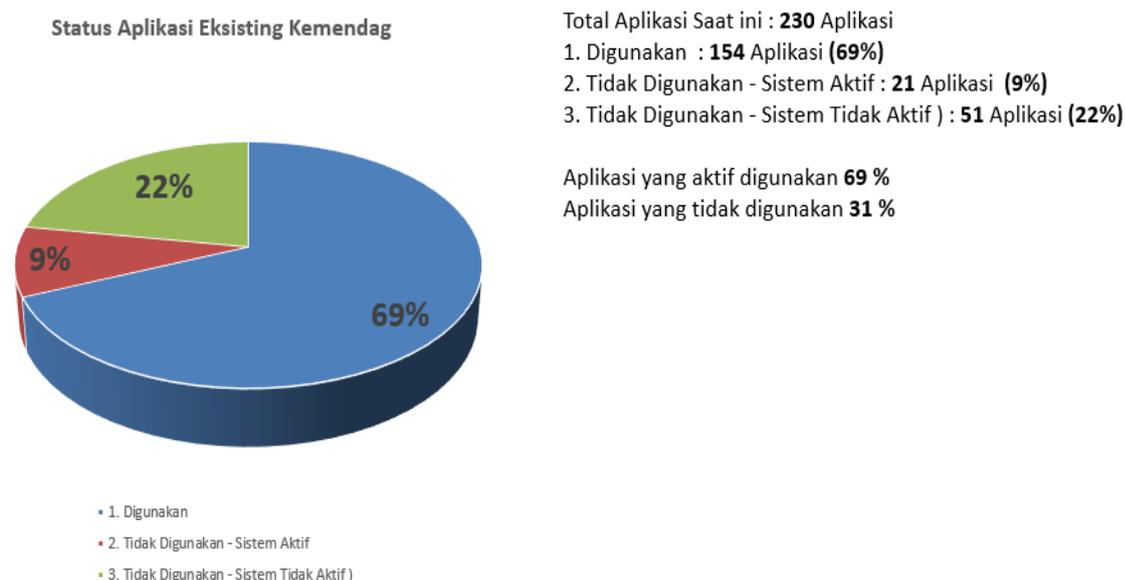
No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Layanan Administrasi Pemerintah	Pemerintah sedang melakukan penyusunan layanan administrasi pemerintahan sesuai dengan amanat Perpres No 95 Tahun 2018	Layanan administrasi pemerintahan perlu digunakan oleh Kemendag	<i>None</i>	Pengembangan portal pelayanan administrasi pemerintah untuk mendukung percepatan SPBE
2.		Belum terdapat aplikasi yang komprehensif yang dapat mendukung pimpinan dalam melakukan analisa dan pengambilan keputusan (Sistem Informasi Eksekutif)	Perlu mengembangkan dan mengimplementasikan Aplikasi yang dapat membantu proses <i>decision making</i>	<i>None</i>	Mengembangkan dan mengimplementasikan Aplikasi yang dapat membantu proses <i>decision making</i>
3.		Terdapat aplikasi umum yang dikembangkan internal oleh Kemendag diantaranya : SIMPEG, Pengelolaan Naskah Dinas (e-office), pengelolaan dokumen, Perencanaan, JDIH Namun, Aplikasi Umum yang dikembangkan internal belum terintegrasi dan terjadi	Perlu dilakukan pengintegrasian terpusat terkait aplikasi tersebut	<i>None</i>	Pengintegrasian aplikasi secara terpusat sehingga tidak terjadi duplikasi

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		duplikasi antara aplikasi yang bersifat terpusat dan di unit kerja, misalnya Aplikasi Umum terkait Kepegawaian, Pengelolaan Naskah Dinas, Pengelolaan Manajemen Dokumen, Perencanaan, Perpustakaan dan lainnya			
4.	Layanan Administrasi Publik	Untuk mendukung Layanan Publik sudah tersedia beberapa layanan yang terintegrasi dengan <i>website</i> Kemendag dan OSS sebagai portal layanan publik Kemendag. Namun demikian belum seluruh layanan publik di Kemendag yang sudah diakomodasi/terintegrasi dalam satu portal layanan publik Kemendag	Perlu bagi seluruh layanan publik di Kemendag untuk diakomodasi/terintegrasi dalam satu portal layanan publik Kemendag	<i>Partially</i>	Mengakomodasi dan mengintegrasikan seluruh layanan publik dalam satu portal layanan publik Kemendag

7. Arsitektur Aplikasi

7.1. Arsitektur Aplikasi Saat Ini

7.1.1. Arsitektur Aplikasi Kemendag Saat Ini



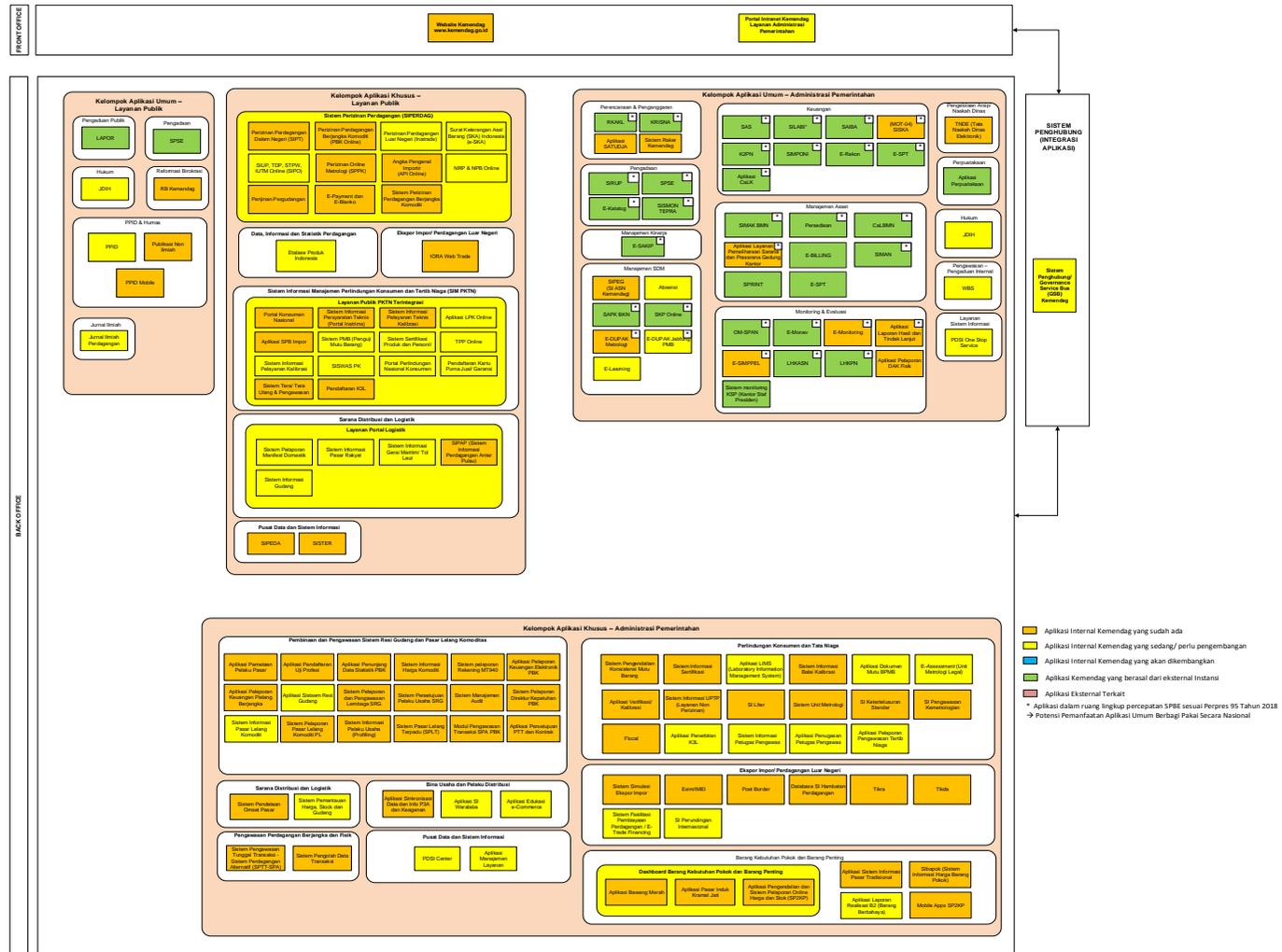
Gambar 7-1 Total Aplikasi Saat Ini

1. Saat ini untuk keseluruhan fungsi umum dan khusus di Kemendag sudah menggunakan aplikasi/sistem elektronik Untuk fungsi umum meliputi :
 - a. Perencanaan
 - b. Penganggaran
 - c. Pengadaan barang dan jasa pemerintah
 - d. Akuntabilitas kinerja
 - e. Pemantauan dan evaluasi
 - f. Kearsipan; Kepegawaian
 - g. dan Pengaduan pelayanan publik umumnya menggunakan aplikasi umum yang disediakan oleh Instansi Pusat terkait
2. Terdapat aplikasi umum yang dikembangkan internal oleh Kemendag diantaranya:
 - a. SIPEG
 - b. Pengelolaan Naskah Dinas (e-office)
 - c. Pengelolaan dokumen
 - d. Perencanaan
 - e. JDIH
3. Aplikasi Umum yang dikembangkan internal belum terintegrasi dan terjadi duplikasi antara aplikasi yang bersifat terpusat dan di unit kerja, misalnya:
 - a. Aplikasi Umum terkait Kepegawaian
 - b. Pengelolaan Naskah Dinas
 - c. Perpustakaan dan lainnya

4. Terdapat 25 Aplikasi terkait Kepegawaian berupa modul-modul aplikasi yang berdiri sendiri di pusat dan aplikasi kepegawaian di masing-masing unit kerja.
5. Terdapat 6 Aplikasi terkait Perpustakaan yang berbeda-beda tersebar di unit kerja yang berbeda. Aplikasi tersebut yaitu Aplikasi Perpustakaan Kemendag, Software Aplikasi Perpustakaan (Biro Humas), Sistem Perpustakaan (PPSDK), Aplikasi Perpustakaan (Pusdiklat), Aplikasi Perpustakaan Balai Besar PPEI (Balai Besar PPEI) dan Database Pengelolaan Perpustakaan Standar (Ditstandalitu).
6. Terdapat 4 Aplikasi terkait Manajemen Dokumen yang berbeda-beda tersebar di unit kerja yang berbeda. Aplikasi tersebut yaitu Aplikasi Administrasi Berkas Digital (Ropeg), SI Manajemen Dokumen (e-Doc), File Sharing Pimpinan (Romum), Sistem Manajemen Dokumen (Sardislog).
7. Untuk mendukung Layanan Publik sudah tersedia beberapa layanan yang terintegrasi dengan website Kemendag dan OSS sebagai portal layanan publik Kemendag. Namun demikian belum seluruh layanan publik di Kemendag yang sudah diakomodasi/ terintegrasi dalam satu portal layanan publik Kemendag
8. Untuk mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan (Internal) saat ini sudah mulai dikembangkan Intranet Portal dan e-Office Kemendag. Namun demikian pemanfaatan Intranet Portal tersebut belum optimal dan belum digunakan oleh seluruh unit kerja. Belum berperan sebagai portal layanan administrasi pemerintahan terintegrasi di lingkungan Kemendag.
9. Untuk Integrasi aplikasi yang terkait OSS sudah menggunakan integrasi berbasis OSS, sedangkan untuk kepentingan integrasi aplikasi internal menggunakan sistem penghubung/ GSB (Government Service Bus)/ API Gateway yang diimplementasikan internal. Namun demikian belum seluruh aplikasi internal terintegrasi
10. Belum terdapat sistem yang dapat mengelola data untuk kepentingan analitik seperti Data Warehouse dan tools analitiknya (Business Intelligence)
11. Belum terdapat aplikasi yang komprehensif yang dapat mendukung pimpinan dalam melakukan analisa dan pengambilan keputusan (Sistem Informasi Eksekutif)
12. Belum terdapat sistem informasi yang dapat mendukung layanan satu data perdagangan yang terintegrasi baik internal maupun dengan satu data nasional (www.data.go.id)
13. Terkait arsitektur Aplikasi Kemendag saat ini telah dilakukan kompilasi yang telah dituangkan dalam bentuk tabel yang terdiri atas:

- a. Direktorat
- b. Unit Kerja
- c. Nama Sistem Elektronik
- d. Klasifikasi
- e. Status
- f. Proses Bisnis Terkait

Terkait detail dari konten tabel **pemetaan arsitektur aplikasi kemendag saat ini** dapat dilihat pada lampiran **8**.



Gambar 7-2 Arsitektur Aplikasi Kemendag Saat Ini

7.2. Arsitektur Aplikasi Target

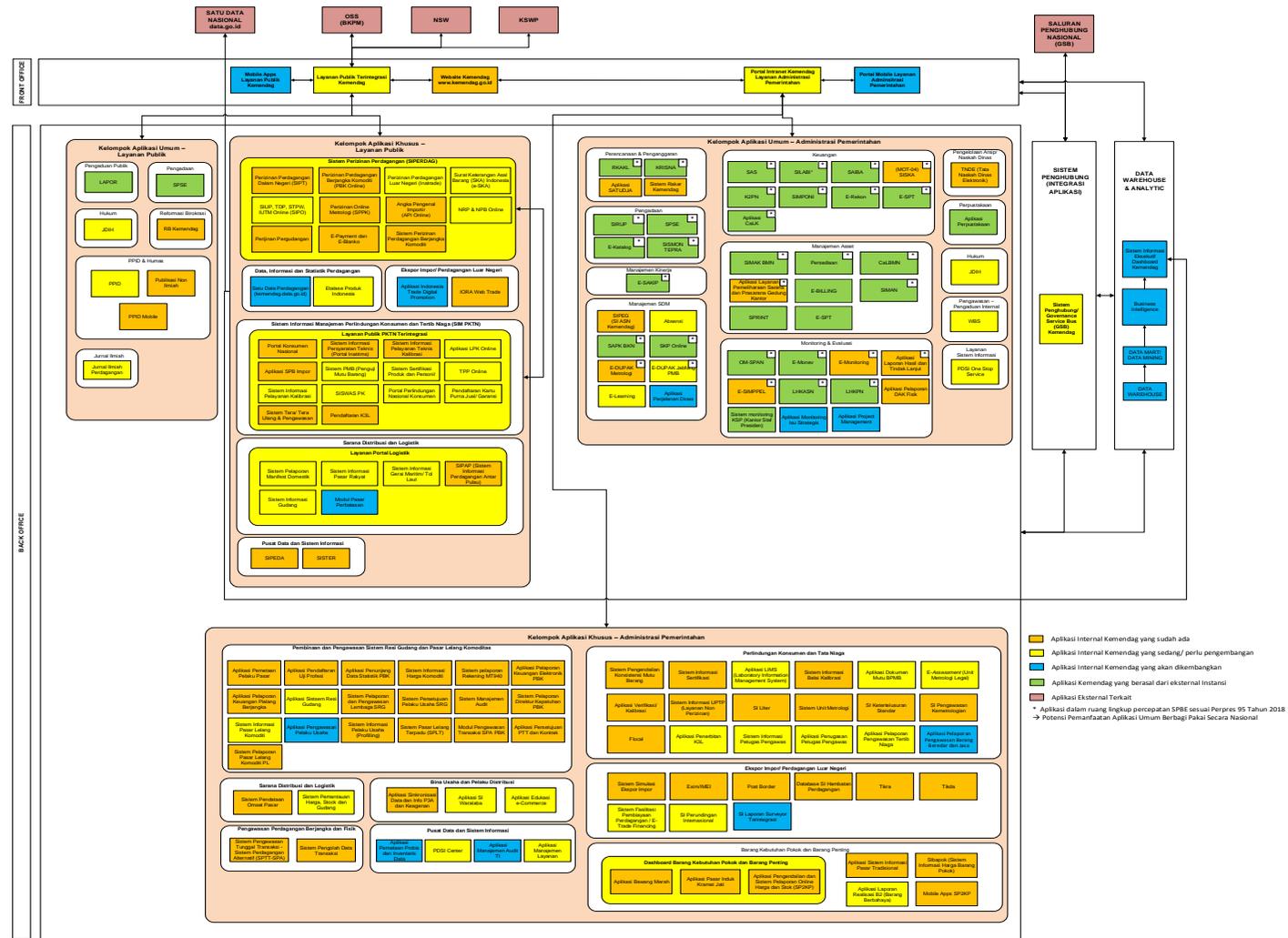
Terkait target aplikasi secara garis besar terbagi 2 yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus, serta dilengkapi dengan Sistem Penghubung (integrasi aplikasi) dan Data *Warehouse*/analitik, pada setiap kategori tersebut terdapat klasifikasi sebagaimana berikut:

Aplikasi Umum terbagi ke dalam 2 kategori yaitu:

1. Kelompok aplikasi umum – **Layanan Publik**
Terdiri atas beberapa klasifikasi aplikasi berikut:
 - a. Pengaduan Publik
 - b. Pengadaan
 - c. Hukum
 - d. Reformasi Birokrasi
 - e. PPID & Humas
 - f. Jurnal Ilmiah
2. Kelompok aplikasi umum – **Admintrasi Pemerintahan**
 - a. Perencanaan dan Penganggaran
 - b. Pengadaan
 - c. Manajemen Kinerja
 - d. Manajemen SDM
 - e. Keuangan
 - f. Manajemen Aset
 - g. *Monitoring*& Evaluasi
 - h. Pengelolaan Arsip/Naskah Dinas
 - i. Perpustakaan
 - j. Hukum
 - k. Pengawasan-Pengaduan Internal
 - l. Layanan SI

Aplikasi Khusus terbagi ke dalam 2 kategori yaitu:

1. Kelompok aplikasi khusus – **Layanan Publik**
Terdiri atas beberapa klasifikasi aplikasi berikut:
 - a. Perizinan Perdagangan
 - b. Data, Informasi dan Statistik Perdagangan
 - c. Ekspor Impor/Perdagangan Luar Negeri
 - d. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)
 - e. Sarana Distribusi dan Logistik
 - f. Pusat Data dan Sistem Informasi
2. Kelompok aplikasi khusus – **Adminitrasi Pemerintahan**
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang
 - b. Sarana Distribusi Logistik
 - c. Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
 - d. Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Fisik
 - e. Pusat Data dan Sistem Informasi
 - f. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)
 - g. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting



Gambar 7-3 Arsitektur Aplikasi Target

7.2.1. Target Arsitektur Aplikasi Umum



dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dengan. Adapun kategori proses Bisnis Aplikasi Umum sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Penganggaran;
- c. Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- d. Akuntabilitas kinerja;
- e. Pemantauan dan evaluasi;
- f. Kearsipan;
- g. Kepegawaian; dan
- h. Pengaduan pelayanan publik

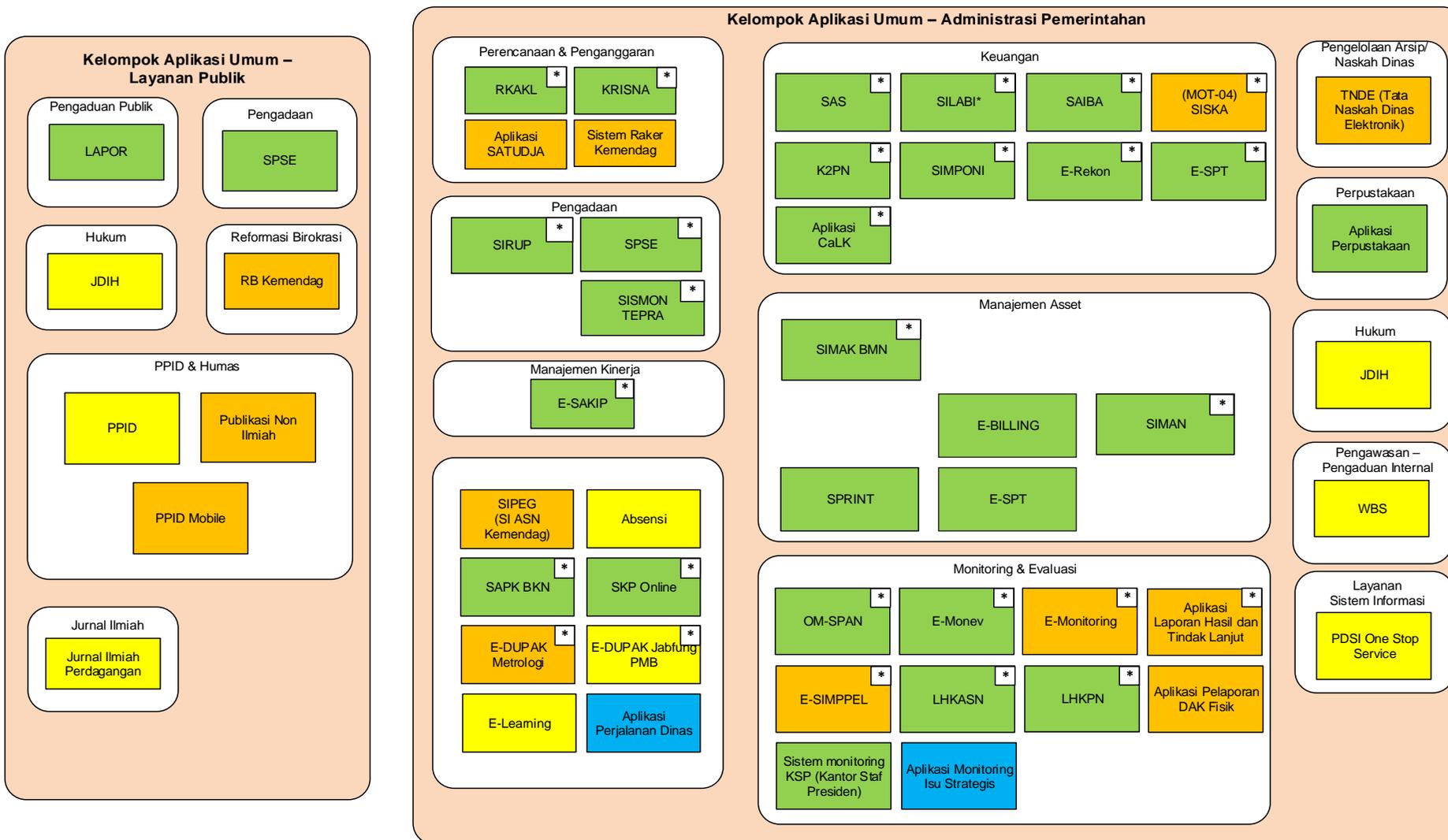
Percepatan Nasional Aplikasi Umum (2018 -2021):

- a. Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi
- b. Integrasi Kepegawaian
- c. Integrasi Kearsipan
- d. Integrasi Pengaduan Publik
- e. Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Terkait arsitektur Aplikasi Kemendag saat ini telah dilakukan kompilasi yang telah dituangkan dalam bentuk tabel yang terdiri atas:

- a. Tipe layanan
- b. Kelompok aplikasi
- c. Nama aplikasi
- d. Tipe aplikasi
- e. User
- f. Deskripsi

Terkait detail dari konten tabel target arsitektur aplikasi umum dapat dilihat pada lampiran **9**

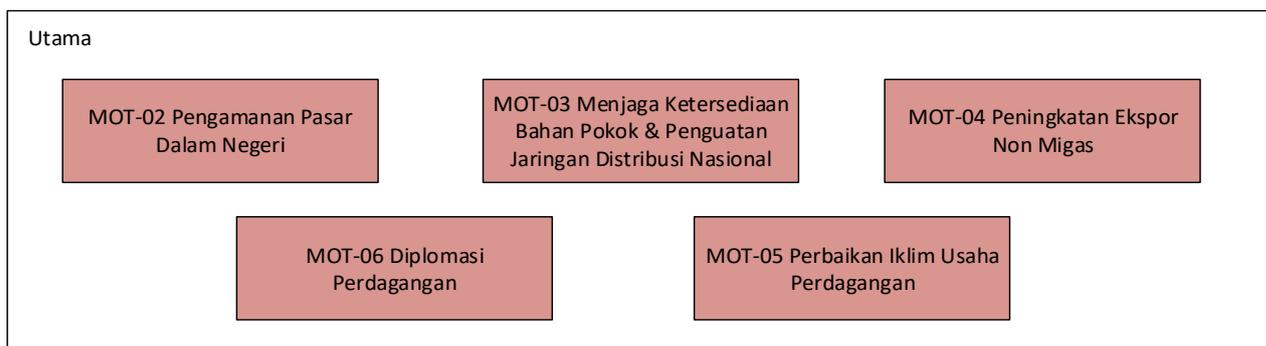


Gambar 7-5 Target Arsitektur Aplikasi Umum

7.2.2. Target Arsitektur Aplikasi Khusus

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

Aplikasi Khusus Kemendag mendukung Proses Bisnis Utama (*Core Process*) Kemendag sebagai berikut:



Gambar 7-6 Fungsi Bisnis Utama Kemendag

Terkait arsitektur Aplikasi Kemendag saat ini telah dilakukan kompilasi yang telah dituangkan dalam bentuk tabel yang terdiri atas:

- a. Tipe layanan
- b. Kelompok aplikasi
- c. Nama aplikasi
- d. Tipe aplikasi
- e. User
- f. Deskripsi

Terkait detail dari konten tabel target arsitektur aplikasi khusus dapat dilihat pada lampiran **10**.

7.2.3. Pemetaan Arsitektur Aplikasi

Seluruh aplikasi umum dan khusus di lingkungan Kementerian Perdagangan selanjutnya dilakukan pemetaan jenis aplikasi yang terdapat di lingkungan Kementerian Perdagangan tersebut sesuai dengan fungsi dan pemetaannya pada proses bisnis. Pemetaan ini menggunakan kuadran McFarlan Grid yang terbagi menjadi 4 (empat) kuadran, yaitu *high potential*, *strategic*, *key operational*, dan *support* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Suatu aplikasi dikatakan *strategic* apabila dapat:
 - a. menciptakan keunggulan kompetitif bagi bisnis;
 - b. memungkinkan pencapaian tujuan bisnis yang spesifik.
2. Suatu aplikasi dikatakan *key operational* apabila dapat:
 - a. mengatasi kerugian bisnis yang diketahui;
 - b. menghindari risiko bisnis yang dapat menyebabkan masalah besar di waktu dekat;
3. Suatu aplikasi dikatakan *support* apabila dapat/akan meningkatkan produktivitas bisnis dan mengurangi biaya yang

dikeluarkan dalam jangka waktu panjang, serta mematuhi peraturan yang berlaku yang tidak mengatur/memengaruhi operasional.

4. Suatu aplikasi dikatakan *high potential* apabila memiliki dampak yang mungkin belum pasti tetapi bisa bersifat strategis.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, kemudian dilakukan pemetaan pada aplikasi yang ada saat ini terutama pada kategori Aplikasi Khusus yang diharapkan dapat memenuhi tujuan perencanaan strategis Kementerian Perdagangan.

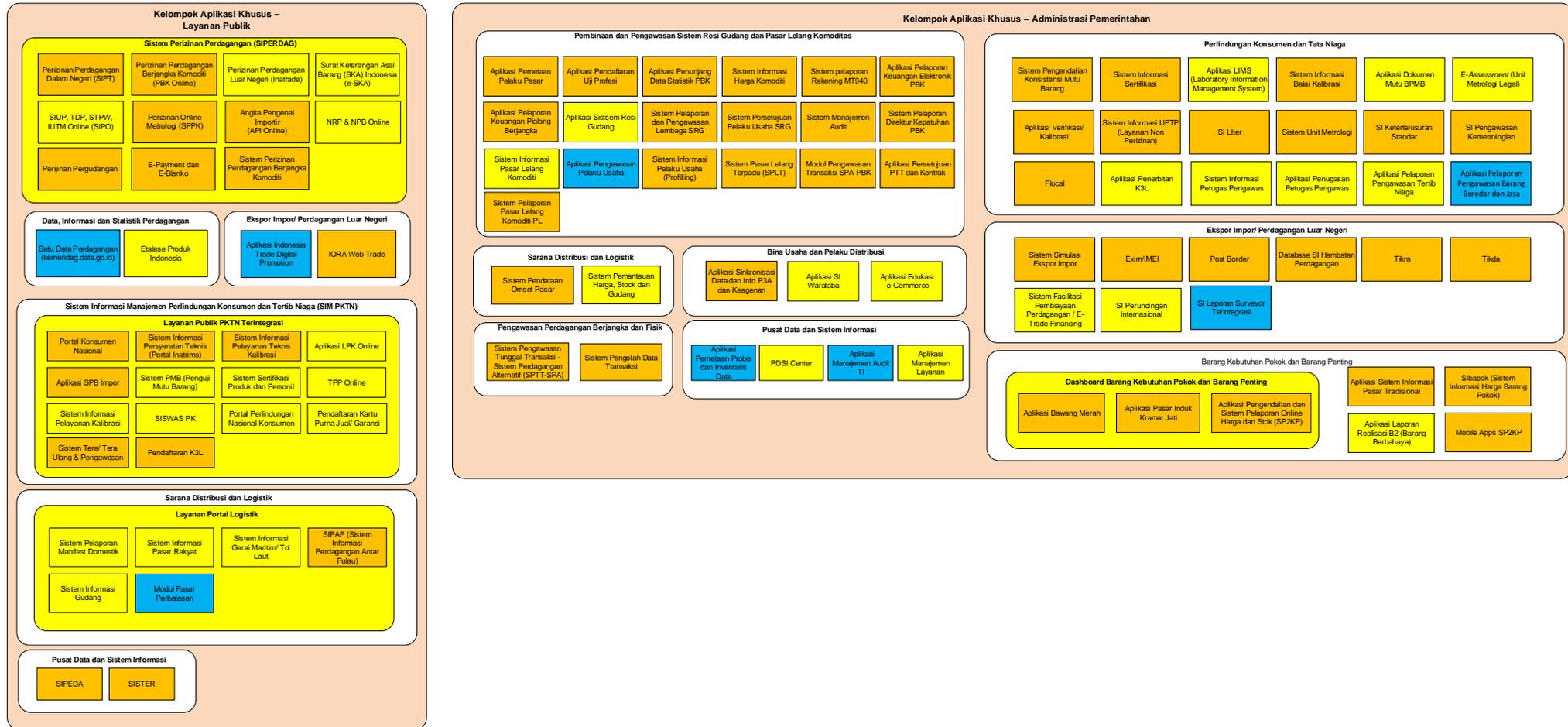
Adapun kategori dari aplikasi umum sebagian besar termasuk ke dalam kuadran key operational dan kuadran support tergantung dari fungsi dan dukungan terhadap proses bisnis saat ini. Sedangkan untuk kategori aplikasi khusus tersebar pada kuadran key operational, strategic, dan high potensial. Hasil pemetaan dapat dilihat dari portofolio sistem informasi saat ini pada Tabel Pemetaan Arsitektur Aplikasi berikut.

Fungsi dari pemetaan Arsitektur aplikasi ini agar mendapatkan prioritas atau pertimbangan dalam hal pengembangan dan pemeliharaan aplikasi oleh Tim Koordinasi SPBE yang dituangkan dalam peta rencana dan anggaran Kementerian Perdagangan. Selain itu, pemetaan ini memiliki tujuan untuk mengelompokkan aplikasi yang masih dapat dikembangkan oleh unit kerja pemilik proses bisnis dan aplikasi yang memiliki fungsi khusus menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis rencana strategis Kementerian Perdagangan dan dinilai sebagai layanan utama dari Kementerian Perdagangan yang selanjutnya akan dikelola oleh unit TIK pusat.

Tabel 7-1 Pemetaan Arsitektur Aplikasi Umum dan Khusus Berdasarkan McFarlan Grid

<i>Strategic</i>	<i>High Potential</i>
<ul style="list-style-type: none">• INATRADE• SIPT• SIMPKTN• SP2KP• SI Pasar Lelang Komoditi• SI Pasar Berjangka Komoditi• Pasar Lelang Online• Sistem Resi Gudang• Sistem Metrologi• e-SKA• SI Pasar Rakyat• e-Simppel• SIPO	<ul style="list-style-type: none">• SI Portal Logistik• Portal Exim• Portal Inaexport

<i>Strategic</i>	<i>High Potential</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Manifest Domestik</i> 	
<i>Key Operational</i>	<i>Support</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Tata Naskah Dinas Elektronik • PDSI One Stop Service • SIPEG/SIASN • SIMAK BMN/SIMAN • PPID • Etalase Produk Indonesia (Bangga Buatan Indonesia & Portal Indonesia) • SI Gerai Maritim • Sipintar (Pengawasan internal) • SI Pelaporan Gudang • Sistem Penghubung Layanan (Gateway) • SI Perdagangan Antar Pulau (SIPAP) • e-Payment dan e-Blanko SKA • SPPK • Inatrimis • Portal Statistik Perdagangan (TIKDA, TIKRA, SIPEDA, SI Laporan Surveyor, dan SISTER) • SI Perundingan Internasional • Sistem Simulasi Ekspor-Impor 	<ul style="list-style-type: none"> • KRISNA • Keuangan (SPAN, SAKTI, SIMPONI, SAS, & RKA K/L) • Pengaduan (LAPOR dan WBS) • Portal Statistik • JDIH • SPSE • Kudagang (e-Learning) • e-Arsip • Aplikasi Perpustakaan • SAKIP • e-Monev • e-Catalog LKPP • SIRUP LKPP • Library Management System • Website Kementerian Perdagangan • Portal Website Eselon 1 • Portal FTA Center • Portal Perwakilan Perdagangan • Jurnal Ilmiah Perdagangan • E-Trade Financing



Gambar 7-7 Target Arsitektur Aplikasi Khusus

7.3. Analisis Kesenjangan Arsitektur Aplikasi

Tabel 7-2 Analisis Kesenjangan Arsitektur Aplikasi

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan	MOT-01.05.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Kepala Bappebti: Perkembangan industri yang diatur oleh Bappebti cukup dinamis, contohnya pengaturan baru mengenai aset kripto dan emas <i>digital</i> yang menuntut kecepatan penyesuaian <i>system</i> khususnya dari sisi perizinan dan pengawasan	Belum terdapat sistem yang memfasilitasi proses perizinan dan pengawasan secara memadai	<i>Partially</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan Aplikasi untuk memfasilitasi pemrosesan perizinan yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) dengan fungsional sebagai berikut: Single Sign On, dapat mengakomodir Pedoman Integrasi Aplikasi (PIA) terbaru yang dikeluarkan oleh instansi yang mengelola OSS; - Aplikasi untuk memfasilitasi pengawasan perdagangan fisik aset kripto dan emas <i>digital</i> dengan fungsional: terhubung/terintegrasi dengan <i>stakeholder</i>, memiliki fitur-fitur yang dapat mengakomodir pelaporan yang dibutuhkan oleh Bappebti, memiliki sistem keamanan (<i>security</i>) yang baik dan <i>web based</i>;
2	Pengamanan Pasar Dalam Negeri	MOT-02.04.CFM.02.SOP.01 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Konsumen:	Belum memadainya kuantitas dan kapabilitas SDM yang	<i>Partially</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan proses <i>transfer knowledge</i> terkait pemanfaatan terhadap feature dan konten aplikasi TIK

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK sehingga juga berdampak pada pemanfaatan terhadap feature dan konten aplikasi TIK belum optimal - Keterbatasan perangkat keras - Keterbatasan akses internet di daerah - Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWAS PK) rekap, saat ini belum dapat merekap data pengaduan secara otomatis berdasarkan parameter dan klasifikasi barang dan jasa, merekap data per-provinsi, membuat statistic pengaduan secara otomatis, pengingat pengaduan yang sudah direspon dan komunikasi secara langsung/dua arah, fitur melihat tingkat kepuasan konsumen. 	<p>memahami pemanfaatan teknologi di lingkungan kerja belum terpenuhinya kapabilitas sistem dalam rangka mendukung keberjalanan proses bisnis</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengadaan perangkat keras - Melakukan peningkatan layanan terkait akses internet di daerah - Melakukan pengembangan feature terkait aplikasi Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWAS PK)

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		<p>MOT-02.05.CFM.01.SOP.01</p> <p>Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini dibutuhkan aplikasi Pelaporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa - Tidak tersedianya database produk barang dan jasa yang terukur (misal berdasarkan kategori standar produk) 	<p>Belum terdapat aplikasi Pelaporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa</p>	<p><i>None</i></p>	<p>Mengembangkan aplikasi Pelaporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa</p> <p>Mengadakan dan menyediakan <i>database</i></p>
		<p>MOT-02.06.CFM.01.SOP.01</p> <p>Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik Untuk UTP:</p> <p>Terkait sistem informasi perizinan - SPPK (memerlukan perbaikan fitur yang telah ada seperti: <i>digital signature</i>, rekapitulasi)</p>	<p>Sistem informasi yang ada membutuhkan perbaikan pada beberapa fitur untuk mengoptimalkan fungsinya dalam mendukung proses bisnis terkait</p>	<p><i>Partially</i></p>	<p>Diperlukan <i>improvement</i> sistem informasi perizinan - SPPK (perbaikan fitur yang telah ada seperti: <i>digital signature</i>, rekapitulasi)</p>
		<p>MOT-02.06.CFM.02.SOP.01</p> <p>Pengujian UTP, Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi:</p> <p>Diperlukan <i>improvement</i> terkait sistem informasi UTP IV (perbaikan fitur yang telah ada seperti: <i>digital signature</i>, integrasi dengan Simponi, e-lab terkait</p>	<p>Belum optimalnya kapabilitas sistem terkait sistem informasi UTP IV, sehingga dibutuhkan perbaikan untuk mengoptimalkan fungsinya dalam mendukung proses bisnis terkait</p>	<p><i>Partially</i></p>	<p>Mengembangkan <i>improvement</i> terkait sistem informasi UTP IV (perbaikan fitur yang telah ada seperti: <i>digital signature</i>, integrasi dengan Simponi, e-lab terkait pencatatan dokumen cerapan pengujian, dll.)</p>

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		pencatatan dokumen cerapan pengujian, dll.)			
3	Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok & Penguatan Jaringan Distribusi	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok: aktivitas <i>maintenance server</i> berkala belum dilaksanakan dengan optimal sehingga menimbulkan <i>down time</i>	Telah terdapat aktivitas <i>maintenance server</i> berkala namun belum optimal sehingga menimbulkan <i>down time</i>	<i>Partially</i>	Menjadwalkan dan melaksanakan <i>maintenance server</i> berkala agar sistem yang sudah ada dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadi <i>down time</i>
		MOT-03.02.CFM.01.SOP.01 Penataan Jaringan Distribusi: Belum terdapat sistem yang dapat mendukung penerimaan proposal revitalisasi pasar	Dibutuhkan sistem yang dapat mendukung penerimaan proposal revitalisasi pasar	<i>None</i>	Mengembangkan sistem yang dapat mendukung penerimaan proposal revitalisasi pasar
4	Peningkatan Ekspor Non Migas	MOT-04.04.CFM.01.SOP.01 Penanganan Tuduhan <i>Dumping</i> : Belum terdapat sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis penanganan tuduhan <i>dumping</i>	Dibutuhkan sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis penanganan tuduhan <i>dumping</i>	<i>None</i>	Mengembangkan sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis penanganan tuduhan <i>dumping</i>
		MOT-04.04.CFM.02.SOP.01 Penanganan Tuduhan Subsidi: Belum terdapat sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis penanganan tuduhan subsidi	dibutuhkan sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis penanganan tuduhan subsidi	<i>None</i>	Mengembangkan sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis penanganan tuduhan subsidi

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		membantu pelaksanaan proses bisnis penanganan tuduhan subsidi			
		MOT-04.04.CFM.03.SOP.01 Penanganan Tindakan <i>Safeguard</i> : Belum terdapat sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis penanganan tindakan <i>safeguard</i>	Dibutuhkan sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis penanganan tindakan <i>safeguard</i>	<i>None</i>	Mengembangkan sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis penanganan tindakan <i>safeguard</i>
		MOT-04.04.CFM.04.SOP.01 <i>Dispute settlement</i> : Belum terdapat sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis <i>dispute settlement</i>	Dibutuhkan sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis <i>dispute settlement</i>	<i>None</i>	Mengembangkan sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis <i>dispute settlement</i>
		MOT-04.05.CFM.01.SOP.01 Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif: Belum terdapat sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis koordinasi penanganan hambatan non tariff	Dibutuhkan sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis koordinasi penanganan hambatan non tarif	<i>None</i>	Mengembangkan sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis koordinasi penanganan hambatan non tarif

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		<p>MOT-04.05.CFM.02.SOP.01</p> <p>penanganan Hambatan Teknis Perdagangan:</p> <p>Belum terdapat sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis penanganan hambatan teknis perdagangan</p>	<p>Mebutuhkan sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis penanganan hambatan teknis perdagangan</p>	<p><i>None</i></p>	<p>Mengembangkan sistem informasi hambatan perdagangan untuk membantu pelaksanaan proses bisnis penanganan hambatan teknis perdagangan</p>
5	Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan	<p>MOT-05.02.CFM.01.SOP.01</p> <p>Pelayanan Perijinan / Non Perijinan Kepada Dunia Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat sistem informasi waralaba, aplikasi logo waralaba, aplikasi perkembangan fasilitator edukasi e-commerce, aplikasi pelaku usaha yang telah dibina dan atau diidentifikasi, dan aplikasi LKTP. - Belum terdapat aplikasi SIPT yang mendukung proses bisnis barang kebutuhan pokok hasil industri dan perikanan kelautan. - Aplikasi e-SKA (Surat Keterangan Asal) membutuhkan pengembangan 		<p><i>Partially</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan sistem informasi waralaba, aplikasi logo waralaba, aplikasi perkembangan fasilitator edukasi e-commerce, aplikasi pelaku usaha yang telah dibina dan atau diidentifikasi, dan aplikasi LKTP. - Mengembangkan aplikasi SIPT yang dapat mendukung proses bisnis barang kebutuhan pokok hasil industri dan perikanan kelautan. - Mengembangkan Aplikasi e-SKA (surat keterangan asal) perlu dikembangkan untuk membantu proses bisnis pelayanan perizinan/non perizinan kepada dunia usaha

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		<p>untuk membantu proses bisnis Pelayanan Perizinan /Non Perizinan Kepada Dunia Usaha</p>			
		<p>MOT-05.03.CFM.01.SOP.01 Peningkatan Nilai Tambah Produk: Belum terdapat <i>database</i> khusus untuk mendukung Sistem Informasi portal-indonesia.id</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membutuhkan sistem informasi waralaba, aplikasi logo waralaba, aplikasi perkembangan fasilitator edukasi e-commerce, aplikasi pelaku usaha yang telah dibina dan atau diidentifikasi, dan aplikasi LKTP. - Belum terdapat pengembangan aplikasi SIPT dalam mendukung proses bisnis barang kebutuhan pokok hasil industri dan perikanan kelautan. - Aplikasi e-SKA (surat keterangan asal) perlu dikembangkan lebih lanjut untuk membantu proses bisnis pelayanan 	<p><i>Partially</i></p>	<p>Mengembangkan <i>database</i> khusus untuk mendukung Sistem Informasi portal-indonesia.id</p>

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			perizinan/non perizinan kepada dunia usaha - Membutuhkan <i>database</i> khusus untuk mendukung Sistem Informasi portal-indonesia.id		
		MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia: Intrade belum optimal dalam membantu proses bisnis pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (<i>certificate of origin</i>) untuk barang ekspor Indonesia	Intrade membutuhkan pengembangan untuk mendukung proses bisnis Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>certificate of origin</i>) untuk barang ekspor Indonesia	<i>Partially</i>	Mengembangkan aplikasi intrade untuk membantu proses bisnis pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (<i>certificate of origin</i>) untuk barang ekspor indonesia
		MOT - 05.07.CFM.01.SOP.01 Pembinaan PBK, SRG dan Pl: Belum terdapat sistem informasi untuk mendukung proses perizinan di bidang PBK/SRG/PL, pengelolaan pelaku usaha di bidang PBK/SRG/PL, dan proses diseminasi informasi publik di bidang PBK/SRG/PL	Membutuhkan sistem informasi untuk mendukung proses perizinan di bidang PBK/SRG/PL, pengelolaan pelaku usaha di bidang PBK/SRG/PL, dan diseminasi informasi publik di bidang PBK/SRG/PL	<i>None</i>	Mengembangkan Sistem Informasi untuk mendukung proses perizinan di bidang PBK/SRG/PL, pengelolaan pelaku usaha di bidang PBK/SRG/PL, dan diseminasi informasi publik di bidang PBK/SRG/PL

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PL: Belum terdapat Sistem Informasi Untuk Mendukung Pengawasan pelaku usaha, lembaga dan transaksi di bidang PBK/SRG/PL, pemantauan subsidi SRG, penyampaian pelaporan SRG dan PL	Mebutuhkan Sistem Informasi untuk mendukung pengawasan pelaku usaha, lembaga dan transaksi di bidang PBK/SRG/PL, pemantauan subsidi SRG, penyampaian pelaporan SRG dan PL	None	Mengembangkan Sistem Informasi untuk mendukung pengawasan pelaku usaha, lembaga dan transaksi di bidang PBK/SRG/PL, pemantauan subsidi SRG, penyampaian pelaporan SRG dan PL
		MOT - 05.07.CFM.03.SOP.01 Pengembangan PBK, SRG dan PL: Belum terdapat <i>database</i> khusus terkait pengkajian produk dan kelembagaan PBK/SRG/PL	Mebutuhkan <i>database</i> khusus terkait pengkajian produk dan kelembagaan PBK/SRG/PL	Partially	Melakukan pengadaan <i>database</i> terkait pengkajian produk dan kelembagaan PBK/SRG/PL
6	Pengembangan Akses Pasar	MOT-06.01.CFM.01.SOP.01 <i>Leading Sector</i> Perundingan Internasional: Belum terdapat sistem informasi perundingan internasional untuk mendukung proses bisnis <i>leading sector</i> perundingan internasional	Mebutuhkan Sistem Informasi yang mendukung Perundingan Internasional untuk Mendukung Proses Bisnis <i>Leading Sector</i> Perundingan Internasional	None	Mengembangkan Sistem Informasi yang mendukung Perundingan Internasional untuk Mendukung Proses Bisnis <i>Leading Sector</i> Perundingan Internasional
7	Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)	MOT-07.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi:	Mebutuhkan sistem informasi terkait proses <i>monitoring</i> perangkat DC (suhu/EMS, <i>traffic</i> /PRTG,	None	Mengembangkan sistem informasi terkait proses <i>monitoring</i> perangkat DC (suhu/EMS, <i>traffic</i> /PRTG, prioritas

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		Belum terdapat sistem informasi terkait proses <i>monitoring</i> perangkat DC (suhu/EMS, <i>traffic</i> /PRTG,prioritas penggantian perangkat/GLPI/ZABBIX, dkk), dan SIEM	prioritas penggantian perangkat/GLPI/ZABBIX, dkk), dan SIEM		penggantian perangkat/GLPI/ZABBIX, dkk), dan SIEM
		MOT-07.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan dan Pelayanan Permintaan Data: Belum terdapat aplikasi untuk pemetaan proses bisnis dan inventaris data (input: inventaris, proses: pemetaan proses bisnis + data + media dukungan TI (aplikasi/db/ <i>service</i>), <i>output</i> : metadata, kamus data/katalog data, kategorisasi data, data <i>quality</i>)	Membutuhkan aplikasi pemetaan proses bisnis dan inventaris data (<i>input</i> : inventaris, proses: pemetaan proses bisnis + data + media dukungan TI (aplikasi/db/ <i>service</i>), <i>output</i> : metadata, kamus data/katalog data, kategorisasi data, data <i>quality</i>)	None	Mengembangkan aplikasi pemetaan proses bisnis dan inventaris data (<i>input</i> : inventaris, proses: pemetaan proses bisnis + data + media dukungan TI (aplikasi/db/ <i>service</i>), <i>output</i> : metadata, kamus data/katalog data, kategorisasi data, data <i>quality</i>)
		MOT - 07.03.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Aplikasi: Belum terdapat <i>tools project management</i> yang didalam ada pengelolaan <i>requirement product</i> , <i>versioning</i> , komunikasi (<i>shared</i>), <i>schedule</i> , <i>change management</i> ; <i>knowledge management system</i> ; <i>Sandboxing</i> untuk <i>development</i> (untuk	Belum terdapat <i>tools project management</i> yang didalam ada pengelolaan <i>requirement product</i> , <i>versioning</i> , komunikasi (<i>shared</i>), <i>schedule</i> , <i>change management</i> ; <i>knowledge management system</i> ; <i>Sandboxing</i> untuk <i>development</i> (untuk <i>environmenttest</i>), HW	None	Mengadakan/mengembangkan <i>tools project management</i> yang didalam ada pengelolaan <i>requirement product</i> , <i>versioning</i> , komunikasi (<i>shared</i>), <i>schedule</i> , <i>change management</i> ; <i>knowledge management system</i> ; <i>Sandboxing</i> untuk <i>development</i> (untuk <i>environment test</i>), HW test/HW <i>virtualization</i> (untuk <i>deployment</i>)

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		<i>environmenttest</i>), HW I/HW <i>virtualization</i> (untuk <i>deployment</i>)	test/HW <i>virtualization</i> (untuk <i>deployment</i>)		
		MOT - 07.04.CFM.01.SOP.01 pengelolaan Keamanan Informasi Belum terdapat aplikasi pemantauan terkait ISO 9001 dan ISO 27001: dokumen, bukti-bukti, temuan, tindak lanjut dan RTM	Mebutuhkan aplikasi pemantauan terkait ISO 9001 dan ISO 27001: dokumen, bukti-bukti, temuan dan tindak lanjut, RTM, dkk	None	Mengembangkan aplikasi pemantauan terkait ISO 9001 dan ISO 27001: dokumen, bukti-bukti, temuan, tindak lanjut dan RTM
8	Pelayanan Informasi dan Publikasi	MOT-08.02.CFM.01 Memerlukan pengembangan terkait <i>content management system</i> (CMS) dengan menambahkan fitur <i>reply and forward</i> , penambahan fitur <i>tracking</i> proses sengketa informasi, pengembangan portal PPID untuk penyimpanan <i>database</i> informasi, dokumentasi, kemudahan melacak informasi tersimpan dengan kata kunci, akses bagi unit untuk mengunggah informasi/data	Mebutuhkan pengembangan <i>content management system</i> (CMS) dan portal PPID untuk mengakomodasi fitur yang ingin ditambahkan	Partially	Mengembangkan <i>content management system</i> (CMS) dan portal PPID untuk mengakomodasi fitur yang ingin ditambahkan
9	Riset dan Pengembangan	MOT-09.01.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Kajian: Memerlukan upgrade <i>software</i> dengan versi terbaru (seperti: Ms. Office,	Mebutuhkan <i>upgrade</i> dengan versi terbaru pada <i>software</i> dan memiliki jaringan akses yang	Partially	Melakukan <i>upgrade software</i> secara berkala

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		<i>Software e-views 9, Software STATA),</i> terbatasnya akses jurnal internasional (seperti: elsevier, JSTOR, akses data WITS, akses data Oxford <i>economic dan tradeshift</i>)	tidak terbatas dalam mengakses jurnal internasional		
10	Pengelolaan Administrasi dan Umum	Terkait proses penyiapan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi persuratan dan kearsipan Kementerian membutuhkan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip	Membutuhkan aplikasi SPBE terkait Pengelolaan Arsip	<i>None</i>	Menunggu aplikasi SPBE terkait Pengelolaan Arsip
11	Pengelolaan SDM	MOT-11.01.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Formasi Pegawai: Memerlukan aplikasi pengusulan tambahan kebutuhan pegawai dan aplikasi registrasi pelaksanaan ujian CPNS	Tidak terdapat aplikasi pengusulan tambahan kebutuhan pegawai dan aplikasi registrasi pelaksanaan ujian CPNS	<i>None</i>	Mengembangkan aplikasi pengusulan tambahan kebutuhan pegawai dan aplikasi registrasi pelaksanaan ujian CPNS
12		MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Perdagangan: Memerlukan pengembangan <i>e-Learning dan Learning Management</i>	Membutuhkan pengembangan aplikasi untuk mengelola <i>e-Learning dan Learning Management</i>	<i>Partially</i>	Membutuhkan pengembangan aplikasi untuk mengelola <i>e-Learning dan LearningManagement</i> dengan fungsional sebagai berikut: mengelola <i>user, role, courses, instructor, facility,</i> manajemen peserta diklat dan kompetensi, manajemen dan distribusi materi/ <i>content, coursecalender, learningpath,</i>

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					<i>usermessaging</i> dan <i>notification</i> , <i>assessment</i> dan <i>testing</i> yang dilakukan sebelum atau sesudah pembelajaran (<i>Pre-test</i> dan <i>Post-Test</i>), menampilkan nilai, <i>course</i> yang disusun sesuai <i>grade</i> , dan <i>webbased</i>
13		MOT-11.02.CFM.01.SOP.03 Pengelolaan Jabatan Fungsional: Memerlukan aplikasi pengelolaan jabatan fungsional	Belum memiliki aplikasi pengelolaan jabatan fungsional	None	Mengembangkan aplikasi pengelolaan jabatan fungsional untuk dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis secara optimal
14		MOT-11.02.CFM.03.SOP.02 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag: Perbaikan pada e-Dupak	Memerlukan perbaikan pada e-Dupak seperti penyederhanaan input penilaian dan rekapitulasi	Partially	Diperlukan pengembangan pada e-Dupak untuk mengurangi kegagalan sistem dan penyederhanaan input penilaian serta rekapitulasi
15		MOT-11.02.CFM.03.SOP.05 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kementerian Perdagangan: Membutuhkan sistem informasi <i>monitoring</i> dan evaluasi jabatan fungsional kemetrolgian untuk mendukung proses bisnis <i>monitoring</i>	Tidak terdapat sistem informasi/aplikasi <i>monitoring</i> dan evaluasi jabatan fungsional kemetrolgian	None	Mengembangkan sistem informasi/aplikasi <i>monitoring</i> dan evaluasi jabatan fungsional kemetrolgian untuk dapat mendukung proses bisnis

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		dan evaluasi jabatan fungsional dibawah pembinaan Kemendag			
16		MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat <i>Stakeholder</i> Perdagangan: Membutuhkan <i>website</i> informasi publik, <i>Open Jurnal System</i>	Mengembangkan <i>website</i> informasi publik dan <i>Open Jurnal System</i>	<i>None</i>	Mengembangkan <i>website</i> informasi publik dan <i>Open Jurnal System</i> untuk menunjang pelaksanaan diklat <i>stakeholder</i> perdagangan
17		MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian: Memerlukan aplikasi penyusunan standar kompetensi	Belum memiliki aplikasi penyusunan standar kompetensi	<i>None</i>	Mengembangkan aplikasi penyusunan standar kompetensi untuk mendukung kebutuhan proses bisnis
18		MOT-11.07.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Perwakilan Perdagangan Luar Negeri: Memerlukan aplikasi rekrutmen SDM perwakilan di Luar Negeri	Belum memiliki aplikasi terkait rekrutmen SDM perwakilan di Luar Negeri	<i>None</i>	Mengembangkan aplikasi rekrutmen SDM perwakilan di Luar Negeri
19	Layanan Hukum	MOT-12.02.CFM.01.SOP.02 Pemberian Konsultasi dan Opini Hukum Bidang Perdagangan Internasional: - Perlu melakukan improvisasi pada aspek kuantitas dan kualitas SDM - Perlu pengembangan <i>website</i> untuk menunjang percepatan dan	- Memerlukan improvisasi pada aspek kuantitas dan kualitas SDM - Memerlukan pengembangan <i>website</i> guna menunjang percepatan dan simplifikasi	<i>Partially</i>	- Improvisasi kuantitas dan kualitas SDM - Mengembangkan <i>website</i> untuk menunjang percepatan dan simplifikasi pelaksanaan advokasi kepada <i>stakeholder</i> melalui advokasi <i>online</i> , akuntabilitas penilaian

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		simplifikasi pelaksanaan advokasi kepada <i>stakeholder</i> melalui advokasi <i>online</i> , akuntabilitas penilaian pemanfaatan dari advokasi hukum yang diterima oleh <i>stakeholder</i>	pelaksanaan advokasi <i>online</i>		pemanfaatan dari advokasi hukum yang diterima oleh <i>stakeholder</i>
20		MOT-12.02.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Dalam Rangka Pengamanan Peraturan Nasional Di Bidang Perdagangan Internasional: Perlu untuk melakukan improvisasi pada aspek kuantitas dan kualitas SDM	Memerlukan improvisasi pada aspek kuantitas dan kualitas SDM	<i>Partially</i>	Improvisasi kuantitas dan kualitas SDM
21		MOT-12.02.CFM.04.SOP.01 Pemberian Opini Hukum Terkait Kesesuaian Kebijakan Negara Mitra Dagang Dengan Komitmen Perjanjian Perdagangan Internasional: - Perlu untuk melakukan improvisasi pada aspek kuantitas dan kualitas SDM - Alokasi anggaran untuk mengakses informasi/ <i>content</i> yang terkait	- Memerlukan improvisasi pada aspek kuantitas dan kualitas SDM - Membutuhkan anggaran untuk dapat mengakses informasi terkait dengan isu-isu perjanjian dan sengketa perdagangan internasional	<i>Partially</i>	- Improvisasi kuantitas dan kualitas SDM - Alokasi anggaran untuk mengakses informasi isu-isu perjanjian dan sengketa perdagangan internasional

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		dengan isu-isu perjanjian dan sengketa perdagangan internasional			
22	Pengelolaan Rencana dan Anggaran	MOT-13.01.CFM.02.SOP.01 Penetapan Rencana Kerja: Perlu untuk mengembangkan aplikasi penyusunan matriks rancangan awal rencana kinerja, yang terintegrasi dengan KRISNA	Membutuhkan pengembangan sistem informasi penyusunan matriks rancangan awal rencana kinerja yang terintegrasi dengan KRISNA	None	Mengembangkan sistem informasi/aplikasi penyusunan matriks rancangan awal rencana kinerja yang dapat terintegrasi dengan KRISNA
		MOT-13.01.CFM.02.SOP.02 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran: Memerlukan aplikasi SATUDJA untuk penyusunan RKA	Belum terdapat aplikasi SATU DJA	None	Mengembangkan aplikasi SATU DJA untuk penyusunan RKA di lingkungan Kemendag
23		MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran: - Membutuhkan aplikasi keuangan (SISKA) di lingkungan Kemendag yang terintegrasi - Aplikasi perjalanan dinas (dalam dan Luar Negeri)	- Belum terdapat aplikasi sistem informasi keuangan SISKA di lingkungan Kemendag yang terintegrasi - Belum terdapat aplikasi perjalanan dinas (dalam dan Luar Negeri)	None	- Mengembangkan sistem informasi/aplikasi SISKA untuk menunjang kinerja Satker di lingkungan Kemendag yang dapat saling terintegrasi - Mengembangkan sistem informasi/aplikasi perjalanan dinas
24		MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan: Membutuhkan aplikasi e-Data LK untuk menghimpun dan memantau permintaan data dari Satker di	Belum memiliki sistem informasi/aplikasi e-Data LK	None	Mengembangkan aplikasi e-Data LK untuk menunjang kinerja Satker di lingkungan Kemendag

No	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisis Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		lingkungan Kemendag terkait pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK			
25		MOT-13.03.CFM.01.SOP.01 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Program: Pengembangan pada aplikasi yang sudah ada yaitu <i>e-Monitoring</i>	Pengembangan pada aplikasi yang sudah ada <i>e-Monitoring</i>	<i>Partially</i>	Mengembangkan aplikasi <i>e-Monitoring</i> untuk menunjang kinerja Satker di lingkungan Kemendag menjadi lebih optimal
27	Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Manajemen dan Pengawasan	MOT-15.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan pengawasan internal: Aplikasi <i>e-Audit</i> masih belum mendukung siklus audit secara menyeluruh, sistem pengaduan untuk mengelola pengaduan internal dan eksternal, sistem manajemen risiko untuk mendukung proses <i>risk assessment</i>	Belum terdapat sistem yang memfasilitasi proses audit secara menyeluruh	<i>Partially</i>	Mengembangkan sistem informasi/aplikasi berupa: <i>E-audit (full version)</i> yang mendukung siklus audit secara menyeluruh

8. Arsitektur Infrastruktur

8.1. Arsitektur Infrastruktur Saat Ini

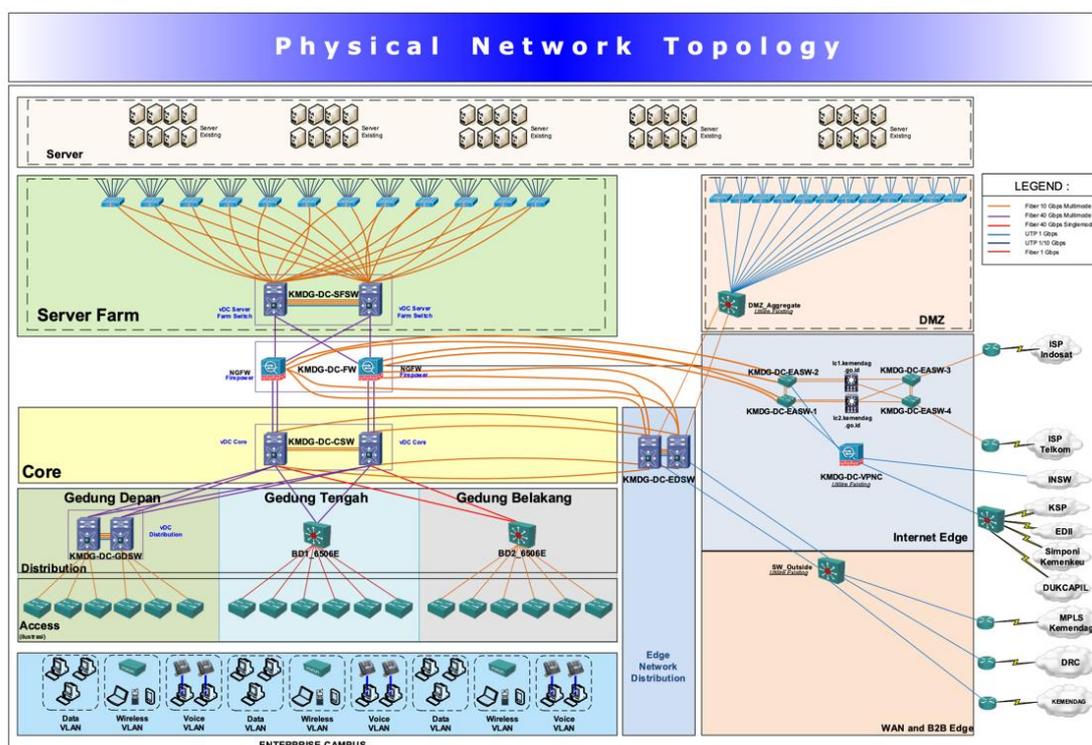
Aspek-aspek yang dibahas merupakan fungsi dasar kelengkapan jaringan, yaitu:

- Arsitektur jaringan merupakan model yang digunakan sebagai acuan analisis dari model topologi Saat Ini. Secara ringkas, model ini merupakan Campus Network Model, dengan kelengkapan dari sisi eksternal dan internal.
- Kelengkapan elemen merupakan rincian dari arsitektur acuan tersebut, yaitu *core layer*, *distribution layer*, *Access Layer*, Internet dan *Internet Edge*.
- Hierarki dan sistematika merupakan urutan keterkaitan fungsi antar elemen.
- Redundansi merupakan fungsi ketersediaan fungsi elemen jaringan.
- Skalabilitas merupakan fungsi kapasitas dari elemen jaringan.

8.2. Analisis Kondisi Infrastruktur Jaringan Saat Ini

a. Topologi Jaringan Kemendag

Berikut merupakan topologi *physical network* Kemendag



Gambar 8-1 Topologi Jaringan Kementerian Perdagangan

Implementasi fungsi jaringan pada topologi sudah menggunakan kerangka *Campus Network Model*. Implementasi ini yang dalam gambar tertera *Enterprise Campus*, memiliki kelengkapan segmentasi, yaitu:

- 1) *Server*: segmen *server-server* aplikasi
- 2) *Server Farm*: segmen fungsi jaringan penghubung *Server* dan *Core Layer*
- 3) *Core Layer*: segmen fondasi jaringan

- 4) *Distribution Layer*: segmen diferensiasi
- 5) *Access Layer*: segmen koneksi host atau akses komputer user
- 6) *Edge Network Distribution*: segmen pengendali layanan eksternal
- 7) DMZ: segmen pengamanan
- 8) *Internet Edge*: segmen pengendali koneksi publik, sebagian layanan eksternal
- 9) *WAN & B2B Edge*: segmen akses terbatas untuk Mitra yang berbeda lokasi geografis
- 10) ISP: koneksi *provider*
- 11) Mitra: kategori segmen organisasi bisnis dengan kerja sama eksternal
- 12) DRC: fungsi *backup* dari layanan *data center*

Dari sisi kategori akses, model ini memiliki kelengkapan:

- 1) Akses terbuka, yaitu akses publik
- 2) Akses terbatas, yaitu akses untuk layanan business-to-business
- 3) Akses privat, yaitu akses untuk internal organisasi

Dari sisi pengendalian akses dilengkapi dengan *Edge Network Distribution*, *DMZ*, *Internet Edge*, *WAN* dan *B2B Edge*

Local Area Network (LAN)

Implementasi LAN sudah menggunakan model *Campus Network*. Model ini sudah diterapkan dengan memperhatikan bagian penting, dengan menggunakan fungsi redundansi.

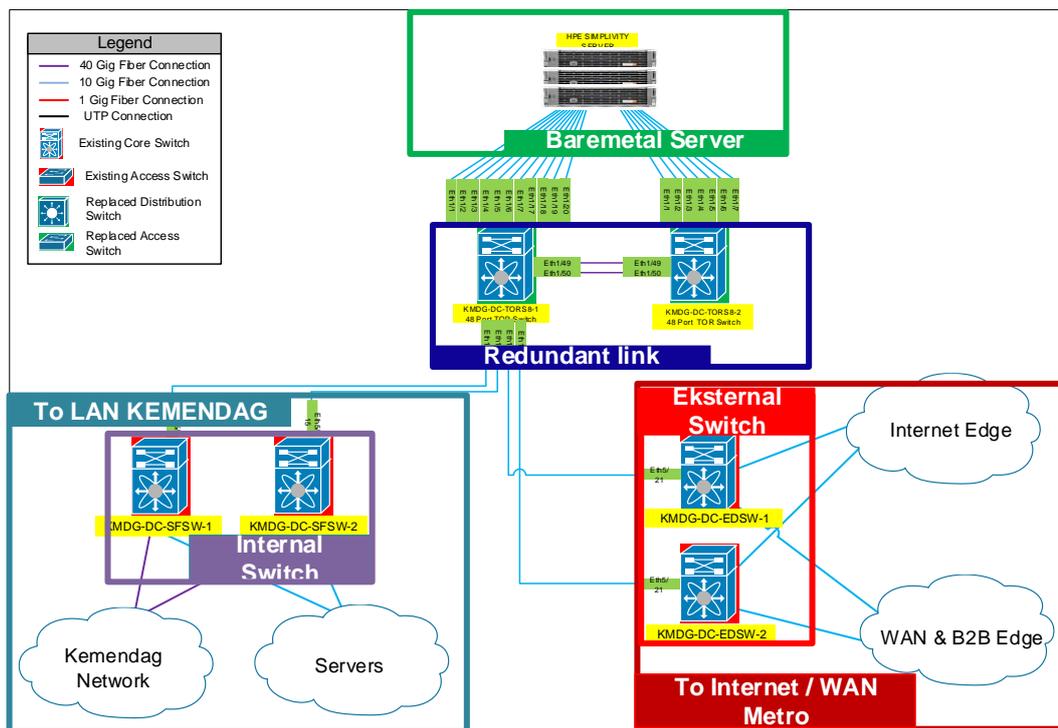
Bagian LAN ini terdiri atas:

- 1) Bagian *Core Layer* memiliki *switch* ganda, dengan koneksi yang redundan. Bagian ini dikategorikan sebagai bagian kritis atau penting. Bagian *Core Layer* terbagi menjadi *Distribution Layer*. Bagian *Distribution Layer* terbagi menjadi *Access Layer*. Bagian *Core Layer* juga terbagi menjadi *Edge Network Distribution*.
- 2) *Distribution Layer* terbagi menjadi tiga bagian. Dengan rincian: LAN Gedung Depan, LAN Gedung Tengah dan LAN Gedung Belakang. Pada Gedung Depan, *Distribution Layer* memiliki dua *switch* redundansi.
- 3) Setiap *Distribution Layer* pada masing-masing gedung melayani user melalui *Access Layer*, berupa *switch-switch*. Kategori akses pada segmen ini terbagi menjadi berbagai VLAN. Pada VLAN ini terbagi menjadi:
 - a. VLAN untuk akses data
 - b. VLAN untuk *wireless*
 - c. VLAN untuk akses voice

b. Topologi Data Center

Dari fungsi layanan, *server-server* pada *Data Center* menyediakan layanan aplikasi dan data. Saat ini layanan tersebut diwakili himpunan *server* dengan nama “*Baremetal Server*”. Layanan tersebut terhubung ke jaringan Kemendag dan diakses oleh pengguna. Layanan tersebut berkategori penting, sehingga akses jaringan disediakan redundansi.

Redundansi diimplementasikan dalam bentuk penyediaan *switch* ganda, dengan fungsi saling *backup*.



Gambar 8-2 Topologi Data Center

Layanan aplikasi dan data dari *server-server* yang terdapat pada *Data Center* ini tersedia untuk eksternal dan internal. Mekanisme keduanya menggunakan pemisahan segmen, pemisahan link dan pemisahan *switch*.

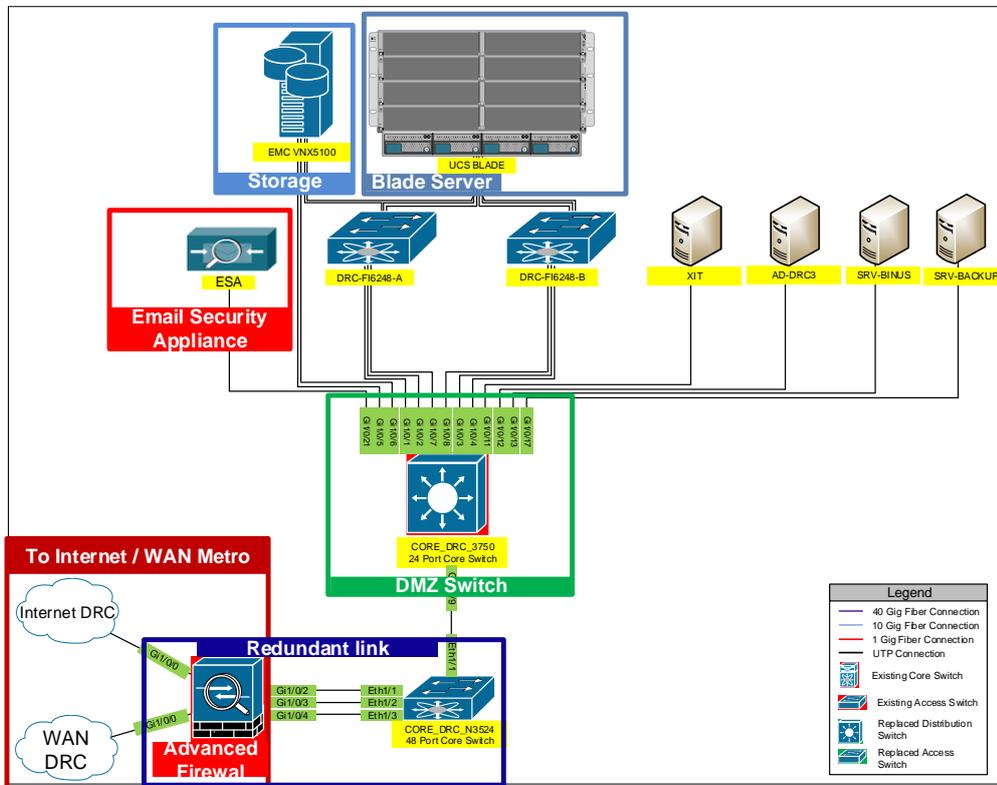
Untuk akses internal, terdapat dua link dengan dua *switch*, yang dinamakan *Internal Switch*. Kemudian koneksi ke luar *switch* ini menuju LAN Kemendag dan ruang *server* lain. Dari model jaringan, mekanisme user internal Kemendag mengakses layanan melalui *Access Layer* pada LAN.

Untuk akses eksternal, terdapat dua link dengan dua *switch* redundansi. Dua *switch* ini dinamakan *Eksternal Switch*. Kemudian *Eksternal Switch* ini terhubung ke Internet melalui dua ISP memberikan layanan publik. Sedangkan satu koneksi lagi disebut WAN, memberikan layanan kepada Mitra dalam bentuk relasi *Business-to-Business*

c. Topologi DRC

Untuk redundansi layanan *Data Center*, terdapat DRC (*Disaster Recovery Center*) dengan lokasi geografis yang berbeda dengan *Data Center*. Saat ini lokasi DRC terdapat di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.

Elemen DRC ini memiliki kategori layanan data dan aplikasi berupa *Storage* dan *Server*. *Server* berupa *Blade Server*, dan *server-server* lain. *Server-server* tersebut dapat mewakili segmen *Distribution Layer*, secara model jaringan. Terdapat dua *switch* penghubung *server-server* tersebut. Muara koneksinya ada pada *Core Switch* DRC.

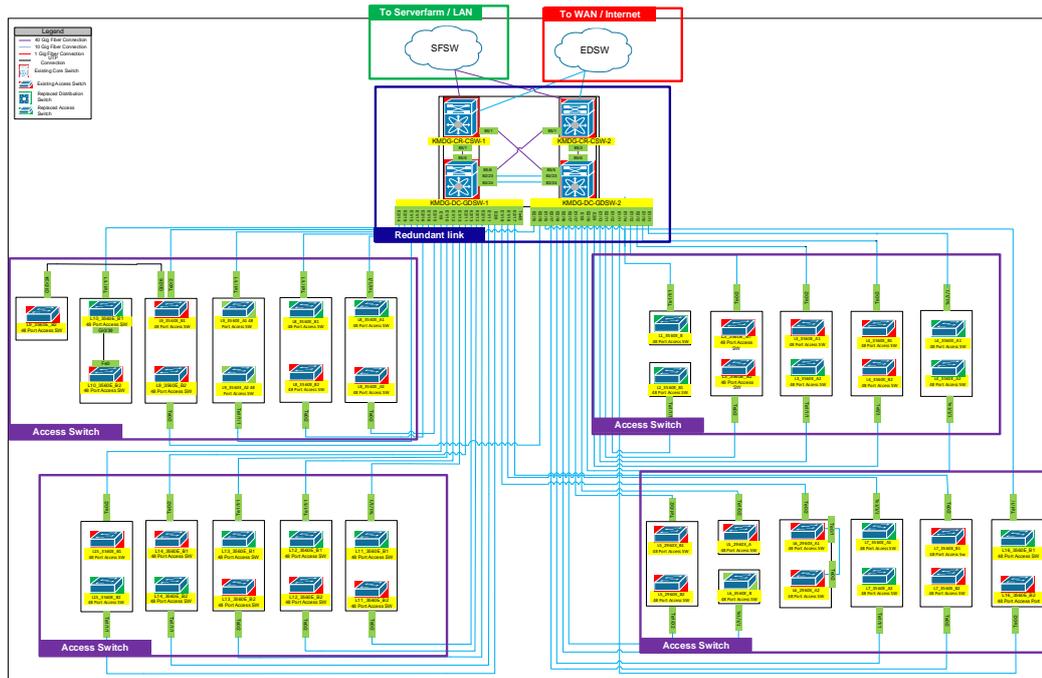


Gambar 8-3 Topologi Data Recovery Center

Kemudian *switch* ganda, dan *server* lain terhubung ke *DMZ Switch*, yang berfungsi untuk memproteksi segmen. Sedangkan proteksi lain, yaitu proteksi koneksi jaringan dari Kantor Kemendag ke DRC menggunakan *Advanced Firewall* dengan link ganda. Koneksi ini terhubung dengan *Core Switch* DRC.

d. Gedung Utama

Local Area Network pada Kantor Kemendag salah satunya terbagi menjadi LAN Gedung Utama. Dari sisi model jaringan, bagian ini termasuk *Distribution Layer*. *Distribution Layer* Gedung Depan memiliki *switch* ganda untuk redundansi.

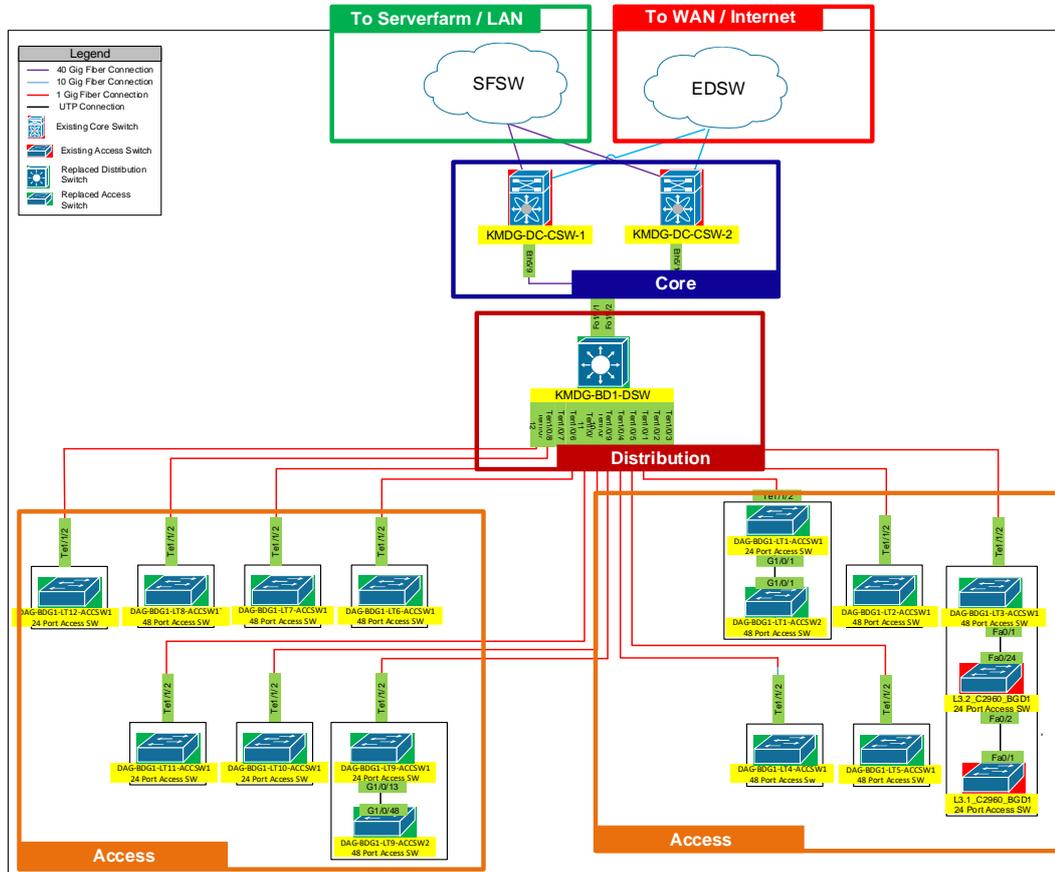


Gambar 8-4 LAN Gedung Depan

Akses ke setiap user di Gedung Utama merupakan *Access Layer*, dan menyediakan pembagian akses melalui *switch-switch*. Akses tersedia dalam bentuk VLAN untuk *wireless*, data dan *voice*.

e. Gedung Satu

Jaringan pada *Distribution Layer* berikutnya adalah LAN Gedung Satu. Dari *Core Layer* terhubung ke *Distribution Layer switch*.

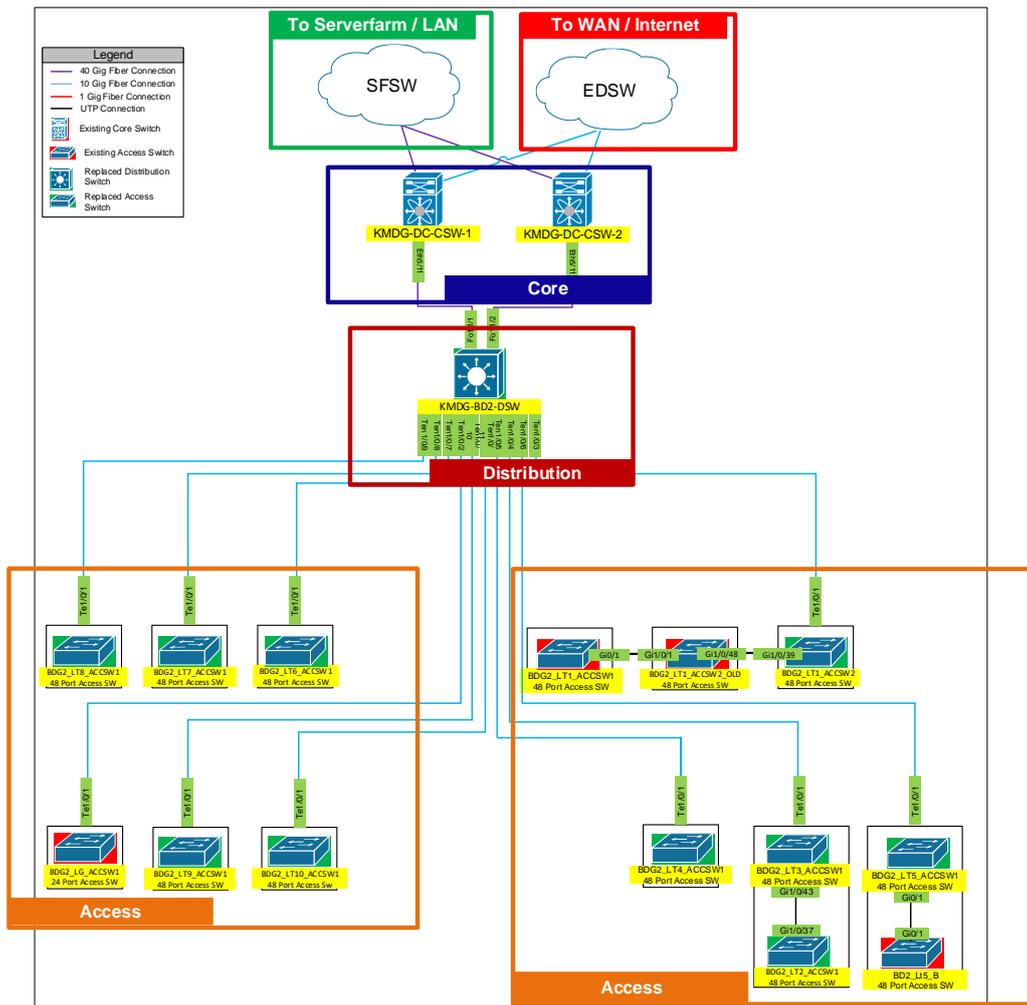


Gambar 8-5 LAN Gedung Tengah

End User pada Gedung Satu ini mengakses layanan melalui media fiber optik yang menghubungkan switch access Layer dengan Distribution Layer.

f. Gedung Dua

Akses user yang lain, terdapat di LAN Gedung Dua. Segmentasi akses ini berupa switch distribution Layer yang terhubung ke switch access Layer. Media penghubung ini berupa fiber optik.



Gambar 8-6 LAN Gedung Belakang

Bentuk topologi antara *Distribution Layer* dengan *Access Layer* adalah *star topology*. Topologi ini menghubungkan *switch Access Layer* sebanyak 9 *switch*, dengan dua *switch* tambahan terhubung ke dua *switch* lain.

8.2.1. Analisis Arsitektur Infrastruktur Saat ini

Resume pembahasan infrastruktur ini disusun berdasarkan asesmen berupa wawancara pada narasumber. Selain itu juga berdasarkan dokumen yang melengkapi asesmen tersebut. Aspek-aspek yang dibahas adalah jaringan komputer, layanan *server* aplikasi dan data, *End User Infrastructure*, *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*, dan keamanan infrastruktur.

Tabel 8-1 Arsitektur Infrastruktur Saat Ini

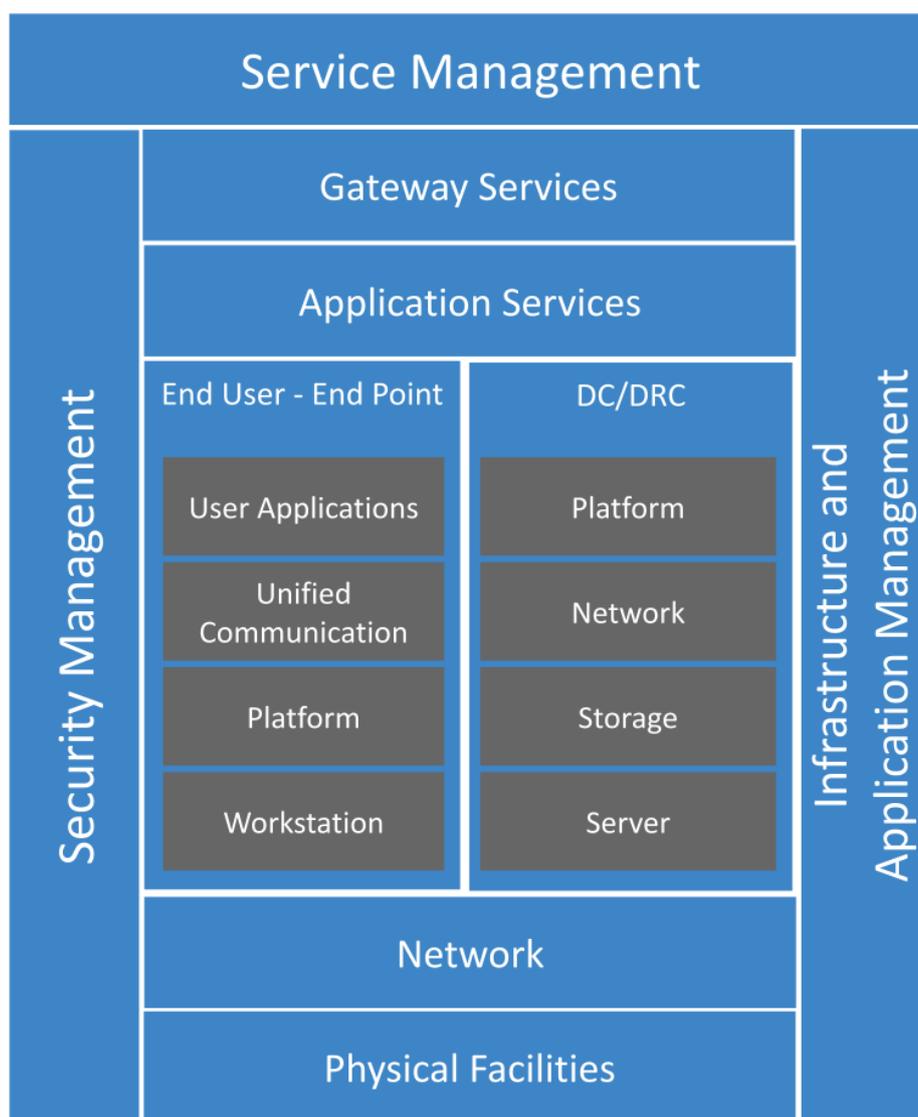
No	Komponen	Deskripsi
1	<i>Physical Facilities</i>	Fasilitas fisik yang tersedia pada <i>data center</i> sudah memadai. Terdapat raised floor untuk jalur kabel. Ruangan <i>server</i> dan ruangan <i>monitoring</i> terpisah dan diamankan menggunakan kendali akses fisik. Akses pengamanan fisik berupa access door. Terdapat sistem pengaturan temperatur dan kelembapan lingkungan udara Data Center.

No	Komponen	Deskripsi
		<p>Dari sisi proteksi sistem mitigasi kebakaran, terdapat <i>fire suppression</i>.</p> <p>Ketersediaan daya listrik menggunakan sistem UPS, dan genset. Genset saat ini dikelola oleh Biro Umum. Saat ini <i>Data Center</i> belum memiliki standar industri DC.</p> <p>Sudah terdapat layanan DRC. Layanan DRC berada di site yang berbeda.</p> <p>Terdapat sebagian aplikasi DC yang berada backupnya di DRC</p>
2	DC / DRC <i>Hardware</i>	<p>Teknologi yang digunakan yaitu baremetal dan <i>virtualized system</i>.</p> <p>Belum terdapat media penyimpanan khusus pada DC, sedangkan sudah tersedia media penyimpanan khusus menggunakan teknologi NAS pada DRC <i>Server</i>.</p> <p>Terdapat beberapa perangkat switch access yang sudah memasuki usia end of life namun belum diganti</p>
3	<i>Network</i>	<p>Model arsitektur jaringan komputer sudah berupa <i>Campus Network</i>.</p> <p>Pada bagian penting, terdapat redundansi, misalnya <i>redundant switch</i> pada <i>Core Layer</i>.</p> <p>Terdapat koneksi Internet yang terhubung ke dua provider internet berbeda.</p> <p>Alokasi <i>bandwidth</i> setiap koneksi tersebut 1 Gbps.</p> <p>Untuk optimasi koneksi Internet, terdapat pengaturan <i>load balancing</i> dengan sistem yang diimplementasikan pada Internet <i>Edge</i>.</p> <p>Koneksi ke kantor di lokasi selain Kemendag, berupa MPLS VPN</p> <p>Koneksi WAN digunakan untuk menyediakan konektivitas internal ke DRC. Selain itu koneksi WAN tersedia sebagai layanan <i>extranet</i>.</p> <p>Terdapat interkoneksi menuju Kemenkeu dan juga Kemlu</p> <p>Pada tahun 2019 sudah dilakukan peremajaan perangkat berupa 2 <i>switchcore</i>, 3 <i>distributionswitch</i> untuk koneksi antar gedung, 2-unit load balancer, next gen firewall, dan Web Application Firewall (WAF) sudah seluruh perangkat untuk core dan distribtuion layer diremajakan.</p>

No	Komponen	Deskripsi
4	<i>Security Mangement</i>	<p>Pengendalian akses berupa perangkat firewall yang berfungsi sekaligus sebagai IPS</p> <p>Proteksi konektivitas WAN menggunakan MPLS VPN</p> <p>Pengendalian akses <i>wireless</i>, berupa <i>whitelisting</i> <i>MAC address</i> untuk dapat mengakses jaringan <i>wireless</i></p>
5	<i>Infrastructure & Application Management</i>	<p>Sudah terdapat <i>monitoring availability</i> dari perangkat infrastruktur menggunakan Whatsup Gold</p> <p><i>Monitoring server</i> menggunakan fungsi bawaan perangkat dan mencakup sebagian utilitas <i>server</i>.</p> <p>Saat ini data dari aplikasi menjadi satu sistem <i>platform</i> bersama aplikasi tersebut.</p> <p>Belum terdapat <i>software</i> khusus untuk melakukan backup data <i>server</i></p> <p>Terdapat sistem <i>monitoring</i> untuk mail <i>database</i> menggunakan script untuk mail flow test report.</p> <p>Belum terdapat SLA untuk <i>server</i> yang dikelola oleh masing-masing unit kerja</p>
6	<i>Application Services</i>	<p>Aplikasi terbagi menjadi aplikasi <i>core</i> dan <i>non-core</i></p> <p>Pihak pengelolaan aplikasi dalam DC menjadi satu dengan pengelolaan infrastruktur</p>
7	<i>Gateway Services</i>	<p>Aplikasi yang berfungsi sebagai Sistem Penghubung Layanan antar aplikasi yang terdapat di lingkungan DC Kementerian Perdagangan atau antar Lembaga Pemerintah/non-Pemerintah sebagai pihak eksternal.</p>
8	<i>Service management</i>	<p>Terdapat <i>helpdesk</i> dan <i>call center</i> untuk jaringan sudah terdapat <i>system helpdesk</i> yaitu PDSI center</p> <p>Pengajuan <i>Request for Changes</i> (RFC) masih secara manual.</p> <p>Dari sisi proses kerja, sudah terdapat prosedur untuk RFC, dan <i>Post Implementation Review</i> (PIR)</p>
9	<i>End user – End Point</i>	<p>Sudah terdapat standarisasi teknologi <i>workstation</i> untuk <i>end-user</i></p> <p>Terdapat penggunaan berbagai jenis platform</p>

No	Komponen	Deskripsi
		Pengendalian patching menggunakan <i>server</i> untuk patching Windows OS dengan menggunakan fitur WSUS Layanan terkendali berupa <i>server</i> untuk pembaharuan <i>anti-virus</i> , yang dilakukan secara <i>centralized</i> Terdapat pengaturan <i>bandwidth</i> untuk user berdasarkan aplikasi, misalnya <i>streaming</i> dibatasi hanya 10% dari 2 Gbps Terdapat konektivitas media <i>wireless</i> pada setiap gedung kantor. Akses ini mencakup area-area kerja.

8.3. Arsitektur Infrastruktur Target



Gambar 8-7 Elemen Arsitektur Infrastruktur

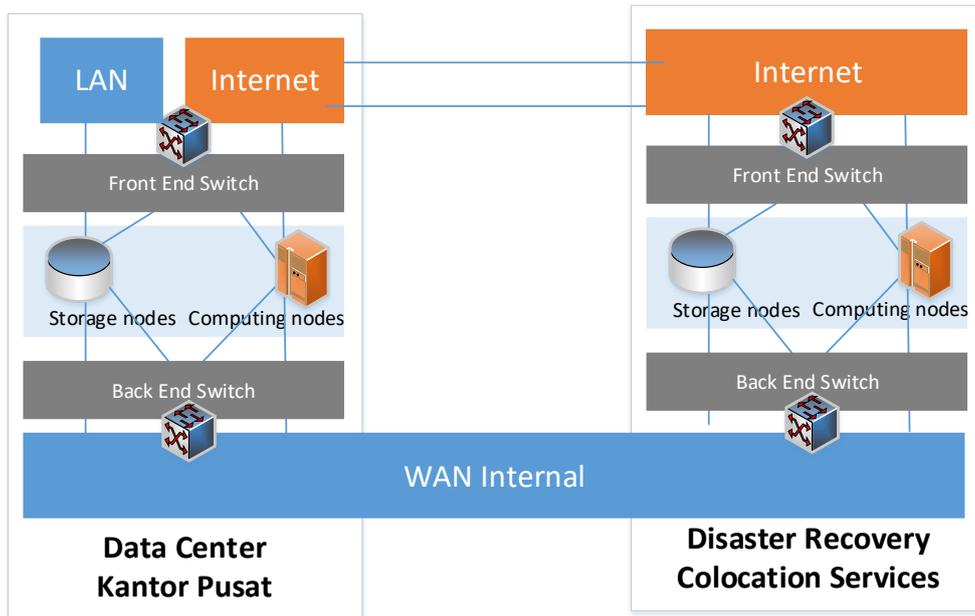
Penjelasan dari elemen dalam model arsitektur infrastruktur terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8-2 Tabel Elemen Target Arsitektur Infrastruktur

No	Komponen	Deskripsi
1	<i>Physical Facilities</i>	Fasilitas fisik yang digunakan untuk <i>Data Center</i> mencakup model arsitektur fisik, rak <i>server</i> untuk penyimpanan perangkat keras, kontrol pengamanan fisik dan pengelolaan parameter lingkungan (sistem pengaturan udara dan temperatur, deteksi dan mitigasi kebakaran).
2	<i>DC / DRC Hardware</i>	Layanan utama dan backup organisasi. Mencakup pengolahan dan penyimpanan data, mencakup <i>server</i> aplikasi, <i>server storage</i> , jaringan lokal pendukung serta <i>platform</i> perangkat lunak untuk mengelola pemrosesan transaksi dan penyimpanan data.
3	<i>Network</i>	Jaringan komputer yang menyambungkan kantor pusat dan kantor wilayah/cabang, serta jaringan komputer di internal kantor pusat dan kantor wilayah/cabang
4	<i>Security Management</i>	Layanan keamanan yang akan memberikan perlindungan pada infrastruktur dan aplikasi. Layanan ini mencakup layanan pada layer data, <i>host desktop/laptop</i> atau <i>server</i> , jaringan dan <i>monitoring</i> serta investigasi atas insiden keamanan yang terjadi.
5	<i>Infrastructure & Application Management</i>	Sistem yang digunakan untuk memantau kinerja aplikasi dan <i>database</i> , melalui <i>log</i> pada <i>server</i> , storage, perangkat jaringan dan softwarena.
6	<i>Application Services</i>	Layanan aplikasi yang bersifat transaksional atau analitikal, yang dapat diakses oleh <i>end user</i> menggunakan <i>laptop</i> , PC atau <i>mobile devices</i>
7	<i>Service management</i>	Pengelolaan layanan berdasarkan siklus IT <i>service management</i> , yang mencakup strategi dan perbaikan yang berkesinambungan
8	<i>Gateway Service</i>	Layanan atau aplikasi yang berfungsi sebagai ESB atau <i>Enterprise Service Bus</i> untuk mengintegrasikan aplikasi yang diletakkan pada Pusat Data (<i>Data Center/DC</i>) menggunakan metode <i>web service</i> .

No	Komponen	Deskripsi
9	<i>End user – End Point</i>	<i>Workstation</i> , berupa <i>desktop</i> atau <i>laptop</i> yang digunakan untuk mengakses berbagai layanan aplikasi dengan sistem dan saluran <i>unified communication</i> untuk mendukung kolaborasi

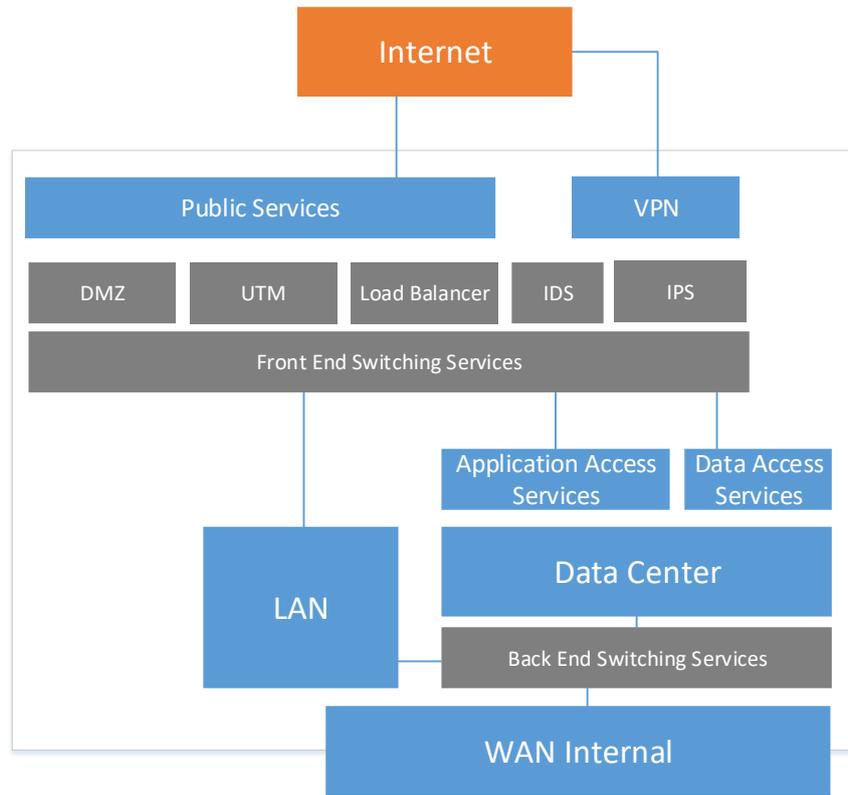
8.3.1. Target Model Konseptual Interkoneksi DC dan DRC Hardware



Gambar 8-8 Target Model Konseptual Interkoneksi DC dan DRC Hardware

Layanan DC dan DRC berfokus pada penyediaan sumber daya komputasi untuk keandalan aplikasi, dan redundansi data untuk ketersediaan data. Untuk ini digunakan koneksi WAN terpisah, dengan fokus pada manajemen pada back-end, dan layanan end-user pada front-end.

8.3.2. Model Konseptual Penguatan Backend Layer dari DC di Kantor Pusat

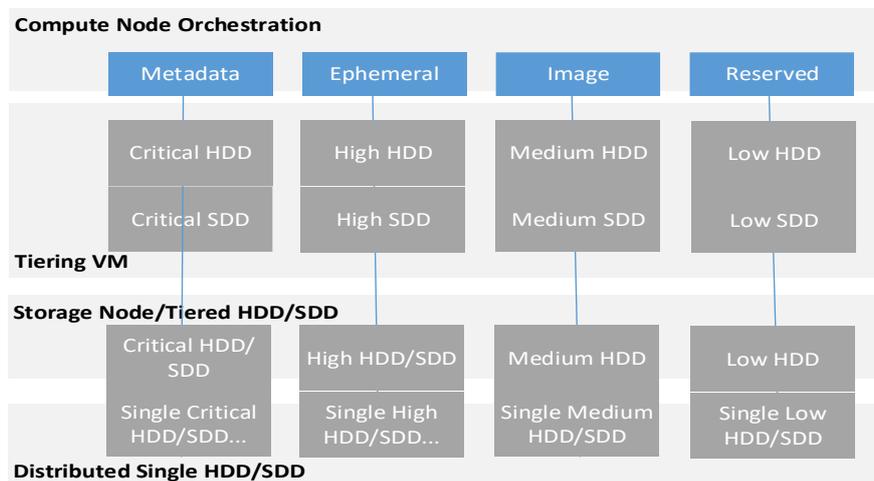


Gambar 8-9 Model Konseptual Penguatan Backend Layer DC

Kantor Pusat menyediakan layanan:

- Publik yang terpisah dengan layanan extranet terbatas dengan VPN.
- Lapisan *Front End* dioptimasi untuk kualitas dan keamanan layanan.
- Back End* untuk akses internal

8.3.3. Target Model Storage dan Aplikasi



Gambar 8-10 Target Model Storage dan Aplikasi

- Arsitektur perangkat keras model berorientasi pada penyediaan sumber daya komputasi dan *storage* yang bersifat

dinamik, *scalable* dan efisien. Dengan teknologi *Cloud orchestration*, IaaS, PaaS, dan *storage*

- b. Komponen hardware untuk compute dan storage akan memiliki perbedaan karakteristik: compute lebih ditekankan pada kinerja, sedangkan storage ditekankan pada aspek kapasitas. Tiering dimasukkan dalam compute, dengan pertimbangan kinerja, makin banyak computing akan makin besar I/O.

8.3.4. Peremajaan Perangkat

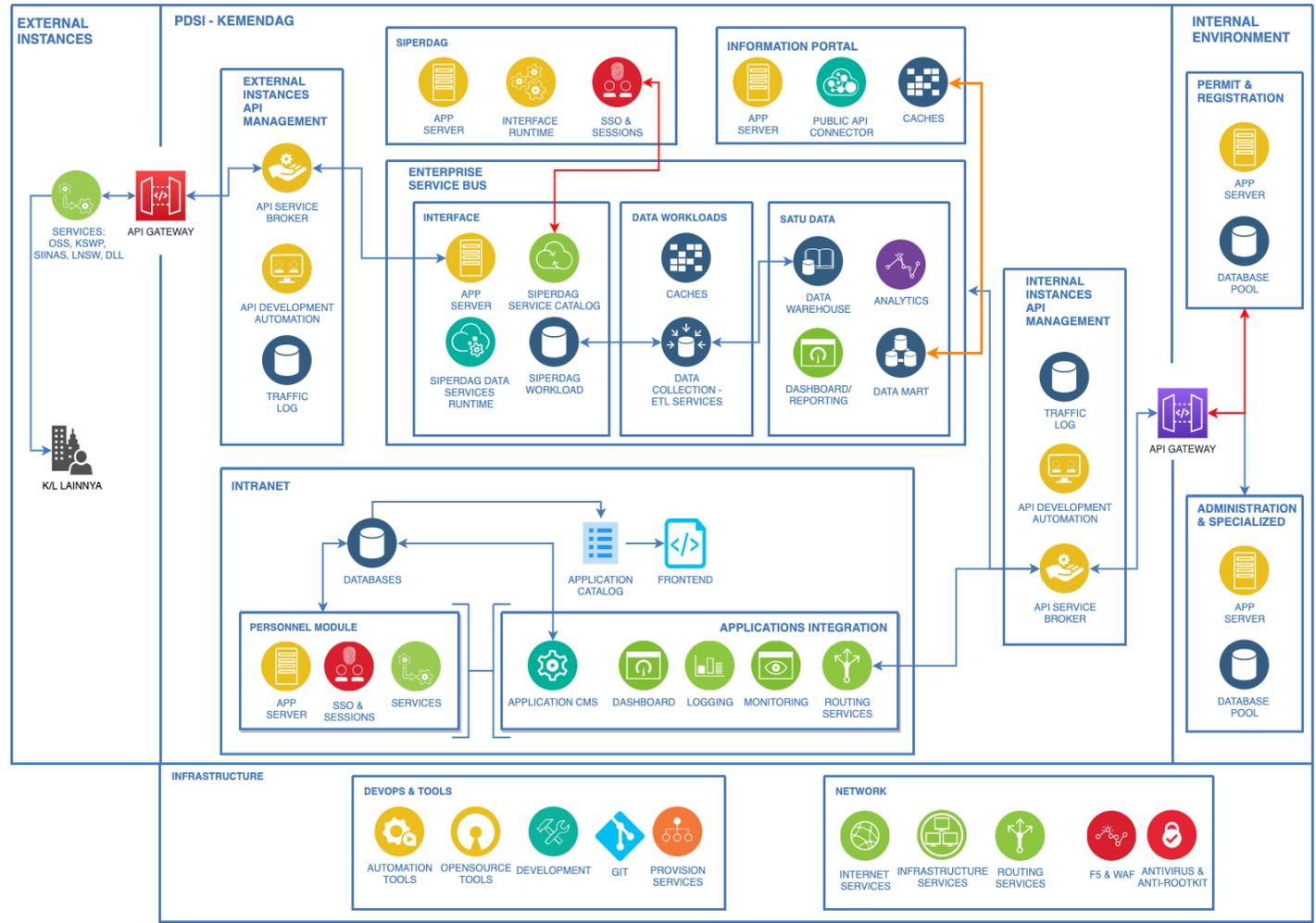
Berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa perangkat yang sudah memasuki usia *end of life* sehingga diperlukan pengadaan untuk peremajaan perangkat-perangkat tersebut. Perangkat-perangkat tersebut adalah:

- a. *Wireless Access Point*, *Wireless lan controller*, *3-unit Precision Air Conditioner* (PAC) dan beberapa *switch access* pada kantor pusat Kemendag
- b. *Wireless Access Point*, *core switch* dan *access switch* di direktorat metrologi, pusdiklat sawangan, standalitu ciracas, PPEI grogol
- c. Selain itu diperlukan penambahan perangkat berupa *switch access* di kantor pusat dan kantor cabang karena jumlah *port switch access* pada saat ini tidak memadai untuk menangani jumlah *user* yang ada.
- d. Terdapat rencana untuk penambahan *firewall* di *co-location* yang berada di jatinegara.
- e. Terdapat rencana pergantian sistem *email* yang semula menggunakan *exchange 2010* menuju *exchange 2016/2019*

8.3.5. Perencanaan Skematik Komunikasi Pusat Data

Berdasarkan hasil wawancara dan rencana dalam mengembangkan aplikasi penghubung aplikasi berupa *Gateway Service* yang saat ini telah mengintegrasikan antar aplikasi perizinan dan pendaftaran yang menjadi aplikasi layanan utama Kementerian Perdagangan dengan cara menyelenggarakan sistem penghubung layanan berupa teknologi *Enterprise Service Bus*. Selain menjadi persyaratan dalam penyelenggaraan SPBE sesuai dengan Arsitektur SPBE nasional, sistem penghubung layanan menjadi alat intergasi dan keterpaduan antara Aplikasi dan Layanan di lingkungan Kementerian Perdagangan atau antar layanan dengan pihak eksternal.

Adapun rancangan skematik peta integrasi yang memanfaatkan sistem penghubung layanan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 8-11 Rancangan Skematik Sistem Penghubung Layanan

8.4. Analisis Kesenjangan Arsitektur Infrastruktur

Tabel 8-3 Analisis Kesenjangan Arsitektur Infrastruktur

No	Komponen	Kondisi Eksisting	Analisa Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	<i>Data Center</i> dan DRC	Fasilitas <i>data center</i> sudah memadai	Fasilitas bangunan <i>data center</i> belum terstandarisasi	<i>Partially</i>	Standarisasi <i>building facilities</i> DC/DRC, misal <i>Tier 2</i> berdasarkan acuan industri DC
2.	<i>Server</i> dan <i>Storage</i>	Pemetaan kapasitas aplikasi dan data masih bersifat parsial	Belum terdapat pemetaan aplikasi dan data kritis pada arsitektur <i>server hyperconverged</i> berdasarkan karakter kecepatan	<i>Partially</i>	Pemetaan aplikasi dan data kritis pada arsitektur <i>server hyperconverged</i> berdasarkan karakter kecepatan processing dan <i>volume</i> data
3.	Jaringan	Infrastruktur jaringan sudah memadai	Belum terdapat layanan backup untuk sebagian aplikasi	<i>Largelly</i>	Penguatan koneksi antara DC dan DRC pada segmen <i>backend</i> , untuk mendukung layanan backup aplikasi dan <i>storage</i>
4.	<i>End User Infrastructure</i>	Update sistem operasi sudah bersifat <i>centralized update</i> Terdapat standarisasi <i>workstation</i> untuk EUI	Sudah terdapat acuan spesifikasi untuk <i>hardware</i> dan <i>software</i> EUI	<i>Fully</i>	-

No	Komponen	Kondisi Eksisting	Analisa Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
5.	Manajemen Layanan Infrastruktur	Sebagian manajemen layanan masih dilakukan secara manual	Belum menggunakan manajemen layanan secara optimal	<i>Partially</i>	Distribusi layanan IT <i>support</i> untuk seluruh <i>end user</i> .
6.	Sistem Penghubung Layanan (SPL)	Seluruh sistem perizinan di Kementerian Perdagangan telah terintegrasi, baik secara internal dan eksternal dengan OSS Kemennes (BKPM) dan LNSW. Selain itu, Sebagian aplikasi layanan administrasi internal telah terintegrasi dengan metode <i>Single Sign-On</i> (SSO).	Belum menggunakan aplikasi <i>Enterprise Service Bus</i> (ESB) yang memiliki fungsi khusus sebagai pengintegrasi antar aplikasi dan data	<i>Partially</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan aplikasi dan data strategis/kritis untuk segera dilakukan integrasi - Menyelenggarakan sistem ESB yang sesuai untuk digunakan sebagai SPL dalam menghadirkan layanan public dan administrasi sesuai amanat SPBE

9. Arsitektur Keamanan

9.1. Arsitektur Keamanan Saat Ini

Model arsitektur keamanan pada infrastruktur dibahas berdasarkan topologi jaringan yang diperoleh. Setelah pembahasan keamanan infrastruktur, dilanjutkan dengan pembahasan elemen arsitektur keamanan yang lain, yaitu dalam kategori informasi, misalnya mencakup keamanan aplikasi, keamanan *database*, akses layanan web *service*.

Kategori berikutnya adalah penguatan di sisi infrastruktur, misalnya aspek akses yaitu proteksi dari kebocoran data, pengelolaan akses untuk user pada sumber daya, proteksi oleh antimalware, proteksi jaringan berupa *threat management*. Aspek *firewall*, IDS dan IPS termasuk pada *threat management* pada penguatan infrastruktur ini.

Dari sisi pengelolaan dan operasional aspek keamanan, mencakup pengelolaan identitas pengakses. Kemudian potensi maintenance, misalnya jika terdapat insiden keamanan yang berlanjut pada pengelolaan *event* dan insiden tersebut. Pada tahap lanjut, biasanya berupa pengelolaan dan *recovery* pasca terjadinya insiden keamanan.

Kategori Pengamanan Akses

Berdasarkan analisa topologi, dari sisi kategori akses, model yang sudah diimplementasikan ini memiliki kategori:

- a. Akses terbuka, yaitu akses publik
- b. Akses terbatas, yaitu akses untuk layanan *business-to-business*
- c. Akses privat, yaitu akses untuk internal organisasi

Pemisahan kategori itu sudah tersegmentasi, dengan proteksi di level jaringan secara memadai.

Akses privat, berupa LAN dan *Server (Data Center)* yang terpisah secara segmentasi dan sistem proteksi dari akses publik.

Akses publik dikendalikan melalui *Internet Edge*, dan akses terbatas dikendalikan melalui WAN Edge.

Untuk penambahan tingkat keamanan, pada *Core Layer* terdapat *Network Edge Layer* yang mengendalikan akses antara segmen pembatas akses publik, akses *private* dan akses terbatas.

Terdapat segmen *Demilitarized Zone (DMZ)* untuk memproteksi *server-server* virtual.

Perangkat Keamanan

- a. *Firewall* berupa *New Generation Firewall*, yang memproteksi akses dan koneksi dari LAN ke *Server*, dan juga ke segmen pembatas.
- b. *Website Application Firewall* untuk memproteksi aplikasi berbasis web untuk layanan publik dan berada pada DMZ.
- c. Perangkat jaringan menggunakan VPN.
- d. *Server* antivirus

Fitur-fitur yang terdapat pada perangkat tersebut antara lain:

- a. Pendeteksi penyusupan berupa *Intrusion Detection System* (IDS)
- b. Pencegahan penyusupan yaitu *Intrusion Prevention System* (IPS)

Fitur pengendalian pembaharuan antivirus diimplementasikan secara tersentralisasi menjadi suatu layanan bagi pengguna-penggunanya.

Resume Keamanan Infrastruktur berdasarkan Kategorisasi

Resume pembahasan keamanan infrastruktur ini disusun berdasarkan asesmen berupa wawancara pada narasumber. Selain itu juga berdasarkan dokumen yang melengkapi asesmen tersebut. Rincian kategorisasi langsung diterapkan pada tabel, dengan pengelompokan seabgai berikut:

- a. Elemen keamanan informasi, mencakup keamanan aplikasi, keamanan *database*, keamanan layanan teknologi web *services*.
- b. Elemen penguatan infrastruktur keamanan, mencakup pengelolaan akses, pengelolaan threat, pengelolaan *antimalware* dan pengelolaan terhadap potensi kebocoran data.
- c. Elemen pengelolaan operasional dan perawatan keamanan, mencakup pengelolaan identitas, pengelolaan insiden dan *recovery* pasca terjadinya insiden.

Tabel 9-1 Resume Keamanan Infrastruktur berdasarkan Kategorisasi

No	Komponen	Deskripsi
1	<i>Application Security</i>	<i>Vulnerability assessment</i> untuk aplikasi sudah pernah dilakukan namun terbatas pada aplikasi-aplikasi yang ada di unit kerja PDSI saja. <i>Secure coding</i> secara khusus belum diterapkan, namun akses aplikasi sudah diproteksi menggunakan SSL Sebagian sistem pengamanan aplikasi bersifat otentikasi lokal sesuai OS atau aplikasi, ataupun berdasarkan layanan <i>Active Directory</i> Terdapat <i>Web Application Firewall</i> (WAF) yang memproteksi aplikasi web
2	<i>Database Security</i>	Sebagian sistem pengamanan <i>database</i> bersifat otentikasi lokal sesuai OS atau RDBMSnya, ataupun berdasarkan layanan <i>Active Directory</i> Sebagian aplikasi masih mengakses <i>database</i> menggunakan <i>high privileged user</i>
3	<i>Service Oriented Architecture (SOA) Security</i>	Belum terdapat implementasi penggunaan <i>Service Oriented Architecture</i> secara khusus

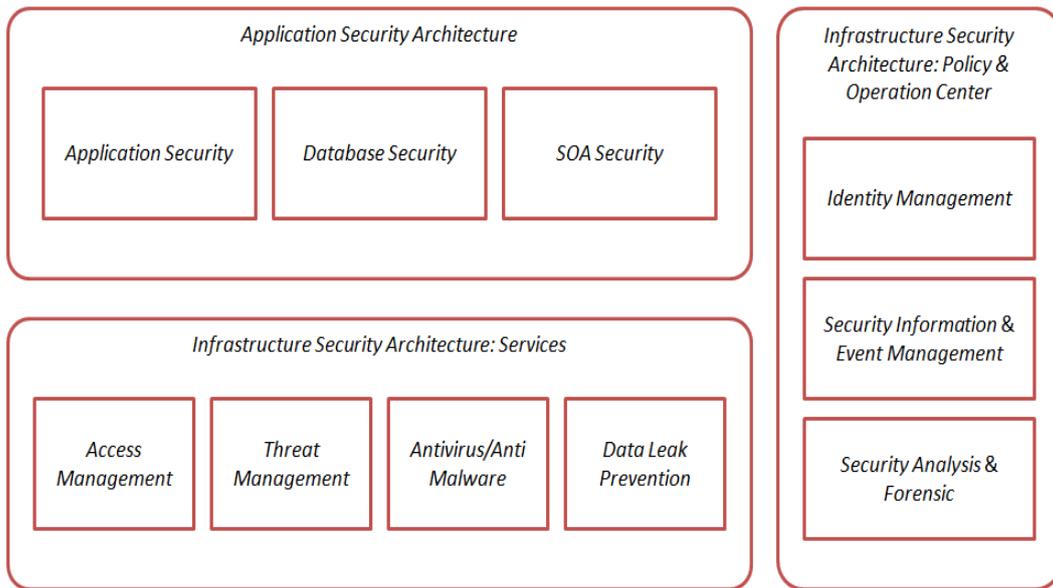
No	Komponen	Deskripsi
4	<i>Access management</i>	Terdapat SSO untuk <i>End-User</i> dalam mengakses Intranet dengan pengaturan akses untuk bagian keuangan, kepegawaian, kearsipan MAC <i>address</i> indentifier untuk koneksi jaringan <i>wireless</i>
5	<i>Threat Management</i>	Sudah terdapat IPS untuk memantau infrastruktur Terdapat perangkat-perangkat keamanan seperti <i>firewall</i> dan <i>web application firewall</i> dengan fungsi dasar yang memadai Terdapat kebijakan mengatur jangka waktu sesi <i>login</i> SSO <i>Vulnerability assessment</i> sudah pernah dilakukan namun terbatas pada aplikasi-aplikasi yang ada di unit kerja PDSI saja. VA menggunakan <i>tools greenbone</i> Sudah terdapat <i>tools</i> proteksi email seperti spam filter dan IPS mail menggunakan <i>cisco email security appliance</i> .
6	<i>Antivirus</i>	Sudah terdapat proteksi <i>workstation</i> , dengan dukungan <i>server anti-virus</i> dan <i>anti-malware</i> , menggunakan AVG
7	<i>Data Leak Prevention</i>	Belum terdapat <i>data leak prevention</i> dari <i>end point</i> , misalnya masih terdapat peluang menggunakan perangkat pribadi untuk mengakses data-data pekerjaan kantor. Perangkat masih dapat terhubung ke Jaringan LAN melalui <i>cable</i> tanpa harus mendaftarkan <i>MAC address</i>
8	<i>Identity Management</i>	Implementasi <i>identity management</i> berupa <i>layanan Active Directory</i> Sebagian akses intranet sudah menggunakan SSO Saat ini <i>layanan identity management</i> belum terintegrasi dengan sistem SDM
9	<i>Security Information & Event Management</i>	Belum terdapat <i>event management</i> untuk mengelola potensi insiden keamanan.
10	<i>Security Analysis & Forensic</i>	Belum terdapat prosedur analisis pencarian bukti-bukti forensik pasca insiden keamanan secara terstruktur

9.2. Arsitektur Keamanan Target

Arsitektur keamanan infrastruktur target ini mencakup kategori:

- a. Keamanan informasi
- b. Keamanan infrastruktur

c. Aspek pengelolaan, operasional dan *recovery* keamanan
Aspek dan kategori tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram model



Gambar 9-1 Diagram Model Arsitektur Keamanan

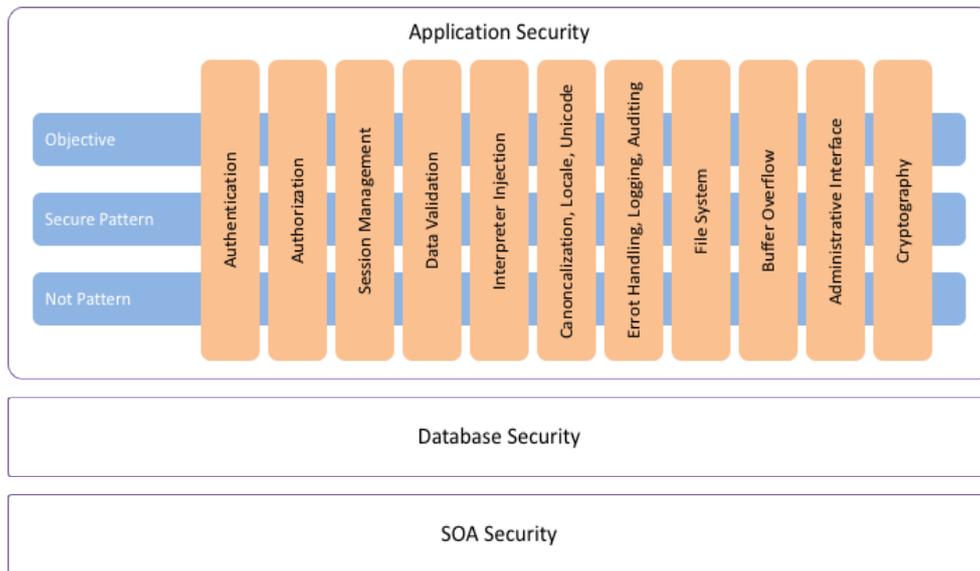
Diagram model ini mencerminkan kelengkapan elemen setiap kategori, dan menggambarkan keterhubungan antara fungsi-fungsi setiap kategori. Dalam bentuk integratifnya, keterhubungan ini menyediakan acuan arsitektur keamanan yang menjadi target suatu organisasi.

Tabel 9-2 Elemen Arsitektur Target Keamanan Informasi

No	Komponen	Deskripsi
1	Application Security	Kelengkapan dan panduan <i>pattern</i> dan <i>non-pattern</i> terkait keamanan aplikasi berbasis jaringan/web, misalnya: <i>authentication, authorization, session management, input validation, error handling</i>
2	Database Security	<i>Pattern</i> umum untuk memitigasi resiko generik keamanan <i>database</i> , misalnya mitigasi <i>bypass</i> akses <i>database</i> , <i>database auditing</i> dan <i>compliance monitoring, database environment protection</i>
3	SOA Security	<i>Pattern</i> generik terkait layanan berbasis teknologi <i>web services</i> , misalnya pengelolaan otentikasi dan identitas antar <i>web service</i> , kontrol akses, pemisahan keamanan sebagai komponen teknologi dan <i>services</i>

Sedangkan elemen pada aspek penguatan keamanan infrastruktur memiliki empat elemen pokok.

9.2.1. Target Model Konseptual Keamanan Domain Informasi



Gambar 9-2 Target Model Konseptual Keamanan Domain Informasi

Tabel 9-3 Deskripsi Model Konseptual Keamanan Domain Informasi

No	Komponen	Deskripsi
1	<i>Application Security</i>	Mengadopsi OWASP (<i>Open Web Application Security Project</i>) terkait: <i>Authentication, Authorization, Session Management, Data validation, Error Handling, Logging, Auditing</i>
2	<i>Database Security</i>	Pattern yang ditujukan untuk memitigasi risiko umum terkait dengan keamanan <i>database</i> berikut: Memitigasi Bypass atas <i>database</i> , memitigasi bypass atas aplikasi dengan tidak menggunakan <i>high privileged user</i>

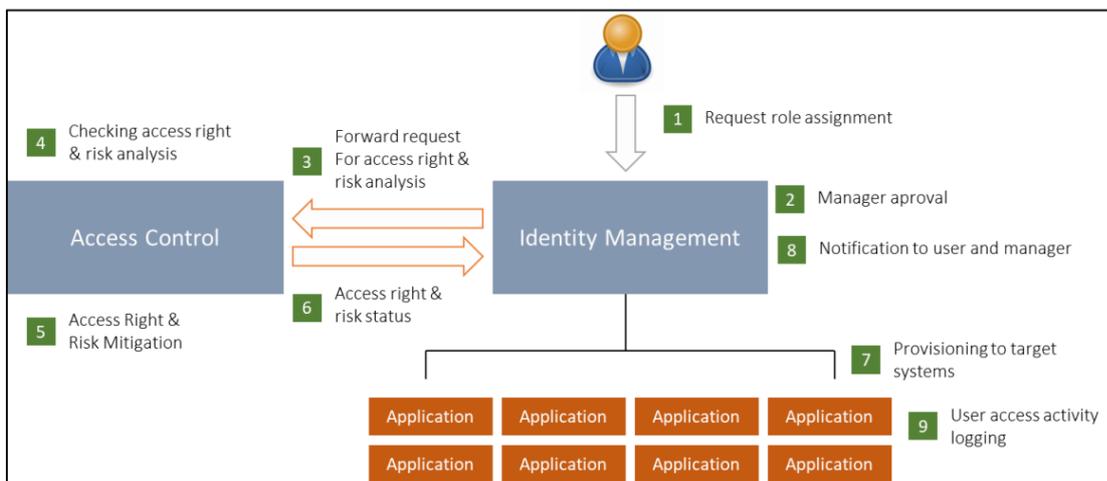
Tabel 9-4 Elemen Arsitektur Target Keamanan Informasi

No	Komponen	Deskripsi
1	<i>Access Management</i>	Merupakan kontrol yang diberikan kepada setiap user untuk dapat melihat, menggunakan, mengubah atau menghapus aplikasi atau sumberdaya lainnya, atau mengakses sistem atau fungsionalitas aplikasi dalam jaringan komputer. Kontrol akses mencakup regulasi dan batasan atas akses pengguna terhadap informasi dan fungsionalitas layanan perusahaan. Layanan ini akan terintegrasi dengan <i>Identity Management</i> .

No	Komponen	Deskripsi
2	<i>Threat Management</i>	Layanan ini ditujukan untuk memberikan kemampuan pencegahan dan proteksi dini terhadap berbagai <i>threat</i> yang masuk ke dalam lingkungan jaringan. Sebagai pertahanan pertama menghadapi lingkungan di luar jaringan internal perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan layanan ini dapat diimplementasikan akuisisi produk dengan <i>signature</i> yang selalu terjaga updatenya atau memiliki <i>rule intelligent</i> untuk mendeteksi <i>threat</i> baru
3	Antimalware	Layanan <i>antivirus/malware management</i> ditujukan untuk merealisasikan perlindungan aset informasi yang tersimpan baik di server maupun <i>desktop/laptop</i> pengguna dan perangkat <i>mobile</i> dari potensi ancaman <i>software</i> yang berbahaya
4	Data <i>Leakage Prevention</i>	Data <i>Leak Prevention</i> ditujukan untuk melindungi data-data perusahaan sensitif yang ada di <i>storage (file server)</i> , ketika transit (ke internet, via <i>email, web, instant messaging, FTP</i>) dan saat di <i>end point</i> (misalnya terhadap duplikasi <i>mobile storage</i>), merujuk kepada kebijakan keamanan informasi organisasi.

9.2.2. Target Model Keamanan Informasi

Access Management

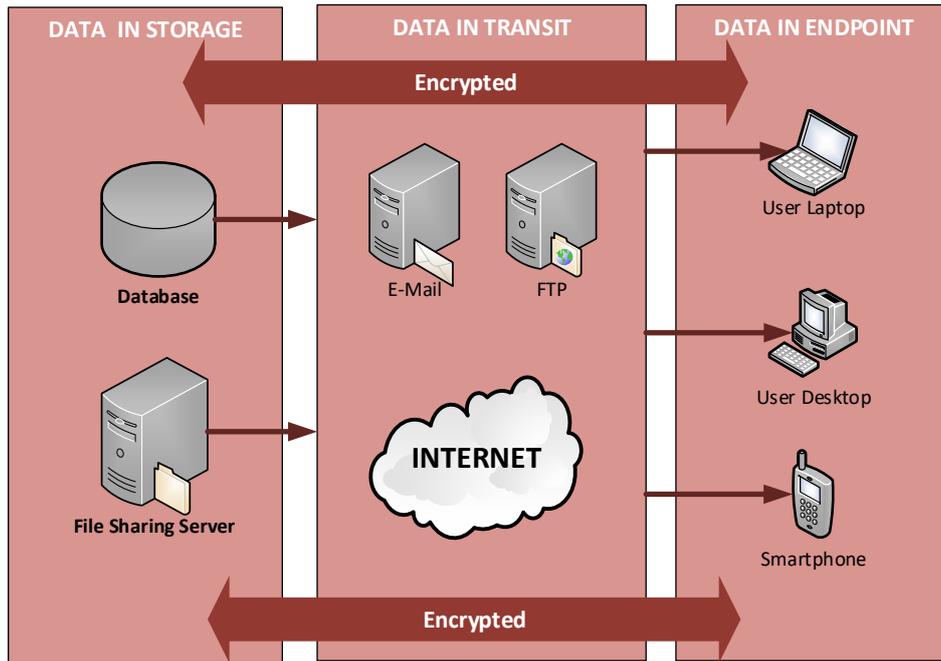


Gambar 9-3 Access Management

Merupakan kontrol yang diberikan kepada setiap user untuk dapat melihat, menggunakan, mengubah atau menghapus aplikasi atau Sumber Daya lainnya, atau mengakses sistem atau

fungsionalitas aplikasi dalam jaringan komputer. Kontrol akses mencakup regulasi dan batasan atas akses pengguna terhadap informasi dan fungsionalitas layanan perusahaan. Layanan ini akan terintegrasi dengan *Identity Management*.

Data Leak Prevention



Gambar 9-4 Data Leak Prevention

Data Leak Prevention ditujukan untuk melindungi data-data perusahaan sensitif yang ada di *storage (file server)*, ketika transit (ke internet, via email, web, *instant messaging*, FTP) dan saat di *endpoint* (misalnya terhadap duplikasi *mobile storage*), merujuk kepada kebijakan keamanan informasi perusahaan.

Sedangkan elemen pada aspek pengelolaan operasional, perawatan dan *recovery* keamanan infrastruktur memiliki tiga elemen pokok.

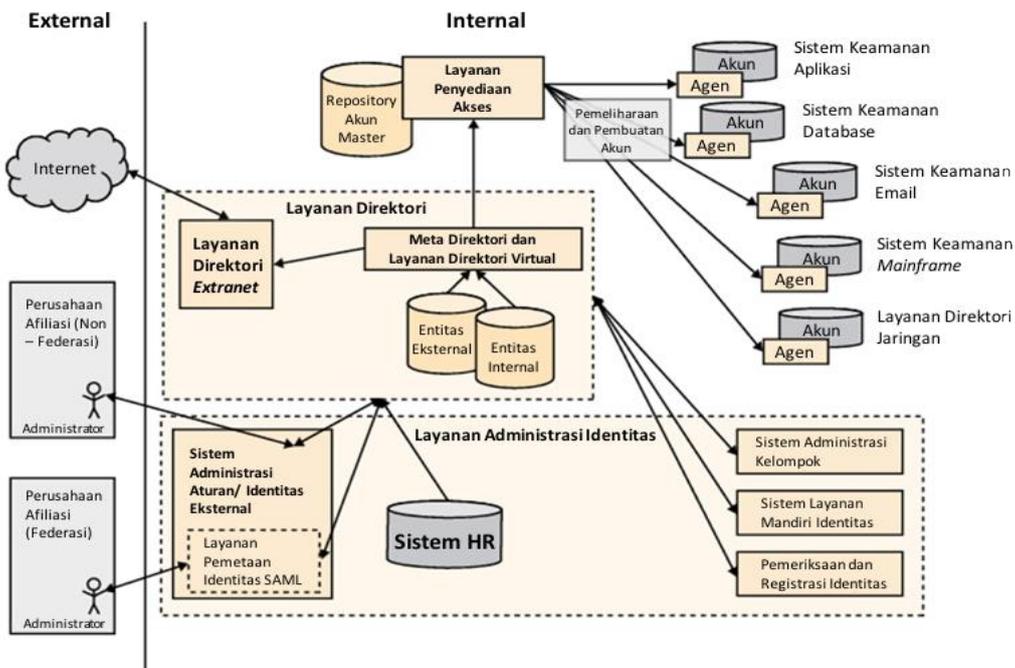
Tabel 9-5 Elemen Arsitektur Target Keamanan Informasi

No	Komponen	Deskripsi
1	<i>Identity Management</i>	<i>Identity Management Service</i> memungkinkan untuk pengelolaan dengan mudah yang biasanya dilakukan secara terpusat atas seluruh identitas pada sumberdaya atau aset TI.
2	<i>Security Information & Event Management</i>	SIEM melakukan <i>logging</i> atas seluruh informasi dan aktivitas yang terjadi di dalam infrastruktur, untuk kemudian diolah dan dikorelasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi

No	Komponen	Deskripsi
		pengelola terkait status terkini keamanan informasi.
3	<i>Security Analysis & Forensic</i>	Layanan ini ditujukan untuk memberikan kemampuan untuk melakukan analisa lebih mendalam atas insiden yang telah terjadi, kemampuan <i>recovery</i> , dan pencarian bukti digital. Misalnya log yang telah dikelola di SIEM, untuk kepentingan forensik atas kasus atau insiden keamanan yang sudah terjadi.

9.2.3. Target Model Domain Kebijakan dan Operasional

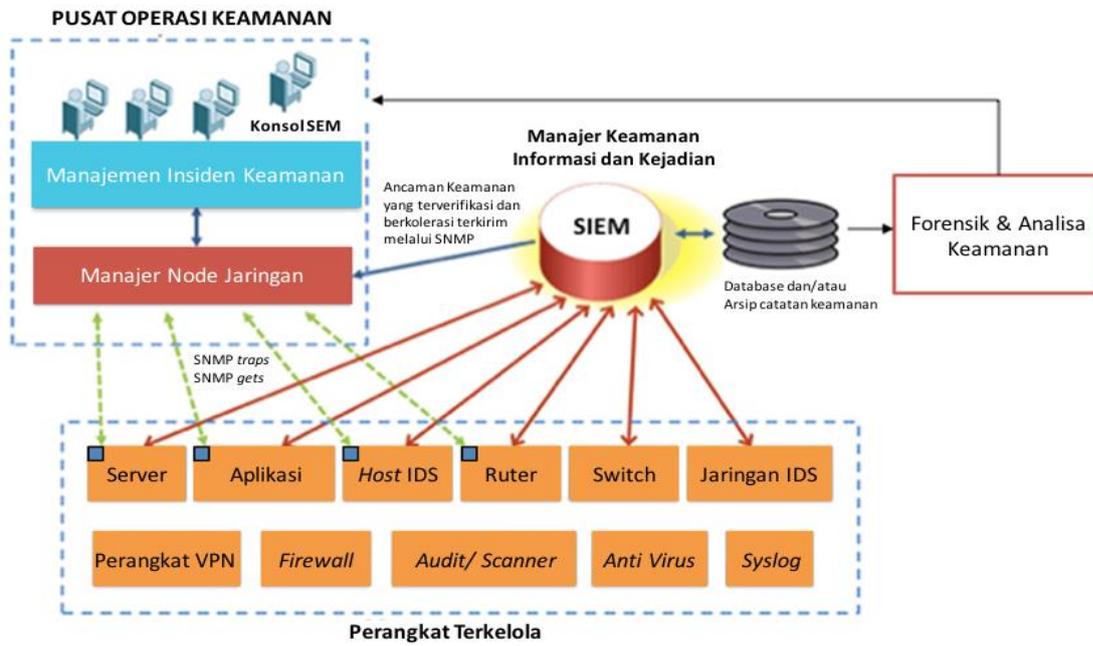
Identity Management



Gambar 9-5 Identity Management

Implementasi *Identity Management Service* memungkinkan untuk pengelolaan secara terpusat seluruh identitas pengguna, merujuk pada posisinya di Sistem Informasi SDM. Informasi tentang pengguna di sistem SDM tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan akses yang diberikan kepada sebuah sumber daya atau aset TI

Security information & event management



Gambar 9-6 Security Information & Event Management

Implementasi SIEM yang digunakan untuk melakukan *logging* atas seluruh informasi dan aktivitas yang terjadi di dalam infrastruktur, untuk kemudian diolah dan dikorelasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi pengelola terkait status terkini keamanan informasi.

9.3. Analisis Kesenjangan Arsitektur Keamanan

Tabel 9-6 Analisis Kesenjangan Arsitektur Keamanan

No	Komponen	Kondisi Eksisting	Analisa Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	<i>Application & database security</i>	Keamanan aplikasi bergantung pada <i>environment</i> bawaan sudah pernah melakukan <i>vulnerability test</i> untuk aplikasi internal	Sudah terdapat assesment untuk sebagian besar aplikasi	<i>Largelly</i>	Implementasi <i>framework</i> keamanan aplikasi untuk menyediakan kontrol yang sesuai berdasar threat dan vulnerability untuk menekan potensi resiko keamanan
		Keamanan <i>Database</i> masih bersifat parsial	Sudah terdapat assesment keamanan untuk kontrol akses <i>database</i>	<i>Largelly</i>	Implementasi <i>framework</i> menguatkan keamanan akses <i>database</i> , misal kontrol berupa <i>access control hardening</i> pada RDBMS untuk mengatasi potensi kerentanan <i>root privileges</i> .
2	<i>Access Management</i>	Seluruh aplikasi internal sudah menggunakan <i>Network Access Control</i> dengan mengimplementasikan SSO	Aplikasi internal sudah mengimplementasikan SSO dan terintegrasi dengan sistem kepegawaian	<i>Fully</i>	-

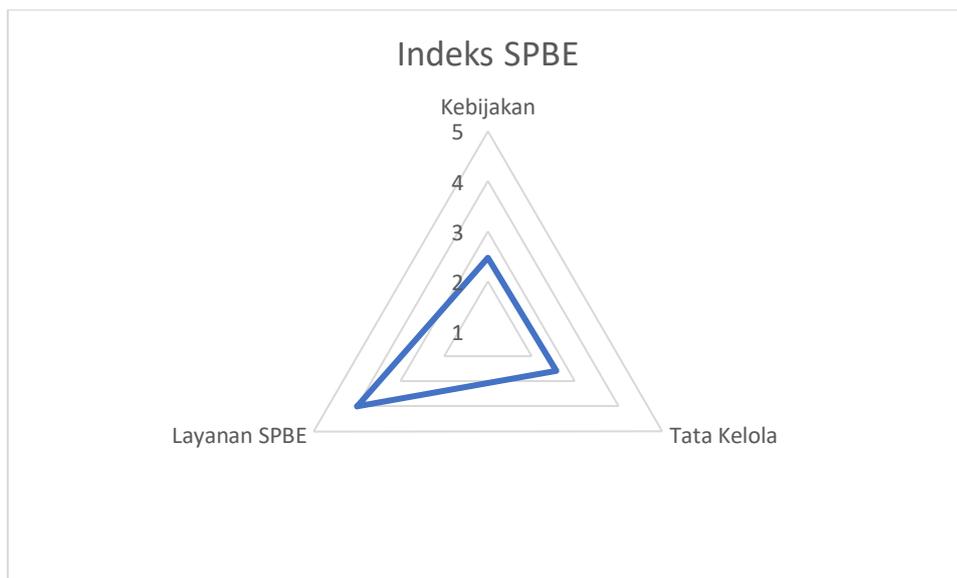
No	Komponen	Kondisi Eksisting	Analisa Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
		<i>Access management</i> sudah terintegrasi dengan <i>identity management</i>			
3	<i>Threat Management</i>	Sudah terdapat perangkat proteksi keamanan	Perangkat keamanan sudah memadai	<i>Largelly</i>	Optimalisasi sistem threat management pada aspek akurasi dan kecepatan sesuai dengan kategori kritikalitas aplikasi
4	<i>Anti-Malware</i>	Sudah mengimplementasikan aplikasi untuk proteksi <i>malware</i> namun masih parsial terbatas pada perangkat <i>server</i>	sudah memiliki <i>centralized antivirus update</i>	<i>Largelly</i>	Penyediaan proteksi untuk <i>workstation</i> dari potensi ancaman <i>malware</i> yang terkendali secara terpusat
5	<i>Data Leakage Prevention</i>	belum terdapat sistem maupun kebijakan untuk proteksi kebocoran data	Masih terdapat potensi penyimpanan data pada perangkat pribadi	<i>None</i>	Penyediaan layanan dan sistem untuk memproteksi pencegahan kebocoran data, misal penguatan enkripsi pada <i>storage</i> dan kendali pada <i>session management user</i>
6	<i>Identity Management</i>	<i>Identity management</i> sudah terintegrasi dengan sistem kepegawaian	Sudah terdapat integrasi sistem identity management dengan sistem kepegawaian untuk pemberian akses	<i>Fully</i>	-

No	Komponen	Kondisi Eksisting	Analisa Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
7	<i>Security Incident & Event Management</i>	Manajemen untuk insiden keamanan dilakukan secara parsial.	Belum memiliki sistem dan prosedur resmi untuk penanganan insiden keamanan	<i>Partially</i>	Kajian dan desain sistem SIEM dengan fitur yang memadai dengan dasar <i>framework</i> untuk analisa dan desain yang sesuai.
8	<i>Security Analysis & Forensics</i>	Belum terdapat prosedur resmi untuk penanganan pasca insiden kamanan secara terstruktur	Belum memiliki sistem dan prosedur resmi untuk penanganan pasca insiden keamanan	<i>None</i>	Kajian dan desain sistem penanganan pasca insiden

10. Tata Kelola TIK Kemendag

10.1. Kondisi Tata Kelola TIK Kemendag Saat Ini

10.1.1. Penilaian Indeks Pada Instansi



Gambar 10-1 Radar Indeks SPBE

Tabel 10-1 Nilai Indeks SPBE

Indeks SPBE	3.34
Domain	Indeks
Kebijakan	2.47
Tata Kelola	2.57
Layanan SPBE	4.00

Secara garis besar, penilaian Indeks SPBE dibagi menjadi tiga domain utama, yaitu domain Kebijakan, domain Tata Kelola, dan domain Layanan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10-1 dan Tabel 10-1. Ketiga domain ini dijabarkan pada bagian selanjutnya.

Berdasarkan dari predikat yang disediakan oleh KemenPANRB, berikut adalah kelompok indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE:

Tabel 10-2 Predikat Pelaksanaan SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	2,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Tabel 10-3 Nilai Indeks SBPE Domain Kebijakan

Domain Kebijakan SPBE	2.47
Aspek	Indeks
Kebijakan Tata Kelola SPBE	2.29
Kebijakan Layanan SPBE	2.60

Tabel 10-3 menjelaskan tentang domain Kebijakan sebagai salah satu domain dari SPBE. Domain ini menilai tentang kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan atau mengelola indikator terkait.

Domain kebijakan terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan layanan. Aspek Kebijakan Tata Kelola menilai tentang pengelolaan dan manajemen TI. Sementara Aspek Kebijakan Layanan mengatur tentang layanan-layanan yang dimiliki oleh masing-masing Instansi. Layanan ini selanjutnya akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.

Tabel 10-4 Nilai Indeks SPBE Domain Tata Kelola

Domain Tata Kelola	2.57
Aspek	Indeks
Kelembagaan	2.00
Strategi dan Perencanaan	2.00
TIK	3.33

Pada tabel 10-4 merupakan penjabaran dari Domain Tata Kelola yang terdiri atas tiga aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan, dan aspek TIK.

Aspek Kelembagaan menilai tentang pelaksanaan Tim Pengarah TIK dan Proses Bisnis yang ada pada Instansi terkait. Sementara, Aspek Strategi dan Perencanaan terbagi menjadi indikator Rencana Induk TIK dan Anggaran untuk TIK. Sedangkan Aspek TIK terdiri atas pengelolaan Pusat Data, penggunaan dan pengelolaan Integrasi Aplikasi, dan Aplikasi Umum yang diperuntukkan kepada masyarakat umum/pengguna layanan Instansi Pusat terkait.

Tabel 10-5 Nilai Indeks SPBE Domain Layanan

Domain Layanan SPBE	4.00
Aspek	Indeks
Administrasi Pemerintahan	4.00
Pelayanan Publik	4.00

Tabel 10-5 merupakan penjelasan mengenai Domain Layanan pada SPBE, dimana pada domain layanan SPBE ini layanan terbagi menjadi dua jenis layanan, yaitu Layanan Administrasi Pemerintah dan Layanan Publik.

10.1.2. Kekuatan dan Kelemahan

1. Kebijakan Tata kelola

a. Kekuatan

Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Komite Pengarah TIK yang mendukung penerapan RISPBE pada semua unit kerja di Instansi Pusat telah ditetapkan melalui Kepmendag Nomor 798 Tahun 2018. Kebijakan lain yang sudah dimiliki adalah tentang proses bisnis terintegrasi, perencanaan dan penganggaran TIK, pengoperasian pusat data, keamanan informasi, penyelenggaraan TIK di Kemendag, standar perangkat TIK, integrasi sistem, dan penggunaan aplikasi secara berbagi pakai yang bahkan sudah dievaluasi dan ditingkatkan secara berkala.

b. Kelemahan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak memiliki kelemahan yang signifikan terkait kebijakan tata kelola, namun masih memungkinkan adanya pengembangan kebijakan internal terkait Tim Pengarah TIK, Strategi Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, anggaran dan belanja TIK, dan pengoperasian pusat data. Sehingga dalam kebijakan-kebijakan tersebut terdapat pernyataan yang jelas yang menyatakan bahwa akan melakukan integrasi dengan SPBE yang dikelola oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang lain.

2. Kebijakan Layanan

a. Kekuatan

Kemendag telah memiliki kebijakan internal yang mengatur tentang layanan publik instansi pemerintah yang sudah dipantau dan dievaluasi secara berkala dan

disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, Kemendag juga memiliki kebijakan internal terkait penggunaan naskah dinas elektronik, manajemen kepegawaian, manajemen perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan, manajemen kinerja, pengadaan barang dan jasa, pengaduan publik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan *whistle-blowing system* (WBS).

- b. Kelemahan
Tidak terdapat kelemahan yang signifikan mengenai aspek Layanan, namun, terdapat peluang untuk peningkatan terhadap aspek layanan dengan terus dilakukannya review dan perbaikan secara berkala.
3. Kelembagaan
 - a. Kekuatan
Secara kelembagaan Kemendag sudah memiliki kelembagaan yang baik. Kemendag sudah memiliki Tim Pengarah TIK yang telah menjalankan tugas dan fungsinya secara keseluruhan meskipun kinerja Tim Pengarah TIK belum dipantau dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, Kemendag telah menerapkan proses bisnisnya secara terintegrasi dan dituangkan ke dalam dokumen yang terstandarkan.
 - b. Kelemahan
Tidak ada kelemahan yang signifikan yang dimiliki oleh Kemendag terkait aspek kelembagaan. Namun, masih terdapat pengembangan yang dapat dilakukan untuk Tim Pengarah SPBE dan proses bisnis yang terintegrasi untuk dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
4. Strategi dan Perencanaan
 - a. Kekuatan
Kemendag telah memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang pada rencana kerja tahunan, sudah terintegrasi dan dapat dikendalikan oleh unit pengelola TIK, serta sudah dievaluasi dan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
 - b. Kelemahan
Kelemahan yang dimiliki oleh Kemendag terkait aspek strategi dan perencanaan adalah dokumen RISPBE yang masih dalam bentuk konsep.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - a. Kekuatan
Kemendag telah memiliki pusat data yang dijalankan dan dikelola sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan,

dikendalikan secara terpusat, dievaluasi secara berkala, dan ditingkatkan sesuai dengan hasil evaluasi. Terlebih Pusat data yang dimiliki oleh Kemendag sudah memiliki sertifikasi ISO 27001 dan ISO 9001. Selain itu, Kemendag juga sudah menggunakan aplikasi umum berbagi pakai secara keseluruhan, dievaluasi secara berkala, dan ditingkatkan sesuai hasil evaluasi.

b. Kelemahan

Tidak terdapat kelemahan yang signifikan mengenai aspek teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh Kemendag. Namun, terdapat peluang untuk peningkatan terhadap aspek integrasi sistem aplikasi. Integrasi sistem aplikasi baiknya dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif, dan dievaluasi secara berkala dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut digunakan untuk meningkatkan integrasi sistem aplikasi.

6. Administrasi Pemerintahan

a. Kekuatan

Kemendag juga sudah menggunakan sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) untuk mendukung persuratan internal secara elektronik dan sudah menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG) untuk mendukung manajemen kepegawaian. Kedua layanan tersebut bahkan sudah berkolaborasi dengan aplikasi lain dan dievaluasi serta ditingkatkan secara berkala.

b. Kelemahan

Peluang peningkatan yang dapat dilakukan oleh Kemendag untuk layanan administrasi pemerintahan adalah untuk melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap layanan manajemen perencanaan, manajemen penganggaran, manajemen keuangan, manajemen kinerja, dan pengadaan barang dan jasa.

7. Pelayanan Publik

a. Kekuatan

Kemendag telah memiliki sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang sudah dikolaborasikan dengan JDIH Nasional dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, ketiga layanan yang didaftarkan untuk penilaian Indeks SPBE, yaitu layanan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri (SIPT), layanan LPK Online, dan layanan UPTP-IV. Ketiga layanan yang dimiliki oleh Kemendag ini sudah dalam tahap optimalisasi.

b. Kelemahan

Layanan whistle-blowing system yang dimiliki oleh Kemendag masih bersifat interaktif, belum pada tahap transaksi. Selain itu layanan pengaduan publik yang dimiliki oleh Kemendag belum dapat melakukan kolaborasi dengan sistem layanan yang lain.

10.2. Target Tata Kelola TIK Kemendag

10.2.1. Arahan Strategis TI

Arahan strategis memberikan panduan tentang penguatan Tata kelola TI ke depan, sebagai dasar untuk menyusun rancangan Tata Kelola TI ke depan.

Tabel 10-6 Arahan Strategis TI

No	Arahan Strategis	Deskripsi
1.	Kepatuhan terhadap regulasi dan praktik terbaik	<p>Kerangka kerja yang diadopsi memperhatikan persyaratan kepatuhan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang No. 11 tahun 2008 yang direvisi menjadi No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian dan netral teknologi.b. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon untuk mendapatkan informasi publik.c. PP No. 61 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan peraturan pelaksanaan terkait pertimbangan tertulis kebijakan badan publik, pengklasifikasian informasi, jangka waktu pengecualian, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, serta tata cara ganti rugi badan publik.d. PP No. 82 tahun 2012 yang direvisi menjadi No. 17 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang sistem elektronik untuk pelayanan

No	Arahan Strategis	Deskripsi
		<p>publik maupun non-pelayanan publik, sanksi administratif, tanggung jawab pidana dan perdata penyelenggara, sertifikasi, kontrak dan tanda tangan elektronik, serta penawaran produk melalui sistem elektronik.</p> <p>e. Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur tentang Kebijakan yang mendukung penyelenggaraan TIK, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit TIK, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, dan pemantauan dan evaluasi SPBE.</p> <p>f. Beberapa kerangka kerja atau standar terkait Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diadopsi di berbagai lembaga negara atau pemerintahan di Indonesia, khususnya COBIT, ITIL, ISO 38500, ISO 20000 dan ISO 27000.</p> <p>Memperhatikan peraturan terkait Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dirilis oleh kepala sektor terkait seperti:</p> <p>a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p> <p>c. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 5 tahun 2018 tentang instrumen evaluasi internal indeks maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p>
2.	Kerangka kerja yang berorientasi kepada layanan berkualitas	<p>Merujuk kepada visi dan misi TI ke depan, maka cara kerja TI juga harus mempunyai kapasitas memadai. dan hal ini direalisasikan dengan hal berikut ini:</p> <p>a. Penguatan kepemimpinan kelembagaan melalui implementasi</p>

No	Arahan Strategis	Deskripsi
		<p>fungsi CIO (<i>Chief Information Officer</i>), CISO (<i>Chief Information Security Officer</i>) dan Tim Koordinasi SPBE (Pengarah dan Pelaksana SPBE), sehingga perencanaan dan monitoring penyelenggaraan TI akan meningkat kualitasnya.</p> <p>b. Penguatan kapasitas organisasi TI dengan memperhatikan kebutuhan implementasi proses-proses Tata Kelola TI, baik di kantor pusat maupun UPT.</p> <p>c. Kapasitas SDM TI yang seimbang dengan tuntutan organisasi ke depan.</p>
3.	Pembangunan Literasi TI pada seluruh lapisan SDM Kemendag dan secara khusus SDM TI	<p>Literasi TI di seluruh lapisan SDM Kemendag perlu untuk dikuatkan, untuk meningkatkan sponsor dan kepemilikan atas implementasi TI, juga memastikan pengguna akhir tidak menjadi titik paling rawan dari implementasi TI.</p> <p>Sedangkan pengembangan SDM TI juga harus dikuatkan untuk memastikan keselarasan dengan kapabilitas yang harusnya dimiliki oleh TI secara <i>organisation-wide</i>. Pengembangan SDM TI merujuk kepada model proses yang ditetapkan.</p>

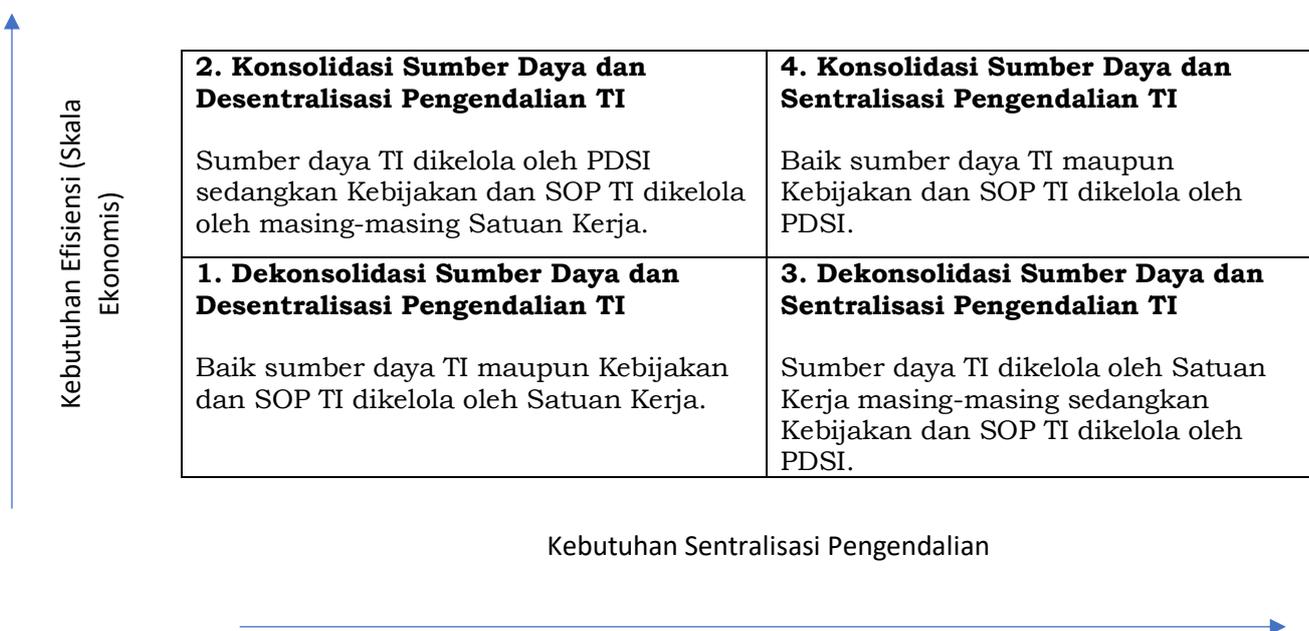
10.2.2. Model Operasi TI

Model Operasi adalah deskripsi tentang bagaimana Kemendag membagi kewenangan dalam pengelolaan TI antara Pengelola TI dan Pemilik Proses Bisnis. Terdapat dua level model operasi yang diusulkan, yaitu level strategis dan level teknis. Model operasi akan dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan dan SOP TI.

10.2.2.1 Level Strategis

Model operasi pada level strategis memperlihatkan bagaimana pemetaan kewenangan perencanaan, pengembangan dan operasional TI dalam konteks hubungan Pengelola TI dengan unit kerja pemilik proses bisnis di Kemendag.

Berikut ini adalah analisis perbandingan untuk keempat pilihan model diatas:



Gambar 10-2 Model Operasi TI

Tabel 10-7 Analisis Perbandingan Model Operasi TI

Model	Kelebihan	Kekurangan
1. Dekonsolidasi Sumber Daya – Desentralisasi Pengendalian TI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fleksibilitas tinggi, baik untuk PDSI maupun Satuan Kerja lain (non-TI) untuk menentukan solusi TI yang tepat kebutuhan masing-masing 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi redundansi inisiatif atau solusi TI yang berdampak terhadap belanja yang tidak efisien ▪ Kualitas data rendah sehingga monitoring satuan kerja atau pengambilan keputusan di tingkat Kemendag tidak efisien dan akurat
2. Konsolidasi Sumber Daya – Desentralisasi Pengendalian TI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efisiensi dari fasilitas DC, DRC dan perangkat keras ▪ Kemudahan monitoring karena DC, DRC dan perangkat keras berada di satu tempat yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi ketidakselarasan antara kebijakan TI di PDSI dengan Satker lain dan dengan solusi yang diimplementasikan ▪ Redundansi proyek karena perencanaan dilakukan PDSI dan juga satker lainnya ▪ Kualitas data rendah untuk mendukung monitoring kinerja organisasi dan pengambilan keputusan di tingkat Kemendag
3. Dekonsolidasi Sumber Daya –	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelarasan perencanaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memerlukan upaya lebih untuk mengkoordinasikan dengan seluruh satker terkait,

Model	Kelebihan	Kekurangan
Sentralisasi Pengendalian TI	<p>kebijakan TI yang terjaga</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi efisiensi sumber daya TI khususnya terkait dengan layanan-layanan TI yang secara bisa berbagi ▪ Potensi fleksibilitas pengadaan sumber daya TI pada satker yang memiliki kegiatan spesifik 	<p>khususnya terkait dengan layanan TI yang disepakati akan digunakan bersama</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Butuh upaya lebih untuk melakukan penjaminan kualitas atas pelaksanaan TI di satker
4. Konsolidasi Sumber Daya – Sentralisasi Pengendalian TI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi penghematan yang besar karena redundansi solusi TI jauh berkurang ▪ Penyelarasan lebih terjaga karena semua kebijakan TI tersentralisasi ▪ Potensi kualitas data yang lebih tinggi untuk monitoring kinerja organisasi dan pengambilan keputusan di tingkat Kemendag 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fleksibilitas PDSI untuk mengikuti perkembangan proses di level Satker cukup terbatas, terutama jika operasi TI secara riil tidak semua implementasinya bisa disentralisasi ▪ Membutuhkan tim pengelola TI yang relatif besar di PDSI

Berikut ini adalah pola pengelolaan TI pada keempat model operasi TI di atas:

Tabel 10-8 Model Operasi Rekomendasi

No	Model Operasi TI	Rencana TI	Portofolio dan Investasi TI	Kebijakan dan Standar TI	Operasi TI	Monitoring TI
1.	Dekonsolidasi Sumber Daya dan Desentralisasi Pengendalian TI	Satuan Kerja	Satuan Kerja	Satuan Kerja	Satuan Kerja	Satuan Kerja

No	Model Operasi TI	Rencana TI	Portofolio dan Investasi TI	Kebijakan dan Standar TI	Operasi TI	Monitoring TI
2.	Konsolidasi Sumber Daya dan Desentralisasi Pengendalian TI	PDSI	PDSI	Satuan Kerja	Satuan Kerja	Satuan Kerja
3.	Dekonsolidasi Sumber Daya dan Sentralisasi Pengendalian TI	Satuan Kerja	Satuan Kerja	PDSI	PDSI	PDSI
4.	Konsolidasi Sumber Daya dan Sentralisasi Pengendalian TI	PDSI	PDSI	PDSI	PDSI	PDSI

Rekomendasi Model Operasi TI

Berdasarkan perbandingan model operasi TI pada tabel di atas maka yang direkomendasikan untuk Kemendag adalah model nomor 4 yaitu Konsolidasi Sumber Daya dan Sentralisasi Pengendalian TI yang akan diturunkan lebih detail menjadi rancangan Tata Kelola TI pada bagian berikutnya.

10.2.2.2 Level Teknis

Model Operasi pada level teknis memperlihatkan bagaimana pengelola TI melakukan kegiatan perencanaan, pengembangan, operasional dan *monitoring*-evaluasi atas layanan TI, dalam perspektif strategi sumberdaya. Seperti telah disinggung pada kajian RISPBE, untuk merealisasikan arsitektur TI dibutuhkan strategi sumberdaya yang tepat.

Berikut ini adalah model operasi pada level teknis yang direkomendasikan:

Tabel 10-9 Model Operasi Level Teknis

Legenda: D = Decides (Memutuskan) R = Review (Mereviu) P = Proposes (Mengusulkan) C = Must be consulted (Perlu dikonsultasikan) X = Executed (Melaksanakan)		DECISION BODIES					
		Menteri Perdagangan	Fungsi CIO	Tim Pengarah	Pengelola TI	Satuan Kerja	Inspektorat
A.	Principles (Peran Strategis TI)						
A.1	Pendefinisian peran strategis TI	D	R	R	PX	C	C
A.2	Perbaikan peran strategis TI	D	R	R	PX	C	C
B.	Perencanaan Strategis TI						
B.1	Analisis kebutuhan bisnis	D	R	R	PX	PC	C
B.2	Prioritisasi kebutuhan TI	D	R	R	PX	C	C
B.3	Pendefinisian solusi TI	D	R	R	PX	C	C
B.4	Rencana Induk SPBE	D	R	R	PX	C	C
C.	Pengelolaan Belanja TI						
C.1	Pengelolaan portofolio proyek TI	D	R	R	PX	C	C
C.2	Belanja investasi TI tahunan	D	R	R	PX	C	C
C.4	Belanja operasi TI tahunan	D	R	R	PX	C	C
D.	Pengelolaan arsitektur TI						
D.1	Pengelolaan konsistensi arsitektur TI						
D.1.1	Standarisasi arsitektur TI	D	R	R	PX	C	C
D.1.2	Penyelarasan terhadap standarisasi arsitektur TI	D	R	R	PX	C	C

Legenda: D = Decides (Memutuskan) R = Review (Mereviu) P = Proposes (Mengusulkan) C = Must be consulted (Perlu dikonsultasikan) X = Executed (Melaksanakan)		DECISION BODIES					
		Menteri Perdagangan	Fungsi CIO	Tim Pengarah	Pengelola TI	Satuan Kerja	Inspektorat
D.2	<i>Pengelolaan sistem informasi</i>						
D.2.1	Pengembangan sistem informasi		D	R	PX	PC	C
D.2.2	Penyelenggaraan operasi		D	R	PX	X	C
D.2.4	Pemberian dukungan teknis		D	R	PX		C
D.3	<i>Pengelolaan arsitektur infrastruktur</i>						
D.3.1	Implementasi WAN backbone		D	R	PX		
D.3.2	Implementasi LAN Kantor Pusat		D	R	PX		
D.3.3	Implementasi LAN Satuan Kerja		D	R	PX	P	
D.3.4	Implementasi Data Center		D	R	PX		
D.3.6	Implementasi <i>Disaster Recovery Center</i>		D	R	PX		
D.3.7	Implementasi infrastruktur pendukung di Satuan Kerja		D	R	PX	P	
D.3.8	Operasi WAN backbone		D	R	PX		
D.3.9	Operasi LAN Kantor Pusat				X		
D.3.10	Operasi LAN Satuan Kerja				D		
D.3.11	Operasi Data Center		D	R	PX		
D.3.13	Operasi <i>Disaster Recovery Center</i>		D	R	PX		
D.3.14	Operasi infrastruktur pendukung di Satuan Kerja				D		
D.3.15	Dukungan teknis WAN backbone				X		
D.3.16	Dukungan teknis LAN Kantor Pusat				X		
D.3.17	Dukungan teknis LAN Satuan Kerja				X		
D.3.18	Dukungan teknis Data Center				X		
D.3.20	Dukungan teknis <i>Disaster Recovery Center</i>				X		
D.3.21	Dukungan teknis infrastruktur pendukung di Unit Kerja				X		

10.2.3. Komponen Penyusun Tata Kelola TI

Berdasarkan model operasi usulan, berikut ini adalah analisa persyaratan persyaratan untuk masing-masing komponen penyusun Tata Kelola TI Kemendag:

Tabel 10-10 Komponen Penyusun Tata Kelola TI

No	Komponen	Kebutuhan Kepatuhan Atas Regulasi atau <i>Good Practices</i>
1.	Struktur Tata Kelola TI	a. Terdapat fungsi CIO (<i>Chief Information Officer</i>) dan Komite TI/ Tim Pengarah yang dipimpin oleh Sestama yang memberikan arahan strategis TI Kemendag, serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaannya. b. Selain itu perlu adanya fungsi CISO (<i>Chief Information Security Officer</i>) yang dirangkapkan kepada Kepala PDSI untuk mengawal pelaksanaan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. c. Terdapat matriks <i>Responsibility & Accountability</i> yang memadai dalam pelaksanaan seluruh Proses TI Kemendag.
2.	Pengembangan SDM TI	a. Jumlah dan kompetensi SDM TI yang proporsional dengan beban dalam pengembangan sistem dan infrastruktur TI beserta operasionalnya. b. Program pengembangan SDM TI dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan kompetensi.
3.	Proses Tata Kelola TI	a. Adanya Kebijakan Tata Kelola TI dalam bentuk Peraturan Kemendag untuk menetapkan prinsip, kewenangan, dan pengaturan secara high level pengelolaan TI. Kebijakan TI menjadi rujukan bagi aturan-aturan turunan yang lebih teknis. b. Kecukupan SOP TI yang sesuai dengan lingkup proses yang diadopsi dari standar atau kerangka kerja. c. Kemendag memiliki target definitif dalam peningkatan kualitas Proses TI. d. Terdapat Indikator Kinerja yang proporsional dalam pelaksanaan seluruh Proses TI Kemendag.
4.	Tools Pendukung	a. Ketersediaan tools untuk membantu otomasi pengelolaan TI, khususnya operasional TI seperti pengelolaan tingkat layanan,

No	Komponen	Kebutuhan Kepatuhan Atas Regulasi atau <i>Good Practices</i>
		<p>pengelolaan insiden dan permasalahan, pengelolaan konfigurasi, monitoring kinerja dan kapasitas.</p> <p>b. Ketersediaan <i>tools</i> untuk mendukung monitoring kinerja aplikasi, status penggunaan sumber daya di infrastruktur dan parameter-parameter lain teknis lain yang diperlukan untuk pengelolaan kinerja dan analisa permasalahan.</p>

10.2.4. Tim Koordinasi Rencana Induk SPBE, Fungsi CIO dan CISO

Untuk menyelaraskan pengembangan TI dalam mendukung pencapaian tujuan Kemendag dibutuhkan satu lembaga *ad hoc* yang bernama Tim Koordinasi RISPBE yang terdiri atas Pengarah dan Pelaksana, pelaksanaan fungsi *Chief Information Officer* (CIO) dan *Chief Information Security Officer* (CISO) oleh jabatan tertentu di struktur organisasi Kemendag yang berlaku, dengan tujuan serta tugas sebagai berikut:

Tabel 10-11 Tim Koodinasi Rencana Induk SPBE, Fungsi CIO dan CISO

NO	ITEM	DESKRIPSI
1	Maksud	Maksud rancangan ini adalah untuk mengatur pembentukan, tugas, fungsi dan keputusan Tim Koordinasi RISPBE yang terdiri atas Pengarah dan Pelaksana SPBE, serta keberadaan fungsi CIO dan CISO.
2	Tujuan	Tujuan pembentukan Tim Koordinasi RISPBE, fungsi CIO dan CISO ini untuk membantu penyelarasan pengelolaan TI serta pengamanan informasi Kemendag dengan strategi Kemendag sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.
3	Tugas dan Fungsi	<p>Tim Koordinasi RISPBE terdiri atas Pengarah dan Pelaksana SPBE.</p> <p>Pengarah RISPBE mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan arahan perencanaan dan kebijakan strategis TI dan sistem manajemen pengamanan informasi Kemendag; 2) Mereviu konsep RISPBE, termasuk prioritas roadmap, dan memberikan

NO	ITEM	DESKRIPSI
		<p>rekomendasi penetapan kepada Kepala Kemendag;</p> <p>3) Mereviu konsep Kebijakan TI dan sistem manajemen pengamanan informasi, dalam bentuk Peraturan dan/ atau Keputusan Kepala Kemendag, serta memberikan rekomendasi penetapan kepada Kepala Kemendag;</p> <p>4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian RISPBE serta keberjalanan Kebijakan Strategis TI dan sistem manajemen pengamanan informasi;</p> <p>5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan serta integrasi berbagai aplikasi, infrastruktur, data dan informasi strategis beserta keberjalanan sistem manajemen pengamanan informasi di lingkungan Kemendag;</p> <p>6) Mereviu keselarasan konsep RKA-KL (TI), baik investasi maupun biaya, dengan Rencana Induk dan Kebijakan TI dan sistem manajemen pengamanan informasi yang berlaku serta memberikan rekomendasi penetapan;</p> <p>7) Merekomendasikan penetapan selera risiko TI Kemendag, mereviu hasil penyusunan profil risiko TI Kemendag, mereviu pelaksanaan tindak lanjut hasil audit TI Kemendag;</p> <p>8) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Kemendag.</p> <p>Pelaksana RISPBE, terdiri atas tim Arsitektur, Tata Kelola, fungsi <i>Project Management Office</i> (PMO) dan Sekretariat dengan tugas sebagai berikut:</p> <p>1) Tim Arsitektur TI</p> <p>a. Melaksanakan reviu penyelarasan dari Rencana Strategis Kemendag terhadap Arsitektur TI Kemendag;</p> <p>b. Menindaklanjuti konsep rancangan Arsitektur Bisnis dari Proses Bisnis Kemendag;</p>

NO	ITEM	DESKRIPSI
		<ul style="list-style-type: none">c. Menyusun konsep rancangan Arsitektur Data dan Informasi Kemendag beserta integrasinya;d. Menyusun konsep rancangan Arsitektur Aplikasi Kemendag;e. Menyusun konsep rancangan Arsitektur Infrastruktur Kemendag;f. Melakukan analisis kesenjangan antara Arsitektur TI kondisi existing dengan target ke depan;g. Melakukan analisis portofolio dan <i>roadmap</i> program dan proyek Arsitektur TI Kemendag;h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program dan proyek Arsitektur TI Kemendag;i. Melakukan peranan sebagai <i>project steering</i> dan standarisasi proyek tata kelola TI. <p>2) Tim Tata Kelola TI:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan reviu penyelarasan Rencana Strategis Kemendag terhadap Tata Kelola TI Kemendag;b. Menyusun konsep kebijakan, standar, dan prosedur TI;c. Menyusun konsep rancangan struktur organisasi terkait TI;d. Menyusun pola pengembangan kompetensi SDM TI;e. Mengupayakan pembangunan budaya organisasi Kemendag berbasis TI;f. Melakukan analisis kesenjangan antara Tata Kelola TI kondisi saat ini dengan target ke depan;g. Menyusun portofolio dan <i>roadmap</i> program dan proyek Tata Kelola TI;h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program dan proyek Tata Kelola TI Kemendag;i. Melakukan peranan sebagai <i>project steering</i> dan standarisasi proyek tata kelola TI. <p>3) Sekretariat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi RISPBE di bidang administrasi;

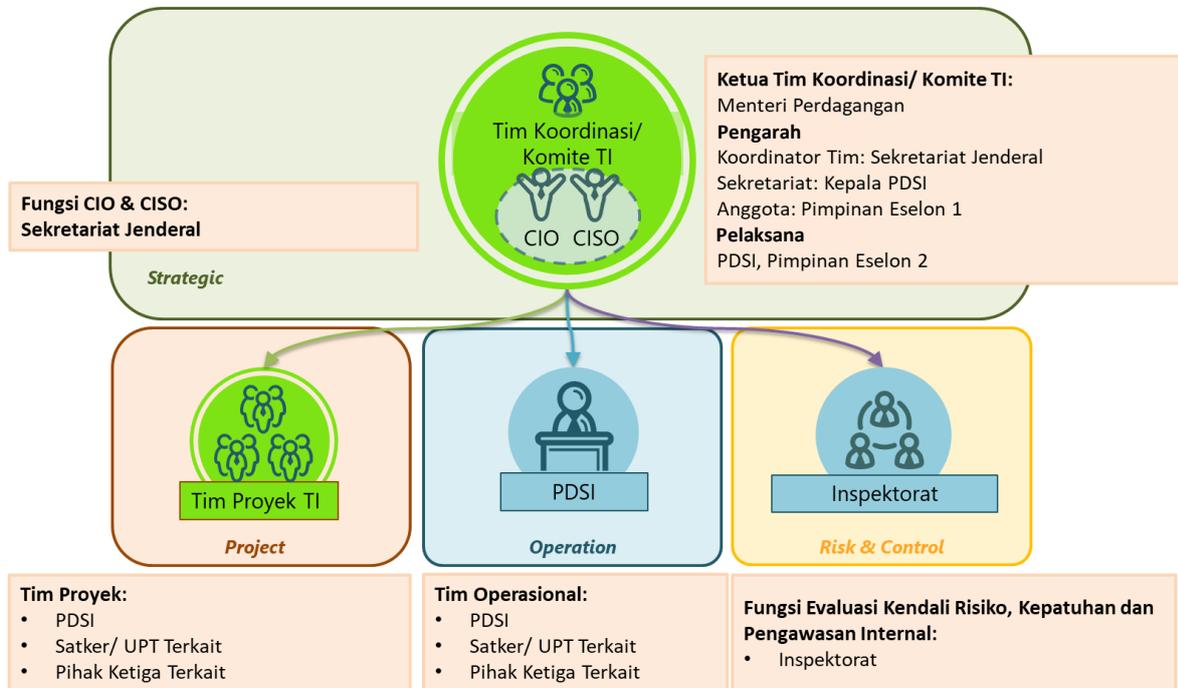
NO	ITEM	DESKRIPSI
		<ul style="list-style-type: none">b. Mengumpulkan dokumentasi dan laporan kegiatan masing-masing bidang;c. Memfasilitasi setiap kegiatan Tim Koordinasi RISPBE ;d. Melakukan pencatatan administrasi, standarisasi dan pencapaian kinerja seluruh proyek TI. <p>Fungsi CIO, diperankan oleh Sekretariat Jenderal, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan penyampaian arahan perencanaan dan kebijakan strategis TI Kemendag;b. Mengkoordinasikan proses reviu konsep RISPBE, termasuk prioritas roadmap, dan memberikan rekomendasi penetapan kepada Kepala Kemendag;c. Mengkoordinasikan proses reviu konsep Kebijakan TI, dalam bentuk Peraturan dan/ atau Keputusan Kepala, serta memberikan rekomendasi penetapan kepada Kepala Kemendag;d. Mengkoordinasikan proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian RISPBE serta keberjalanan Kebijakan Strategis TI terkait;e. Mengkoordinasikan proses pemantauan dan evaluasi pembangunan serta integrasi berbagai aplikasi, infrastruktur, data dan informasi strategis di lingkungan Kemendag;<ul style="list-style-type: none">1) Mengkoordinasikan proses reviu keselarasan konsep RKA-KL (TI), baik investasi maupun biaya, dengan Rencana Induk dan Kebijakan TI yang berlaku serta memberikan rekomendasi penetapan;2) Mengkoordinasikan proses rekomendasi penetapan selera risiko TI Kemendag, reviu hasil penyusunan profil risiko TI Kemendag, serta reviu pelaksanaan tindak lanjut hasil audit TI Kemendag;3) Melakukan peranan sebagai project sponsor pada proyek strategis TI Kemendag dan menetapkan <i>Project Charter</i>;

NO	ITEM	DESKRIPSI
		<p>4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Kemendag.</p> <p>Fungsi CISO, diperankan oleh Sekretariat Jenderal, memiliki tugas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan penyampaian arahan perencanaan dan kebijakan sistem manajemen pengamanan informasi Kemendag;b. Mengkoordinasikan proses reviu program dan proyek terkait sistem manajemen pengamanan informasi, termasuk prioritasasi roadmap;c. Mengkoordinasikan proses reviu konsep Kebijakan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, dalam bentuk Peraturan dan/ atau Keputusan Kepala;d. Mengkoordinasikan proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program dan proyek sistem manajemen pengamanan informasi beserta keberjalanan kebijakan dan peraturan terkait;e. Mengkoordinasikan proses reviu keselarasan konsep RKA-KL (TI) terkait sistem manajemen pengamanan informasi, baik investasi maupun biaya, dengan program dan kebijakan yang berlaku;f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peranan sebagai <i>project steering</i> pada program dan proyek terkait sistem manajemen pengamanan informasi Kemendag dan menyusun konsep dan merekomendasikan penetapan <i>Project Charter</i>;g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Kemendag.

NO	ITEM	DESKRIPSI
4	Keanggotaan	<p>Struktur Pengarah dan Pelaksana RISPBE, Fungsi CIO dan CISO adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengarah RISPBE, terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">1) Ketua oleh pejabat Sestama;2) Sekretariat oleh Kepala PDSI;3) Anggota seluruh Eselon 1 selain Inspektorat.2. Pelaksana TI, terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">1) Ketua oleh pejabat Kepala Kepala PDSI2) Tim Arsitektur TI:3) Tim Tata Kelola TI:4) Sekretariat:
5	Pertemuan	<p>Tim Koordinasi RISPBE melakukan pertemuan minimal setahun 2 kali sebagai berikut, atau di luar itu apabila diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pertama di awal semester pertama dengan agenda mengenai evaluasi pencapaian tahun sebelumnya, rencana kegiatan tahunan, serta pembahasan mengenai adanya perubahan yang berdampak terhadap rencana kegiatan.b. Ketiga di awal bulan ketujuh untuk mengevaluasi pencapaian TI di kuartal kedua dan memberikan arahan peningkatan di masa depan.

10.2.5. Struktur Tata Kelola TI

Struktur Tata Kelola merupakan salah satu komponen utama Tata Kelola TI. Secara high level, berikut ini adalah kebutuhan struktur Tata Kelola TI:



Gambar 10-3 Struktur Tata Kelola TI Rekomendasi

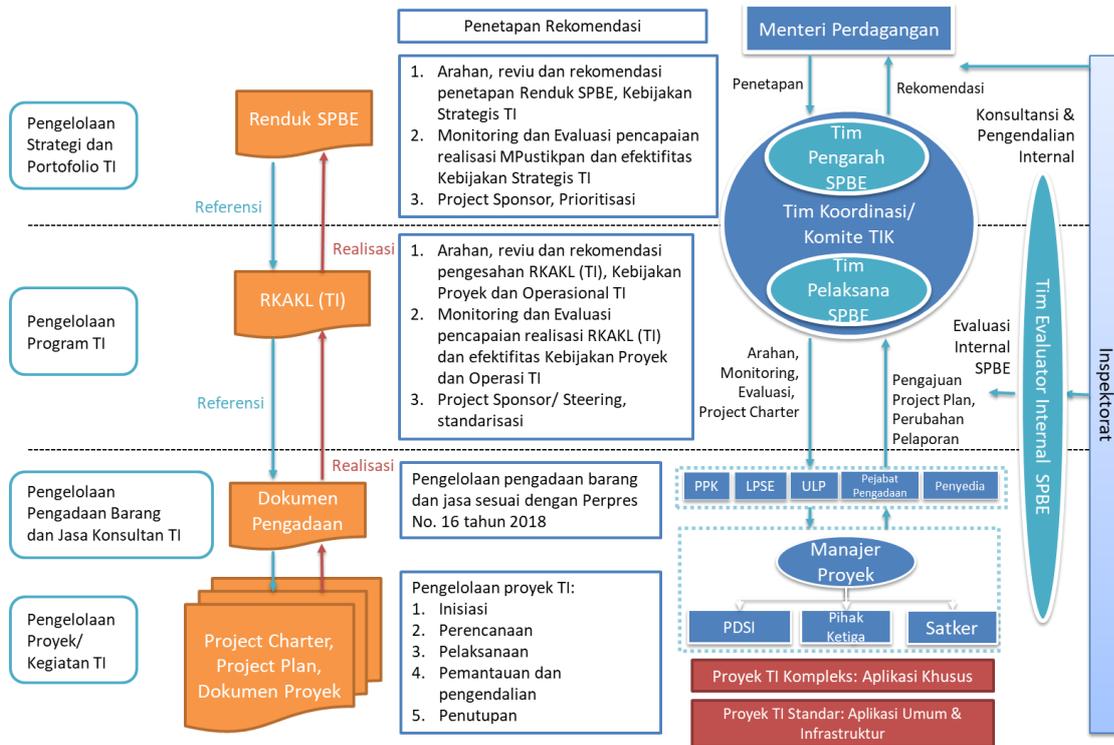
Selanjutnya akan dijelaskan masing-masing bagian struktur tersebut sebagai berikut:

Tabel 10-12 Deskripsi Struktur Tata Kelola TI Rekomendasi

NO	KATEGORI FUNGSI	DESKRIPSI	PIHAK TERKAIT
1	Strategis	Fokus fungsi ini adalah memastikan keterkaitan dan keselarasan antara TI dengan strategi pencapaian visi dan misi Kemendag untuk menghasilkan keputusan-keputusan strategis terkait investasi TI beserta anggaran yang dibutuhkan.	1) Tim Koordinasi RISPBE (Tim Pengarah dan Tim Pelaksana) 2) Fungsi CIO (<i>Chief Information Officer</i>) 3) Fungsi CISO (<i>Chief Information Security Officer</i>)
2	Pengembangan & Proyek	Fokus fungsi ini adalah mengelola dan mengimplementasikan proyek-proyek TI Kemendag agar sesuai dengan keputusan dan arahan dari fungsi strategis	Tim Proyek Teknologi Informasi, terdiri atas: 1) Tim Pembangunan SI di Kemendag Kantor Pusat 2) Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis (Satker) 3) Vendor Pendukung Akuisisi dan Pembangunan SI,

NO	KATEGORI FUNGSI	DESKRIPSI	PIHAK TERKAIT
			Implementasi Infrastruktur TI dan Konsultansi TI
3	Operasi	Fokus Kategori Fungsi ini adalah mengelola operasional, pemeliharaan layanan TI serta pengamanan informasi di lingkungan Kemendag	1) Organisasi Pengelola TI di Kemendag 2) Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis (Satker) 3) Vendor Pendukung Operasi TI
4	Pengendalian Risiko dan Evaluasi Kontrol	Fokus Kategori Fungsi ini adalah mengelola risiko dan kontrol yang terkait dengan implementasi TI Kemendag	Inspektorat

Berikut ini adalah struktur tata kelola yang menghubungkan RISPBE dengan Rencana Proyek



Gambar 10-4 Struktur Tata Kelola TI dengan Rencana Proyek

Gambar 15-14 merupakan ilustrasi struktur tata kelola TI mengenai pengelolaan rencana proyek. Pengelolaan rencana proyek ini dapat diturunkan secara berjenjang dari level strategis hingga menjadi level teknis, baik dari sisi perencanaan dan penanggung jawab terkait pada masing-masing tingkatan.

Pada level strategis, terdapat Strategi dan Portofolio TI yang tercantum pada RISPBE Kemendag. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam beberapa tahun ke depan, maka Strategi dan Portofolio tersebut perlu dijabarkan menjadi bagian-bagian yang lebih detail dan direalisasikan dalam bentuk Program-program TI yang dicantumkan pada RKAKL untuk TIK. Selanjutnya Program-program TI ini akan dirincikan menjadi proyek atau kegiatan TI. Proyek atau kegiatan TI tersebut tentunya memerlukan dokumen pengadaan dan dokumen administratif lainnya sebagai bentuk nyata realisasi dari Program TI dalam mencapai Strategi dan Portofolio TI yang sudah ditetapkan.

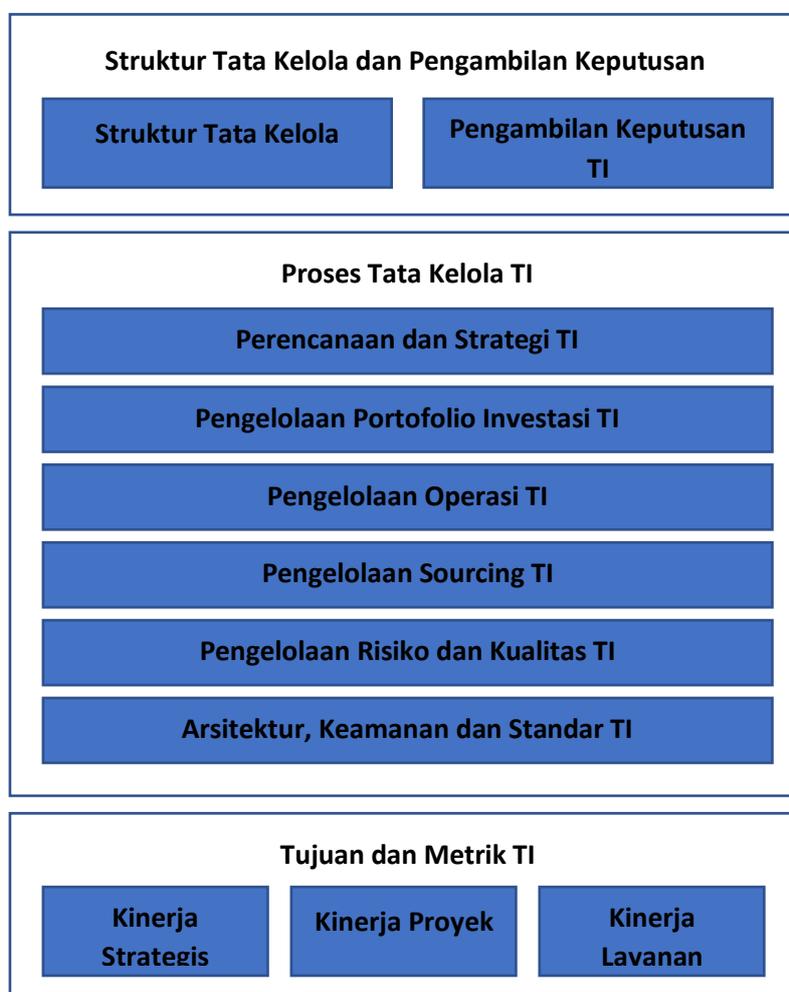
Menteri Perdagangan perlu menetapkan Tim Koordinasi atau Tim Komite TIK yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan rencana proyek di atas pada level strategis. Tim Komite TIK sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu Tim Pengarah SPBE dan Tim Pelaksana SPBE sesuai dengan arahan Perpes No.95 Tahun 2018. Tim Komite TIK akan memberikan arahan, melakukan monitoring, evaluasi, dan menetapkan Project Charter dalam berjalannya program dan proyek TI. Selanjutnya, proyek atau kegiatan TI akan dilaksanakan oleh tim yang bertugas melaksanakan proyek tersebut.

Pelaksanaan program dan proyek TI untuk mencapai portofolio TI yang sudah ditetapkan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program dan proyek TI, memastikan bahwa hal-hal yang telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dan melakukan evaluasi kondisi SPBE Kemendag secara berkala. Kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi ini adalah Inspektorat. Namun terkhusus untuk mengetahui kondisi evaluasi SPBE Kemendag secara berkala, perlu terdapat Tim Evaluator Internal SPBE.

10.2.6. Program Tata Kelola TI

10.2.6.1 Kerangka Kerja Proses Tata Kelola TI

Kerangka kerja proses tata kelola TI memberikan gambaran tentang komponen-komponen utama yang diimplementasikan untuk merealisasikan Tata Kelola TI Organisasi. Komponen-komponen utama tata kelola TI adalah struktur, proses, serta tujuan dan metrik.



Gambar 10-5 Model Struktur Tata Kelola TI

Komponen struktur mengatur tentang perlunya struktur organisasi yang berisi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan TIK di Kemendag. Struktur Tata Kelola yang dibentuk selanjutnya akan menjadi penanggung jawab dalam proses tata kelola TI yang ada di Kemendag. Dalam melakukan proses tata kelola TI, struktur tata kelola TI memiliki tentunya memiliki komposisi, fungsi,

tanggung jawab, dan kewenangan yang perlu ditetapkan secara jelas untuk masing-masing bagian. Keberadaan struktur tata kelola juga berfungsi sebagai mekanisme untuk pengambilan keputusan TI sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang ditetapkan untuk masing-masing bagian.

Dalam melakukan tata kelola TI, tentunya ada proses-proses tata kelola TI yang perlu dijalankan. Proses ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa TIK yang ada sudah dikelola sedemikian rupa sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis Kemendag yang sudah ditetapkan. Proses tata kelola TI yang perlu dilakukan setidaknya adalah proses Perencanaan dan Strategi TI, proses Pengelolaan Portofolio Investasi TI, proses Pengelolaan Operasi TI, proses Pengelolaan Sourcing TI, proses Pengelolaan Risiko dan Kualitas TI, dan Arsitektur, Keamanan, dan Standar TI.

Proses Perencanaan dan Strategi TI adalah proses yang bertujuan untuk memahami kondisi Kemendag dan TI saat ini. Pemahaman mengenai kondisi Kemendag dan TI saat ini kemudian menjadi dasar dalam menyusun rencana dan strategi TI yang seharusnya sejalan dan mendukung tercapainya tujuan atau sasaran strategis yang dimiliki oleh Kemendag. Rencana dan strategi TI tidak hanya disusun, namun juga perlu dikomunikasikan dan dimengerti oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di bidang TIK.

Proses Pengelolaan Portofolio Investasi TI adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa investasi TI yang dilakukan sudah sejalan dengan sasaran strategi Kemendag yang sudah ditetapkan. Proses ini juga perlu melakukan evaluasi, prioritasasi, dan penyeimbangan program dan proyek TI yang ada di dalamnya dengan mengacu pada keterkaitan mereka dengan sasaran strategis dan risiko yang ada.

Proses Proses Operasi TI adalah proses yang bertujuan untuk mengelola layanan atau aplikasi sehingga dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan dari pengguna aplikasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Proses ini dilakukan dengan mengelolan prosedur operasional untuk layanan bisa berjalan dengan baik, melakukan monitoring terhadap infrastruktur TIK yang ada, mengelola lingkungan yang dibutuhkan sehingga layanan bisa dipergunakan dengan baik, dan mengelola fasilitas.

Proses Pengelolaan Sourcing TI adalah proses yang bertujuan untuk memastikan kapabilitas sumberdaya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan demi mencapai sasaran strategis Kemendag. Ha ini dilakukan dengan cara mengelola pegawai yang ada, melakukan identifikasi posisi TIK yang bersifat strategis dan berperan penting, melakukan pelatihan untuk menjaga dan mengembangkan kemampuan dan kapabilitas pegawai, melakukan evaluasi performa pegawai, dan mengelola bagaimana pegawai yang memiliki hubungan kerja secara eksternal dengan Kemendag.

Proses Pengelolaan Risiko dan Kualitas TI adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kualitas yang ada dan memenuhi keinginan dan kebutuhan pihak-pihak yang terkait. Selain itu, proses ini juga mengelola tentang risiko-risiko yang ada di Kemendag, namun yang khusus terkait dengan TIK.

Arsitektur, Keamanan, dan Standar TI merupakan bagian proses tata kelola TI yang perlu dilakukan sebagaimana mengacu pada Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Bahwasannya, setiap Instansi Pusat/Pemerintah Daerah wajib memiliki arsitektur yang akan dituju. Arsitektur tersebut mencakup tentang arsitektur bisnis, data, layanan, aplikasi, infrastruktur atau teknologi, keamanan, dan tata kelola TI.

Dalam melakukan Proses Tata Kelola TI tentunya perlu terdapat evaluasi dan monitoring untuk memastikan bahwa hal-hal yang dilakukan sudah sesuai dan tepat untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis Kemendag terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan komponen tujuan dan metrik yang dipergunakan untuk mengukur ketercapaian dan kinerja. Baik kinerja pada level strategis, yang kemudian diturunkan menjadi kinerja proyek dan kinerja layanan.

10.2.6.2 Kebijakan TI

Berdasarkan kerangka kerja proses tata kelola TI yang telah disampaikan, diusulkan untuk menyusun Kebijakan Tata Kelola TI yang perlu diformalisasi dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 10-13 Daftar Kebijakan Tata Kelola TI

No	Kategori	Lingkup Kebijakan
1.	Kebijakan Tata Kelola TI	<ol style="list-style-type: none">1. Manajemen Strategi, Arsitektur dan Portofolio TI2. Manajemen Anggaran dan Biaya TI3. Manajemen SDM TI4. Manajemen Relasi TI5. Manajemen Perjanjian Layanan TI6. Manajemen Pihak Ketiga TI7. Manajemen Kualitas TI8. Manajemen Risiko TI9. Manajemen Pengamanan Informasi10. Manajemen Program dan Proyek TI11. Manajemen Ketersediaan dan Kapasitas TI12. Manajemen Perubahan TI13. Manajemen Pengetahuan TI14. Manajemen Aset TI15. Manajemen Konfigurasi TI16. Manajemen Operasi TI17. Manajemen Data

		18. Manajemen Permintaan Layanan dan Insiden TI 19. Manajemen Permasalahan TI 20. Manajemen Kontinuitas TI 21. Manajemen Kinerja TI 22. Manajemen Kepatuhan TI 23. Manajemen Kendali Internal TI
--	--	---

Untuk mencapai kebijakan Tata Kelola TI yang baik sebagaimana pada Tabel 15-9, maka setidaknya kebijakan tersebut memenuhi komponen sebagai berikut:

Tabel 10-14 Komponen Kebijakan Tata Kelola TI

No.	Lingkup Kebijakan	Komponen Kebijakan
1	Manajemen Strategi, Arsitektur dan Portofolio TI	a. Penyusunan arahan TI b. Peninjauan kondisi, performa, dan kapabilitas TI saat ini c. Penetapan target kapabilitas TI d. Penetapan kesenjangan e. Pengkomunikasian strategi f. Penetapan target Portofolio g. Penetapan ketersediaan anggaran h. Evaluasi dan prioritas program untuk dianggarkan i. Pengelolaan ketercapaian manfaat yang didapatkan dari investasi
2	Manajemen Anggaran dan Biaya TI	a. Pengelolaan finansial dan keuangan b. Pengelolaan anggaran c. Prioritisasi alokasi anggaran d. Pengalokasian biaya
3	Manajemen SDM TI	a. Pengelolaan pegawai TIK b. Pengindentifikasian posisi penting c. Pengembangan kompetensi personel d. Evaluasi performa pegawai e. Pengelolaan pihak ketiga
4	Manajemen Relasi TI	a. Penetapan ekspektasi bisnis b. Pengidentifikasian kesempatan, risiko, dan halangan TI dalam mencapai pengembangan bisnis c. Pengelolaan relasi bisnis d. Pengoordinasian dan komunikasi e. Penerimaan masukan untuk pengembangan berkelanjutan
5	Manajemen Perjanjian Layanan TI	a. Pengelolaan layanan TI b. Pengkatalogan layanan

No.	Lingkup Kebijakan	Komponen Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Penetapan dan perjanjian tingkat layanan d. Monitor dan pelaporan tingkat layanan
6	Manajemen Pihak Ketiga TI	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan pihak ketiga dan kontrak b. Pemantauan performa dan kepatuhan pihak ketiga c. Pengelolaan kontrak dan hubungan dengan pihak ketiga
7	Manajemen Kualitas TI	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan QMS (Quality Management System) b. Penetapan standar dan mutu baku untuk kualitas c. Pengelolaan kualitas untuk pengguna d. Penerapan manajemen kualitas pada pengembangan dan rilis aplikasi e. Peninjauan kualitas secara berkala f. Pengembangan kualitas secara berkelanjutan
8	Manajemen Risiko TI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data risiko b. Analisis risiko c. Pengkomunikasian kondisi risiko d. Penetapan penanganan risiko e. Penetapan portfolio pengelolaan risiko
9	Manajemen Pengamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan ISMS b. Penetapan risiko keamanan informasi dan penanganannya c. Monitor dan review ISMS
10	Manajemen Program dan Proyek TI	<ul style="list-style-type: none"> a. Penginisiasian program dan proyek TI b. Pengelolaan hubungan dengan stakeholder c. Perencanaan program dan proyek TI d. Pelaksanaan program dan proyek TI e. Pengelolaan kualitas program dan proyek TI f. Review, monitoring, dan pelaporan program dan proyek TI g. Pengelolaan sumberdaya program dan proyek TI h. Pengelolaan risiko program dan proyek TI

No.	Lingkup Kebijakan	Komponen Kebijakan
11	Manajemen Ketersediaan dan Kapasitas TI	<ul style="list-style-type: none"> i. Penutupan program dan proyek TI a. Peninjauan ketersediaan, performa, dan kapasitas TI saat ini b. Peninjauan dampak kondisi saat ini terhadap keberjalanan bisnis c. Perencanaan kebutuhan layanan d. Monitoring dan review ketersediaan dan kapasitas TI e. Penyediaan layanan sesuai kebutuhan bisnis
12	Manajemen Perubahan TI	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi, prioritas, dan otorisasi permintaan untuk perubahan b. Pengelolaan perubahan yang bersifat darurat c. Pelacakan dan pelaporan perubahan d. Pendokumentasian perubahan
13	Manajemen Pengetahuan TI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan budaya dan fasilitas untuk berbagi pengetahuan TI b. Pengidentifikasian dan pengklasifikasian sumber informasi c. Pengelolaan dan pengolahan informasi menjadi pengetahuan TI d. Penggunaan dan penyebaran pengetahuan TI e. Evaluasi relevansi pengetahuan TI
14	Manajemen Aset TI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengidentifikasian dan pencatatan aset b. Pengelolaan aset kritikal c. Pengelolaan siklus hidup aset d. Optimasi biaya aset e. Pengelolaan lisensi
15	Manajemen Konfigurasi TI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan model konfigurasi TI b. Pengelolaan repository konfigurasi TI c. Pengelolaan configuration item d. Penerbitan status dan laporan konfigurasi TI e. Verifikasi dan review integritas repository konfigurasi TI
16	Manajemen Operasi TI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan prosedur operasional b. Pengelolaan layanan TI dari eksternal c. Pengelolaan infrastruktur TI d. Pengelolaan lingkungan untuk layanan TI

No.	Lingkup Kebijakan	Komponen Kebijakan
		e. Pengelolaan fasilitas
17	Manajemen Data	a. Pengelolaan master data b. Pengelolaan meta data c. Cleansing data d. Pengelolaan produsen dan wali data
18	Manajemen Permintaan Layanan dan Insiden TI	a. Penetapan kategori dan penanganan insiden dan permintaan layanan TI b. Perekaman, klasifikasi, dan prioritas permintaan layanan dan insiden TI c. Verifikasi, persetujuan, dan pemenuhan permintaan layanan d. Investigasi, diagnose, dan pengalokasian sumberdaya untuk insiden TI e. Penyelesaian insiden TI f. Pelacakan status dan pelaporan
19	Manajemen Permasalahan TI	a. Pengidentifikasian dan pengklasifikasian permasalahan TI b. Penginvestigasian dan diagnosa permasalahan TI c. Pendokumentasian akar permasalahan dari masalah yang sudah pernah terjadi d. Penyelesaian permasalahan TI e. Pencegahan permasalahan TI secara proaktif
20	Manajemen Kontinuitas TI	a. Pengelolaan kebijakan, cakupan, dan tujuan kontinuitas TI b. Pengelolaan strategi kontinuitas TI c. Penyusunan BCP d. Pengujian, dan peninjauan BCP e. Pengelolaan backup informasi f. Pelaksanaan review pasca pelaksanaan BCP g. Pelatihan pelaksanaan BCP
21	Manajemen Kinerja TI	a. Pelaksanaan monitoring terhadap kinerja TI b. Penetapan target performa dan kepatuhan c. Pengumpulan dan pengolahan data performa dan kepatuhan d. Analisis data dan pelaporan kinerja TI

No.	Lingkup Kebijakan	Komponen Kebijakan
		e. Tindakan penyesuaian atau hukuman apabila terjadi penyimpangan atau ketidakpatuhan
22	Manajemen Kepatuhan TI	a. Pengidentifikasian peraturan eksternal yang wajib dipatuhi b. Penyesuaian kondisi internal agar mematuhi peraturan eksternal c. Konfirmasi bahwa kepatuhan terhadap peraturan eksternal sudah tercapai
23	Manajemen Kendali Internal TI	a. Peninjauan kendali internal TI b. Peninjauan efektivitas kendali internal TI c. Pelaksanaan self-assessment terhadap kendali internal TI d. Identifikasi dan pelaporan apabila terdapat penyimpangan dari kendali internal e. Perencanaan dan pelaksanaan inisiatif untuk memastikan bahwa kendali sudah terpenuhi

Untuk pemenuhan terhadap regulasi mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Informasi maka dibutuhkan pula penurunan kebijakan manajemen pengamanan informasi dalam bentuk Kebijakan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dengan konten sebagai berikut:

Tabel 10-15 Pedoman Umum Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

No	Kategori	Lingkup Kebijakan
1.	Pedoman Umum Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	1. Klasifikasi Informasi 2. Pengelolaan Risiko Pengamanan Informasi 3. <i>Segregation of Duties</i> Pengamanan Informasi 4. Pengamanan Akuisisi, Pengembangan dan Implementasi Sistem TI 5. Pengamanan Infrastruktur TI 6. Pengamanan Pihak Ketiga TI 7. Pengamanan Perubahan, Rilis dan Deployment TI 8. Pengelolaan Kendali Akses dan Kriptografi Sistem TI 9. Pengamanan Fisik dan Lingkungan TI

		10. Pengamanan Perangkat <i>Mobile, Teleworking</i> dan <i>Media Removable</i> 11. Pengamanan Email dan Penggunaan Internet 12. Pengelolaan Aspek Legal dan HAKI 13. Pengelolaan Dokumen/ <i>Record</i> Pengamanan Informasi 14. Pelaksanaan Audit Pengamanan Informasi
--	--	---

10.2.6.3 SOP TI

Berdasarkan lingkup konsep Kebijakan Tata Kelola TI di atas, berikut ini adalah dekripsi dari lingkup SOP TI yang diusulkan. Detil deskripsi usulan SOP TI dapat dilihat pada **Lampiran 11 Deskripsi Usulan SOP TI**.

10.2.7. Teknologi Pendukung

Berikut ini adalah teknologi pendukung yang dapat dijadikan referensi dalam membantu keberlangsungan tata kelola TI di Kemendag:

Tabel 10-16 Tools Pendukung Tata Kelola TI

Kategori	Tool	Alternatif Solusi
Perencanaan	<i>Enterprise Architecture</i>	<i>Mega Suite, IBM rational EA, Troux Technologies, Avolution</i>
	<i>IT Portfolio Management</i>	<i>CA Portfolio Management, PlanView, BMC, Adaptive IT Portfolio Manager</i>
	<i>Performance Management</i>	<i>BMC PATROL Performance Manager, HP Openview Performance Management, Microsoft Operation Manager</i>
Pengembangan	<i>Application management</i>	<i>IBM Application Development, Borland AppCenter, Microsoft Application Center</i>
	<i>Change Management</i>	<i>BMC Change Management, CA Change Management, OTRS Change Management</i>
	<i>Configuration Management</i>	<i>BMC Configuration Management, CA Configuration Management, OTRS Service Asset&Configuration Management</i>
Operasi	<i>Server Management</i>	<i>IBM Tivoli Business System Manager, HP OpenView, BMC PATROL, manageEngine (Monitoring)</i>
	<i>Network Management</i>	<i>IBM Tivoli Netview, HP OpenView, ManageEngine (monitoring)</i>
	<i>Backup&Recovery Management</i>	<i>CommVault, IBM, EMC, Symantec, CA Technologies</i>
	<i>Incident&Problem Management</i>	<i>BMC Service Desk, CA IT Helpdesk, OTRS Helpdesk</i>
	<i>Security Management</i>	<i>Administrative: IBM Tivoli, HP Openview, SunSolstice</i>

Kategori	Tool	Alternatif Solusi
		<i>Policy Management: CA eTrust AM, Cisco Secure Policy Manager, Evidian Access Master SP</i> <i>Identity&Password Management: IBM Tivoli Identity Director, BMC CONTOL-SA, CA eTrust Admin,</i>
Evaluasi	<i>Risk Management</i>	<i>EMC-RSA, SAP GRC, IBM OpenPage GRC, Mega Suite, Oracle GRC</i>
	<i>Audit Management</i>	<i>BPS Resolver, IBM OpenPage GRC, Jade Software-Methodware</i>

Sumber: Gartner

Selain solusi yang bersifat *premium*, terdapat pula teknologi pendukung *open source* yang dapat dijadikan referensi dalam membantu keberlangsungan tata kelola TIK Kemendag. Berikut adalah solusi *open source* yang dapat digunakan:

Tabel 10-17 Tools Pendukung Tata Kelola TI Open Source

Kategori	Tool	Alternatif Solusi
Perencanaan	<i>Enterprise Architecture</i>	<i>ArchiMate Modelling, ADOIT, Modelio, Open ModelSphere</i>
	<i>IT Portfolio Management</i>	<i>OpenPPM, VisionProject, Workfront</i>
	<i>Performance Management</i>	<i>Xangati, TeamQuest, Sightline Systems, Zabbix, SevOne</i>
Pengembangan	<i>Application management</i>	<i>pinpoint, Apache Skywalking, JavaMelody, StageMonitor</i>
	<i>Change Management</i>	<i>iTOP, CA Change Management, OTRS Change Management</i>
	<i>Configuration Management</i>	<i>ServiceDesk</i>
Operasi	<i>Server Management</i>	<i>IPMI Monitor-ManageEngine</i>
	<i>Network Management</i>	<i>Nagios, IPMI Monitor</i>
	<i>Backup & Recovery Management</i>	<i>Bacula</i>
	<i>Incident & Problem Management</i>	<i>Agiloft, Zoho Desk</i>
	<i>Security Management</i>	<i>Administrative: Suricata</i> <i>Policy Management: Snort</i> <i>Identity&Password Management: Fail2ban</i>
Evaluasi	<i>Risk Management</i>	<i>RiskNetwork, GLPI, SimpleRisk, Practical Threat Analysis</i>
	<i>Audit Management</i>	<i>Open-AudIT, Qualityze, Netwrix, iAuditor, AuditNet</i>

10.3. Analisis Kesenjangan Tata Kelola TI Kemendag

Tabel 10-18 Analisis Kesenjangan Tata Kelola TI

No.	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisa Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Struktur Tata Kelola TI	Birokrasi Organisasi TIK dan Data yang ada di Kemendag saat ini belum tersentral	Perlu melakukan penyederhanaan birokrasi Organisasi TIK dan Data di Kemendag	<i>Partially</i>	Melakukan Penyederhaan Birokrasi Organisasi TIK dan Data dengan: a. Penambahan fungsi Tata Kelola TI dan Data pada struktur saat ini b. Penyempurnaan uraian pekerjaan untuk struktur organisasi TIK dan Data maupun tim Koordinator SPBE/ Komite TIK di lingkungan Kemendag
2.		Belum terdapat komite yang secara khusus bertanggung jawab atas respon insiden keamanan informasi di Kemendag	Kemendag perlu memiliki komite atau tim yang secara khusus bertanggung jawab atas insiden keamanan informasi	<i>None</i>	Pembentukan <i>Computer Security Incident Response Team</i> Kemendag
3.	Pengembangan SDM TI	Kompetensi SDM TIK yang dimiliki oleh PDSI kurang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi	Perkembangan <i>trend</i> teknologi yang cepat perlu diimbangi dengan kompetensi SDM TIK PDSI yang selalu ditingkatkan	<i>Partially</i>	Melakukan penguatan kompetensi SDM TIK dan Data melalui: a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Peta Okupasi TIK dan Keamanan Siber

No.	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisa Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					<ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi individu, baik SKKNI maupun Internasional c. Peningkatan kompetensi TIK dan Keamanan Siber pada jabatan fungsional Pranata Komputer, Statistisi, Sandiman, Peneliti, Analis Kebijakan d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pembinaan Teknis, Talkshow, Seminar, Workshop, Pemagangan TIK dan Data
4.	Proses Tata Kelola TI	Kemendag baru memiliki terdapat sebagian kebijakan dan SOP TIK dan Data	Kebijakan dan SOP TIK perlu dilengkapi untuk menjadi pedoman pelaksanaan seluruh Proses TIK	<i>Partially</i>	<p>Melakukan perumusan dan penyempurnaan kebijakan & SOP TIK dan Data dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian kebijakan dan SOP TI dengan menambahkan lingkup Sistem Manajemen Layanan TI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dan Tata Kelola dan Manajemen Data b. Integrasi Situs Web Eselon 1 ke Kemendag c. Melakukan penyusunan dan pengesahan kebijakan terkait

No.	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisa Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
					prosedur tata kelola dan manajemen Data
5.		Sudah terdapat pelaksanaan evaluasi SPBE secara periodik, namun belum terdapat assessment berkala untuk mengetahui kondisi Tata Kelola TIK dan Keamanan Informasi Kemendag	Perlu melaksanakan assessment secara berkala untuk mengetahui kondisi Tata Kelola TIK dan Keamanan Informasi Kemendag secara berkala	<i>Partially</i>	Perlu melakukan Assessment Indeks Keamanan Informasi secara periodik
6.		Kemendag belum memiliki sertifikasi untuk sistem manajemen mutu. Selain itu terdapat sertifikasi lain yang hanya terbatas pada lingkup yang kecil	Perlu melakukan sertifikasi sistem manajemen mutu dan memperluas lingkup sertifikasi yang sudah dimiliki saat ini	<i>Partially</i>	Perlu melakukan konsultasi dan resertifikasi dan surveillance internasional TIK dan data untuk: a. Resertifikasi dan Surveillance ISO 9001:2015 terkait sistem manajemen mutu b. Resertifikasi dan Surveillance ISO 27001:2013 terkait sistem manajemen keamanan informasi
7.		Pengelolaan <i>website</i> unit kerja Kemendag yang masih terpisah	Perlu adanya integrasi pengelolaan web yang dibawah oleh PDSI	<i>None</i>	Pengelolaan web dan CMS secara terintegrasi di bawah pengelolaan PDSI dan didukung dengan pengesahan kebijakan integrasi web
8.		<i>Disaster Recovery Plan</i> yang ada masih terbatas pada PDSI	Perlu memperluas cakupan <i>Disaster Recovery</i>	<i>Partially</i>	Perluasan lingkup <i>Disaster Recovery Plan</i> meliputi Kemendag, Satker Khusus

No.	Komponen	Kondisi Saat Ini	Analisa Pemenuhan	Pemenuhan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			<i>Plan</i> mengingat kebutuhan satker yang juga memerlukan DRP		Pengelolaan Pusat Data, dan pengguna layanan terkait
9.		Manajemen Risiko TI hanya dilakukan dalam lingkup DC Pusat	Perlu melakukan perluasan lingkup manajemen risiko TI	<i>Partially</i>	Melaksanakan Manajemen Risiko SPBE meliputi seluruh Kemendag
10.		Belum terdapat kegiatan survei dan belum terdapat indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kemendag baik dari sisi Internal dan Eksternal	Perlu melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kemendag dan melakukan peningkatan secara berkelanjutan	<i>None</i>	Pelaksanaan Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kemendag
11.	Tools Pendukung	Sudah terdapat <i>tools</i> untuk membantu otomasi pengelolaan operasional TI, terutama untuk pengelolaan tingkat layanan, pengelolaan insiden dan permasalahan, pengelolaan konfigurasi, <i>monitoring</i> kinerja dan kapasitas	Kondisi saat ini sudah sesuai dengan target	<i>Fully</i>	N/A

11. Rencana Inisiatif

11.1. Rencana Inisiatif dan Pemetaan Terhadap Sasaran Strategis Kemendag

Tabel 11-1 Rencana Inisiatif Arsitektur Bisnis, Data, Layanan dan Aplikasi terhadap Sasaran Startegis Kemendag

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
A	Arsitektur Bisnis & Data				
1.	Penyusunan detail arsitektur data Kemendag	SS6.01	06	Memperkuat Sistem Pengendalian Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Data)
B	Arsitektur Layanan				
B.1	Layanan Administrasi Pemerintahan				
1.	Pengembangan portal administrasi pemerintahan Kemendag - Portal Intranet Kemendag	SS6.01	01	Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
2.	Portal <i>Mobile</i> Layanan Adminsitrase Pemerintahan	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
B.2	Layanan Publik				

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
1.	Pengembangan portal layanan publik terintegrasi Kemendag (PPID, JDIH)	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi), Humas, & Rokum
2.	Pengembangan portal <i>mobile</i> layanan publik Kemendag	SS6.02	01	Memperkuat pelayanan publik yang responsif	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Humas
3.	Integrasi layanan perizinan Kemendag (SIPERDAG)				
a.	Integrasi SIPERDAG dengan OSS	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PDN
b.	Integrasi SIPERDAG dengan INSW	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Daglu
c.	Integrasi SIPERDAG dengan KSWP	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Rokeu
d.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Daglu

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
	Perdagangan Luar Negeri (Inatrade)			komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	
e.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Dalam Negeri (SIPT)	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bapokting
f.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (SIMPKTN)	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
g.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti
h.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem <i>Surveyor</i>	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PDN
4.	Pemeliharaan SIPERDAG	SS6.01	03	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PDN

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
				pendorong kinerja aparaturn Kementerian Perdagangan	
5.	Pengembangan Layanan Satu Data Perdagangan (data.kemendag.go.id)	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Data)
6.	Pengembangan Situs Web Kemendag	SS6.02	01	Memperkuat pelayanan publik yang responsif	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
C	Arsitektur Aplikasi				
C.1	Pengembangan Aplikasi Umum				
1.	Perencanaan - Percepatan SPBE Nasional	SS6.01	07	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Roren
2.	Penganggaran - Percepatan SPBE Nasional	SS6.01	07	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Roren

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
3.	Keuangan - Percepatan SPBE Nasional	SS6.01	07	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Rokeu
4.	Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah - Percepatan SPBE Nasional	SS6.01	07	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Roren
5.	Akuntabilitas Kinerja - Percepatan SPBE Nasional	SS6.01	01	Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg
		SS6.01	04	Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg
6.	Pemantauan dan Evaluasi - Percepatan SPBE Nasional	SS6.01	04	Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Romum

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
7.	Kearsipan - Percepatan SPBE Nasional	SS6.01	06	Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Romum
8.	Kepegawaian (Sudah termasuk sistem administrasi perjalanan dinas) - Percepatan SPBE Nasional	SS6.01	01	Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg
		SS6.01	04	Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg
9.	Pengaduan Publik - Percepatan SPBE Nasional	SS6.02	01	Memperkuat pelayanan publik yang responsif	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Humas
		SS6.02	02	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Humas
10.	Pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan (Learning Management System)	SS6.01	01	Mengembangkan standar kompetensi SDM Bidang Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg
C.2	Pengembangan Aplikasi Khusus				

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
C.2.1	Aplikasi Khusus Fungsi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)				
1.	Dashboard Portal PKTN				
a.	Pengembangan Sistem Informasi PKTN terintegrasi (SIMPKTN) –	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
2.	Modul Perlindungan Konsumen				
a.	Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWA-PK)	SS6.03	01	Menguatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Dit. PK
b.	Portal Nasional Perlindungan Konsumen	SS6.03	01	Menguatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Dit. PK
c.	Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Produk Elektronika	SS3.01	03	Mengembangkan standardisasi, mutu produk, dan regulasi pro-konsumen	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Dit. PK

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
3.	Modul Standarisasi dan Pengendalian Mutu				
a.	Aplikasi <i>laboratorium Information Management System (LIMS)</i>	SS3.07	01	Meningkatkan pemenuhan saran dan prasarana pelatihan SDM Sektor Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
b.	Sistem Informasi Dokumen Mutu BPMB	SS3.01	03	Mengembangkan standardisasi, mutu produk, dan regulasi pro-konsumen	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
c.	LPK Online	SS3.01	03	Mengembangkan standardisasi, mutu produk, dan regulasi pro-konsumen	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
d.	Nomor pendaftaran Barang (NPB)	SS3.02	03	Meningkatkan pengawasan barang beredar dan tertib ukur	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
e.	Tanda Pengenal Produsen (TPP) online	SS6.01	03	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparaturnya Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
f.	Sistem Informasi Pengujian Mutu Barang	SS3.02	03	Meningkatkan pengawasan barang beredar dan tertib ukur	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
g.	E-Dupak Jabfung PMB	SS6.01	05	Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan SDM Kementerian sesuai Analisis Jabatan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
h.	Sistem Informasi Sertifikasi Produk	SS3.02	03	Meningkatkan pengawasan barang beredar dan tertib ukur	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
i.	Sistem Informasi Sertifikasi Personil	SS7.01	01	Mengembangkan standar kompetensi SDM Bidang Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
j.	Sistem Informasi Pelayanan Kalibrasi	SS3.02	03	Meningkatkan pengawasan barang beredar dan tertib ukur	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
k.	Portal Inatrimis	SS6.02	01	Memperkuat pelayanan public yang responsif	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
l.	Modul Pegaduan Pelayanan Ditstandalitu	SS6.02	01	Memperkuat pelayanan publik yang responsif	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
4.	Modul Metrologi				
a.	Sistem Informasi Perizinan Metrologi	SS6.01	06	Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
b.	Sistem Informasi UPTP (Layanan non-perizinan)	SS6.02	01	Memperkuat pelayanan publik yang responsif	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
c.	E-Dupak (Sistem Pengelolaan DUPAK)	SS6.01	05	Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan SDM Kementerian sesuai Analisis Jabatan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
d.	E-Assessment SKKPTTU (Sistem informasi Penilaian UML)	SS6.01	03	Meningkatkan kualitas sarana dan prasaran penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
5.	Modul Pengawasan Barang Beredar dan Jasa				
a.	Aplikasi Sistem Pelaporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	SS3.02	03	Meningkatkan pengawasan barang beredar dan tertib ukur	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditwas
6.	Modul Tertib Niaga				
a.	Pendaftaran barang Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, Lingkungan, Hidup (K3L)	SS2.02	01	Menguatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
b.	Sistem Informai Petugas Pengawas	SS2.02	01	Menguatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
c.	Aplikasi Penugasan Petugas Pengawas	SS2.02	01	Menguatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
d.	Aplikasi Pelaporan Pengawasan tertib Niaga	SS3.02	02	Meningkatkan tertib niaga untuk pelaku usaha	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
7.	Integrasi Data Dari Seluruh Aplikasi Eksting	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
8.	Pemeliharaan SIM PKTN	SS6.01	03	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparaturnya Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
C.2.2	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Dalam Negeri				
1.	Pengembangan Etalase Produk Indonesia	SS1.01	02	Meningkatkan diversifikasi produk ekspor	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & P3DN
2.	Pembangunan Sistem Pemantauan Harga, Stock dan Gudang	SS2.01	01	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan di daerah untuk mengatasi kelangkaan stok	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
3.	Pengembangan Dashboard Portal Logistik				
a.	Pengembangan Sistem Pelaporan Manifest Domestik	SS4.01	07	Membangun basis data informasi pasar domestik dan produk unggulan daerah	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
b.	Pengembangan Sistem Informasi Pasar Rakyat	SS4.01	04	Mengoptimalkan kegiatan pemasaran produk dalam negeri unggulan yang berkesinambungan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
c.	Pengembangan Sistem Informasi Gerai Maritim/ Tol Laut	SS4.01	01	Meningkatkan pelayanan kemudahan berusaha dalam bidang perdagangan dalam negeri yang mudah, murat, cepat dan akurat	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
d.	Pengembangan Sistem Informasi Gudang	SS2.01	01	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan di daerah untuk mengatasi kelangkaan stok	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
e.	Pembangunan Modul Pasar Perbatasan	SS6.01	06	Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
4.	Pemeliharaan Portal Logistik	SS6.01	03	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
5.	Pembangunan Sistem Fasilitator Edukasi e-Commerce	SS4.01	06	Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pembinaan, pelatihan usaha	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Binus
6.	Pembangunan Sistem Laporan Realisasi B2 (Barang Berbahaya)	SS2.02	01	Mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Informasi harga Barang Kebutuhan Pokok	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bapokting
7.	Pengembangan Dashboard Bapokting yang Terintegrasi dengan <i>Dashboard</i> Kemendag	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bapokting
C.2.3	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Luar Negeri				
1.	Pembangunan Sistem Indonesia Trade Digital Promotion	SS1.01	02	Meningkatkan diversifikasi produk ekspor	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PEN
2.	Pengembangan Sistem Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan / E-Trade Financing	SS1.01	08	Penguatan pencitraan Indonesia	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditfas
3.	Pengembangan SI Perundingan Internasional	SS1.01	09	Optimalisasi peran perwakilan perdagangan di luar negeri	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PPI

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
4.	Pengembangan Sistem Perizinan Terpadu Perdagangan Luar Negeri (SPTP sudah termasuk SIPO dan e-SKA)	SS1.01	06	Meningkatkan pelayanan perizinan dan pengembangan pemanfaatan fasilitas ekspor dan impor	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Daglu
C.2.4	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Berjangka Komoditi				
1.	Pengembangan Sistem Informasi Pasar Lelang Komoditi	SS5.01	01	Meningkatkan sinergitas Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti
2.		SS5.01	02	Meningkatkan manfaat pelaksanaan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti
3.	Pengembangan Sistem Resi Gudang	SS5.01	01	Meningkatkan sinergitas Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti
4.		SS5.01	02	Meningkatkan manfaat pelaksanaan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti
5.	Pemeliharaan Sistem Lelang Komoditi	SS6.01	03	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
				pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	
C.2.5	Aplikasi Khusus Pusat Data dan Sistem Informasi				
1.	Pengembangan Aplikasi PDSI Center	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
C.2.6	Aplikasi Khusus Fungsi Audit				
1.	Pembangunan Sistem Manajemen Audit	SS6.01	06	Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Itjen
D	Aplikasi Khusus Sistem Penghubung Pemerintahan				
1.	Pengembangan Sistem Penghubung Kemendag	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
E	Pengembangan Sistem Informasi Analitikal Kemendag				
1.	Sosialisasi Sistem Informasi Perdagangan (SIP)	SS6.01	03	Meningkatkan kualitas sarana dan prasaran penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
2.	Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan (SIP)	SS6.01	03	Meningkatkan kualitas sarana dan prasaran penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
a.	Pengembangan Data Warehouse Kemendag	SS6.01	03	Meningkatkan kualitas sarana dan prasaran penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
b.	Pengembangan Business Intelligence Kemendag	SS6.01	03	Meningkatkan kualitas sarana dan prasaran penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
c.	Pembangunan Portal/Dashboard SIP	SS6.01	03	Meningkatkan kualitas sarana dan prasaran penunjang dan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
				pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	
F.	Infrastruktur TIK				
1.	Peremajaan perangkat pada kantor pusat dan cabang Kemendag	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
2.	Pengembangan perangkat infrastruktur	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
3.	Penguatan koneksi Internet	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
4.	Penyediaan sistem monitoring kinerja infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pemantauan layanan aplikasi	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
5.	<i>Maintenance</i> tahunan infrastruktur TI	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
				komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	
6.	Penyediaan <i>subscriptions software</i>	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
G.	Keamanan TIK				
1.	Implementasi <i>framework</i> keamanan aplikasi untuk menyediakan kontrol yang sesuai berdasar <i>threat</i> dan <i>vulnerability</i> untuk menekan potensi resiko keamanan aplikasi	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
2.	Implementasi <i>framework</i> penguatan keamanan akses <i>database</i> .	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
3.	Kajian dan implementasi <i>centralized antimalware</i> untuk <i>workstation</i>	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
4.	Kajian dan desain sistem SIEM	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
5.	Kajian dan desain sistem penanganan pasca insiden dalam kerangka komputer forensik	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
H.	Tata Kelola TIK				
1.	Penyederhanaan Birokrasi Organisasi TIK dan Data	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	Ropeg dan PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
2.	Pembentukan CSIRT Kemendag	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	Ropeg dan PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
I.	Manajemen TIK				
1.	Penguatan Kompetensi SDM TIK dan Data	SS7.01	02	Membangun manajemen SDM berbasis kompetensi yang terintegrasi	Ropeg dan PDSI (PIC: Bagian TU)

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
2.	Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola dan Manajemen Data	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK dan Pokja Data)
3.	Penyesuaian Kebijakan dan SOP TI dengan menambah lingkup SMLTI, SMKI, Integrasi Situs Web Eselon 1 ke Kemendag, beserta dengan pengesahan SOP TIK dan Data	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
4.	Pelaksanaan <i>Assessment</i> Indeks Keamanan Informasi secara periodik	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK dan Pokja Infrastruktur)
5.	Resertifikasi dan Surveillance lingkup Sertifikasi ISO 9001:2015	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
6.	Resertifikasi dan Surveillance lingkup Sertifikasi ISO 27001:2013	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
				komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	
7.	Pengelolaan web dan CMS secara terintegrasi dan pengesahan kebijakan integrasi web	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
8.	Update DRP	SS6.01	03	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
9.	Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE seluruh Kemendag	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
10.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kemendag	SS6.02	01	Memperkuat pelayanan publik yang responsif	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
11.	Evaluasi Pencapaian RISPBE dan Maturity SPBE	SS6.01	02	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi Informasi yang terintegrasi	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
J.	Audit TIK				

NO.	NAMA INISIATIF	KODE SASARAN STRATEGIS	KODE ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI ORGANISASI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
1.	Audit Infrastruktur TIK	SS6.01	02	Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan	Inspektorat
2.	Audit Aplikasi TIK	SS6.01	02	Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan	Inspektorat
3.	Audit Keamanan TIK	SS6.01	02	Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan	Inspektorat

11.2. Deskripsi Rencana Inisiatif

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
A	Arsitektur Bisnis & Data		
1.	Penyusunan detail arsitektur data Kemendag	Terkait arsitektur data PDSI selaku walidata pada tingkat pusat yang ditetapkan oleh Kemendag perlu untuk memastikan bahwa: - kebijakan terkait data telah mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia	PDSI (PIC: Pokja Data)
2.		PDSI selaku walidata pada tingkat pusat yang ditetapkan oleh Kemendag perlu untuk mengidentifikasi dan menetapkan: - Forum data; - Produsen data; - Metadata	PDSI (PIC: Pokja Data)
B	Arsitektur Layanan		
B.1	Layanan Administrasi Pemerintahan		
1.	Pengembangan portal administrasi pemerintahan Kemendag - Portal Intranet Kemendag	Perlu untuk mengembangkan portal administrasi pemerintahan Kemendag yang bersifat intranet yang bertujuan sebagai portal yang menyediakan akses ke semua hal yang dibutuhkan pekerja.	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
2.	Portal <i>Mobile</i> Layanan Adminsitasi Pemerintahan	Perlu untuk mengembangkan portal <i>Mobile</i> administrasi pemerintahan Kemendag yang bertujuan sebagai portal yang menyediakan akses ke semua hal yang dibutuhkan pekerja yang lebih praktis	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
B.2	Layanan Publik		
1.	Pengembangan portal layanan publik terintegrasi Kemendag (PPID, JDIH)	Perlu untuk mengembangkan portal layanan publik terintegrasi Kemendag (PPID, JDIH) yang dapat diakses oleh publik, Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Perdagangan.	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi), Humas, & Rokum
2.	Pengembangan portal <i>mobile</i> layanan publik Kemendag	Perlu untuk mengembangkan portal <i>Mobile</i> layanan publik Kemendag yang bertujuan sebagai portal yang menyediakan akses ke semua hal yang dibutuhkan oleh publik yang lebih praktis	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Humas
3.	Integrasi layanan perizinan Kemendag (SIPERDAG)		
a.	Integrasi SIPERDAG dengan OSS	Perlu untuk mengintegrasikan SIPERDAG denga OSS untuk perdagangan dalam negeri sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PDN

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
b.	Integrasi SIPERDAG dengan INSW	Perlu untuk mengintegrasikan SIPERDAG dengan INSW untuk memudahkan urusan pelaku usaha terkait dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik.	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Daglu
c.	Integrasi SIPERDAG dengan KSWP	Perlu untuk mengintegrasikan SIPERDAG dengan KSWP untuk memudahkan urusan pelaku usaha terkait urusan perpajakan.	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Rokeu
d.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Luar Negeri (INATRADE)	Perlu untuk mengintegrasikan SIPERDAG dengan INATRADE untuk memudahkan urusan pelaku usaha terkait layanan perijinan di bidang perdagangan Secara elektronik	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Daglu
e.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Dalam Negeri (SIPT)	Perlu untuk mengintegrasikan SIPERDAG dengan SIPT untuk memudahkan urusan pelaku usaha terkait penerbitan izin perdagangan dalam negeri	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bapokting
f.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (SIMPKTN)	Perlu untuk mengintegrasikan SIPERDAG dengan SIMPKTN agar tercipta transparansi antara urusan pelaku usaha dan perlindungan konsumen dan tata tertib niaga	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
g.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)	Perlu untuk mengintegrasikan SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai langkah mengembangkan dan memberdayakan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
		sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi	
h.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem <i>Surveyor</i>	Perlu untuk mengintegrasikan SIPERDAG dengan Sistem <i>Surveyor</i> guna menciptakan transparansi proses <i>survey</i> yang dilakukan oleh <i>surveyor</i> dan pelaku usaha, sehingga dapat mencegah kecurangan dalam menentukan kuota impor	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PDN
4.	Pemeliharaan SIPERDAG	Pemeliharaan dilakukan untuk mendukung berjalannya sistem pada proses bisnis	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PDN
5.	Pengembangan Layanan Satu Data Perdagangan (data.kemendag.go.id)	Perlu untuk mengembangkan Layanan Satu Data Perdagangan yang menampilkan infografis perkembangan perdagangan di segala sektor	PDSI (PIC: Pokja Data)
6.	Pengembangan Situs Web Kemendag	Pengembangan situs web Kemendag digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan sektor perdagangan dengan memuat informasi kebijakan perdagangan, kegiatan perdagangan di Indonesia, kegiatan terkait dengan Sektor Perdagangan, dan Profil Kemendag	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
C	Arsitektur Aplikasi		
C.1	Pengembangan Aplikasi Umum		
1.	Perencanaan - Percepatan SPBE Nasional	Menunggu aplikasi percepatan SPBE	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Roren

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
2.	Penganggaran - Percepatan SPBE Nasional	Menunggu aplikasi precepatan SPBE	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Roren
3.	Keuangan - Percepatan SPBE Nasional	Menunggu aplikasi precepatan SPBE	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Rokey
4.	Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah - Percepatan SPBE Nasional	Menunggu aplikasi precepatan SPBE	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Roren
5.	Akuntabilitas Kinerja - Percepatan SPBE Nasional	Menunggu aplikasi precepatan SPBE	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg
6.	Pemantauan dan Evaluasi - Percepatan SPBE Nasional	Menunggu aplikasi precepatan SPBE	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Romum
7.	Kearsipan - Percepatan SPBE Nasional	Menunggu aplikasi precepatan SPBE	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Romum
8.	Kepegawaian - Percepatan SPBE Nasional	Menunggu aplikasi precepatan SPBE	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg
9.	Pengaduan Publik - Percepatan SPBE Nasional	Menunggu aplikasi precepatan SPBE	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Humas
10.	Pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan (<i>Learning Management System</i>)	Menunggu aplikasi precepatan SPBE	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg
C.2	Pengembangan Aplikasi Khusus		

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
C.2.1	Aplikasi Khusus Fungsi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)		
1.	Dashboard Portal PKTN		
a.	Pengembangan Sistem Informasi PKTN terintegrasi (SIMPKTN) –	Perlu untuk mengembangkan integrasi SIMPKTN (Sistem Informasi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga) guna untuk memudahkan perizinan, pendaftaran, pengaduan, konsumen dan pengawasan usaha	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
2.	Modul Perlindungan Konsumen		
a.	Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWA-PK)	Sistem pengawasan perlindungan konsumen (SISWA SPK) bertujuan untuk melayani pengaduan konsumen secara <i>online</i>	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Dit. PK
b.	Portal Nasional Perlindungan Konsumen	Portal Nasional Perlindungan Konsumen bertujuan untuk dapat meningkatkan keberdayaan konsumen, mewujudkan perlindungan konsumen yang sinergis dan terintegrasi bagi kementerian lembaga dan pemangku kepentingan terkait	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Dit. PK
c.	Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi	Megembangkan modul Perlindungan Konsumen terkait pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual dalam bahasa indonesia bagi produk	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Dit. PK

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
	Produk Telematika dan Produk Elektronika	telematika dan produk elektronika sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen	
3.	Modul Standarisasi dan Pengendalian Mutu		
a.	Aplikasi laboratorium Information Management System (LIMS)	Aplikasi untuk menangani proses bisnis pengujian di lingkungan Balai Pengujian Mutu Barang Dit. Standarisasi dan Pengendalian Mutu	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
b.	Sistem Informasi Dokumen Mutu BPMB	Perlu untuk mengembangkan <i>Website</i> BPMB untuk mendukung proses bisnis terkait promosi Balai Pengujian Mutu Barang maupun interaksi Pelanggan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
c.	LPK Online	LPK <i>Online</i> bertujuan untuk pendaftaran dan pelaporan Lembaga Penilaian Kesesuaian secara <i>online</i>	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
d.	Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	Nomor Pendaftaran Barang digunakan untuk dapat memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
e.	TPP online	Perlu untuk mengembangkan aplikasi TPP Online untuk mendukung proses bisnis terkait Penerbitan Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
f.	Sistem Informasi Penguji Mutu Barang	Untuk meningkatkan pengawasan barang beredar dan tertib ukur diperlukan pengembangan Sistem Informasi Penguji Mutu Barang	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
g.	E-Dupak Jabfung PMB	Aplikasi untuk pengajuan angka kredit Jabfung PMB	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
h.	Sistem Informasi Sertifikasi Produk	Pelayanan sertifikasi di bidang produk dan permohonan sertifikasi produk secara <i>online</i> yang menghasilkan Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI)	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
i.	Sistem Informasi Sertifikasi Personil	Pelayanan sertifikasi di bidang personil digunakan untuk meningkatkan daya saing terhadap produk ekspor di pasar global serta dalam rangka perlindungan konsumen dibidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
j.	Sistem Informasi Pelayanan Kalibrasi	Aplikasi untuk menangani proses bisnis kalibrasi di lingkungan Balai Kalibrasi, Dit. Standarisasi dan Pengendalian Mutu	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
k.	Portal Inatrimis	Portal Inatrimis bertujuan untuk memberikan informasi kepada eksportir tentang regulasi teknis atau persyaratan mutu produk yang diterapkan di negara tujuan ekspor (Uni Eropa, Tiongkok, Korea Selatan,	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
		Negara Aggota GCC (The Gulf Cooperation Council), Amerika Serikat, Kanada, Malaysia, Filipina, dan Kazakhstan)	
1.	Modul Pegaduan Pelayanan Ditstandalitu	Mengembangkan modul pengaduan pelayanan sebagai sarana dalam memperkuat pelayanan publik yang responsif	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
4.	Modul Metrologi		
a.	Sistem Informasi Perizinan Metrologi	Aplikasi pelayanan perizinan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) memberikan informasi jenis pelayanan, persyaratan pengajuan dan perizinan UTTP yang telah terbit	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
b.	Sistem Informasi UPTP (Layanan non-perizinan)	Melakukan pengembangan berupa perbaikan fitur yang telah ada seperti: <i>digital signature</i> , integrasi dengan Simponi, e-lab terkait pencatatan dokumen cerapan pengujian, dll untuk mendukung proses bisnis terkait Pengujian UTTP, Verifikasi Standar Ukuran Dan Kalibrasi	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
c.	E-Dupak (Sistem Pengelolaan DUPAK)	Diperlukan pengembangan pada E-Dupak berupa perbaikan <i>error</i> yang ada, penyederhanaan input penilaian, dan rekapitulasi untuk mendukung proses bisnis terkait Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
d.	<i>E-Assessment</i> SKKPTTU (Sistem informasi Penilaian UML)	Sistem informasi penilaian UML yang memiliki fitur dashboard, data rekap UML, permohonan penilaian UML, verifikasi berkas, <i>assessment</i> UML, penerbitan ulang SKKPTTU, dan <i>tracking assessment</i>	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
5.	Modul Pengawasan Barang Beredar dan Jasa		
a.	Aplikasi Sistem Pelaporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Perlu untuk mengembangkan Sistem Pelaporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa yang dilengkapi dengan <i>database</i> (berdasarkan kategori standar produk) untuk mendukung proses bisnis terkait Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar terukur	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditwas
6.	Modul Tertib Niaga		
a.	Pendaftaran barang Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, Lingkungan, Hidup (K3L)	Perlu untuk penambahan modul terkait tertib niaga berupa pendaftaran barang Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, Lingkungan Hidup (K3L) bertujuan sebagai persyaratan mutu alat perlindungan konsumen dan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
b.	Sistem Informai Petugas Pengawas	Penambahan modul berupa sistem informasi petugas pengawas bertujuan untuk dapat memudahkan dalam pengawasan barang beredar	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
c.	Aplikasi Penugasan Petugas Pengawas	Aplikasi ini dibutuhkan untuk dapat memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan barang beredar	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
d.	Aplikasi Pelaporan Pengawasan tertib Niaga	Terkait modul tertib niaga membutuhkan pengembangan berupa Aplikasi Pelaporan Pengawasan tertib Niaga yang bertujuan sebagai sarana dalam meningkatkan tertib niaga bagi pelaku usaha	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
7.	Integrasi Data Dari Seluruh Aplikasi Eksisting	Perlu untuk mengintegrasikan data dari seluruh aplikasi eksisting dengan tujuan untuk memudahkan proses penelusuran data dan informasi yang dapat mengoptimalkan proses bisnis	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
8.	Pemeliharaan SIM PKTN	Pemeliharaan dilakukan untuk mendukung berjalannya sistem pada proses bisnis	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
C.2.2	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Dalam Negeri		
1.	Pengembangan Etalase Produk Indonesia	Aplikasi ini dibutuhkan dengan tujuan untuk melakukan <i>display</i> produk perdagangan, sehingga dapat membantu para pelaku usaha untuk mempromosikan produk mereka (Peningkatan nilai tambah produk)	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & P3DN
2.	Pembangunan Sistem Pemantauan Harga, <i>Stock</i> dan Gudang	Aplikasi ini bertujuan untuk dapat melakukan pemantauan terhadap harga, stok dan gudang	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
3.	Pengembangan <i>Dashboard</i> Portal Logistik		

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
a.	Pengembangan Sistem Pelaporan Manifest Domestik	Pengembangan sistem pelaporan manifest domestik bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait ketersediaan data jenis barang dan volume perdagangan antarpulau dalam penyusunan kebijakan perdagangan antarpulau/daerah	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
b.	Pengembangan Sistem Informasi Pasar Rakyat	Pengembangan sistem informasi pasar rakyat diperlukan untuk mendukung proses bisnis terkait penataan jaringan distribusi/pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, dan pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
c.	Pengembangan Sistem Informasi Gerai Maritim/ Tol Laut	Pengembangan sistem informasi gerai maritim digunakan untuk memberikan akses informasi terkait program gerai maritim, pelaporan secara online hasil pendataan, pemantauan dan evaluasi jenis, jumlah dan harga barang sesuai dengan aanat Perpres 70 Tahun 2017. Sehingga dapat mempermudah akses informasi dan pelaporan kepada pimpinan dan juga masyarakat luas.	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
d.	Pengembangan Sistem Informasi Gudang	Sistem informasi Gudang merupakan aplikasi yang digunakan untuk melaporkan mutase stok dalam gudang yang telah disurvei oleh Kemendag	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
e.	Pembangunan Modul Pasar Perbatasan	Pembangunan Modul Pasar Perbatasan diperlukan untuk membantu dalam mengawasi kegiatan perdagangan di perbatasan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
4.	Pemeliharaan Portal Logistik	Pemeliharaan dilakukan untuk mendukung berjalannya sistem pada proses bisnis	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
5.	Pembangunan Sistem Fasilitator Edukasi e-Commerce	Merupakan aplikasi pelaku usaha yang telah dibina dan atau diidentifikasi (Pusdatin perlu mengantisipasi jika kebutuhan data aktifitas e-commerce setelah RPP diterbitkan yang nantinya bersumber dari satu pintu yaitu BPS, belum ada alokasi anggaran untuk aplikasi ini)	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Binus
6.	Pembangunan Sistem Laporan Realisasi B2 (Barang Berbahaya)	Tujuan dari aplikasi ini untuk mendukung pengawasan barang yang termasuk dalam kategori penting dan berbahaya	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bapokting
7.	Pengembangan <i>Dashboard</i> Bapokting yang Terintegrasi dengan <i>Dashboard</i> Kemendag	Mengembangkan dan memberdayakan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung keberjalanan proses bisnis	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bapokting
C.2.3	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Luar Negeri		
1.	Pembangunan Sistem Indonesia <i>Trade Digital Promotion</i>	Sistem ini diperlukan untuk membantu proses promosi pada sektor perdagangan di indonesia	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PEN

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
2.	Pengembangan Sistem Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan / <i>E-Trade Financing</i>	Dalam rangka mendorong aksesibilitas pelaku usaha terhadap perbankan maka perlu adanya upaya pemerintah untuk memfasilitasi akses pembiayaan. Terutamanya dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dimana memberikan kemudahan akses dan transparansi sehingga perlu fasilitasi pelaku usaha melalui sistem elektronik berbasis web.	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditfas
3.	Pengembangan SI Perundingan Internasional	Mengembangkan Sistem Informasi yang mendukung Perundingan Internasional untuk Mendukung Proses Bisnis <i>Leading Sector Perundingan Internasional</i>	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PPI
4.	Pengembangan Sistem Perizinan Terpadu Perdagangan Luar Negeri (SPTP sudah termasuk SIPO dan e-SKA)	Mengembangkan Sistem Perizinan Perdagangan Luar Negeri dengan tujuan meningkatkan pelayanan perizinan dan pengembangan pemanfaatan fasilitas ekspor dan impor	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Daglu
C.2.4	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Berjangka Komoditi		
1.	Pengembangan Sistem Informasi Pasar Lelang Komoditi	Mengembangkan Sistem Informasi Pasar Lelang Komoditi untuk mendukung proses bisnis mengenai Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan terkait Pasar Lelang Komoditi dalam rangka perbaikan iklim usaha perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
2.	Pengembangan Sistem Resi Gudang	Mengembangkan Sistem Sistem Resi Gudang untuk mendukung proses bisnis mengenai Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan terkait Sistem Resi Gudang dalam rangka perbaikan iklim usaha perdagangan	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti
3.	Pemeliharaan Sistem Lelang Komoditi	Pemeliharaan dilakukan untuk mendukung berjalannya sistem pada proses bisnis	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti
C.2.5	Aplikasi Khusus Pusat Data dan Sistem Informasi		
1.	Pengembangan Aplikasi PDSI <i>Center</i>	Perlu untuk mengembangkan Aplikasi PDSI <i>Center</i> untuk mendukung proses <i>tracking status, dashboard: history</i> terbaru (penyelesaian permasalahan), pemisahan insiden: layanan/keamanan.	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
C.2.6	Aplikasi Khusus Fungsi Audit		
1.	Pembangunan Sistem Manajemen Audit	Membangun Sistem Manajemen Audit yang dapat memfasilitasi proses audit secara menyeluruh di lingkungan Kemendag	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Itjen
D	Aplikasi Khusus Sistem Penghubung Pemerintahan		
1.	Pengembangan Sistem Penghubung Kemendag	Mengembangkan sistem penghubung Kemendag yang bertujuan untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
E	Pengembangan Sistem Informasi Analitikal Kemendag		
1.	Sosialisasi Sistem Informasi Perdagangan (SIP)	Melaksanakan sosialisasi untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemberdayaan sistem dalam mendukung proses bisnis	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
2.	Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan (SIP)	Mengembangkan sistem Informasi Perdagangan (SIP) untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemberdayaan sistem dalam mendukung proses bisnis	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
a.	Pengembangan <i>Data Warehouse</i> Kemendag	Mengembangkan <i>Data Warehouse</i> Kemendag untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemberdayaan sistem dalam mendukung proses bisnis	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
b.	Pengembangan <i>Business Intelligence</i> Kemendag	<i>Business Intelligence</i> (BI) adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Teknologi BI dapat menangani data yang tak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar untuk membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan selain itu membuat kesempatan strategi bisnis yang baru. Tujuan dari BI yaitu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut. Mengidentifikasi kesempatan yang baru dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
		berdasarkan wawasan dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang. <i>Business Intelligence</i> di Kemendag dapat digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Eksekutif atau EIS (<i>Executive Information System</i>)	
c.	Pengembangan Portal/ <i>Dashboard</i> SIP	Mengembangkan Portal/ <i>Dashboard</i> SIP untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemberdayaan sistem dalam mendukung proses bisnis	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
F	Infrastruktur IT		
1.	Peremajaan perangkat pada kantor pusat dan cabang Kemendag	Melakukan peremajaan terhadap perangkat-perangkat infrastruktur yang sudah memasuki masa <i>end of life</i> , peremajaan umumnya dilakukan dengan mengganti perangkat lama dengan perangkat baru.	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
2.	Pengembangan perangkat infrastruktur	Pengembangan perangkat infastruktur berupa pengadaan perangkat <i>networking</i> .	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
3.	Penguatan koneksi Internet	Penguatan koneksi internet (<i>2 provider</i>), WAN dan penguatan koneksi DC dan DRC pada segmen <i>backend</i> , untuk mendukung layanan <i>backup</i> aplikasi dan data	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
4.	Penyediaan sistem monitoring kinerja infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pemantauan layanan aplikasi	Penyediaan sistem monitoring kinerja aplikasi untuk memantau <i>performance</i> dan <i>awaibility</i> dari aplikasi	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
5.	<i>Maintenance</i> tahunan infrastruktur TI	<i>Maintenance</i> berkala perangkat infrastruktur IT	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
6.	Penyediaan <i>subscriptions software</i>	Pemeliharaan subskripsi, <i>annual technical support</i> , dan lisensi dari <i>software</i> yang saat ini digunakan di lingkungan Kemendag	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
G	Keamanan IT		
1.	Implementasi <i>framework</i> keamanan aplikasi untuk menyediakan kontrol yang sesuai berdasar <i>threat</i> dan <i>vulnerability</i> untuk menekan potensi resiko keamanan aplikasi	Implementasi <i>framework</i> keamanan aplikasi untuk menyediakan kontrol yang sesuai berdasar <i>threat</i> dan <i>vulnerability</i> untuk menekan potensi resiko keamanan	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
2.	Implementasi <i>framework</i> penguatan keamanan akses <i>database</i> .	Implementasi <i>framework</i> menguatkan keamanan akses <i>database</i> , misal kontrol berupa <i>access control hardening</i> pada RDBMS untuk mengatasi potensi kerentanan <i>root privileges</i> .	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
3.	Kajian dan implementasi <i>centralized antimalware</i> untuk <i>workstation</i>	Kajian sistem server antimalware untuk menyediakan proses update yang tersentralisasi untuk <i>end-user</i> .	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
4.	Kajian dan desain sistem SIEM	Pengkajian sistem <i>security incident & event management</i> sebagai media <i>logging</i> dan pencatatan insiden keamanan yang pada perangkat-perangkat di kemendag	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
5.	Kajian dan desain sistem penanganan pasca insiden dalam kerangka komputer forensik	Kajian dan desain sistem penanganan pasca insiden dengan memanfaatkan logging untuk mendapatkan bukti digital	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
H	TATA KELOLA TIK		
1.	Penyederhanaan Birokrasi Organisasi TIK dan Data	<p>Penyesuaian birokrasi terkait pengelolaan TIK dan Data. Pengelolaan TIK dan Data perlu dilakukan secara tersentral oleh PDSI. Pengadaan, perawatan, pemantauan, dan pengelolaan aset terkait TIK juga merupakan kewenangan dan berada di bawah koordinasi PDSI.</p> <p>Dalam melakukan penyederhanaan organisasi TIK dan Data untuk mematuhi Surat Edaran mengenai Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, diperlukan adanya pembagian beban kerja yang adil dan merata kepada seluruh personel yang ada di dalam PDSI. Oleh karena itu, diperlukan adanya kegiatan analisis beban kerja SDM TIK untuk menyesuaikan kebutuhan SDM terkait perubahan struktur organisasi dari bentuk struktural menjadi bentuk fungsional.</p>	Ropeg dan PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
2.	Pembentukan CSIRT Kemendag	Pembentukan Tim <i>Computer Security Incident Response Team</i> . Tim ini bertanggung jawab atas insiden	Ropeg dan PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
		keamanan informasi, terlebih dalam kasus dimana terdapat kasus insiden keamanan informasi yang memerlukan eskalasi dan bersifat darurat atau penanganan dengan segera.	
I	MANAJEMEN TIK		
1.	Penguatan Kompetensi SDM TIK dan Data	Penguatan kompetensi SDM yang mengelola atau bertanggung jawab terkait TIK dan Data yang ada di Kemendag. Penguatan ini diperlukan untuk menyesuaikan kompetensi SDM TIK dengan perkembangan tren teknologi dan kebutuhan yang menyertainya. Penguatan ini dapat berbentuk pelatihan, sertifikasi SKKNI maupun internasional, seminar, workshop, dan pembinaan teknis.	Ropeg dan PDSI (PIC: Bagian TU)
2.	Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola dan Manajemen Data	Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan prosedur terkait Tata Kelola dan Manajemen Data. Perlu terdapat kebijakan terkait pengelolaan data di Kemendag. Kebijakan tersebut adalah untuk mengelola data semisal <i>master data</i> , <i>meta data</i> , <i>data cleansing</i> , dsb. Kebijakan terkait data tidak hanya bias bersifat kebijakan, namun juga perlu diturunkan dalam bentuk prosedur yang menjadi panduan dalam level teknis.	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK & Pokja Data)

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
		Kebijakan ini juga diperlukan untuk bias berkolaborasi dengan Satu Data Nasional.	
3.	Penyesuaian Kebijakan dan SOP TIK dengan menambah lingkup SMLTI, SMKI, Integrasi Situs Web Eselon 1 ke Kemendag, beserta dengan pengesahan SOP TIK dan Data	Kebijakan dan SOP terkait TIK perlu disesuaikan dengan pertimbangan memperluas lingkup pengelolaan Manajemen Layanan TI, Manajemen Keamanan Informasi, Integrasi Situs Web Eselon 1 atau Unit Kerja ke Kemendag. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu diturunkan menjadi pedoman yang lebih teknis berupa SOP.	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
4.	Pelaksanaan <i>Assessment</i> Indeks Keamanan Informasi secara periodik	Sesuai dengan ketentuan BSSN yang bertanggung jawab atas keamanan informasi. Bahwasanya Indeks Keamanan Informasi perlu dilaksanakan secara berkala baik yang dilakukan oleh Kemendag secara mandiri dan oleh BSSN.	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK & Pokja Infrastruktur)
5.	Resertifikasi dan Surveillance lingkup Sertifikasi ISO 9001:2015	Kemendag sudah memiliki Sertifikasi ISO 9001:2015. Oleh karena itu, diperlukan tindakan surveillance yang dilakukan setiap tahun untuk menjaga status tersertifikat dan resertifikasi setiap tiga tahun sekali.	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
6.	Resertifikasi dan Surveillance lingkup Sertifikasi ISO 27001:2013	Kemendag sudah memiliki Sertifikasi ISO 27001:2013. Oleh karena itu, diperlukan tindakan surveillance yang dilakukan setiap tahun untuk menjaga status tersertifikat dan resertifikasi setiap tiga tahun sekali.	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
7.	Pengelolaan web dan CMS secara terintegrasi dan pengesahan kebijakan integrasi web	Pengelolaan web yang ada di tingkat Eselon 2 perlu dilakukan secara terintegrasi. Integrasi tersebut adalah dengan pengelolaan yang terpusat oleh PDSI dan unit kerja terkait memiliki kewenangan untuk mengisi dan mengelola konten web. Pengelolaan ini perlu didukung dengan kebijakan yang memaksa dan mengikat.	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
8.	Update DRP	DRP yang ada perlu secara bertahap dan berkala diperbaharui dengan melingkup hal yang lebih luas.	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
9.	Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE seluruh Kemendag	Sesuai dengan amanat Perpres No.95 Tahun 2018, bahwa masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan manajemen risiko terkait TIK yang ada di instansi tersebut. Kemendag perlu melakukan assessment dan penanganan risiko TIK yang ada pada seluruh unit kerja yang ada di Kemendag.	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
10.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kemendag	Sesuai dengan amanat Perpres No.95 Tahun 2018, bahwa masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE di instansi tersebut. Kemendag perlu melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap seluruh layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang ada di Kemendag.	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)

NO.	NAMA INISIATIF	DESKRIPSI	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
11.	Evaluasi Pencapaian RISPBE dan Maturity SPBE	Pelaksanaan RISPBE perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui pencapaian dari RISPBE di masing-masing tahun. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi acuan untuk penyesuaian RISPBE dengan kondisi terbaru dari Kemendag. Selain itu, diperlukan juga mengetahui maturity indeks SPBE.	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
J	AUDIT TIK		
1.	Audit Infrastruktur TIK	Proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.	Inspektorat
2.	Audit Aplikasi TIK	Proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.	Inspektorat
3.	Audit Keamanan TIK	Proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap keamanan SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara keamanan SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.	Inspektorat

11.3. Peta Rencana

Tabel 11-2 Peta Rencana Inisiatif Arsitektur Bisnis, Data, Layanan dan Aplikasi

NO.	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
A	Peta Rencana Data						
1.	Penyusunan detail arsitektur satu data Kemendag						PDSI (PIC: Pokja Data)
B	Peta Rencana Layanan						
B.1	Layanan Administrasi Pemerintahan						
1.	Pengembangan portal administrasi pemerintahan Kemendag - Portal Intranet Kemendag						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
2.	Portal <i>Mobile</i> Layanan Adminsitrase Pemerintahan						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
B.2	Layanan Publik						
1.	Pengembangan portal layanan publik terintegrasi Kemendag (PPID, JDIH)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi), Humas, & Rokum
2.	Pengembangan portal <i>mobile</i> layanan publik Kemendag						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Humas

NO.	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
3.	Integrasi layanan perizinan Kemendag (SIPERDAG)						
a.	Integrasi SIPERDAG dengan OSS						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PDN
b.	Integrasi SIPERDAG dengan INSW						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Daglu
c.	Integrasi SIPERDAG dengan KSWP						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Rokeu
d.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Luar Negeri (Inatrade)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Daglu
e.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Dalam Negeri (SIPT)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bapokting
f.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (SIMPKTN)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
g.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti
h.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem <i>Surveyor</i>						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PDN
4.	Pemeliharaan SIPERDAG						
5.	Pengembangan Layanan Satu Data Perdagangan (data.kemendag.go.id)						PDSI (PIC: Pokja Data)

NO.	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
6.	Pengembangan Situs Web Kemendag						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
7.	Pengembangan Situs Bangga Buatan Indonesia						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
C	Peta Rencana Aplikasi						
C.1	Pengembangan Aplikasi Umum						
1.	Perencanaan - Percepatan SPBE Nasional						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Roren
2.	Penganggaran - Percepatan SPBE Nasional						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Roren
3.	Keuangan - Percepatan SPBE Nasional						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Rokeu
4.	Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah - Percepatan SPBE Nasional						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Roren
5.	Akuntabilitas Kinerja - Percepatan SPBE Nasional						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg
6.	Pemantauan dan Evaluasi - Percepatan SPBE Nasional						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Romum
7.	Kearsipan - Percepatan SPBE Nasional						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Romum
8.	Kepegawaian - Percepatan SPBE Nasional						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg

NO.	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
9.	Pengaduan Publik - Percepatan SPBE Nasional						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi), Humas
10.	Pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan (Learning Management System)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg
C.2	Pengembangan Aplikasi Khusus						
C.2.1	Aplikasi Khusus Fungsi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)						
1.	Dashboard Portal PKTN						
a.	Pengembangan Sistem Informasi PKTN terintegrasi (SIMPKTN)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
2.	Modul Perlindungan Konsumen						
a.	Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWA-PK)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Dit. PK
b.	Portal Nasional Perlindungan Konsumen						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Dit. PK
c.	Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Produk Elektronika						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Dit. PK
3.	Modul Standarisasi dan Pengendalian Mutu						
a.	Aplikasi laboratorium Information Management System (LIMS)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu

NO.	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
b.	Sistem Informasi Dokumen Mutu BPMB						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
c.	LPK Online						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
d.	Nomor pendaftaran Barang (NPB)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
e.	Tanda Pengenal Produsen (TPP) online						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
f.	Sistem Informasi Penguju Mutu Barang						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
g.	E-Dupak Jabfung PMB						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
h.	Sistem Informasi Sertifikasi Produk						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu

NO.	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
i.	Sistem Informasi Sertifikasi Personil						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
j.	Sistem Informasi Pelayanan Kalibrasi						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
k.	Portal Inatrimis						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
1.	Modul Pegaduan Pelayanan Ditstandalitu						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
4.	Modul Metrologi						
a.	Sistem Informasi Perizinan Metrologi						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
b.	Sistem Informasi UPTP (Layanan non-perizinan)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
c.	E-Dupak (Sistem Pengelolaan DUPAK)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
d.	E-Assessment SKKPTTU (Sistem informasi Penilaian UML)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
5.	Modul Pengawasan Barang Beredar dan Jasa						

NO.	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
a.	Aplikasi Sistem Pelaporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditwas
6.	Modul Tertib Niaga						
a.	Pendaftaran barang Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, Lingkungan, Hidup (K3L)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
b.	Sistem Informai Petugas Pengawas						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
c.	Aplikasi Penugasan Petugas Pengawas						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
d.	Aplikasi Pelaporan Pengawasan tertib Niaga						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
7.	Integrasi Data Dari Seluruh Aplikasi Eksting						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
8.	Pemeliharaan SIM PKTN						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
C.2.2	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Dalam Negeri						
1.	Pengembangan Etalase Produk Indoensia						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & P3DN
2.	Pembangunan Sistem Pemantauan Harga, <i>Stock</i> dan Gudang						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog

NO.	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
3.	Pengembangan <i>Dashboard</i> Portal Logistik						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
a.	Pengembangan Sistem Pelaporan Manifest Domestik						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
b.	Pengembangan Sistem Informasi Pasar Rakyat						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
c.	Pengembangan Sistem Informasi Gerai Maritim/ Tol Laut						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
d.	Pengembangan Sistem Informasi Gudang						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
e.	Pembangunan Modul Pasar Perbatasan						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
4.	Pemeliharaan Portal Logistik						
5.	Pembangunan Sistem Fasilitator Edukasi e-Commerce						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Binus

NO.	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
6.	Pembangunan Sistem Laporan Realisasi B2 (Barang Berbahaya)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bapokting
7.	Pengembangan <i>Dashboard</i> Bapokting yang Terintegrasi dengan <i>Dashboard</i> Kemendag						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bapokting
C.2.3	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Luar Negeri						
1.	Pembangunan Sistem Indonesia Trade Digital Promotion						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PEN
2.	Pengembangan Sistem Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan / E-Trade Financing						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditfas
3.	Pengembangan SI Perundingan Internasional						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PPI
4.	Pengembangan Sistem Perizinan Terpadu Perdagangan Luar Negeri (SPTP sudah termasuk SIPO dan e-SKA)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Daglu
C.2.4	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Berjangka Komoditi						
1.	Pengembangan Sistem Informasi Pasar Lelang Komoditi						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti
2.	Pengembangan Sistem Resi Gudang						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti
3.	Pemeliharaan Sistem Lelang Komoditi						

NO.	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
C.2.5	Aplikasi Khusus Pusat Data dan Sistem Informasi						
1.	Pengembangan Aplikasi PDSI Center						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
C.2.6	Aplikasi Khusus Fungsi Audit						
1.	Pembangunan Sistem Manajemen Audit						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Itjen
D	Peta Rencana Sistem Penghubung Pemerintahan						
1.	Pengembangan Sistem Penghubung Kemendag						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
E	Peta Rencana Sistem Informasi Analitikal Kemendag						
1.	Sosialisasi Sistem Informasi Perdagangan (SIP)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
2.	Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan (SIP)						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
a.	Pengembangan Data Warehouse Kemendag						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
b.	Pengembangan Business Intelligence Kemendag						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
c.	Pengembangan Portal/ Dashboard SIP						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
F	Peta Rencana Infrastruktur TI						

NO.	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
1.	Peremajaan perangkat pada kantor pusat dan cabang Kemendag						PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
2.	Pengembangan perangkat infrastruktur						PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
3.	Penguatan koneksi Internet						PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
4.	Penyediaan sistem monitoring kinerja infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pemantauan layanan aplikasi						PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
5.	<i>Maintenance</i> tahunan infrastruktur TI						PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
6.	Penyediaan <i>subscriptions software</i>						PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
G	Peta Rencana Keamanan TI						
1.	Implementasi <i>framework</i> keamanan aplikasi untuk menyediakan kontrol yang sesuai berdasar <i>threat</i> dan <i>vulnerability</i> untuk menekan potensi resiko keamanan aplikasi						PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
2.	Implementasi <i>framework</i> penguatan keamanan akses <i>database</i> .						PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
3.	Kajian dan implementasi <i>centralized antimalware</i> untuk <i>workstation</i>						PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)

NO.	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
4.	Kajian dan desain sistem SIEM						PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
5.	Kajian dan desain sistem penanganan pasca insiden dalam kerangka komputer forensik						PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
H	Peta Rencana Tata Kelola TIK						
1.	Penyederhanaan Birokrasi Organisasi TIK dan Data						Ropeg dan PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
2.	Pembentukan CSIRT Kemendag						Ropeg dan PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
I	Peta Rencana Manajemen TIK						
1.	Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola dan Manajemen Data						PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK & Pokja Data)
2.	Penyesuaian Kebijakan dan SOP TI dengan menambah lingkup SMLTI, SMKI, Integrasi Situs Web Eselon 1 ke Kemendag, beserta dengan pengesahan SOP TIK dan Data						PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
3.	Pelaksanaan <i>Assessment</i> Indeks Keamanan Informasi secara periodik						PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK & Pokja Infrastruktur)

NO.	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
4.	Resertifikasi dan Surveillance lingkup Sertifikasi ISO 9001:2015						PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
5.	Resertifikasi dan Surveillance lingkup Sertifikasi ISO 27001:2013						PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
6.	Pengelolaan web dan CMS secara terintegrasi dan pengesahan kebijakan integrasi web						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
7.	Update DRP						PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
8.	Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE seluruh Kemendag						PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
9.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kemendag						PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
10.	Penguatan Kompetensi SDM TIK dan Data						Ropeg dan PDSI (PIC: Bagian TU)
11.	Evaluasi Pencapaian RISPBE dan Maturity SPBE						PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
J	Peta Rencana Audit TIK						
1.	Audit Infrastruktur TIK						Inspektorat
2.	Audit Aplikasi TIK						Inspektorat
3.	Audit Keamanan TIK						Inspektorat

11.4. Strategi Sumberdaya Rencana Inisiatif

Tabel 11-3 Strategi Sumberdaya Arsitektur Bisnis, Data, Layanan, dan Aplikasi

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ <i>Upgrade/</i> <i>Maintenance</i>	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co- Sourcing
A	Arsitektur Bisnis & Data					
1.	Penyusunan detail arsitektur satu data Kemendag	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Co-sourcing</i>	<i>Insourcing</i>
B	Arsitektur Layanan					
B.1	Layanan Administrasi Pemerintahan *)					
1.	Pengembangan portal administrasi pemerintahan Kemendag - Portal Intranet Kemendag	<i>Upgrade</i>	Capex	Pengembangan	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Insourcing</i>
2.	Portal <i>Mobile</i> Layanan Adminsitirasi Pemerintahan	Baru	Capex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
B.2	Layanan Publik *)					

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ <i>Upgrade/ Maintenance</i>	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co- Sourcing
1.	Pengembangan portal layanan publik terintegrasi Kemendag (PPID, JDIH)	Baru	Capex	Pengembangan	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Insourcing</i>
2.	Pengembangan portal <i>mobile</i> layanan publik Kemendag	Baru	Capex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
3.	Integrasi layanan perizinan Kemendag (SIPERDAG)					
a.	Integrasi SIPERDAG dengan OSS	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Insourcing</i>
b.	Integrasi SIPERDAG dengan INSW	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Insourcing</i>
c.	Integrasi SIPERDAG dengan KSWP	Baru	Opex	Pengembangan	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
d.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Luar Negeri (Inatrade)	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
e.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Dalam Negeri (SIPT)	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ Upgrade/ Maintenance	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co- Sourcing
f.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (SIMPKTN)	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
g.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
h.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Surveyor	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
4.	Pemeliharaan SIPERDAG	<i>Maintenance</i>	Opex	Implementasi	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>
5.	Pengembangan Layanan Satu Data Perdagangan (data.kemendag.go.id)	Baru	Capex	Pengembangan	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Insourcing</i>
6.	Pengembangan Situs Web Kemendag	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Insourcing</i>
C	Arsitektur Aplikasi					
C.1	Pengembangan Aplikasi Umum					

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ Upgrade/ Maintenance	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co- Sourcing
1.	Perencanaan - Percepatan SPBE Nasional	Baru	<i>Opex</i>	Akuisisi/ Implementasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
2.	Penganggaran - Percepatan SPBE Nasional	Baru	<i>Opex</i>	Akuisisi/ Implementasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
3.	Keuangan - Percepatan SPBE Nasional	Baru	<i>Opex</i>	Akuisisi/ Implementasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
4.	Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah - Percepatan SPBE Nasional	Baru	<i>Opex</i>	Akuisisi/ Implementasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
5.	Akuntabilitas Kinerja - Percepatan SPBE Nasional	Baru	<i>Opex</i>	Akuisisi/ Implementasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
6.	Pemantauan dan Evaluasi - Percepatan SPBE Nasional	Baru	<i>Opex</i>	Akuisisi/ Implementasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
7.	Kearsipan - Percepatan SPBE Nasional	Baru	<i>Opex</i>	Akuisisi/ Implementasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
8.	Kepegawaian - Percepatan SPBE Nasional	Baru	<i>Opex</i>	Akuisisi/ Implementasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>
9.	Pengaduan Publik - Percepatan SPBE Nasional	Baru	<i>Opex</i>	Akuisisi/ Implementasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Co-sourcing</i>

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ <i>Upgrade/</i> <i>Maintenance</i>	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing
10.	Pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan (Learning Management System)	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Insourcing</i>
C.2	Pengembangan Aplikasi Khusus					
C.2.1	Aplikasi Khusus Fungsi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)					
1.	Dashboard Portal PKTN					
a.	Pengembangan Sistem Informasi PKTN terintegrasi (SIMPKTN) –	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
2.	Modul Perlindungan Konsumen					
a.	Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWA-PK)	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ Upgrade/ Maintenance	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co- Sourcing
b.	Portal Nasional Perlindungan Konsumen	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
c.	Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Produk Elektronika	Baru	<i>Capex</i>	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
3.	Modul Standarisasi dan Pengendalian Mutu					
a.	Aplikasi laboratorium Information Management System (LIMS)	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
b.	Sistem Informasi Dokumen Mutu BPMB	Baru	<i>Capex</i>	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
c.	LPK Online	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
d.	Nomor pendaftaran Barang (NPB)	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
e.	TPP online	Baru	<i>Capex</i>	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ Upgrade/ Maintenance	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co- Sourcing
f.	Sistem Informasi Penguji Mutu Barang	Baru	Capex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing
g.	E-Dupak Jabfung PMB	Upgrade	Opex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing
h.	Sistem Informasi Sertifikasi Produk	Baru	Capex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing
i.	Sistem Informasi Sertifikasi Personil	Upgrade	Opex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing
j.	Sistem Informasi Pelayanan Kalibrasi	Upgrade	Opex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing
k.	Portal Inatrimis	Upgrade	Opex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing
l.	Modul Pegaduan Pelayanan Ditstandalitu	Upgrade	Opex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing
4.	Modul Metrologi					
a.	Sistem Informasi Perizinan Metrologi	Upgrade	Opex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing
b.	Sistem Informasi UPTP (Layanan non-perizinan)	Upgrade	Opex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing
c.	E-Dupak (Sistem Pengelolaan DUPAK)	Upgrade	Opex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ Upgrade/ Maintenance	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing
d.	E-Assessment SKKPTTU (Sistem informasi Penilaian UML)	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
5.	Modul Pengawasan Barang Beredar dan Jasa					
a.	Aplikasi Sistem Pelaporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
6.	Modul Tertib Niaga					
a.	Pendaftaran barang Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, Lingkungan, Hidup (K3L)	Baru	<i>Capex</i>	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
b.	Sistem Informai Petugas Pengawas	Baru	<i>Capex</i>	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
c.	Aplikasi Penugasan Petugas Pengawas	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
d.	Aplikasi Pelaporan Pengawasan tertib Niaga	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ Upgrade/ Maintenance	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co- Sourcing
7.	Integrasi Data Dari Seluruh Aplikasi Saat Ini	Baru	Capex	Akuisisi	Outsourcing	Insourcing
8.	Pemeliharaan SIM PKTN	Maintenance	Opex	Implementasi	Insourcing	Insourcing
C.2.2	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Dalam Negeri					
1.	Pengembangan Etalase Produk Indoensia	Upgrade	Opex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing
2.	Pembangunan Sistem Pemantauan Harga, Stock dan Gudang	Baru	Capex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing
3.	Pengembangan <i>Dashboard</i> Portal Logistik					
a.	Pengembangan Sistem Pelaporan Manifest Domestik	Upgrade	Opex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing
b.	Pengembangan Sistem Informasi Pasar Rakyat	Upgrade	Opex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing
c.	Pengembangan Sistem Informasi Gerai Maritim/ Tol Laut	Upgrade	Opex	Pengembangan	Outsourcing	Insourcing

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ <i>Upgrade/</i> <i>Maintenance</i>	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing
d.	Pengembangan Sistem Informasi Gudang	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
e.	Pembangunan Modul Pasar Perbatasan	Baru	Capex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
4.	Pemeliharaan Portal Logistik	<i>Maintenance</i>	Opex	Implementasi	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>
5.	Pembangunan Sistem Fasilitator Edukasi e-Commerce	Baru	Capex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
6.	Pembangunan Sistem Laporan Realisasi B2 (Barang Berbahaya)	Baru	Capex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
7.	Pengembangan Dashboard Bapokting yang Terintegrasi dengan Dashboard Kemendag	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
C.2.3	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Luar Negeri					
1.	Pembangunan Sistem Indonesia <i>Trade Digital Promotion</i>	Baru	Capex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ <i>Upgrade/ Maintenance</i>	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing
2.	Pengembangan Sistem Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan / E-Trade Financing	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
3.	Pengembangan SI Perundingan Internasional	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
4.	Pengembangan Sistem Perizinan Terpadu Perdagangan Luar Negeri (SPTP sudah termasuk SIPO dan e-SKA)	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
C.2.4	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Berjangka Komoditi					
1.	Pengembangan Sistem Informasi Pasar Lelang Komoditi	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ Upgrade/ Maintenance	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co- Sourcing
2.	Pengembangan Sistem Resi Gudang	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
3.	Pemeliharaan Sistem Lelang Komoditi	<i>Maintenance</i>	Opex	Implementasi	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>
C.2.5	Aplikasi Khusus Pusat Data dan Sistem Informasi					
1.	Pengembangan Aplikasi PDSI Center	<i>Upgrade</i>	Opex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
C.2.6	Aplikasi Khusus Fungsi Audit					
1.	Pembangunan Sistem Manajemen Audit	Baru	Capex	Akuisisi	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
D	Sistem Penghubung Pemerintahan					
1.	Pengembangan Sistem Penghubung Kemendag	<i>Upgrade</i>	Capex	Pengembangan	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
E	Pengembangan Sistem Informasi Analitikal Kemendag					

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ Upgrade/ Maintenance	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co- Sourcing
1.	Sosialisasi Sistem Informasi Perdagangan (SIP)	<i>Upgrade</i>	Capex	Konsultasi/ Implementasi	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
2.	Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan (SIP)	<i>Upgrade</i>	Capex	Konsultasi/ Implementasi	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
a.	Pengembangan Data Warehouse Kemendag	<i>Upgrade</i>	Capex	Konsultasi/ Implementasi	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
b.	Pengembangan Business Intelligence Kemendag	<i>Upgrade</i>	Capex	Konsultasi/ Implementasi	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
c.	Pengembangan Portal/ Dashboard SIP	<i>Upgrade</i>	Capex	Konsultasi/ Implementasi	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
F	Infrastruktur IT					
1.	Peremajaan perangkat pada kantor pusat dan cabang Kemendag	Baru	Capex	Implementasi	Outsourcing	Outsourcing
2.	Pengembangan perangkat infrastruktur	Baru	Capex	Implementasi	Outsourcing	Outsourcing
3.	Penguatan koneksi Internet	Upgrade	Capex	Konsultasi	Outsourcing	Outsourcing

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ <i>Upgrade/</i> <i>Maintenance</i>	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing
4.	Penyediaan sistem monitoring kinerja infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pemantauan layanan aplikasi	Baru	Capex	Implementasi	Outsourcing	Outsourcing
5.	<i>Maintenance</i> tahunan infrastruktur TI	<i>Maintenance</i>	Opex	Pengembangan	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>
6.	Penyediaan <i>subscriptions software</i>	<i>Maintenance</i>	Opex	Pengembangan	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>
G	Keamanan IT					
1.	Implementasi <i>framework</i> keamanan aplikasi untuk menyediakan kontrol yang sesuai berdasar <i>threat</i> dan <i>vulnerability</i> untuk menekan potensi resiko keamanan aplikasi	Baru	Capex	Konsultasi	Outsourcing	Outsourcing
2.	Implementasi <i>framework</i> penguatan keamanan akses <i>database</i> .	Baru	Capex	Konsultasi	Outsourcing	Outsourcing

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ Upgrade/ Maintenance	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co- Sourcing
3.	Kajian dan implementasi <i>centralized antimalware</i> untuk <i>workstation</i>	Baru	Capex	Implementasi	Outsourcing	Outsourcing
4.	Kajian dan desain sistem SIEM	Baru	Capex	Konsultasi	Outsourcing	Outsourcing
5.	Kajian dan desain sistem penanganan pasca insiden dalam kerangka komputer forensik	Baru	Capex	Konsultasi	Outsourcing	Outsourcing
I.	Tata Kelola TIK					
1.	Penyederhanaan Birokrasi Organisasi TIK dan Data	Baru	<i>Opex</i>	Konsultasi	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>
2.	Pembentukan CSIRT Kemendag	Baru	<i>Opex</i>	Konsultasi	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>
H.	Manajemen TIK					
1.	Penguatan Kompetensi SDM TIK dan Data	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Konsultasi dan Pengembangan	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Insourcing</i>
2.	Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola dan Manajemen Data	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Konsultasi	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ <i>Upgrade/</i> <i>Maintenance</i>	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing
3.	Penyesuaian Kebijakan dan SOP TI dengan menambah lingkup SMLTI, SMKI, Integrasi Situs Web Eselon 1 ke Kemendag, beserta dengan pengesahan SOP TIK dan Data	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Pengembangan	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>
4.	Pelaksanaan <i>Assessment</i> Indeks Keamanan Informasi secara periodik	Baru	<i>Opex</i>	Konsultasi	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>
5.	Resertifikasi dan Surveillance lingkup Sertifikasi ISO 9001:2015	<i>Maintenance</i>	<i>Opex</i>	Konsultasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Insourcing</i>
6.	Resertifikasi dan Surveillance lingkup Sertifikasi ISO 27001:2013	<i>Maintenance</i>	<i>Opex</i>	Konsultasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Insourcing</i>
7.	Pengelolaan web dan CMS secara terintegrasi dan	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Konsultasi dan Pengembangan	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>

NO.	NAMA INISIATIF	TIPE KEGIATAN Baru/ <i>Upgrade/ Maintenance</i>	TIPE ANGGARAN Belanja Modal (Capex) / Biaya (Opex)	TIPE PEKERJAAN Pengembangan/ Akuisisi/ Implementasi/ Konsultasi	TIPE PELAKSANAAN Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing	TIPE OPERASI KE DEPAN Insourcing/ Outsourcing/ Co- Sourcing
	pengesahan kebijakan integrasi web					
8.	Update DRP	<i>Upgrade</i>	<i>Opex</i>	Konsultasi	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
9.	Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE seluruh Kemendag	Baru	<i>Opex</i>	Konsultasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Insourcing</i>
10.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kemendag	Baru	<i>Opex</i>	Konsultasi	<i>Insourcing</i>	<i>Insourcing</i>
11.	Evaluasi Pencapaian RISPBE dan Maturity SPBE	<i>Maintenance</i>	<i>Opex</i>	Konsultasi	<i>Co-Sourcing</i>	<i>Insourcing</i>
J.	Audit TIK					
1.	Audit Infrastruktur TIK	Baru	<i>Opex</i>	Konsultasi	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
2.	Audit Aplikasi TIK	Baru	<i>Opex</i>	Konsultasi	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>
3.	Audit Keamanan TIK	Baru	<i>Opex</i>	Konsultasi	<i>Outsourcing</i>	<i>Insourcing</i>

11.5. Estimasi Anggaran Biaya Rencana Inisiatif

Tabel 11-4 Estimasi Anggaran Biaya Inisiatif Arsitektur Bisnis, Data, Layanan, dan Aplikasi

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Arsitektur Bisnis & Data						
1.	Penyusunan detail arsitektur data Kemendag	50.000.000	480.000.000	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja Data)
B	Arsitektur Layanan						
B.1	Layanan Administrasi Pemerintahan *)						
1.	Pengembangan portal administrasi pemerintahan Kemendag - Portal Intranet Kemendag	270.000.000	-	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
2.	Portal <i>Mobile</i> Layanan Adminsitration Pemerintahan	-	258.000.000	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
B.2	Layanan Publik						
1.	Pengembangan portal layanan publik	300.000.000	-	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja)

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
	terintegrasi Kemendag (PPID, JDIH)						Aplikasi), Humas, & Rokum
2.	Pengembangan portal <i>mobile</i> layanan publik Kemendag	-	258.000.000	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Humas
3.	Integrasi layanan perizinan Kemendag (SIPERDAG)						
a.	Integrasi SIPERDAG dengan OSS	421.202.000	-	421.202.000	-	421.202.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PDN
b.	Integrasi SIPERDAG dengan INSW		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Daglu
c.	Integrasi SIPERDAG dengan KSWP		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Rokeu

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
d.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Luar Negeri (Inatrade)		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Daglu
e.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Dalam Negeri (SIPT)		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bapokting
f.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (SIMPKTN)		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
g.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti
h.	Integrasi SIPERDAG dengan Sistem Surveyor		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PDN
4.	Pemeliharaan SIPERDAG	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Pengembangan Layanan Satu Data Perdagangan (statistik.kemendag.go.id)	45.000.000	375.000.000	187.500.000	-	-	PDSI (PIC: Pokja Data)
6.	Pengembangan Situs Web Kemendag	172.000.000	172.000.000	172.000.000	172.000.000	172.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
C	Arsitektur Aplikasi						
C.1	Pengembangan Aplikasi Umum						
1.	Perencanaan - Percepatan SPBE Nasional	-	154.000.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Roren
2.	Penganggaran - Percepatan SPBE Nasional	-	154.000.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Roren
3.	Keuangan - Percepatan SPBE Nasional	-	154.000.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Rokeu

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.	Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah - Percepatan SPBE Nasional	-	192.500.000	192.500.000	192.500.000	192.500.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Roren
5.	Akuntabilitas Kinerja - Percepatan SPBE Nasional	-	154.000.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg
6.	Pemantauan dan Evaluasi - Percepatan SPBE Nasional	-	154.000.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Romum
7.	Kearsipan - Percepatan SPBE Nasional	-	154.000.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Romum
8.	Kepegawaian - Percepatan SPBE Nasional	-	267.000.000	267.000.000	267.000.000	267.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
9.	Pengaduan Publik - Percepatan SPBE Nasional	-	154.000.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi), Humas
10.	Pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan (Learning Management System)	200.000.000	200.000.000	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ropeg
C.2	Pengembangan Aplikasi Khusus						
C.2.1	Aplikasi Khusus Fungsi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)						
1.	Dashboard Portal PKTN						
a.	Pengembangan Sistem Informasi PKTN terintegrasi (SIMPKTN)	1.550.000.000	-	1.550.000.000	-	1.550.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
2.	Modul Perlindungan Konsumen						

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
a.	Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWA-PK)		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Dit. PK
b.	Portal Nasional Perlindungan Konsumen		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Dit. PK
c.	Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Produk Elektronika		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Dit. PK
3.	Modul Standarisasi dan Pengendalian Mutu						
a.	Aplikasi laboratorium Information Management System (LIMS)		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
b.	Sistem Informasi Dokumen Mutu BPMB		-		-		PDSI (PIC: Pokja)

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
							Aplikasi) & Ditstandalitu
c.	LPK Online		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
d.	Nomor pendaftaran Barang (NPB)		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
e.	TPP online		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
f.	Sistem Informasi Penguju Mutu Barang		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
g.	E-Dupak Jabfung PMB		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
h.	Sistem Informasi Sertifikasi Produk		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
i.	Sistem Informasi Sertifikasi Personil		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
j.	Sistem Informasi Pelayanan Kalibrasi		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
k.	Portal Inatrimis		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
l.	Modul Pegaduan Pelayanan Ditstandalitu		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditstandalitu
4.	Modul Metrologi						

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
a.	Sistem Informasi Perizinan Metrologi		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
b.	Sistem Informasi UPTP (Layanan non-perizinan)		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
c.	E-Dupak (Sistem Pengelolaan DUPAK)		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
d.	E-Assessment SKKPTTU (Sistem informasi Penilaian UML)		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditmet
5.	Modul Pengawasan Barang Beredar dan Jasa						
a.	Aplikasi Sistem Pelaporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Ditwas

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
6.	Modul Tertib Niaga		-				
a.	Pendaftaran barang Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, Lingkungan, Hidup (K3L)		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
b.	Sistem Informai Petugas Pengawas		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
c.	Aplikasi Penugasan Petugas Pengawas		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
d.	Aplikasi Pelaporan Pengawasan tertib Niaga		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
7.	Integrasi Data Dari Seluruh Aplikasi Eksting		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
8.	Pemeliharaan SIM PKTN	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PKTN
C.2.2	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Dalam Negeri						
1.	Pengembangan Etalase Produk Indoensia	675.521.000	337.500.000	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & P3DN
2.	Pembangunan Sistem Pemantauan Harga, Stock dan Gudang	605.000.000	337.500.000	-		-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
3.	Pengembangan Dashboard Portal Logistik						
a.	Pengembangan Sistem Pelaporan Manifest Domestik	1.200.000.000		600.000.000		600.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
b.	Pengembangan Sistem Informasi Pasar Rakyat						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
c.	Pengembangan Sistem Informasi Gerai Maritim/ Tol Laut						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
d.	Pengembangan Sistem Informasi Gudang						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
e.	Pembangunan Modul Pasar Perbatasan						PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Sardislog
4.	Pemeliharaan Portal Logistik		200.000.000		200.000.000		200.000.000

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Pembangunan Sistem Fasilitator Edukasi e-Commerce	-	200.000.000		200.000.000	-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Binus
6.	Pembangunan Sistem Laporan Realisasi B2 (Barang Berbahaya)	-	200.000.000		200.000.000	-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bapokting
7.	Pengembangan Dashboard Bapokting yang Terintegrasi dengan Dashboard Kemendag	-	200.000.000		200.000.000	-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bapokting
C.2.3	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Luar Negeri						
1.	Pembangunan Sistem Indonesia Trade Digital Promotion	50.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PEN
2.	Pengembangan Sistem Fasilitasi Pembiayaan	150.000.000	-	339.000.000	-	-	PDSI (PIC: Pokja)

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Perdagangan / E-Trade Financing						Aplikasi) & Ditfas
3.	Pengembangan SI Perundingan Internasional	-	-	-	339.000.000	-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & PPI
4.	Pemeliharaan/ Pengembangan Sistem Perizinan Terpadu Perdagangan	9.200.000.000	10.120.000.000	11.132.000.000	12.245.200.000	13.469.720.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Daglu
C.2.4	Aplikasi Khusus Fungsi Perdagangan Berjangka Komoditi						
1.	Pengembangan Sistem Informasi Pasar Lelang Komoditi	400.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti
2.	Pengembangan Sistem Resi Gudang		-		-		PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Pemeliharaan Sistem Lelang Komoditi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Bappebti
C.2.5	Aplikasi Khusus Fungsi Pengelolaan TIK						
1.	Pengembangan Aplikasi PDSI Center (termasuk manajemen layanan)	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
C.2.6	Aplikasi Khusus Fungsi Audit						
1.	Pembangunan Sistem Manajemen Audit	150.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi) & Itjen
D	Aplikasi Khusus Sistem Penghubung Pemerintahan						
1.	Pengembangan Sistem Penghubung Kemendag	-	1.200.000.000	4.000.000.000	-	-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
E	Pengembangan Sistem Informasi Analitikal Kemendag						
1.	Sosialisasi Sistem Informasi Perdagangan (SIP)	623.256.000	-	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
2.	Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan (SIP)	-					PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
a.	Pengembangan Data Warehouse Kemendag	-	3.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
b.	Pengembangan Business Intelligence Kemendag	-					PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
c.	Pengembangan Portal/ Dashboard SIP	-					PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
F.	Infrastruktur IT						
1.	Peremajaan perangkat pada kantor pusat dan cabang Kemendag	30.787.000.000	-	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Pengembangan perangkat infrastruktur	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
3.	Penguatan koneksi Internet	4.400.000.000	4.840.000.000	5.324.000.000	5.856.400.000	6.442.040.000	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
4.	Penyediaan sistem monitoring kinerja infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pemantauan layanan aplikasi	-	270.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
5.	<i>Maintenance</i> tahunan infrastruktur TI	4.200.000.000	5.750.000.000	9.000.000.000	9.900.000.000	10.899.000.000	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
6.	Penyediaan <i>subscriptions software</i>	1.800.000.000	1.980.000.000	2.178.000.000	2.395.800.000	2.635.380.000	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
G	Keamanan IT						
1.	Implementasi Framework keamanan aplikasi untuk menyediakan	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
	kontrol yang sesuai berdasar threat dan vulnerability untuk menekan potensi resiko keamanan						
2.	Implementasi framework penguatan keamanan akses <i>database</i> .	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
3.	Kajian dan implementasi centralized antimalware untuk workstation	98.000.000	98.000.000	98.000.000	98.000.000	98.000.000	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
4.	Kajian dan desain sistem SIEM	-	-	300.000.000	-	-	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
5.	Kajian dan desain sistem penanganan pasca insiden dalam kerangka komputer forensik	-	-	-	300,000,000	-	PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
H	Tata Kelola TIK						

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Penyederhanaan Birokrasi Organisasi TIK dan Data	-	-	-	-	-	Ropeg dan PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
2.	Pembentukan CSIRT Kemendag	-	-	-	-	-	Ropeg dan PDSI (PIC: Pokja Infrastruktur)
I	Manajemen TIK						
1.	Penguatan Kompetensi SDM TIK dan Data	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Ropeg dan PDSI (PIC: Bagian TU)
2.	Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola dan Manajemen Data	-	-	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK & Pokja Data)
3.	Penyesuaian Kebijakan dan SOP TI dengan menambah lingkup SMLTI, SMKI, Integrasi Situs Web Eselon 1 ke Kemendag, beserta	-	-	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
	dengan pengesahan SOP TIK dan Data						
4.	Pelaksanaan <i>Assessment</i> Indeks Keamanan Informasi secara periodik	-	-	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK & Pokja Infrastruktur)
5.	Resertifikasi dan Surveillance lingkup Sertifikasi ISO 9001:2015	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
6.	Resertifikasi dan Surveillance lingkup Sertifikasi ISO 27001:2013	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
7.	Pengelolaan web dan CMS secara terintegrasi dan pengesahan kebijakan integrasi web	-	-	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja Aplikasi)
8.	Update DRP	-	-	-	252.000.000	-	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)

NO.	NAMA INISIATIF	ESTIMASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					PENGGUNA ANGGARAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
9.	Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE seluruh Kemendag	-	-	-	-	-	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
10.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kemendag	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
11.	Evaluasi Pencapaian RISPBE dan Maturity SPBE	427.000.000	427.000.000	427.000.000	427.000.000	427.000.000	PDSI (PIC: Pokja Tata Kelola TIK)
J	Audit TIK						
1.	Audit Infrastruktur TIK		300.000.000				Inspektorat
2.	Audit Aplikasi TIK			300.000.000			Inspektorat
3.	Audit Keamanan TIK			350.000.000			Inspektorat

Lampiran

Lampiran 1 Arsitektur Bisnis Saat Ini

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
1	MOT-01. Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan	MOT-01.01. Undang-Undang Bidang Perdagangan	MOT-01.01.CFM.01.SOP.01 Perencanaan Penyusunan Undang-Undang Bidang Perdagangan	Menelaah pemasalahan bidang Perdagangan
			Mengajukan usulan penyusunan Undang-Undang bidang perdagangan	
			Membuat perencanaan penyusunan undang-undang bidang perdagangan	
			Menyusun naskah akademis	
			Menyampaikan perencanaan penyusunan undang-undang bidang perdagangan untuk dimasukkan ke dalam pogram legislasi nasional	
			MOT-01.01.CFM.01.SOP.02 Persiapan Pembentukan Undang-Undang Bidang Perdagangan	Menyiapkan konsep rancangan undang-undang bidang perdagangan
			Melakukan pembahasan	
Menyampaikan rancangan undang-undang bidang perdagangan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan proses harmonisasi				
Membuat konsep permohonan surat Presiden				

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
			MOT-01.01.CFM.01.SOP.03 Pengajuan Rancangan Undang-Undang	Menyampaikan rancangan undang-undang bidang perdagangan kepada Kementerian Sekretariat Negara Menyampaikan rancangan undang-undang bidang perdagangan kepada DPR Melakukan pembahasan bersama DPR
		MOT-01.02. Kepesertaan Pembahasan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	MOT-01.02.CFM.01.SOP.01 Kepesertaan Pembahasan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan rapat pembahasan Menyusun laporan hasil rapat pembahasan Menyampaikan masukan tertulis
		MOT-01.03 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan	MOT-01.03.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan	Melakukan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan undang-undang bidang perdagangan Melakukan pembahasan bersama Sekretaris Jenderal, Eselon I, Eselon II Melakukan perbaikan berdasarkan hasil pembahasan dengan Sekretaris Jenderal, Eselon I, Eselon II

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				Menyampaikan net konsep Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang bidang Perdagangan
		MOT-01.04. Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan	MOT-01.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan	Melakukan penelaahan konsep Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan yang diberikan oleh Unit Eselon II pemrakarsa
				Melakukan pembahasan konsep Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan yang diberikan oleh Unit Eselon II pemrakarsa dengan Eselon I dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait,
				Menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan
				Membuat Salinan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan untuk diteruskan ke unit Eselon II pemrakarsa dan menyampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan dan diupload dalam <i>website</i> JDIH Kementerian Perdagangan
		MOT-01.05. Peraturan Kepala BAPPEBTI	MOT-01.05.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Kepala BAPPEBTI	Penelaahan dan analisa terkait peraturan, penyusunan konsep, pembahasan, dan uji publik

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
		MOT-01.06. Peraturan di Bidang Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kemendag	MOT-01.06.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan di Bidang Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kemendag	Menganalisis perkembangan peraturan terbaru, menyusun penyempurnaan usulan revisi SK Jabatan Fungsional, mengajukan ke KemenpanRB dan Kementerian Keuangan, Sosialisasi ke pegawai di lingkungan Kemendag
		MOT-01.07. Penyusunan Perjanjian	MOT-01.07.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Perjanjian	Melakukan penelaahan konsep Penyusunan Perjanjian, melakukan pembahasan konsep Perjanjian bersama unit Eselon II terkait
2	MOT-02 Pengamanan Pasar Dalam Negeri	MOT-02.01 Pengawasan Barang dan Jasa	MOT-02.01.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Pendaftaran Lembaga Penilaian MOT-02.01.CFM.02.SOP.01 Pengawasan Kinerja LPK Terdaftar	Menerima permohonan pendaftaran LPK/pendaftaran ulang/pendaftaran koreksi melakukan pengecekan dokumen pendaftaran LPK berkoordinasi dengan KAN dan/atau Kementerian Teknis (jika diperlukan) menerbitkan surat (Keputusan Pendaftaran LPK atau Penolakan Pendaftaran LPK) Melakukan pendataan produk yang akan diambil beserta daerah pengambilan contoh dan petugas pengambil contoh Membuat dan mengirimkan surat kerjasama pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>kepada Dinas yang menangani bidang perdagangan tingkat provinsi</p> <p>Melakukan pembelian contoh (produk yang dibeli sesuai kriteria yang ditetapkan</p> <p>Produk yang bertanda SNI dan mencantumkan NRP/NPB, jumlah produk yang dibeli sesuai dengan kebutuhan sampel uji yang diperlukan laboratorium)</p> <p>Mengirim sampel produk yang telah dibeli ke laboratorium uji</p> <p>Pihak laboratorium melakukan uji sampel produk</p> <p>Menerima hasil pengujian yang telah dilakukan oleh laboratorium uji</p> <p>Melakukan rekapitulasi dan telaah hasil pengujian</p> <p>Melakukan evaluasi kinerja LPK</p> <p>Membuat laporan pengawasan kinerja LPK terdaftar</p> <p>Mengirimkan laporan pengawasan kinerja LPK terdaftar kepada instansi/unit terkait</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
			MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang yang SNI nya Diberlakukan Wajib	<p>Penerbitan SPPT SNI (produsen dalam negeri/luar negeri mengajukan permohonan SPPT SNI ke UPT LsPro PPMB atau LsPro lainnya dan proses sertifikasi diatur tersendiri oleh masing-masing LsPro hingga diterbitkannya SPPT-SNI)</p> <p>Pelaku usaha melakukan pendaftaran LPK</p> <p>Pelaku usaha menyampaikan surat permohonan untuk memperoleh NPB/NRP kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu</p> <p>Petugas pelayanan menerima permohonan pendaftaran dari pelaku usaha dan melakukan pengecekan persyaratan dokumen permohonan NPB/NRP</p> <p>Petugas memberikan tanda terima permohonan pendaftaran NPB/NRP (apabila persyaratan telah lengkap dan benar), pelaku usaha melakukan entry data pada aplikasi NPB/NRP</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	<i>Key Business Requirements</i>
				<p>Petugas pelayanan memasukan dokumen pendaftaran NPB/NRP pada map kendali dan melakukan paraf pada map kendali tersebut</p> <p>Petugas verifikasi melakukan verifikasi kesesuaian dan ketertelusuran dokumen dan memaraf pada map kendali</p> <p>Penandatanganan oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dan penerbitan NPB/NRP</p>
		<p>MOT-02.02 Penyediaan Standar Acuan</p>	<p>MOT-02.02.CFM.01.SOP.01 Perumusan SNI Jasa Bidang Perdagangan</p>	<p>Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SNI yang akan disusun, , , , menyediakan referensi dan sumber daya yang diperlukan untuk,.</p> <p>MembentukTim Perumus(konseptor) yang akan merumuskan konsep RSNI</p> <p>menyusunusulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) mengenai RSNI yang akan dirumuskan</p> <p>menyusun tim yang terdiri dari unsur konsumen</p> <p>produsen, pakar, danpemerintah yang akandiajukankepada BSN sebagai anggota</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Komite Teknis (Komtek) 03-03 Jasa Bidang Perdagangan</p> <p>perumusan RSNI, menyusun konsep RSNI1, menyelenggarakan rapat teknis RSNI2, menyelenggarakan rapat konsensus RSNI3, menyampaikan RSNI3 dan kelengkapannya ke BSN untuk proses jajak pendapat</p> <p>memfasilitasi dan menjamin kelancaran kegiatan Komtek 03-03 Jasa Bidang Perdagangan</p>
		<p>MOT-02.03 Koordinasinasion al Perlindungan Konsumen</p>	<p>MOT-02.03.CFM.01.SOP.01 Koordinasi Nasional Perlindungan Konsumen</p>	<p>Direktorat Pemberdayaan Konsumen: Analisa penyelenggaraan pembinaan perlindungan konsumen, koordinasi dengan unit-unit yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan konsumen, mempublikasikan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan barang beredar/jasa kepada Masyarakat.</p> <p>Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa: Klasifikasi kegiatan, Pengawasan, Analisa penyelenggaraan pengawasan barang beredar,</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				pembinaan perlindungan konsumen, kordinasi dengan instansi terkait.
		MOT-02.04 Pemberdayaan Konsumen	MOT-02.04.CFM.01.SOP.01 Pembentukan dan Penguatan BPSK	Direktorat Pemberdayaan Konsumen: Penerbitan Surat Keputusan Menteri tentang Pembentukan BPSK, Penerbitan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pengangkatan Anggota BPSK, Pembinaan Anggota BPSK,
			MOT-02.05.CFM.01.SOP.02 Aktivasi LPKSM	Aktivasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Pembinaan LPKSM
			MOT-02.04.CFM.02.SOP.01 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Konsumen	Menerima pengaduan, verifikasi data konsumen, menjawab pengaduan, menindaklanjuti pengaduan, membuat rekapitulasi pengaduan, membuat evaluasi
			MOT-02.05.CFM.02.SOP.02 Kemitraan Perlindungan Konsumen	Direktorat Pemberdayaan Konsumen melakukan peninjauan terhadap isu aktual yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan perlindungan konsumen Direktorat Pemberdayaan Konsumen mengidentifikasi kebutuhan program

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>kemitraan dan menyiapkan proposal kemitraan</p> <p>Direktorat Pemberdayaan Konsumen membangun hubungan kemitraan dengan unit terkait di Kementerian Perdagangan seperti Direktorat Standardisasi, Direktorat PBBJ, Direktorat Metrologi, dan Institusi/ Instansi terkait di luar kementerian perdagangan dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten/ Kota</p> <p>Direktorat Pemberdayaan Konsumen mengadakan forum komunikasi perlindungan konsumen dengan stakeholder/ pihak-pihak yang berkepentingan tersebut sehingga terbentuk jejaring kemitraan informasi perlindungan konsumen</p> <p>Direktorat Pemberdayaan Konsumen melakukan evaluasi penyelenggaraan kemitraan.</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
			MOT-02.04.CFM.02.SOP.03 Edukasi Konsumen Cerdas	<p>Direktorat Pemberdayaan Konsumen menyusun program edukasi konsumen sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Direktorat Pemberdayaan Konsumen mengidentifikasi kebutuhan program edukasi perlindungan konsumen</p> <p>Direktorat Pemberdayaan Konsumen berkoordinasi antar Direktorat dalam Kementerian Perdagangan, juga dengan unit terkait seperti BPOM dan instansi terkait lainnya</p> <p>Direktorat Pemberdayaan Konsumen melakukan pelaksanaan Edukasi Konsumen Cerdas di tempat-tempat yang telah ditentukan, adapun bentuk-bentuk edukasi konsumen cerdas diantaranya Motivator, Motivator Mandiri, Edukasi kepada siswa/mahasiswa/keompok masyarakat, dan <i>Talkshow</i></p> <p>Direktorat Pemberdayaan Konsumen melakukan evaluasi terhadap edukasi perlindungan konsumen</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
		MOT-02-05 Pengawasan Barang dan Jasa di Pasar	MOT-02.05.CFM.01.SOP.01 Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar terhadap produk logam, mesin dan elektronika, produk hasil pertanian, kimia dan kehutanan, serta Produk jasa distribusi dan jasa bisnis
		MOT-02-06 Pelayanan Kemetrologian	MOT-02.06.CFM.01.SOP.01 Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik Untuk UTTP	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar terhadap: produk logam, mesin dan elektronika, produk hasil pertanian, kimia dan kehutanan, serta Produk jasa distribusi dan jasa bisnis
			MOT-02.06.CFM.02.SOP.01 Pengujian UTTP, Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi	Registrasi, verifikasi order dan fisik alat, pembayaran PNBP, penugasan penguji, uji alat, penerbitan cerapan, verifikasi draf Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP), penerbitan SKHP
3	MOT-03 Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok & Penguatan Jaringan Distribusi	MOT-03.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok	Melakukan pemantauan bapok, analisa pemicu kenaikan harga, melakukan operasi pasar/pasar murah, pemantauan pelaksanaan operasi pasar/pasar murah, evaluasi pelaksanaan operasi pasar/pasar murah

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
		MOT-03.02 Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok & Penguatan Jaringan Distribusi	MOT-03.02.CFM.01.SOP.01 Penataan Jaringan Distribusi	Mengevaluasi proposal, menetapkan usulan pasar yang direvitalisasi/dikembangkan, Menetapkan Usulan Pembangunan Gudang Sebagai Pusat Distribusi daerah
4	MOT-04 Peningkatan Ekspor Non Migas	MOT-04.01 Pengembangan Pasar Ekspor	MOT-04.01.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Pasar Ekspor	Usulan, penetapan negara, penentuan produk, pembentukan tim, pembautan SK, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan laporan, meamsukkan laporan ke Peta Pasar, diseminasi laporan
			MOT-04.01.CFM.01.SOP.02 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Pasar dan Produk Ekspor	Membuat rencana, membuat SK Tim, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, verifikasi laporan awal, pelaksanaan workshop/rakor, verifikasi laporan akhir, validasi laporan akhir, rekomendasi kebijakan, dan diseminasi/sosialisasi hasil
		MOT-04.02 Pengembangan Produk Ekspor	MOT-04.02.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Produk Ekspor	Identifikasi dan analisa potensi ekspor, adaptasi produk sampai dengan fasilitasi pengembangan produk yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan,

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<i>monitoring</i> dan evaluasi, sampai dengan penyusunan laporan kegiatan
		MOT-04.03 Pengembangan Citra	MOT-04.03.CFM.01.SOP.01 Promosi	Menguraikan mekanisme pelaksanaan kegiatan promosi Internasional oleh Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra, Ditjen PEN, Kementerian Perdagangan dalam upaya mempromosikan Eksportir Indonesia
		MOT-04.04 Penanganan Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard	MOT-04.04.CFM.01.SOP.01 Penanganan Tuduhan Dumping	Mencari informasi tuduhan, koordinasi dengan pihak terkait, <i>on the spot</i> verification, pendampingan kepada perusahaan terkait (apabila diperlukan), tindak lanjut dari informasi <i>statement of essential fact</i>
			MOT-04.04.CFM.02.SOP.01 Penanganan Tuduhan Subsidi	Penyelidikan anti subsidi, analisa data dan informasi, kordinasi, konsultasi, dan pengumuman hasil penyelidikan
			MOT-04.04.CFM.03.SOP.01 Penanganan Tindakan Safeguard	Notifikasi/inisiasi penyelidikan safeguard, Analisa data dan informasi, koordinasi dengan pihak terkait, penyampaian informasi terkait pelaksanaan <i>hearing</i>
			MOT-04.04.CFM.04.SOP.01 Dispute Settlement	Menerima informasi, mempelajari kasus, koordinasi dengan pihak terkait

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Menyampaikan hasil Analisa, konsultasi, pembahasan hal terkait masalah yang menimbulkan keberatan</p> <p>Pembentukan Panel DSB-WTO dan berkoordinasi dengan ACWL serta Perusahaan/Eksportir/Asosiasi guna memperoleh informasi/masukan/opini hukum</p> <p>Melaksanakan siding, dan melaksanakan hasil rekomendasi</p>
		<p>MOT-04.05 Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif</p>	<p>MOT-04.05.CFM.01.SOP.01 Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif</p>	<p>Melakukan <i>monitoring</i> dan mencari informasi kebijakan/ketentuan terkait hambatan teknis perdagangan, memberikan informasi kebijakan/ketentuan terkait hambatan teknis perdagangan, mengumpulkan informasi, melakukan analisis, melakukan koordinasi, melakukan analisis lanjutan, menyusun kertas posisi/tanggapan Indonesia atas kebijakan/ketentuan terkait, menyusun profil/ringkasan kasus hambatan teknis perdagangan, dan proses dokumentasi</p> <p>Menerima informasi hambatan teknis perdagangan ekspor dari negara mitra dagang</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
			MOT-04.05.CFM.02.SOP.01 Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	Melakukan analisis, evaluasi, konsultasi dengan otoritas negara mitra Rapat koordinasi dengan pelaku usaha & asosiasi terkait Pendaftaran penyelesaian sengketa ke lembaga <i>Dispute Settlement Body</i> (DSB) WTO Penyelesaian sengketa di forum panel DSB WTO
		MOT-04.06 Pengawasan Mutu Barang Olah Komoditi Ekspor (Bokor)	MOT-04.06.CFM.01.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Olah Komoditi Ekspor (Bokor)	Pelaku usaha/produsen komoditi ekspor mempersiapkan komoditinya untuk diperiksa sebagai bagian dari kegiatan pengawasan mutu BOKOR Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu atau instansi teknis menyusun standar acuan komoditi ekspor digunakan sebagai dasar acuan pada pengujian mutu barang/laboratorium penguji mutu untuk dilakukan pengujian mutu dengan menggunakan parameter berdasarkan standar yang ditetapkan, Balai Pengujian melakukan pengujian

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Balai pengujian melakukan pengujian contoh BOKOR dan menerbitkan sertifikasi/laporan hasil pengujian mutu. Jika hasil pengujian mutu barang sesuai dengan SNI/Standar Acuan Komoditi Ekspor maka Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu memberikan informasi barang telah memenuhi persyaratan dan dapat di ekspor. Apabila hasil verifikasi kesesuaian mutu menyatakan sebaliknya, Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu memberikan saran kepada pelaku usaha/produsen komoditi ekspor agar dilakukan perbaikan mutu</p>
			<p>MOT-04.06.CFM.01.SOP.02 Penerbitan Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR</p>	<p>Produsen SIR mengekspor produknya ke luar negeri menyampaikan surat permohonan untuk memperoleh TPP kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu</p> <p>Petugas pelayanan menerima dokumen permohonan TPP SIR dan mengecek kelengkapan persyaratan dari setiap pemohon TPP SIR</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				Petugas pelayanan memasukkan semua dokumen pada map kendali dan memberikan paraf pada map kendali
		Petugas verifikasi memeriksa ulang kelengkapan dokumen permohonan dan mengisi <i>form checklist</i> TPP dan memberikan paraf pada map kendali		
		Penandatanganan oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dan penerbitan TPP SIR		
		MOT-.04.07 Standar Acuan Fisik Komoditi & Pemantauan Mutu Komoditi Ekspor	MOT-04.07.CFM.01.SOP.01 penyusunan & Pengesahan Standar Buku Contoh Karet	Membentuk tim penilai pembuatan buku contoh karet konvensional
		Membuat daftar contoh yang akan dibeli berdasarkan jenis dan perusahaan karet berkoordinasi dengan Tim Penilai		
		Membuat surat pembelian contoh karet konvensional ke perusahaan karet sesuai jenis karet yang dihasilkan		
		Membuat surat pembelian contoh karet konvensional		
		Menetapkan Petugas Pengambil Contoh (PPC)		
		Membeli contoh karet konvensional di pabrik		

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Melakukan pengeringan contoh karet</p> <p>Melakukan penilaian contoh karet sesuai standar Green Book</p> <p>Membuat buku contoh karet konvensional</p> <p>Mengesahkan Buku Contoh Karet oleh Dir.Standalitu</p> <p>Mendistribusikan buku contoh karet ke stakeholder</p>
5	MOT-05 perbaikan Iklim Usaha Perdagangan	MOT-05.01 pengendalian Ekspor dan Impor	MOT-05.01.CFM.01.SOP 01 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Ekspor-Impor	<p>Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan:</p> <p>Monitoring dan evaluasi ekspor-impor mulai dari pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, monitoring, evaluasi hingga pelaporan hasil evaluasi.</p> <p>Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan</p> <p>Monitoring dan evaluasi ekspor-impor mulai dari pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, monitoring, evaluasi hingga pelaporan hasil evaluasi.</p> <p>Direktorat Impor:</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p><i>Monitoring</i> dan evaluasi ekspor-impor mulai dari pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, <i>monitoring</i>, evaluasi hingga pelaporan hasil evaluasi</p> <p>Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor: Monitoring dan evaluasi ekspor-impor mulai dari pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, <i>monitoring</i>, evaluasi hingga pelaporan hasil evaluasi.</p>
		MOT-05.02 Perbaikan Iklim Usaha Dalam Negeri	MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perijinan / Non Perijinan Kepada Dunia Usaha	<p>BINUS: Permohonan Pemenuhan Komitmen: STPW, SIUJS, SIUP4, Keagenan/distributor</p> <p>Bapokting: Pendaftaran, Verifikasi dan Pelaporan</p> <p>DITFAS: Memfasilitasi pelayanan perijinan ekspor dan impor kepada pelaku usaha secara elektronik, memverifikasi dan validasi serta menerbitkan perijinan melalui sistem Inatrade</p>
		MOT-05.03 Peningkatan Nilai Tambah Produk	MOT-05.03.CFM.01.SOP.01 Peningkatan Nilai Tambah Produk	Pembaharuan data UKM, penelaahan produk UKM, rekomendasi ekspor produk UKM potensial dan layak jual, fasilitasi peningkatan nilai tambah produk UKM potensial dan belum layak, pemantauan dan evaluasi UMKM mitra

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				binaan, rekomendasi produk UKM yang sudah difasilitasi
		MOT-05.04 Perdagangan Yang Berkelanjutan	MOT-05.04.CFM.01.SOP.01 Harga Patokan Ekspor (HPE)	Melaksanakan <i>monitoring</i> dan pengumpulan data harga komoditi, rapat rutin, dan melaksanakan penyusunan <i>draf</i> Peraturan Menteri Perdagangan berdasarkan HPE yang disepakati pada rapat Tim Penetapan HPE.
		MOT-05.05 Peningkatan Peran Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus	MOT-05.05.CFM.01.SOP 01 Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (Dalam Hal Usulan dari Pemerintah)	Kementerian Perdagangan sebagai anggota Dewan Nasional KEK berperan serta dalam sidang Dewan Nasional yang membahas usulan pembentukan KEK Kementerian Perdagangan bersama Dewan Nasional KEK mengambil keputusan terhadap usulan tersebut berdasarkan hasil sidang, setelah melalui pemeriksaan dokumen, penilaian kriteria lokasi dan melakukan kunjungan ke lokasi yang diusulkan; apabila usulan diterima, maka usulan diteruskan kepada Presiden disertai dengan <i>draf</i> Peraturan Pemerintah tentang

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Penetapan KEK; apabila usulan tidak diterima, maka usulan dikembalikan kepada pengusul dengan disertai alasan penolakan</p> <p>Kementerian Perdagangan menyiapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendelegasian wewenang penerbitan perijinan dibidang perdagangan kepada Administrator KEK setelah lokasi KEK ditetapkan</p> <p>MOT-05.05.CFM.02.SOP 01 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan di KEK</p> <p>Menteri Perdagangan mendelegasikan kewenangannya dalam menerbitkan perijinan dibidang perdagangan kepada Administrator KEK. Untuk melaksanakan amanat UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dalam rangka meyenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Administrator KEK. Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri ini</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>ditetapkan setelah terbit Peraturan Pemerintah tentang Penetapan KEK</p> <p>Administrator KEK menyampaikan laporan penerbitan perijinan dibidang perdagangan secara berkala atau insidentil kepada Menteri Perdagangan melalui inatrade seperti yang diatur di Peraturan Menteri (Hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri: jenis-jenis perijinan, tahapan memperoleh perijinan, mekanisme pengawasan dan sanksi serta kewajiban).</p> <p>Dewan Kawasan KEK melakukan evaluasi pengelolaan KEK, menyusun laporan hasil evaluasi dan menyampaikannya kepada Administrator dan Dewan Nasional; pendelegasian Wewenang dilakukan paling lambat 12 bulan sejak Adminstrator dibentuk; dalam hal Menteri telah mendelegasikan Kewenangan Penerbitan Perizinan kepada Kepala BKPM, Kepala Satuan</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Kerja Dinas Provinsi dan kabupaten Kota Bidang</p> <p>Penanaman Modal, maka Menteri harus mengalihkan pendelegasian wewenang kepada Administrator dalam waktu 6 bulan sejak Adminstrator dibentuk; Administrator dibentuk oleh Dewan Kawasan dan harus sudah dibentuk paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi.</p> <p>Administrator KEK melakukan monitoring dan evaluasi</p>
	<p>MOT-05.06 Pengembangan Fasilitasi Ekspor - Impor</p>	<p>MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) Untuk Barang Ekspor Indonesia</p>		<p>Penetapan Pejabat Penandatanganan SKA:</p> <p>Pelaksanaan Pendistribusian Surat keterangan Asal</p> <p>Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal</p>
	<p>MOT-05.07</p>	<p>MOT 05.07.CFM.01.SOP.01 Pembinaan PBK, SRG dan PI</p>		<p>Melakukan analisa kondisi terkini, penyusunan perencanaan, koordinasi antar instansi/ <i>stakeholder</i>, pelaksanaan pembinaan</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
		Pembinaan dan Pengawasan PBK, SRG, dan PI	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PL	Melakukan analisa kondisi terkini, penyusunan kegiatan pengawasan, koordinasi antar unit kerja, pelaksanaan pengawasan
			MOT-5.07.CFM.03.SOP.01 Pengembangan PBK, SRG dan PL	Melakukan analisa kondisi terkini, penyusunan perencanaan pengembangan tahunan, koordinasi antar unit kerja/stake holder, pelaksanaan pengembangan PBK/SRG/PL
		MOT-05.08 Pemulihan Iklim Usaha Perdagangan	MOT-05.08.CFM.01.SOP.01 Penyelidikan Tindakan Anti <i>Dumping</i>	Industri Dalam Negeri menyampaikan permohonan penyelidikan anti dumping kepada KADI;
				KADI meneliti apakah permohonan sudah lengkap
				KADI segera melakukan pre-notifikasi apabila permohonan sudah lengkap
				KADI melakukan persiapan inisiasi setelah melakukan pre-notifikasi
				KADI melakukan inisiasi penyelidikan
KADI menyiapkan dan mengirim kuesioner untuk disampaikan kepada para pihak terkait				

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>KADI melakukan verifikasi di lapangan dengan pihak terkait (IDN, eksportir/produsen asing yang dituduh, importir) apabila merasa bukti belum dapat diperoleh dari jawaban kuesioner atau jawaban kuesioner diragukan kebenarannya</p> <p>KADI menyusun laporan sementara dari hasil penyelidikan</p> <p>KADI melakukan dengar pendapat untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembelaan</p> <p>KADI mengeluarkan laporan hasil penyelidikan dan mengusulkan rekomendasi pengenaan BMADS/BMAD kepada Menteri Perdagangan</p> <p>Menteri Perdagangan menyampaikan laporan hasil penyelidikan dan usulan rekomendasi kepada Menteri Keuangan</p> <p>Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengenaan BMADS/BMAD atas barang impor yang dimaksud</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
			MOT-05.08.CFM.02.SOP.01 Penyelidikan Tindakan Imbalan	<p>Industri Dalam Negeri (IDN) menyampaikan permohonan penyelidikan tindakan imbalan kepada KADI</p> <p>KADI meneliti apakah permohonan IDN sudah lengkap</p> <p>KADI segera mengadakan konsultasi dengan pihak yang berkepentingan (negara yang dituduh), apabila permohonan sudah lengkap</p> <p>KADI melakukan persiapan inisiasi penyelidikan</p> <p>KADI menyiapkan dan mengirim kuesioner untuk diisi oleh pihak-pihak yang berkepentingan (IDN, eksportir/produsen asing yang dituduh, importir); Menetapkan batas waktu pengembalian jawaban kuesioner untuk pihak yang berkepentingan; dan menentukan perpanjangan waktu batas pengembalian maksimal 30 hari</p> <p>KADI menganalisa jawaban kuesioner dan menyiapkan laporan hasil penyelidikan sementara serta rekomendasi BMIS/BMI</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>KADI melakukan verifikasi di lapangan apabila merasa bukti belum dapat diperoleh dari jawaban kuesioner atau jawaban kuesioner diragukan kebenarannya</p> <p>KADI melakukan dengar pendapat untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembelaan</p> <p>KADI mengeluarkan laporan hasil penyelidikan dan mengusulkan rekomendasi pengenaan BMIS/BMI kepada Menteri Perdagangan</p> <p>Menteri Perdagangan menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada Menteri Keuangan</p> <p>Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengenaan BMIS/BMI atas barang impor yang dimaksud</p> <p>MOT-05.08.CFM.03.SOP.01 Penyelidikan <i>Safeguard</i></p> <p>Melindungi Industri Dalam Negeri atas adanya lonjakan impor serta memperbaiki kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius yang di alami Industri Dalam Negeri atas adanya lonjakan volume impor tersebut melalui pengenaan <i>Safeguard/Bea Masuk</i></p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				Tindakan Pengamanan (BMTP). Dengan adanya prosedur penanganan penyelidikan <i>Safeguard</i> diharapkan dapat tersedianya kejelasan dan proses sistematis yang efektif.
6	MOT-06 Pengembangan Akses Pasar	MOT-06.01 Diplomasi Perdagangan	MOT-06.01.CFM.01.SOP.01 <i>Leading Sector</i> Perundingan Internasional MOT-06.01.CFM.01.SOP.02 Menghadiri dan/Melakukan Perundingan Sidang Internasional MOT-06.01.CFM.01.SOP.03 Usulan Pengesahan Perjanjian dan/atau Kesepakatan Perjanjian Internasional	Koordinasi dengan K/L dan stakeholder Menyiapkan kerta posisi Indonesia, melakukan pendekatan dengan mitra, rapat dengan delegasi konsultasi publik, FGD mengumpulkan masukan dari K/L dan stakeholder terkait Dirjen KPI menugaskan Eselon II di lingkungan Ditjen KPI untuk mempersiapkan naskah terjemahan, naskah penjelasan dan konsep rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait lainnya setelah Dirjen KPI menerima persetujuan pimpinan atas hasil perundingan yang disyaratkan untuk ditetapkan menjadi peraturan perundangan

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPI melakukan rapat konsultasi dan koordinasi dengan unit dan/ atau instansi terkait serta pemangku kepentingan untuk merumuskan naskah terjemahan, naskah penjelasan dan konsep rancangan peraturan perundangundangan dan dokumen terkait lainnya</p> <p>Unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPI melaporkan hasil pembahasan rapat konsultasi dan koordinasi kepada Dirjen KPI untuk mendapatkan arahan dan persetujuan</p> <p>Dirjen KPI menyiapkan surat ijin menjadi lembaga pemrakarsa yang ditandatangani oleh pimpinan Kementerian Perdagangan dan disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri dan tembusan kepada instansi terkait</p> <p>Dirjen KPI menyampaikan usulan konsep pengesahan perjanjian dan/ kesepakatan internasional kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan dan persetujuan</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Pimpinan menyampaikan usulan konsep pengesahan perjanjian dan/ kesepakatan internasional kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Sekretariat Negara</p> <p>Kementerian Luar Negeri melakukan tindak lanjut atas usulan pengesahan perjanjian dan/ atau perjanjian internasional</p> <p>Unit Eselon II di Ditjen KPI melakukan monitoring pengesahan perjanjian internasional</p>
7	MOT - 07 Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)	MOT-07.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	MOT-07.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Identifikasi terhadap infrastruktur TIK yang perlu pengembangan, Mendesain rencana induk infrastruktur TIK, koordinasi, Analisa pemenuhan dan konfirmasi.
		MOT-07.02 Pengelolaan dan Pelayanan Permintaan Data	MOT-07.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan dan Pelayanan Permintaan Data	Identifikasi, Analisa, pengadaan, konsolidasi, verifikasi, monitoring dan review terkait data

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
		MOT-07.03 Pengelolaan Aplikasi	MOT-07.03.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Aplikasi	Melakukan koordinasi terkait pemetaan aplikasi, identifikasi, pemberian rekomendasi teknis, verifikasi, implementasi dan rancangan, proses pelaporan, dan monitoring
		MOT-07.04 Pengelolaan Keamanan Informasi	MOT-07.04.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Keamanan Informasi	Mengklasifikasikan informasi dan potensi risiko, sosialisasi terkait manajemen KSI, dan <i>monitoring</i> dan evaluasi
8	MOT-08 pelayanan Informasi dan Publikasi	MOT-08.01 Pengelolaan Informasi, Publikasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	MOT-08.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Mempersiapkan materi publikasi, memastikan materi publikasi cetak sesuai dengan buku Panduan Cetak Kementerian Perdagangan dan mendukung pencitraan positif Kementerian Perdagangan dan menyerahkan produk final publikasi cetak dan elektronik kepada Pusat Humas sebagai dokumentasi
			MOT-08.01.CFM.01.SOP.02 Publikasi	Unit eselon I dan II mengajukan surat permintaan liputan kegiatan, sosialisasi, dan jumpa pers yang melibatkan Pimpinan Kementerian Perdagangan kepada Pusat Humas

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				Pusat Humas mempersiapkan siaran pers berdasarkan substansi yang diberikan oleh unit terkait.
				Unit eselon I dan II mempersiapkan paket informasi lengkap sebagai materi publikasi atau jumpa pers
				Pusat Humas mengundang wartawan, mendistribusikan siaran pers, mempersiapkan kelengkapan sarana seperti ruangan, laptop, sound sistem, LCD, petugas fotografer dan rekaman dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
				Pusat Humas mendokumentasikan kegiatan pimpinan, sosialisasi, dan jumpa pers dalam bentuk foto dan audiovisual.
				Pusat Humas mempublikasikan hasil liputan ke dalam <i>website</i> dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
			MOT-08.01.CFM.02.SOP.01 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Menyiapkan konsep dan silabus Sosialisasi/Bimtek sesuai arahan pimpinan
				Mengirim surat permintaan peserta dan narasumber

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Menyiapkan segala sesuatu yang terkait pelaksanaan bimtek (surat tugas, SK panitia/narasumber/moderator, SK honor, dll)</p> <p>Melaksanakan kegiatan sosialisasi/bimtek</p> <p>Dokumentasi kegiatan sosialisasi/bimtek</p> <p>Membuat laporan kegiatan</p> <p>Mengirimkan informasi kegiatan ke Sekretariat Ditejen PKTN untuk dipublikasikan</p>
		MOT-08.02 Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan	MOT-08.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan	Menerima, mendokumentasikan, mendapatkan informasi, menyampaikan informasi kepada pihak yang meminta dan mendokumentasikan penyampaian informasi tersebut.
		MOT-08.03 Pelayanan Perpustakaan	MOT-08.03.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perpustakaan	Unit eselon II membuat usulan bahan pustaka yang dibutuhkan dan menyerahkannya ke Pusat Humas dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Pusat Humas merupakan satu-satunya unit yang merencanakan pengadaan dan pengelolaan perpustakaan (bahan pustaka, desain, sistem

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>perpustakaan, katalogisasi, dll) dan menyebarkan edaran permintaan usulan bahan pustaka dari unit eselon II setiap tahun.</p> <p>Pusat Humas menyusun pedoman pengelolaan perpustakaan (keanggotaan, peminjaman buku, pemberian sanksi dan pengembalian buku)</p> <p>Anggota perpustakaan melakukan peminjaman buku, pembayaran denda, dan pengembalian buku (Non Anggota tidak diperkenankan meminjam buku)</p> <p>Pusat Humas bekerjasama dengan perpustakaan lain dalam hal melakukan pelatihan/workshop kepustakaan bagi pustakawan dan anggota perpustakaan serta pengembangan jaringan sistem perpustakaan. Pusat Humas memiliki perpustakaan modern dengan manajemen perpustakaan yang baik.</p>
		MOT-08.04 Pengelolaan Komunikasi	MOT-08.04.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Komunikasi Dalam Situasi Krisis	Pusat Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi dan pelaksanaan media massa dan

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
		Dalam Situasi Krisis		<p>publikasi; penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan antar lembaga; penyiapan koordinasi dan pelaksanaan informasi publik dan perpustakaan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.</p> <p>SOP ini mengatur mekanisme pengelolaan komunikasi dan koordinasi lintas unit dalam Kemendag untuk tujuan merespon isu hangat yang merebak di media massa, termasuk yang muncul dalam demonstrasi. Dalam upaya untuk menyediakan respon dan menghadapi para pelaku demo tersebut, perlu dilakukan komunikasi yang intensif dan cepat antara Pusat Humas, Unit Teknis terkait, termasuk Menteri dan/atau Wakil Menteri sebagai pihak yang menyetujui isi pesan yang akan disampaikan.</p>
9	MOT - 09 Riset dan Pengembangan	MOT - 09.01 Pengkajian dan Pengembangan	MOT-09.01.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Kajian	Membuat rencana kajian, membuat SK Tim, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, verifikasi laporan awal, pelaksanaan

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
		Kebijakan Perdagangan		workshop/rakor, verifikasi laporan akhir, validasi laporan akhir, rekomendasi kebijakan, dan diseminasi/sosialisasi hasil kajian
10	MOT – 10 Pengelolaan Administrasi dan Umum	MOT -10.01 Pengelolaan Arsip	MOT-10.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Arsip	Penyusunan kebijakan persuratan dan kearsipan, Pembinaan jabatan fungsional Arsiparis, Pelaksanaan koordinasi kegiatan persuratan dan kearsipan, Pengelolaan arsip Kementerian, Sosialisasi/ <i>workshop</i> /bimtek terkait pengelolaan persuratan dan kearsipan, Pelaksanaan pemusnahan arsip Kementerian
MOT -10.02 Pengelolaan K3L		MOT-10.01.CFM.02.SOP.01 Pengelolaan K3L	Pelaksanaan kegiatan bakti social, Pelayanan kesehatan terhadap pegawai dan keluarga Kementerian, Pembinaan jabatan fungsional dokter umum, dokter gigi, perawat umum, perawat gigi, pranata lab, apoteker, dan asisten apoteker	
MOT -10.03 Pengelolaan Keprotokolan		MOT-10.01.CFM.02.SOP.01 Pengelolaan Keprotokolan	Penyusunan rencana penugasan terkait keprotokolan Kementerian, Pelaksanaan koordinasi kegiatan keprotokolan Kementerian, Sosialisasi/ <i>workshop</i> terkait kegiatan keprotokolan, Pengelolaan perjalanan dinas luar negeri Kementerian	

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
		MOT -10.04 Pengelolaan BMN	MOT-10.04.CFM.01.SOP.01 Perencanaan dan Pengadaan Barang & Jasa	Penyusunan rencana pengadaan barang/jasa Kementerian, Pelaksanaan koordinasi pengadaan barang/jasa Kementerian (tender), Sosialisasi/workshop/bimtek terkait kegiatan pengadaan barang/jasa, dan Pembinaan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
			MOT-10.04.CFM.01.SOP.02 Penatausahaan BMN	Inventarisasi dan pencatatan BMN ke dalam aplikasi SIMAK-BMN, Penyusunan daftar barang ruangan, Penggabungan data BMN dari unit Eselon I (UAPPB-E1) dan ADK UAPPB-E1 ke dalam aplikasi SIMAK BMN tingkat Kementerian, rekonsiliasi internal antara laporan BMN dengan neraca pada laporan keuangan, penyusunan laporan BMN, sosialisasi terkait penatausahaan BMN
			MOT-10.04.CFM.01.SOP.03 Penggunaan dan Pemanfaatan BMN	Memproses usulan penggunaan dan pemanfaatan BMN dari unit Eselon/Satker
			MOT-10.04.CFM.01.SOP.04 Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN	Membentuk SK tim panitia penghapusan, proses usulan penghapusan dan

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				pemindahtanganan BMN dari unit Eselon I/Satker
11	MOT-11 Pengelolaan SDM	MOT-11.01 Pengadaan SDM	MOT-11.01.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Formasi Pegawai	Menerima, menginventarisir data pengusulan tambahan kebutuhan pegawai dari unit2, menyesuaikan data ke dalam format BKN, menganalisis data usulan sesuai ABK, menyusun formasi kebutuhan pegawai tahun berjalan ke aplikasi e-Formasi Kemempnan RB.
			MOT-11.01.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Rekrutmen CPNS	Menyiapkan tim Teknis, membuat perencanaan tahapan, pengumuman, seleksi berkas, penyerahan kartu peserta ujian, menyiapkan soal ujian tertulis, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian, pengumuman hasil ujian/pelamar lulus, daftar ulang secara online, memproses pengangkatan CPNS, menerbitkan SK pengangkatan CPNS
			MOT-11.01.CFM.01.SOP.03 Pengangkatan PNS	Pemanggilan dan pemberitahuan aktif bekerja bagi CPNS Kemendag, pelaksanaan orientasi, penempatan CPNS, monev kinerja CPNS, melaksanakan diklat prajabatan, memproses pengangkatan PNS

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
		MOT-11.02 Pembinaan dan Pengembangan SDM	MOT-11.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Kinerja Pegawai	Menetapkan tujuan organisasi yang ingin dicapai, penyusunan desain/metode yang akan digunakan, melakukan penilaian kinerja pegawai, evaluasi, pertimbangan dan rekomendasi
			MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Perdagangan	Melakukakan Analisa Kebutuhan Diklat Koordinasi pembuatan daftar prioritas diklat Rapat Membuat dan menyampaikan jadwal diklat Persiapan diklat Menetapkan tenaga kediklatan Mempersiapkan sarana dan prasarana Melakukan seleksi peserta, Memanggil calon peserta Menerima daftar peserta tetap dan perubahan rapat persiapan pelaksanaan Registrasi peserta diklat Pelaksanaan diklat Evaluasi diklat Rapat evaluasi Laporan penyelenggaraan

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				Evaluasi kinerja aparatur pasca diklat
			MOT-11.02.CFM.01.SOP.03 Pengelolaan Jabatan Fungsional	Menentukan unit Pembina, membuat pedoman teknis pembinaan, membentuk tim PAK, melakukan analisis kebutuhan formasi jabatan fungsional, mengusulkan kebutuhan pejabat fungsional, melakukan identifikasi pengangkatan jft, melakukan penerimaan jft (CPNS), mengadakan diklat fungsional, pengangkatan pertama, penilaian dan penetapan angka kredit, pemrosesan SK kenaiakan jenjang dan kenaikan pangkat, monitoring dan evaluasi jft.
			MOT-11.02.CFM.02.SOP.01 Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	Membuat aturan dan sanksi, membentuk tim pemeriksaan, pemerisaan, membuat laporan hasil pemeriksaan
			MOT-11.02.CFM.03.SOP.01 Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di bawah Pembinaan Kemendag	Pembinaan karir Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang melalui uji kompetensi (berupa pengujian pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan)

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Pelaksanaan uji kompetensi meliputi pembentukan Tim Teknis Uji Kompetensi</p> <p>Penyusunan persyaratan peserta dan ketentuan pelaksanaan uji kompetensi</p> <p>Kerangka kerja umum Tim Teknis Uji Kompetensi</p> <p>Verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK)</p> <p>Pelaksanaan uji kompetensi</p> <p>Prosedur penentuan materi uji kompetensi</p> <p>MOT-11.02.CFM.03.SOP.02 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag</p> <p>Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu: Pengelolaan dan koordinasi kegiatan Penetapan Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional yang terdiri dari kegiatan penilaian dari kegiatan penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), Menyusun pedoman pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang</p> <p>Direktorat Metrologi: Pengajuan angka kredit, unggah dokumen, verifikasi dokumen, sidang uji Daftar Usulan</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Penilaian Angka Kredit (DUPAK), penerbitan Penilaian Angka Kredit (PAK)</p>
			<p>MOT-11.02.CFM.03.SOP.05 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kementrian Perdagangan</p>	<p>Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu: Monitoring dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dilakukan melalui kegiatan bimbingan/pertemuan teknis di bidang jabatan fungsional untuk memperoleh informasi dan membahas berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional maupun terhadap perkembangan kebijakan pimpinan yang terkait, Unit pembina melakukan pembentukan, pembinaan dan pengembangan organisasi profesi jabatan fungsional penguji mutu barang</p> <p>Direktorat Metrologi: Penyampaian kuesioner, pengumpulan kuesioner yang telah dilengkapi, pengolahan data kuesioner, penyampaian hasil analisa dan</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				rekomendasi, pelaporan monitoring dan evaluasi jabfung kemetrolgian.
			MOT-11.02.CFM.04.SOP.01 Pelaksanaan Forum/ <i>Event</i> Internasional	Pihak donor menyampaikan tawaran seminar, workshop, simposium, magang, pendidikan atau pelatihan kepada Kementerian Perdagangan, menelaah tawaran dimaksud, menyampaikan usulan nama petugas yang akan mengikuti kegiatan dimaksud, seleksi nama peserta, pelaksanaan event, pelaporan
		MOT-11.03 Pengembangan SDM <i>Stakeholder</i> Perdagangan	MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat <i>Stakeholder</i> Perdagangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan (PUSDIKLAT): Koordinasi AKD, perumusan kerjasama diklat, Penyusunan program diklat, penyusunan kurikulum dan silabus, Sosialisasi dan promosi, perekrutan seleksi peserta, Administrasi pembayaran diklat, Perekrutan pengajar, menentukan jadwal diklat, menyusun panitia diklat, menyiapkan materi diklat, mempersiapkan sarana dan prasarana, pelaksanaan diklat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN):

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BPPEI):
		MOT-11.04 Administrasi dan Informasi Kepegawaian	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian	Memproses kenaikan pangkat pegawai Proses pengajuan Pensiun dini, pensiun BUP Proses pengajuan pembuatan Karis/Karsu, Kartu TASPEN Memproses pengajuan mutasi pegawai Proses cuti pegawai dan pengaktifan kembali Pemutakhiran data pada system informasi kepegawaian
			MOT-10.04.CFM.01.SOP.02 Penatausahaan BMN	Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) terdiri dari beberapa kegiatan pokok diantaranya pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN
		MOT-11.05 Pengembangan Standar Kompetensi	MOT-11.05.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Standar Kompetensi	<i>Review</i> organisasi, review standar kompetensi, penyusunan dan penetapan standar kompetensi
		MOT-11.06 <i>Assessment Center</i>	MOT-11.06.CFM.01.SOP.01 <i>Assessment Center</i>	Penetapan standar kompetensi Pembentukan Tim Assesor Merencanakan dan membuat <i>assessment tools</i>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				Melaksanakan <i>Assesment</i> , mengelola dan memanfaatkan hasil <i>assessment</i>
		MOT-11.07 Pengelolaan Sdm Perwakilan Perdagangan Di Luar Negeri	MOT-11.07.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan SDM Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri	Pengumuman pembukaan seleksi Melaksanakan seleksi administrasi dan tertulis Pengumuman kelulusan Diklat substansi luar negeri dan keterampilan Mengolah hasil ujian diklat Memberikan pertimbangan
12	MOT-12 Layanan Hukum	MOT-12.01 Pemberian Bantuan Hukum Litigasi	MOT-12.01.CFM.01.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum di Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara MOT-12.01.CFM.02.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum di Mahkamah Konstitusi	Mempelajari dan mengumpulkan bahan/data/informasi yang terkait dengan gugatan Melakukan koordinasi untuk membahas dengan unit Eselon I, Eselon II dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait Mewakili unit yang digugat untuk melakukan proses persidangan Menyiapkan data, alat bukti dan informasi bersama dengan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				Kementerian terkait permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan Menyampaikan Keterangan Pemerintah dan menghadirkan keterangan saksi/ahli Menyiapkan dan menyampaikan Kesimpulan Pemerintah di Mahkamah Konstitusi
			MOT-12.01.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum di Mahkamah Agung	Menyiapkan data, alat bukti dan informasi, menyiapkan Jawaban Permohonan dan Akta Bukti, menyampaikan Jawaban dan Akta Bukti terkait Hak Uji Materiil peraturan perundang-undangan bersama dengan Eselon I, Eselon II, Eselon III ke Mahkamah Agung
		MOT-12.02 Pemberian Pelayanan Hukum Non Litigasi	MOT-12.02.CFM.01.SOP.01 Pemberian Konsultasi dan Telaah Hukum (<i>Legal Opinion</i>) Bidang Perdagangan	Menerima, meneliti serta menelaah permintaan telaah hukum dan konsultasi hukum, melakukan kajian hukum atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan/data/informasi/yang terkait dengan permasalahan yang diajukan
			MOT-12.02.CFM.01.SOP.02 Pemberian Konsultasi dan	Mengajukan, meneliti, koordinasi, melakukan pengkajian, menyusun kajian, menyusun konsep pendapat hukum, dan

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
			Opini Hukum Bidang Perdagangan Internasional	melakukan pencatatan serta pembahasan permasalahan dan meminta pihak yang memohon konsultasi hukum untuk mengumpulkan bahan/data/dokumen/informasi terkait dengan permasalahan yang diajukan
			MOT-12.02.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Dalam Rangka Pengamanan Peraturan Nasional di Bidang Perdagangan Internasional	Menerima dan disposisi permintaan opini hukum
				Menilai dan mengkaji relevansi bahan analisis
				Melakukan tinjauan awal atas permintaan opini hukum dan memberikan arahan
				Melakukan penelaahan atas <i>draft convention, agreement, protocol, treaty, arrangement</i> , dan <i>Memorandum of Understanding</i> terkait perdagangan internasional dan memberikan arahan kepada pelaksana, mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum (primer/sekunder)
				Melakukan analisa hukum, memeriksa hasil analisa hukum dan menyiapkan konsep opini hukum

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				Memeriksa dan menyetujui konsep opini hukum
				Penyampaian opini hukum/pendampingan kepada stakeholder
			MOT-12.02.CFM.04.SOP.01 Pemberian Opini Hukum Terkait Kesesuaian Kebijakan Negara Mitra Dagang Dengan Komitmen Perjanjian Perdagangan Internasional	Menerima dan disposisi permintaan opini hukum
				Melakukan tinjauan awal atas permintaan opini hukum dan memberikan arahan
				Melakukan penelaahan atas <i>draf convention, agreement, protocol, treaty, arrangement</i> , dan <i>Memorandum of Understanding</i> terkait perdagangan internasional dan memberikan arahan kepada pelakasna
				Mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum (primer/sekunder)
				Menilai dan mengkaji relevansi bahan analisis
				Melakukan analisa hukum
				Memeriksa hasil analisa hukum dan menyiapkan konsep opini hukum
				Memeriksa dan menyetujui konsep opini hukum

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				Penyampaian opini hukum/pendampingan kepada stakeholder
13	MOT-13 pengelolaan Rencana & Anggaran	MOT-13.01 Penyusunan Rencana Kerja	MOT-13.01.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan	Pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, membuat SK Tim, membuat konsep rancangan awal Renstra, melakukan FGD
			MOT-13.01.CFM.02.SOP.01 Penetapan Rencana Kerja	Penyusunan konsep rancangan awal renja, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, pelaksanaan FGD, pelaksanaan Rapat Kerja Kemendag,
			MOT-13.01.CFM.02.SOP.02 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Sosialiasi kebijakan, penelaahan RKA
		MOT-13.02 Pengelolaan Keuangan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.01 Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan	Pb4 Menghimpun usulan nama calon pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dari masing-masing Satker, menyusun konsep Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan KPA berdasarkan usulan masing-masing Satket, menyusun SK pengelola keuangan masing-masing Satker
			MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran	Pembinaan kepada pengelola anggaran masing-masing Satker, monitoring dan

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>evaluasi pelaksanaan anggaran unit Eselon I Kementerian Perdagangan, menghimpun dan mengolah data realisasi anggaran Kementerian Perdagangan secara berkala, menghimpun data kendala realisasi anggaran Kementerian Perdagangan kepada Sekretaris Jenderal, dan pelaporan data monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran kepada Sekretaris Jenderal</p>
			<p>MOT-13.02.CFM.01.SOP.03 Revisi DIPA/RKA-KL</p>	<p>Satker di lingkungan Kementerian Perdagangan menyerahkan RKA-KL/DIPA kepada Biro Keuangan</p> <p>Biro Keuangan setelah RKA-KL/DIPA diterima oleh masing-masing satker melakukan pembinaan kepada para pengelola pada unit satker di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi DIPA/POK dengan nara sumber dari Kementerian Keuangan</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Satker di lingkungan Kementerian Perdagangan menyerahkan usulan revisi RKA-KL/DIPA kepada Biro Keuangan</p> <p>Biro Keuangan melakukan penilaian/penelaahan terhadap usulan revisi RKA-KL/DIPA unit satker di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan kewenangannya dan syarat-syarat data dukung yang diperlukan;</p> <p>Biro keuangan berdasarkan hasil penelaahan revisi RKA-KL/DIPA memberikan rekomendasi kepada unit satker terkait sesuai kewenangan proses usulan revisi</p> <p>Biro Keuangan mengusulkan revisi RKA-KL/DIPA kepada Ditjen. Anggaran Kementerian Keuangan dan melakukan pendampingan penelaahan terhadap usulan revisi RKA-KL/DIPA unit satker</p> <p>Biro Keuangan menerima SP- RKA-KL revisi dari Ditjen. Anggaran Kementerian Keuangan dan menginformasikan kepada unit</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				terkait untuk melakukan penelaahan DIPA/RKA-KL;
				Biro Keuangan menerima pengesahan revisi RKA-KL/DIPA unit Satker di lingkungan Kementerian Perdagangan/surat persetujuan revisi dan selanjutnya disampaikan kepada satker terkait.
			MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan SK pelaksanaan SAI pada seluruh Satker di lingkungan Kementerian Perdagangan, pembinaan SAI pada seluruh Satker di lingkungan Kementerian Perdagangan, rekonsiliasi dengan KPPN melalui e-Rekon & LK setiap bulan, pendampingan penyusunan laporan keuangan Satker, monitoring dan konsolidasi data seluruh satker pada aplikasi e-Rekon & LK, penyusunan laporan keuangan tingkat Kementerian Audited, monitoring tindak lanjut reviu Itjen, dan fasilitasi pelaksanaan audit laporan keuangan oleh BPK-RI
		MOT-13.03	MOT-13.03.CFM.01.SOP.01	Konversi DIPA sebagai data awal Sistem E-Monitoring Kementerian

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements	
		Evaluasi dan Pelaporan	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Perdagangan, sosialisasi, dan pelaporan	
			MOT-13.03.CFM.01.SOP.02 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Pelaksanaan rapat koordinasi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan membuat konsep LAKIP	
		MOT-13.04 Pengelolaan PNBP	MOT-13.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan PP Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Menghimpun usulan perubahan PP tarif dan jastifikasi dari Satker pengelola PNBP di lingkungan Kementerian Perdagangan, , dan	Menyampaikan usulan revisi PP tarif beserta kelengkapan data untuk disampaikan ke Direktorat PNBP Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan
					Melakukan pembahasan revisi PP tarif dengan Direktur PNBP Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan
				MOT-13.04.CFM.01.SOP.02 Perencanaan Target PNBP & Penetapan PAGU	Menghimpun dan mengolah data Target dan PAGU PNBP tahun (20XX+1)

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				Menyampaikan data target dan Pagu PNBPN ke Kementerian Keuangan
			MOT-13.04.CFM.01.SOP.03 Revisi Target dan Pagu PNBPN	Memproses usulan revisi target dan Pagu PNBPN TA berjalan dari satker pengelola PNBPN, mendampingi satker pengelola PNBPN rapat membantu revisi target Pagu PNBPN bersama DJA, dan menyampaikan laporan hasil pembahasan target Pagu PNBPN
		MOT-13.05 Administrasi Bantuan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan	MOT-13.05.CFM.01.SOP.01 Administrasi Pinjaman Luar Negeri	Membuat rencana dan rapat koordinasi
			MOT-13.05.CFM.01.SOP.02 Administrasi Hibah Yang Direncanakan	Melaksanakan koordinasi penyusunan analisis rencana, program dan anggaran, kerjasama dan bantuan luar negeri serta evaluasi dan pelaporan
				Penyiapan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan koordinasi rencana kebutuhan serta administrasi pelaksanaan bantuan luar negeri
			MOT-13.05.CFM.01.SOP.03 Administrasi Hibah Langsung	Membuat rencana, rapat koordinasi, pengolahan dan analisis data

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
14	MOT-14 Penataan Organisasi	MOT-14.01 Penataan Organisasi	MOT-14.01.CFM.01.SOP.01 Analisis Beban Kerja	<p>Membentuk tim analisa beban kerja</p> <p>Melakukan uji coba pelaksanaan analisa beban kerja</p> <p>Menetapkan standar norma waktu produk berdasarkan norma proses tahapan dan standar norma waktu produk Berdasarkan norma pelayanan</p> <p>Menyusun laporan volume kerja secara berkala, melakukan inventarisasi pemangku jabatan</p> <p>Rekapitulasi jumlah pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan</p> <p>Melakukan penghitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan dan prestasi kerja jabatan</p> <p>Melakukan rekapitulasi data norma waktu berdasarkan proses tahapan dan data norma waktu berdasarkan norma pelayanan di lingkungan Kementerian Perdagangan</p> <p>Proses penalaahan</p> <p>Pengesahan hasil analisis beban kerja</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				Sosialisasi hasil pengukuran analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan
			MOT-14.01.CFM.01.SOP.02 Penataan Kelembagaan	Membentuk Tim Penataan Kelembagaan Menyusun naskah akademis penataan kelembagaan Melakukan analisa dan perbaikan naskah akademis dan menyusun rancangan perubahan Permendag Tentang Ortaker Kemendag Mengusulkan perubahan organisasi ke Kemenpan dan Reformasi Birokrasi Melakukan pembahasan terhadap usulan perubahan organisasi Penyempurnaan <i>draf</i> Permendag tentang perubahan Ortaker Menteri Perdagangan mengesahkan Permendag tentang perubahan Ortaker Kemendag, dan sosialisasi
			MOT-14.01.CFM.01.SOP.03	Tim Analisa dan Evaluasi Jabatan melakukan evaluasi jabatan,

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
			Analisa dan Evaluasi Jabatan	<p>Berkoordinasi dengan semua unit Eselon I melakukan persiapan analisa jabatan</p> <p>Tim Analisa dan Evaluasi Jabatan menyampaikan formulir kuesioner</p> <p>Penyusunan uraian jabatan fungsional tertentu</p> <p>Persetujuan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta BKN</p> <p>Tim Analisa dan Evaluasi Jabatan melakukan entri data hasil pengisian kuesioner dari semua Unit</p> <p>Tim Analisa dan Evaluasi Jabatan melakukan analisa terhadap hasil pengisian kuesioner untuk menentukan nomenklatur jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum</p> <p>Verifikasi terhadap nomenklatur jabatan dan uraian jabatan yang telah disusun</p> <p>Biro Organisasi dan Kepegawaian memberikan hasil verifikasi terhadap hasil evaluasi jabatan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian.</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
15	MOT-15 Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Manajemen dan Pengawasan	MOT-15.01 PENGELOLAAN MANAJEMEN KINERJA	MOT-15.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Manajemen Kinerja	<p>Menyusun Peta Strategi dan Arsitektur Indikator Kinerja berdasarkan misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Perdagangan serta</p> <p>Menyampaikan hasil penyusunan Peta Strategi dan Arsitektur Indikator Kinerja kepada Unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perdagangan setiap tahun pada Bulan Desember tahun sebelumnya.</p> <p>Menyusun Matriks Renja yang berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kegiatan pendukung IKU beserta target-targetnya berdasarkan Penyusunan Peta Strategi dan Arsitektur Indikator Kinerja serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diselesaikan pada bulan januari setiap tahunnya.</p> <p>Melakukan koordinasi horizontal dan vertikal untuk menyempurnakan Matriks Renja Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan</p> <p>Unit Eselon II di Kementerian Perdagangan menyiapkan data sesuai Matriks Renja Unit Eselon II Kementerian Perdagangan</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Menginput data capaian kinerja dari Matriks Renja unit Eselon II ke dalam program Actuate Performance <i>Softviews</i> setiap kuartal dan menyampaikan laporan kuartal <i>Balance Score Card</i> kepada Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan pada minggu kedua bulan berikutnya</p> <p>Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan menyusun Laporan Kuartal <i>Balanced Score Card</i> Kementerian Perdagangan dan menyampaikan laporan kuartal <i>Balance Score Card</i> kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal pada minggu ke tiga bulan berikutnya</p>
		<p>MOT-15.02 Pengelolaan Tinjauan Manajemen</p>	<p>MOT15.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Tinjauan Manajemen</p>	<p>Menyiapkan bahan rapat Pimpinan (Rapim), Rapat <i>Adhoc</i> dan Rapat Koordinasi Lainnya</p> <p>Menyiapkan bahan rapat Sidang Kabinet, Rapat <i>Adhoc</i> dan Rapat Koordinasi Lainnya</p> <p>Menyiapkan bahan rapat Dewan Perwakilan Rakyat</p> <p>Pembentukan tim, mempersiapkan program kerja pengawasan PKA (Program Kerja Audit),</p>
			<p>MOT-15.03.CFM.01.SOP.01</p>	

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
		MOT-15.03 Pengawasan Internal	Pelaksanaan pengawasan internal	pelaksanaan pengawasan internal, pelaporan, tindak lanjut pelaporan
			MOT-15.03.CFM.02.SOP.01 pelaksanaan <i>Review</i> Laporan Keuangan	Pembentukan tim, mempersiapkan program kerja pengawasan PKA (Program Kerja Audit), pelaksanaan pengawasan internal, pelaporan, tindak lanjut pelaporan
			MOT-15.03.CFM.02.SOP.02 pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Melakukan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perdagangan terhadap kinerja dan keuangan
			MOT-15.03.CFM.03.SOP.01 Pelaksanaan Wilayah Tertib Administrasi (WTA)	Pembentukan tim, mempersiapkan program kerja pengawasan PKA (Program Kerja Audit), pelaksanaan pengawasan internal, pelaporan, tindak lanjut pelaporan
			MOT-15.03.CFM.03.SOP.01 Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Publik eksternal menyampaikan pengaduan dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, <i>website</i> , e-mail, dan surat Pusat layanan pengaduan mendata dan memilah pengaduan, dengan ketentuan tertentu Petugas melakukan penelaahan laporan pengaduan masyarakat, mengelompokan berdasarkan jenis penyimpangan

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>Tim Layanan Pengaduan merumuskan inti masalah yang diadukan</p> <p>Tim Layanan Pengaduan menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan</p> <p>Tim Layanan Pengaduan meneliti dokumen dan atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima</p> <p>Tim Layanan Pengaduan menetapkan hasil penelaahan pengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori Berkadar Pengawasan dan yang Tidak Berkadar Pengawasan</p> <p>Terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan pelayanan masyarakat/publik yang dilakukan oleh unit di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka diteruskan kepada bagian di unit terkait</p> <p>Unit terkait tersebut menindak lanjuti pengaduan masyarakat tersebut dan</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
				<p>melaporkan hasil tindak lanjut kepada Tim Pengaduan Masyarakat di Inspektorat Jenderal dengan jangka waktu 7 hari kerja</p> <p>Inspektur Jenderal mereviu laporan hasil penelaahan, untuk hasil penelaahan yang Berkadar Pengawasan di tindaklanjuti untuk pemeriksaan lebih lanjut.</p> <p>Tim Pengaduan Masyarakat melakukan pemeriksaan pendahuluan berupa Telaah lanjutan, Konfirmasi dan Kegiatan klarifikasi</p> <p>Tim membuat laporan hasil pemeriksaan pendahuluan / kesimpulan berupa rekomendasi yaitu Tidak perlu pemeriksaan/Perlu pemeriksaan mendalam</p> <p>Untuk kesimpulan hasil pemeriksaan pendahuluan: “Tidak perlu pemeriksaan”, kemudian dilaporkan kepada Inspektur Jenderal dengan tembusan MENPAN dan Terlapor</p>
		MOT-15.04	MOT-15.04.CFM.05.SOP.01	<p>Penyusunan <i>draf</i> kuesioner</p> <p>Melakukan uji coba kuesioner</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Key Business Requirements
		Pengukuran dan Pengelolaan Kepuasan <i>Stakeholder</i>	Pelaksanaan Survei Kepuasan <i>Stakeholder</i>	Menyempurnakan kuesioner
				Melakukan survei Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dengan mengirimkan kuesioner kepada pelanggan
				Mengumpulkan mengelola dan menganalisis hasil survei untuk menghasilkan IKP
				Menyampaikan laporan hasil survei kepada pemimpin
		MOT-15.05 Pengendalian Dokumen	MOT-15.05.CFM.05.SOP.01 Pengendalian Dokumen	Pembuatan dan Penerbitan Dokumen
				Pendistribusian Dokumen
				Pengendalian Dokumen Eksternal dan Pemanfaatan Dokumen
				Penarikan dan Pemusnahan Dokumen
				Penyimpanan
				Penempatan
Perubahan Dokumen dan Pengunggahan				
MOT-15.06 Koordinasi Implementasi	MOT-15.05.CFM.06.SOP.01 Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Program Khusus	Tahap persiapan kebijakan dan program khusus, mulai dari pengumpulan bahan, perencanaan kebijakan, sampai dengan koordinasi kebijakan dan program khusus		

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	<i>Key Business Requirements</i>
		Kebijakan dan Program Khusus		Tahap pelaksanaan kebijakan dan program khusus, terdiri dari implementasi kebijakan oleh Unit-unit Eselon II terkait, pendampingan dan pengawasan oleh Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan Tahap evaluasi dan pelaporan kebijakan dan program khusus, terdiri dari evaluasi implementasi kebijakan dan program khusus

Lampiran 2 Matriks Organisasi VS Fungsi

Organisasi Fungsi	ITJEN	PDN	PKTN	DAGLU	PEN	PPIE	BAPPEBTI	BPPP	SEKJEN
MOT-01									
PENGELOLAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN									
MOT-01.01. Undang-Undang Bidang Perdagangan							V		V
MOT-01.02. Kepesertaan Pembahasan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan									V
MOT-01.03. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan									V
MOT-01.04. Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan									V
MOT-01.05. Peraturan Kepala BAPPEBTI							V		
MOT-01.06. Peraturan di Bidang Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kemendag									V
MOT-01.07. Penyusunan Perjanjian									V
MOT-02									
PENGAMANAN PASAR DALAM NEGERI									

Organisasi Fungsi	ITJEN	PDN	PKTN	DAGLU	PEN	PPIE	BAPPEBTI	BPPP	SEKJEN
	MOT-02.01 Pengawasan Barang dan Jasa			V					
MOT-02.02 Penyediaan Standar Acuan			V						
MOT-02.03 Koordinasinasional Perlindungan Konsumen			V						
MOT-02.04 Pemberdayaan Konsumen			V						
MOT-02-05 Pengawasan Barang dan Jasa Di Pasar			V						
MOT-02-06 Pelayanan Kemetrolgian			V						
MOT-03									
Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok & Penguatan Jaringan Distribusi									
MOT-03.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok		V							
MOT-03.02 Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok & Penguatan Jaringan Distribusi		V							
MOT-04									
Peningkatan Ekspor Non Migas									
MOT-04.01 Pengembangan Pasar Ekspor					V				

Organisasi Fungsi	ITJEN	PDN	PKTN	DAGLU	PEN	PPIE	BAPPEBTI	BPPP	SEKJEN
MOT-04.02 Pengembangan Produk Ekspor					V				
MOT-04.03 Pengembangan Citra					V				
MOT-04.04 Penanganan Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard				V					
MOT-04.05 Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif				V					
MOT-04.06 Pengawasan Mutu Barang Olah Komoditi Ekspor (Bokor)			V						
MOT-.04.07 Standar Acuan Fisik Komoditi & Pemantauan Mutu Komoditi Ekspor			V						
MOT-05 perbaiki iklim Usaha Perdagangan									
MOT-05.01 pengendalian Ekspor dan Impor				V					
MOT-05.02 Perbaiki Iklim Usaha Dalam Negeri		V		V					
MOT-05.03 Peningkatan Nilai Tambah Produk		V							
MOT-05.04 Perdagangan yang Berkelanjutan				V					
MOT-05.05 Peningkatan Peran Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus									
MOT-05.06 Pengembangan Fasilitasi Ekspor - Impor				V					

Organisasi Fungsi	ITJEN	PDN	PKTN	DAGLU	PEN	PPIE	BAPPEBTI	BPPP	SEKJEN
				V					
MOT-08.02 Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan									V
MOT-08.03 Pelayanan Perpustakaan									V
MOT-08.04 Pengelolaan Komunikasi Dalam Situasi Krisis									V
MOT - 09									
Riset dan Pengembangan									
MOT - 09.01 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan								V	
MOT - 10									
Pengelolaan Administrasi dan Umum									
MOT -10.01 Pengelolaan Arsip									V
MOT -10.02 Pengelolaan K3L									V
MOT-10.03 Pengelolaan Keprotokolan									V
MOT-10.04 Pengelolaan BMN									V
MOT-11									
Pengelolaan SDM									

Lampiran 3 Target Perbaikan Proses Bisnis

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
1	MOT-01. Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan	MOT-01.01. Undang-Undang Bidang Perdagangan	MOT-01.01.CFM.01.SOP.01 Perencanaan Penyusunan Undang-Undang Bidang Perdagangan	-
		MOT-01.01.CFM.01.SOP.02 Persiapan Pembentukan Undang-Undang Bidang Perdagangan	-	
		MOT-01.01.CFM.01.SOP.03 Pengajuan Rancangan Undang-Undang	-	
		MOT-01.02. Kepesertaan Pembahasan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	MOT-01.02.CFM.01.SOP.01 Kepesertaan Pembahasan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	-
		MOT-01.03 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan	MOT-01.03.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan	-

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
		MOT-01.04. Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan	MOT-01.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan	-
		MOT-01.05. Peraturan Kepala BAPPEBTI	MOT-01.05.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Kepala BAPPEBTI	Diperlukan <i>improvement</i> untuk pengarsipan/digitalisasi dokumen Peraturan Kepala BAPPEBTI/PERKA (Penyusunan Perka), Diseminasi Peraturan Kepala BAPPEBTI
		MOT-01.06. Peraturan di Bidang Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kemendag	MOT-01.06.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan di Bidang Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kemendag	-
		MOT-01.07. Penyusunan Perjanjian	MOT-01.07.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Perjanjian	-
2	MOT-02 Pengamanan Pasar Dalam Negeri	MOT-02.01 Pengawasan Barang dan Jasa	MOT-02.01.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Pendaftaran Lembaga Penilaian	-

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
			MOT-02.01.CFM.02.SOP.01 Pengawasan Kinerja LPK Terdaftar	-
			MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang yang SNI nya Diberlakukan Wajib	-
		MOT-02.02 Penyediaan Standar Acuan	MOT-02.02.CFM.01.SOP.01 Perumusan SNI Jasa Bidang Perdagangan	-
		MOT-02.03 Koordinasinasional Perlindungan Konsumen	MOT-02.03.CFM.01.SOP.01 Koordinasi Nasional Perlindungan Konsumen	-
		MOT-02.04 Pemberdayaan Konsumen	MOT-02.04.CFM.01.SOP.01 Pembentukan dan Penguatan BPSK	-
			MOT-02.05.CFM.01.SOP.02 Aktivasi LPKSM	-
			MOT-02.04.CFM.02.SOP.01 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Konsumen	Membutuhkan pengembangan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWAS PK)

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
			MOT-02.04.CFM.02.SOP.03 Edukasi Konsumen Cerdas	-
		MOT-02-05 Pengawasan Barang dan Jasa Di Pasar	MOT-02.05.CFM.01.SOP.01 Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar	Aplikasi Pelaporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
		MOT-02-06 Pelayanan Kemetrolagian	MOT-02.06.CFM.01.SOP.01 Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik Untuk UTPP	Diperlukan <i>improvement</i> sistem informasi perizinan - SPPK (perbaikan fitur yang telah ada seperti: <i>digital signature</i> , rekapitulasi)
			MOT-02.06.CFM.02.SOP.01 Pengujian UTPP, Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi	Diperlukan <i>improvement</i> terkait sistem informasi UTPP IV (perbaikan fitur yang telah ada seperti: <i>digital signature</i> , integrasi dengan Simponi, e-lab terkait pencatatan dokumen cerapan pengujian, dll.)
3	MOT-03 Menjaga Ketersediaan Bahan	MOT-03.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok	Memerlukan aktivitas <i>maintenance server</i> berkala agar sistem yang

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
	Pokok & Penguatan Jaringan Distribusi			sudah ada dapat berjalan dengan lancar (tidak terjadi down time)
		MOT-03.02 Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok & Penguatan Jaringan Distribusi	MOT-03.02.CFM.01.SOP.01 Penataan Jaringan Distribusi	Membutuhkan pengembangan sistem yang dapat mendukung penerimaan proposal revitalisasi pasar
4	MOT-04 Peningkatan Ekspor Non Migas	MOT-04.01 Pengembangan Pasar Ekspor	MOT-04.01.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Pasar Ekspor	-
			MOT-04.01.CFM.01.SOP.02 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Pasar dan Produk Ekspor	-
		MOT-04.02 Pengembangan Produk Ekspor	MOT-04.02.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Produk Ekspor	-
		MOT-04.03 Pengembangan Citra	MOT-04.03.CFM.01.SOP.01 Promosi	-
			MOT-04.04.CFM.01.SOP.01 Penanganan Tuduhan <i>Dumping</i>	Membutuhkan Sistem Informasi Hambatan Perdagangan Untuk Membantu Pelaksanaan Proses

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
		MOT-04.04 Penanganan Tuduhan <i>Dumping</i> , Subsidi, <i>Safeguard</i>		Bisnis Penanganan Tuduhan <i>Dumping</i>
			MOT-04.04.CFM.02.SOP.01 Penanganan Tuduhan Subsidi	Membutuhkan Sistem Informasi Hambatan Perdagangan Untuk Membantu Pelaksanaan Proses Bisnis Penanganan Tuduhan Subsidi
			MOT-04.04.CFM.03.SOP.01 Penanganan Tindakan <i>Safeguard</i>	Membutuhkan Sistem Informasi Hambatan Perdagangan Untuk Membantu Pelaksanaan Proses Bisnis Penanganan Tindakan <i>Safeguard</i>
			MOT-04.04.CFM.04.SOP.01 <i>Dispute Settlement</i>	Membutuhkan Sistem Informasi Hambatan Perdagangan Untuk Membantu Pelaksanaan Proses Bisnis <i>Dispute Settlement</i>
		MOT-04.05 Koordinasi Penanganan Hambatan <i>Non</i> Tarif	MOT-04.05.CFM.01.SOP.01 Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif	Membutuhkan Sistem Informasi Hambatan Perdagangan Untuk Membantu Pelaksanaan Proses

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
				Bisnis Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif
			MOT-04.05.CFM.02.SOP.01 penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	Membutuhkan Sistem Informasi Hambatan Perdagangan Untuk Membantu Pelaksanaan Proses Bisnis Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan
		MOT-04.06 Pengawasan Mutu Barang Olah Komoditi Ekspor (Bokor)	MOT-04.06.CFM.01.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Olah Komoditi Ekspor (Bokor)	-
			MOT-04.06.CFM.01.SOP.02 Penerbitan Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR	-
		MOT-.04.07 Standar Acuan Fisik Komoditi & Pemantauan Mutu Komoditi Ekspor	MOT-04.07.CFM.01.SOP.01 penyusunan & Pengesahan Standar Buku Contoh Karet	-
5	MOT-05	MOT-05.01	MOT-05.01.CFM.01.SOP 01	-

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
	perbaikan Iklim Usaha Perdagangan	pengendalian Ekspor dan Impor	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Ekspor-Import	
MOT-05.02 Perbaikan Iklim Usaha Dalam Negeri		MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perijinan / Non Perijinan Kepada Dunia Usaha	Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi: Membutuhkan Sistem Informasi Waralaba, Aplikasi Logo Waralaba, Aplikasi Perekmbangan Fasilitator Edukasi <i>e-Commerce</i> , Aplikasi Pelaku Usaha yang Telah Dibina dan atau Diidentifikasi, dan Aplikasi LKTP	
Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting: Membutuhkan Pengembangan Aplikasi SIPT Dalam Mendukung Proses Bisnis Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri dan Perikanan Kelautan.				
Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri: E-SKA membutuhkan				

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
				pengembangan untuk membantu proses bisnis Pelayanan Perizinan /Non Perizinan Kepada Dunia Usaha
		MOT-05.03 Peningkatan Nilai Tambah Produk	MOT-05.03.CFM.01.SOP.01 Peningkatan Nilai Tambah Produk	Membutuhkan <i>database</i> untuk mendukung Sistem Informasi portal-indonesia.id
		MOT-05.04 Perdagangan Yang Berkelanjutan	MOT-05.04.CFM.01.SOP.01 Harga Patokan Ekspor (HPE)	-
		MOT-05.05 Peningkatan Peran Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus	MOT-05.05.CFM.01.SOP 01 Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (Dalam Hal Usulan dari Pemerintah)	-
			MOT-05.05.CFM.02.SOP 01 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Di KEK	-
		MOT-05.06 Pengembangan Fasilitas Ekspor - Impor	MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 Pelaksanaan Penerbitan Surat	Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri à Inatrade membutuhkan

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
			Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) Untuk Barang Ekspor Indonesia	pengembangan untuk membantu proses bisnis Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate Of Origin</i>) Untuk Barang Ekspor Indonesia Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri à Intrade Membutuhkan Pengembangan untuk Membantu Proses Bisnis Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate Of Origin</i>) Untuk Barang Ekspor Indonesia
		MOT-05.07 Pembinaan dan Pengawasan PBK, SRG, dan Pl	MOT - 05.07.CFM.01.SOP.01 Pembinaan PBK, SRG dan Pl	Memerlukan Sistem Informasi untuk mendukung pemrosesan perizinan di bidang PBK/SRG/PL, pengelolaan pelaku usaha di bidang PBK/SRG/PL, Diseminasi

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
				informasi publik di bidang PBK/SRG/PL
			MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PL	Memerlukan Sistem Informasi untuk mendukung pengawasan pelaku usaha, lembaga dan transaksi di bidang PBK/SRG/PL, pemantauan subsidi SRG, penyampaian pelaporan SRG dan PL
			MOT - 05.07.CFM.03.SOP.01 Pengembangan PBK, SRG dan PL	Memerlukan Bank data (<i>database</i>) terkait pengkajian produk dan kelembagaan PBK/SRG/PL
		MOT-05.08 Pemulihan Iklim Usaha Perdagangan	MOT-05.08.CFM.01.SOP.01 Penyelidikan Tindakan Anti <i>Dumping</i>	-
			MOT-05.08.CFM.02.SOP.01 Penyelidikan Tindakan Imbalan	-
			MOT-05.08.CFM.03.SOP.01 Penyelidikan <i>Safeguard</i>	-

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
6	MOT-06 Pengembangan Akses Pasar	MOT-06.01 Diplomasi Perdagangan	MOT-06.01.CFM.01.SOP.01 <i>Leading Sector</i> Perundingan Internasional	Membutuhkan Sistem Informasi Perundingan Internasional untuk Mendukung Proses Bisnis <i>Leading Sector</i> Perundingan Internasional
			MOT-06.01.CFM.01.SOP.02 Menghadiri dan/Melakukan Perundingan Sidang Internasional	-
			MOT-06.01.CFM.01.SOP.03 Usulan Pengesahan Perjanjian dan / atau Kesepakatan Perjanjian Internasional	-
7	MOT - 07 Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)	MOT-07.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	MOT-07.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Membutuhkan informasi terkait <i>monitoring</i> perangkat DC (suhu/EMS, <i>traffic</i> /PRTG, prioritas penggantian perangkat/GLPI/ZABBIX, dkk), SIEM
		MOT-07.02 Pengelolaan dan Pelayanan Permintaan Data	MOT-07.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan dan Pelayanan Permintaan Data	Membutuhkan aplikasi pemetaan proses bisnis dan inventaris data (input: inventaris, proses: pemetaan proses bisnis + data + media dukungan TI

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
				(aplikasi/db/service), <i>output</i> : metadata, kamus data/katalog data, kategorisasi data, data quality)
		MOT-07.03 Pengelolaan Aplikasi	MOT - 07.03.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Aplikasi	<i>tools project management</i> yang didalam ada pengelolaan <i>requirement product, versioning, komunikasi (shared), schedule, change management; knowledge management system; Sandboxing</i> untuk <i>development</i> (untuk <i>environment test</i>), HW test/HW <i>virtualization</i> (untuk <i>deployment</i>)
		MOT-07.04 Pengelolaan Keamanan Informasi	MOT - 07.04.CFM.01.SOP.01 pengelolaan Keamanan Informasi	Memerlukan aplikasi pemantauan ISO 9001 dan ISO 27001: dokumen, bukti-bukti, temuan dan tindak lanjut, RTM, dkk
8	MOT-08	MOT-08.01 Pengelolaan Informasi, Publikasi,	MOT-08.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	-

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
	pelayanan Informasi dan Publikasi	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	MOT-08.01.CFM.01.SOP.02 Publikasi	-
			MOT-08.01.CFM.02.SOP.01 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	-
		MOT-08.02 Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan	MOT-08.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan	-
		MOT-08.03 Pelayanan Perpustakaan	MOT-08.03.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perpustakaan	-
		MOT-08.04 Pengelolaan Komunikasi Dalam Situasi Krisis	MOT-08.04.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Komunikasi Dalam Situasi Krisis	-
9	MOT - 09 Riset dan Pengembangan	MOT - 09.01 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan	MOT - 09.01.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Kajian	Memerlukan atensi improvement terhadap beberapa sisem berikut: - Ms. Office, <i>Software</i> e-views 9, <i>Software</i> STATA (memerlukan <i>upgrade</i>)

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
				- Membutuhkan <i>software</i> adobe versi terbaru, akses jurnal internasional yang tidak terbatas (JSTOR, akses data WITS, GTAP <i>dynamic</i>)
10	MOT – 10 Pengelolaan Administrasi dan Umum	MOT -10.01 Pengelolaan Arsip	MOT -10.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Arsip	Terkait aplikasi pengelolaan arsip menunggu percepatan SPBE
MOT -10.02 Pengelolaan K3L		MOT -10.01.CFM.02.SOP.01 Pengelolaan K3L	Penambahan modul terkait tertib niaga berupa pendaftaran barang Keselamatan, Kemanan, Kesehatan, Lingkungan Hidup (K3L) bertujuan sebagai persyaratan	
MOT -10.03 Pengelolaan Keprotokolan		MOT -10.01.CFM.02.SOP.01 Pengelolaan Keprotokolan	-	
MOT -10.04		MOT -10.04.CFM.01.SOP.01	Menunggu aplikasi percepatan SPBE	

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
		Pengelolaan BMN	Perencanaan dan Pengadaan Barang & Jasa MOT -10.04.CFM.01.SOP.02 Penatausahaan BMN MOT -10.04.CFM.01.SOP.03 penggunaan dan Pemanfaatan BMN MOT -10.04.CFM.01.SOP.04 Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN	-
11	MOT-11 Pengelolaan SDM	MOT-11.01 Pengadaan SDM	MOT-11.01.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Formasi Pegawai MOT-11.01.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Rekrutmen CPNS	Ropeg: – Memerlukan aplikasi pengusulan tambahan kebutuhan pegawai, – aplikasi registrasi pelaksanaan ujian CPNS -

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
			MOT-11.01.CFM.01.SOP.03 Pengangkatan PNS	-
		MOT-11.02 Pembinaan dan Pengembangan SDM	MOT-11.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Kinerja Pegawai	-
			MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementrian Perdagangan	Pengembangan <i>e-Learning, Learning Management System (LMS)</i>
			MOT-11.02.CFM.01.SOP.03 Pengelolaan Jabatan Fungsional	Membutuhkan aplikasi pengelolaan jabatan fungsional
			MOT-11.02.CFM.02.SOP.01 Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	-
			MOT-11.02.CFM.03.SOP.01	-

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
			Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag	
			MOT-11.02.CFM.03.SOP.02 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag	e-DUPAK (perbaikan <i>error</i> yang ada, penyederhanaan input penilaian, rekapitulasi)
			MOT-11.02.CFM.03.SOP.05 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kementerian Perdagangan	Membutuhkan Sistem Informasi <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian untuk Mendukung Proses Bisnis <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Jabatan Fungsional dibawah Pembinaan Kementerian Perdagangan
			MOT-11.02.CFM.04.SOP.01 Pelaksanaan Forum/ <i>Event</i> Internasional	-
		MOT-11.03 Pengembangan SDM <i>Stakeholder</i> Perdagangan	MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat <i>Stakeholder</i> Perdagangan	Membutuhkan <i>website</i> informasi publik, <i>Open Jurnal System</i>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
		MOT-11.04 Administrasi dan Informasi Kepegawaian	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian	Membutuhkan aplikasi penyusunan standar kompetensi
		MOT-11.05 Pengembangan Standar Kompetensi	MOT-11.05.CFM.01.SOP.01 pengembangan Standar Kompetensi	-
		MOT-11.06 <i>Assessment Center</i>	MOT-11.06.CFM.01.SOP.01 <i>Assessment Center</i>	-
		MOT-11.07 Pengelolaan Sdm Perwakilan Perdagangan Di Luar Negeri	MOT-11.07.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan SDM Perwakilan Perdagangan Di Luar Negeri	Memerlukan aplikasi rekrutmen SDM perwakilan di Luar Negeri
12	MOT-12 Layanan Hukum	MOT-12.01 Pemberian Bantuan Hukum Litigasi	MOT-12.01.CFM.01.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Di Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara	-
			MOT-12.01.CFM.02.SOP.01	-

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
			Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Konstitusi	
			MOT-12.01.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Agung	-
		MOT-12.02 Pemberian Pelayanan Hukum <i>Non</i> Litigasi	MOT-12.02.CFM.01.SOP.01 Pemberian Konsultasi dan Telaah Hukum (<i>Legal Opinion</i>) Bidang Perdagangan	-
			MOT-12.02.CFM.01.SOP.02 Pemberian Konsultasi dan Opini Hukum Bidang Perdagangan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu untuk melakukan improvisasi pada aspek kuantitas dan kualitas SDM - Perlu pengembangan <i>website</i> untuk menunjang percepatan dan simplifikasi pelaksanaan advokasi kepada <i>Stakeholder</i> melalui advokasi online, serta akuntabilitas penilaian pemanfaatan dari advokasi hukum yang diterima oleh <i>Stakeholder</i>.

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
			MOT-12.02.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Dalam Rangka Pengamanan Peraturan Nasional Di Bidang Perdagangan Internasional	- Perlu untuk melakukan improvisasi pada aspek kuantitas dan kualitas SDM
			MOT-12.02.CFM.04.SOP.01 Pemberian Opini Hukum Terkait Kesesuaian Kebijakan Negara Mitra Dagang Dengan Komitmen Perjanjian Perdagangan Internasional	- Perlu untuk melakukan improvisasi pada aspek kuantitas dan kualitas SDM - Alokasi anggaran untuk mengakses informasi/ <i>content</i> yang terkait dengan isu-isu perjanjian dan sengketa perdagangan internasional.
13	MOT-13 pengelolaan Rencana & Anggaran	MOT-13.01 Penyusunan Rencana Kerja	MOT-13.01.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan	-
			MOT-13.01.CFM.02.SOP.01 Penetapan Rencana Kerja	Perlu untuk mengembangkan aplikasi penyusunan matriks rancangan awal rencana kinerja, yang terintegrasi dengan KRISNA

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
			MOT-13.01.CFM.02.SOP.02 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Memerlukan aplikasi SATUDJA untuk penyusunan RKA
		MOT-13.02 Pengelolaan Keuangan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.01 Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan	-
			MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran	Membutuhkan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SISKA) semua satker di lingkungan Kementerian Perdagangan yang terintegrasi
				Aplikasi Perjalanan Dinas (Dalam dan Luar Negeri)
			MOT-13.02.CFM.01.SOP.03 Revisi DIPA/RKA-KL	-
MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan	Aplikasi e-dataLK untuk menghimpun dan memantau permintaan data dari semua satuan kerja di Lingkungan			

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
				Kementerian Perdagangan terkait pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK
		MOT-13.03 Evaluasi dan Pelaporan	MOT-13.03.CFM.01.SOP.01 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Membutuhkan aplikasi e- <i>Monitoring</i>
			MOT-13.03.CFM.01.SOP.02 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	-
		MOT-13.04 Pengelolaan PNBP	MOT-13.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan PP Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	-
			MOT-13.04.CFM.01.SOP.02	-

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
			Perencanaan Target PNBPN & Penetapan PAGU	
			MOT-13.04.CFM.01.SOP.03 Revisi Target dan PAGU PNBPN	-
		MOT-13.05 Administrasi Bantuan Luar Negeri Di Kementerian Perdagangan	MOT-13.05.CFM.01.SOP.01 Administrasi Pinjaman Luar Negeri MOT-13.05.CFM.01.SOP.02 Administrasi Hibah Yang Direncanakan	-
			MOT-13.05.CFM.01.SOP.03 Administrasi Hibah Langsung	-
14	MOT-14 Penataan Organisasi	MOT-14.01 Penataan Organisasi	MOT - 14.01.CFM.01.SOP.01 Analisis Beban Kerja	-
			MOT - 14.01.CFM.01.SOP.02	-

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
			Penataan Kelembagaan	
			MOT - 14.01.CFM.01.SOP.03 Analisa dan Evaluasi Jabatan	-
15	MOT-15 Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Manajemen dan Pengawasan	MOT-15.01 Pengelolaan Manajemen Kinerja	MOT-15.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Manajemen Kinerja	Menunggu aplikasi precepatan SPBE
		MOT-15.02 Pengelolaan Tinjauan Manajemen	MOT-15.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Tinjauan Manajemen	-
		MOT-15.03 Pengawasan Internal	MOT-15.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan pengawasan internal	Memerlukan pengembangan sistem informasi/aplikasi berupa: 1. E-audit (<i>full version</i>) yang mendukung siklus audit secara menyeluruh

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
				<p>2. Sistem Pengaduan untuk mengelola pengaduan internal dan eksternal</p> <p>3. Sistem Manajemen Risiko untuk mendukung proses <i>risk assessment</i></p>
			<p>MOT-15.03.CFM.02.SOP.01 pelaksanaan <i>Review</i> Laporan Keuangan</p>	<p>Sejauh ini proses bisnis masih mumpuni dan belum membutuhkan <i>improvement</i></p>
			<p>MOT-15.03.CFM.02.SOP.02 pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>Menunggu aplikasi precepatan SPBE</p>
			<p>MOT-15.03.CFM.03.SOP.01 Pelaksanaan Wilayah Tertib Administrasi (WTA)</p>	<p>-</p>
			<p>MOT-15.03.CFM.03.SOP.01 Pelayanan Pengaduan Masyarakat</p>	<p>-</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Potensi perbaikan proses bisnis
		MOT-15.04 Pengukuran dan Pengelolaan Kepuasan <i>Stakeholder</i>	MOT-15.04.CFM.05.SOP.01 Pelaksanaan Survei Kepuasan <i>Stakeholder</i>	Sejauh ini proses bisnis masih mumpuni dan belum membutuhkan <i>improvement</i>
		MOT-15.05 Pengendalian Dokumen	MOT-15.05.CFM.05.SOP.01 Pengendalian Dokumen	-
		MOT-15.06 Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Program Khusus	MOT-15.05.CFM.06.SOP.01 Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Program Khusus	-

Lampiran 4 Arsitektur Data Saat Ini

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
1	Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi	SIUP	Bukti perusahaan telah memiliki izin usaha dalam bidang perdagangan	PTSP Kab/kota	
2		Tanda Pendaftaran (TDP)	Bukti perusahaan telah mendaftarkan datanya ke pemerintah	PTSP Kab/kota	
3		Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa Produksi Dalam/Luar Negeri	Tanda bukti Perusahaan Nasional telah terdaftar sebagai Agen/Distributor berdasarkan perjanjian dengan Prinsipal.	Dari Perusahaan	
4		Pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual Berbahasa Indonesia, untuk barang dalam dan luar negeri	tanda daftar/bukti suatu produk telah dilengkapi petunjuk penggunaan dan kartu garansi berbahasa indonesia	Pelaku usaha	
5		STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)	izin usaha mendirikan/menjalankan bisnis waralaba	Pelaku usaha, daerah	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
6		izin usaha membuka toko modern, Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional		Daerah	
7		Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan (LKTP)	Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau instansi pemerintah yg berwenang	Perusahaan dan/atau Kantor Akuntan Publik	
8		Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS)	Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa <i>survey</i> sebagaimana diatur dalam Permendag No. 14 Tahun 2006	Pelaku Usaha	
9		Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) - Rekomendasi Izin Kerja	Surat Izin Usaha dan Rekomendasi Izin Kerja Warga Negara Asing pada Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	BKPM	
10		Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4)	Izin untuk melaksanakan kegiatan perantara perdagangan properti, sebagaimana diatur dalam Permendag No. 33 Tahun 2008	Pelaku usaha	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
11		Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang	Izin untuk Menyelenggarakan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang, baik skala Lokal, Nasional, dan Internaisional.	Pelaku usaha	
12		Rekomendasi - Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)	Izin Usaha Penjualan Langsung	Pelaku usaha, BKPM	
13	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik	Data Gudang	Merupakan Data Gudang seluruh indonesia yang berisi: 1. Alamat gudang 2. luas gudang 3. kepemilikan 4. barang yang disimpan 5. TDG/Non TDG	Disperindag	
14		Data verifikasi antar pulau kelapa sawit dan produk turunannya.	Merupakan data pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan turunannya yg diperoleh dari: 1. Penyampaian surat pemberitahuan kegiatan pengangkutan anatar pulau kelapa sawit dan turunannya oleh pelaku usaha pemilik	Pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan turunannya dan <i>surveyor</i>	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
			komoditas kelapa sawit dan turunannya 2. Penyampaian laporan realisasi pengangkutan antar pulau kelapa sawit dan turunannya oleh --pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan turunannya dan <i>surveyor</i> .		
15		Data verifikasi izin <i>distributor</i> , <i>distributor</i> untuk IT, sub <i>distributor</i> minuman beralkohol (SIUP-MB).	Izin untuk melakukan distribusi MB ataupun pengeceran/penjualan langsung	Pelaku usaha yang melakukan izin	
16		Data pasar	Merupakan data pasar seluruh Indonesia yg berisi: 1. Nama pasar 2. Alamat 3. Jumlah pedagang, dll.	<i>Survey</i> yang dilakukan pihak ke 3	
17	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Data harga barang kebutuhan Pokok dan Penting/strategis	Data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di 34 provinsi	Pemantauan harga barang kebutuhan pokok harian di	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
				pasar tradisionial	
18		Data stok barang kebutuhan pokok	Data stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di 34 provinsi	Pemantauan stok barang kebutuhan pokok harian di pasar tradisionial	
19		Izin kayu antar pulau (PKAPT)	Perdagangan kayu antar pulau (PKAPT) adalah kegiatan jual-beli dan atau pendistribusian kayu dari satu pulau ke pulau lainnya dan atau dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. PKAPT adalah Perorangan/Badan Usaha yang melakukan perdagangan kayu antar pulau	Pelaku usaha melakukan <i>input</i> langsung ke sistem	
20		Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) sebagai <i>distributor</i>	SIUP-B2 adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus B2	Pelaku usaha melakukan <i>input</i> langsung ke sistem	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
21		Izin distribusi gula SPPGRAP (SPPAGKR)	Surat yang diterbitkan untuk proses pendistribusian gula sesuai dengan penggunaan dan atau pemanfaatannya dalam hal perdagangan gula antar pulau	Pelaku usaha melakukan <i>input</i> langsung ke sistem	
22	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Data ukm binaan kemendag	Data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (sesuai UU 20/2008) yang telah dibina oleh Direktorat DKM dan PDN	<i>Form</i> profil yang diisi oleh pelaku UKM saat kegiatan	
23	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	Jumlah pengaduan konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang diterima oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen	Data dikumpulkan langsung dari pengaduan konsumen, baik melalui media <i>website</i> (siswaspk), <i>email</i> , <i>hotline</i> , <i>whatsapp</i> , <i>mobile app</i> ataupun datang langsung	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
24		Data produk yang ditarik di negara asean	Jumlah dan jenis produk yang ditarik di negara ASEAN	Data dikumpulkan dari laporan seluruh negara yang ada di ASEAN	
25		Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah BPSK yang terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota	Kepmendag atau Kepdirjen	
26		Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)	Jumlah LPKSM yang terbentuk		
27	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu	SNI wajib	Data SNI yang telah diberlakukan secara wajib	Kementerian teknis terkait pemberlakuan SNI Wajib, BSN	<ul style="list-style-type: none"> - SNI yang telah diberlakukan secara wajib - Peraturan Menteri teknis terkait
28		Data LPK terdaftar di Kemendag, yang memuat:	Data LPK yang terdaftar di Direktorat Standardisasi, yang memuat: nama LPK, domisili LPK, ruang lingkup LPK,	LPK yang mendaftar baik manual ataupun <i>online</i> .	Direktori LPK: <ul style="list-style-type: none"> - Data LPK

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
			akreditasi kan, status kadaluarsa LPK dan akreditasi LPK		<ul style="list-style-type: none">- Data personil penanggung jawab- Data personil kontak- Data pendaftaran LPK- Data akreditasi * direktori data LPK- LPK- Nomor pendaftaran- Nama LPK- Tanggal mulai pendaftaran- Tanggal akhir pendaftaran- Ruang lingkup- SNI- Nomor akreditasi LPK

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal mulai akreditasi - Tanggal akhir akreditasi - Surat penunjukan - Tanggal surat penunjukan
29		Database Nomor Registrasi Produk (NRP)	Data registrasi produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib yang beredar di dalam negeri	Pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor NRP - Perusahaan - Produk - Merk - Jenis - Tanggal daftar - Tanggal awal NRP - Tanggal akhir NRP - LPK - Nomor sertifikasi SPPT-SNI - Tanggal awal sertifikat

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					- Tanggal akhir

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
30		<i>Database</i> Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	Data pendaftaran barang impor yang SNI nya diberlakukan secara wajib	Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor NPB - Importir - Alamat importer - Produk - <i>Merk</i> - Jenis - Negara asal - Tanggal daftar - Tanggal awal NPB - Tanggal akhir NPB - LPK - Nomor sertifikasi SPPT-SNI - Tanggal awal sertifikat - Tanggal akhir sertifikat - Pabrik asal - Alamat pabrik

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
31		<i>Database</i> Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR	Data produsen standar <i>indonesian rubber</i>	Pelaku usaha	* Direktori TPP: - Nama pabrik - Alamat - Kode TPP - Nomor TPP - Tanggal - Status - Jenis produk - SPPT -SNI/Rekomendasi teknis - LSPro penerbit SPPT SNI * Data pabrik - Nama pabrik - Kode TPP - Alamat perusahaan - Alamat pabrik - Telp/Fax - Kontak person - <i>Email</i>
32		Hasil pengawasan di gudang importir			- Jenis komoditi - Nama importir - Merek produk

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					<ul style="list-style-type: none">- Tipe produk- Hasil pengujian- Lokasi uji petik- LSPro yang mensertifikasi- Jenis ketidaksesuaian- Tindak lanjut- NPB- Nomor SPPT-SNI- Nama produsen- Asal produk-Jenis Komoditi- Nama Importir- Merek Produk- Tipe Produk- Hasil Pengujian- Lokasi Uji Petik- LSPro Yang Mensertifikasi- Jenis Ketidaksesuaian- Tindak Lanjut- NPB- Nomor SPPT-SNI

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					<ul style="list-style-type: none"> - Nama Produsen - Asal Produk
33		Data Pejabat Fungsional PMB	Data <i>profile</i> pejabat fungsional Penguji Mutu Barang	PMB	<ul style="list-style-type: none"> - Data Pribadi - Data Pangkat - Data Jabatan PMB - Data Diklat Fungsional - Data Uji Kompetensi - Data Diklat Teknis - Data Pendidikan - Data Diklat Teknis - Data Seminar/Diklat Non Teknis - Diklat Penghargaan - status - Status jabatan fungsional - Data pribadi - Data pangkat

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					<ul style="list-style-type: none"> - Data jabatan PMB - Data diklat fungsional - Data uji kompetensi - Data diklat teknis - Data pendidikan - Data diklat teknis - Data seminar/diklat non Teknis - Diklat penghargaan - Status jabatan fungsional
34		Informasi peraturan teknis negara tujuan ekspor (inatrims)	Informasi peraturan teknis negara tujuan ekspor	Negara tujuan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> - 10 produk utama dan potensial - Klasifikasi produk (informasi umum dan sistem klasifikasi)

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					<ul style="list-style-type: none">- Pasar global (pasar dan tren perdagangan di negara tujuan ekspor dan dunia, produksi dan perdagangan Indonesia)- Rantai nilai- Akses ke dalam pasar negara tujuan ekspor (ikhtisar, persyaratan wajib yang harus dipenuhi, persyaratan pembelian umum, sertifikasi produk di negara tujuan ekspor, ceruk pasar)- tautan

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
35		Ruang lingkup pelayanan sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan sertifikasi produk dengan lingkup 61 produk sesuai sertifikat akreditasi. - Pelayanan sertifikasi personel dengan lingkup petugas pengambil contoh dengan 17 lingkup produk - Pelayanan bimbingan teknis di bidang mutu barang 	Sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Nama produk - Standar SNI - Skema sertifikasi
36		Ruang lingkup pelayanan pengujian	Ruang lingkup pelayanan pengujian	Sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup - Masa akreditasi - Harga penguji komoditi sebanyak 60 komoditi - Standar waktu pengujian - <i>List</i> Petugas Pengambil contoh
37		Ruang lingkup pelayanan kalibrasi	Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi	Sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup - Masa akreditasi - Biaya kalibrasi - Standar waktu kalibrasi

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
38	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	Laporan <i>surveyor</i>			
39	Direktorat Impor	Data Angka Pengenal Importir (API)	Berdasarkan Permendag no. 70 tahun 2015	Instansi penerbit API dan BKPM	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor API - Tanggal API - Nama perusahaan - NPWP Perusahaan - Alamat perusahaan - Nomor akta Pendirian/notaris - Nomor TDP - Referensi bank devisa - Jenis barang/jasa - Surat izin usaha Perdagangan/izin Usaha lain yang sejenis

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
40	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor	Data perusahaan importir dan eksportir berikut data terkait lainnya	Merupakan data perusahaan yang melakukan ekspor-impor yang memerlukan perijinan di Ditjen Daglu. Data profil perusahaan tersimpan dalam <i>database</i> INATRADE	Direktorat Ekspor Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Ekspor Industri dan Pertambangan, Direktorat Impor, Direktorat Metrologi, Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (UPTP I)	
41		Data realisasi ekspor dan impor	Berupa data laporan realisasi ekspor dan impor yang dilakukan oleh perusahaan setelah mendapatkan perijinan di Direktorat Jenderal Daglu	Pelaku usaha dan indonesia National Single Windor (INSW)	
42		Data perusahaan pengurus SKA dan data terkait lainnya	Data ini merupakan profil pelaku untuk seluruh kegiatan penerbitan SKA	Eksportir dan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
43		Data Surat Keterangan Asal (SKA), yang paling sedikit memuat:	Paling sedikit memuat: nomor SKA, tanggal SKA, nama perusahaan, NPWP perusahaan, alamat perusahaan, negara tujuan, uraian barang, <i>volume</i> barang, nilai barang	Eksportir dan instansi penerbit surat keterangan asal	
44		Data perijinan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Daglu	Data perijinan terkait: 1. Eksportir terdaftar; 2. Persetujuan ekspor; 3. Persetujuan impor. Memuat: Jenis perizinan, nomor izin, tanggal izin, nama perusahaan, npwp perusahaan, alamat perusahaan, penanggungjawab, negara asal/tujuan, uraian barang, jumlah barang	Direktorat Ekspor Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Ekspor Industri dan Pertambangan, Direktorat Impor, Direktorat Metrologi, Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (UPTP I)	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
45		Data permohonan perijinan		Direktorat Ekspor Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Ekspor Industri dan Pertambangan, Direktorat Impor, Direktorat Metrologi, Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (UPTP I)	
46		Data <i>gateway</i>	Perijinan yang sudah diterbitkan dan dalam proses pengiriman ke NSW	Direktorat Ekspor Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Ekspor Industri dan Pertambangan, Direktorat	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
				Impor, Direktorat Metrologi, Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (UPTP I)	
47		Pengiriman data ke NSW	Perijinan yang sudah diterbitkan dan dalam proses pengiriman ke NSW	Direktorat Ekspor Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Ekspor Industri dan Pertambangan, Direktorat Impor, Direktorat Metrologi, Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (UPTP I)	
48		LS impor	Perizinan LS impor yang sudah diterbitkan	Indonesia & Sucofindo (KSO)	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
49		COI	Perijinan <i>Certificate of Inspection</i> (COI) Impor yang sudah diterbitkan	Surveyor Indonesia & Sucofindo (KSO)	
50		LS ekspor	Perijinan LS ekspor yang sudah diterbitkan	Perusahaan yang ditunjuk untuk menerbitkan LS ekspor	
51		V-Legal (Surat verifikasi legalitas kayu)	SVLK yang diterbitkan oleh kemenhut (Kemen LHK)	Kemen LHK	
52		SPE kopi	Perizinan ekspor kopi yang sudah diterbitkan	Dinas daerah yang menangani surat persetujuan ekspor kopi	
52		Direktorat Pengamanan Perdagangan	<i>Trade remedy</i> (270)	Data yang dihentikan, data dalam proses, data yang dikenakan bea masuk	Aduan KBRI atau pelaku usaha (berdasarkan penanganan)
53		TBT (150)	Hambatan teknis perdagangan (non tarif <i>barrer</i> dan <i>measure</i>) belum dipisahkan. Ditangani berdasarkan aduan	Aduan KBRI atau pelaku usaha	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
				(berdasarkan penanganan)	
54		Penipuan (150)	Data penipuan (pelaku kebanyakan indonesia). Dianggap temuan ITJEN, karena dianggap tidak sesuai tupoksi.	Aduan KBRI atau pelaku usaha (berdasarkan penanganan)	
55	Direktorat Perundingan ASEAN	Isu/permasalahan perdagangan barang dengan Mitra	contoh: masalah <i>eco green</i>	Permasalahan atau hambatan yang terjadi di satu negara, informasi/keterangan isu yg terjadi	
56		<i>Summary of discussion</i>		Jadwal perundingan, hasil kesepakatan, tindak lanjut, dll	
57		Informasi ratifikasi		<i>Draf</i> perpres, naskah urgensi, terjemahan,	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
				<i>agreement original</i>	
58	Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional	<i>Summary of discussion</i>	Jadwal perundingan, hasil kesepakatan, tindak lanjut, dll	Hasil perundingan	
59		Informasi terkait isu-isu di APEC			
60		Isu/permasalahan perdagangan barang dengan Mitra	Permasalahan atau hambatan yang terjadi di satu negara		
61		Informasi Ratifikasi	<i>Draf</i> perpres, naskah urgensi, terjemahan, <i>agreement original</i>		
62	Direktorat Perundingan Bilateral	<i>Fact sheet</i>			
63	Perundingan Perundingan Perdagangan Jasa	<i>Domestik regulation</i>	Data peraturan domestik terkait sektor jasa	<i>Management Information System (MIS)</i>	
64		<i>Schedule of commitment</i>	Data sektor/ sub sektor jasa yang dikomitmenkan di perdagangan internasional.	<i>Management Information System (MIS)</i>	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
65	Direktorat Perundingan Multilateral	Notifikasi pertanian anggota WTO		WTO	- Notifikasi terkait subsidi domestik - Subsidi ekspor - Akses pasar anggota WTO
66		<i>Summary of discussion</i>		-Brafaks - WTO	
67		Isu/permasalahan perdagangan dengan Negara mitra	Permasalahan/regulasi Indonesia yang menjadi <i>concern</i> di WTO dan informasi/keterangan isu yang terjadi	Hasil perundingan	
68		Profil khusus sengketa	Regulasi Indonesia dan Negara-negara anggota WTO lainnya yang menjadi <i>concern</i> setiap Negara anggota WTO yang disengketakan di forum <i>Dispute Settlement Body</i> WTO	- <i>Online document from</i> WTO - Instansi terkait	
69		Dokumen Submisi	Berisi analisa klaim gugatan dan/atau argumen bantahan anggota WTO yang bersengketa		
70	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor	Data <i>euromonitor</i>	Data market negara 20 tujuan ekspor utama mulai dari profil	Euromonitor.com	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
			negara, industri, produk, regulasi (produsen dan konsumen produk)		
			(bisa dishare untuk eksportir)		
71		Data <i>stylus</i>	<i>Online database trend forecasting, design</i> produk (5 produk utama: <i>food beverage, fashion, beauty, product design, colour&material</i>); gambaran visual beraneka produk panduan <i>design</i> , warna, bentuk produk;	stylus.com	
72		<i>Database designer</i>	<i>database</i> seluruh <i>designer</i> profesional indonesia (untuk sementara fokus ke produk interior, grafis, fashion) --> (memfasilitasi produsen dan konsumen, panduan portofolio)	langsung, <i>apply</i> , pengisian <i>form</i> oleh <i>designer</i>	
73		Data profil produk	Produk unggulan ekspor (berbagai macam produk)	<i>survey</i>	
74	Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	Data eksportir	Data profil eksportir, produk, negara tujuan ekspor	<i>Survey</i> , data dari dinas di daerah, kontak	Data dalam bentuk <i>database</i> mysql;

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
				langsung, CSC (<i>customer service center</i> lantai 2)	
75		Data importir	Data profil importir, produk yang dicari	Perwakilan Atdag dan ITPC, CSC (<i>customer service center</i> lantai 2)	Data dalam bentuk <i>database</i> mysql;
76		Data pameran dalam dan luar negeri	Profil pameran, peserta, produk baik yang di fasilitasi oleh PEN ataupun yang tidak difasilitasi	Data peserta pameran ada di Direktorat. Pengembangan Promosi dan Citra	Data dalam bentuk <i>database</i> mysql;
77		<i>Market brief</i>	Berisi informasi produk tertentu di pasar tertentu yang dianggap potensial yang dibuat melalui <i>desk research</i>	Berbagai macam sumber, kuantitatif dan regulasi	Data dalam bentuk cetakan dan pdf;
78		<i>Market Intelligence</i>	informasi mengenai kondisi dan peluang pasar prospektif tujuan ekspor Indonesia	<i>Survey</i> langsung di negara tujuan (<i>survey</i> sendiri)	Data dalam bentuk cetakan dan pdf;

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
				kondisi pasar dan distribusi)	
79		Ekspor <i>news</i>	Informasi perkembangan potensi produk ekspor Indonesia yang mencakup nilai ekspor produk, penemuan produk baru, merek dagang, kisah sukses pelaku usaha, SDM, opini <i>buyer</i> .	Berbagai macam sumber, <i>Inquiry</i> dari <i>buyer</i> , data statistik perdagangan, asosiasi, <i>survey</i> langsung di daerah (<i>survey</i> sendiri kondisi pasar dan distribusi); Kegiatan Direktorat Jenderal PEN;	Data dalam bentuk cetakan dan pdf;
80		Warta Ekspor	Informasi aktual terkait dengan tema yang perlu diketahui publik khususnya eksportir Indonesia baik berupa peluang pasar, kerja sama pengembangan ekspor,	Berbagai macam sumber, data statistik perdagangan, asosiasi, laporan	Data dalam bentuk cetakan dan pdf;

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
			produk ekspor, promosi dan regulasi.	perwakilan ATDAG / ITPC; Kegiatan Ditjen PEN;	
81		Data statistik	Data Ekspor-Impor Indonesia dan Dunia	Pusdatin	Data master dalam bentuk <i>database</i> MS Access; Data hasil olahan dalam bentuk Excel
82		Data <i>Inquiry</i> Permintaan Hubungan Dagang	Data permintaan hubungan dagang yang bersumber dari laporan perwakilan ATDAG/ITPC dan permintaan langsung melalui CSC (<i>Customer Service Center</i>)	laporan perwakilan ATDAG / ITPC dan CSC	Data dalam bentuk <i>database</i> mysql;
83		Data Pemenang Primaniyarta	Data eksportir yang mendapatkan penghargaan Primaniyarta	Data Eksportir, Set. Ditjen PEN	Data dalam bentuk <i>database</i> mysql dan MS Word;
84		Data Pemenang Prima Duta	Data Importir yang mendapatkan penghargaan Prima Duta	Set. Ditjen PEN	Data dalam bentuk <i>database</i>

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					mysql dan MS Word;
85	Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra	data kegiatan promosi		perwakilan, asosiasi, pelaku usaha, daerah, unit terkait ppie, ppei, ppe, asosiasi	- Jadwal Pameran - Misi Dagang - Misi Pembelian - Peserta Promosi - Capaian Realisasi Kegiatan
86		data eksportir			
87		data evaluasi pameran	kuesioner		
88	Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan	Regulasi	Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang		- Nomor Peraturan - Judul Peraturan - Keterangan
89	Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik	Total volume perdagangan berjangka komoditi	Informasi mengenai total transaksi perdagangan berjangka baik yang di dalam bursa berjangka maupun di luar bursa berjangka	Bursa Berjangka (diolah oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik)	- Periode - Bursa Berjangka - Jenis Transaksi - Total Transaksi
90		Perkembangan Harga Komoditi Pasar Berjangka	Informasi harga komoditi yang diperdagangkan pada bursa berjangka (CPO, Emas, Kakao, Kopi dan Timah)	Bursa Berjangka (diolah oleh Biro Pengawasan	- Tanggal - Jenis Komoditi - Bulan kontrak/Serah

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
				Pasar Berjangka dan Fisik)	- Harga - Sumber Harga
91		Analisa Komoditi CPO, Emas, Kakao, Kopi Arabika, Kopi Robusta, Timah	Analisis komoditi pasar fisik terorganisir dan pasar berjangka	Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Data lainnya	- Periode - Jenis Komoditi - Analisa Komoditi
92	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar	Perkembangan Harga Komoditi Pasar SPOT dan Berkjangka (CPO, Olein, Minyak Kelapa, Kakao, Kopi Arabika, Kopi Robusta, Lada Hitam, Lada Putih, Karet, jagung dan Emas)	Publikasi updating harga komoditi yang diperdagangkan pada bursa berjangka	Reuters, Bursa Berjangka Jakarta, Bursa Komoditi Derivatif Indonesia	
93		Analisa Komoditi CPO, Emas, Kakao, Kopi Arabika, Kopi Robusta	Analisis komoditi pasar fisik terorganisir dan pasar berjangka	Reuters, Bursa Berjangka, Sumber Data Lainnya	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
94		Analisa Komoditi CPO, Emas, Kakao, Kopi Arabika, Kopi Robusta Lada Hitam, Lada Putih, Gabah, Beras, Karet, Timah	Analisis komoditi pasar fisik terorganisir dan pasar berjangka	Reuters, Bursa Berjangka, Sumber Data Lainnya	
95		Kontrak Komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka (Rencana tahun 2015)	Persetujuan atas kontrak komoditi yang diajukan oleh bursa berjangka	Bappebti	
96		PTT Pasar Fisik Lelang (Rencana tahun 2015)	Persetujuan atas PTT yang diajukan oleh bursa berjangka atau kliring berjangka	Bappebti	
97	Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Lembaga dalam Sistem Resi Gudang (Gudang, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi)	Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang yang memperoleh persetujuan Bappebti	Bappebti	
98		Transaksi dalam Sistem Resi Gudang (Penerbitan, Pembiayaan)	Data penerbitan, pengalihan, pembebanan hak jaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang	Pusat Registrasi SRG	
99		Sebaran Gudang SRG milik Pemerintah	Informasi terkait Gudang SRG yang dibangun Pemerintah,	Bappebti	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
			meliputi data lokasi, alamat, kapasitas, pengelola		
100		Lembaga dalam Pasar Lelang Forward Komoditas Agro (Penyelenggara Pasar Lelang, Kliring dan Penjamin Pasar Lelang)	Kelembagaan dalam Pasar Lelang Komoditas (Penyelenggara dan Lembaga Kliring & Penjaminan) yang memperoleh persetujuan Bappebti	Bappebti	
101		Transaksi dalam Pasar Lelang Forward Komoditas Agro	Data transaksi jual beli pada Penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditas Agro (pelaku, komoditas, jenis, volume, harga)	Bappebti	
102	Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri	Data Peta Kebutuhan Konsumen	Menggambarkan pemetaan perilaku konsumen sebelum membeli, membeli dan menggunakan barang	<i>Survey</i>	
103		Laporan analisis perkembangan harga kebutuhan pokok dalam negeri dan international	Perkembangan harga bulanan pangan dan isu isu terkait	ditjen PDN, BPS, Reuters, CBOT	
104		Indikator kinerja utama stabilitas harga bapak	Capaian Kinerja stabilitas harga dan disparitas harga		

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
		a. Koefisien variasi harga antar waktu		BPS dan Ditjen PDN	
		b. Koefisien harga antar daerah		Ditjen PDN	
105		Persentase penggunaan produk dalam negeri		BPS dan Bank Indonesia	
106		Pertumbuhan pdb perdagangan besar dan eceran		BPS dan BI	
107		Analisis inflasi	Melihat komoditi apa aja punya andil besar terhadap inflasi	BPS	
108	Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional	Laporan kajian	Laporan kajian yang dihasilkan puska KPI	BPS, WITS, BI, DPBJ	
109	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian	Aplikasi yang menyediakan data kepegawaian, data absensi, data rekrutmen, dan data kinerja dan tunkin		
110	Biro Keuangan	Pengelolaan realisasi anggaran / keuangan	Data realisasi anggaran Kementerian Perdagangan, termasuk perwakilan Kementerian Perdagangan di Luar Negeri	- Data realisasi unit - Data SISKAK - Data OMSPAN	- Nama Unit - Pagu Awal - Pagu APBN-P - Target Realisasi (Rp)

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					- Target Realisasi (%) - Realisasi (Rp) - Realisasi (%) - Sisa Anggaran (Rp) - Sisa Anggaran (%)
111		Revisi RKA-K/L	Data revisi RKA-K/L Satker Sekretariat Jenderal, satker Atase Perdagangan, dan satker KDEI.	Internal	- Kode Kegiatan
					- Uraian Kegiatan
					- Kode Output
					- Uraian Output
					- Kode Suboutput
					- Uraian Suboutput
					- Kode Komponen
					- Uraian Komponen
					- Kode Subkomponen
					- Uraian Subkomponen
					- Kode Akun
					- Uraian Akun

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					<ul style="list-style-type: none"> - Detail Kegiatan - Volume Kegiatan - Harga Satuan - Rincian Perhitungan - Jumlah Biaya - Selisih - Unit Pengusul Revisi - Jenis revisi (KPA atau Kanwil)
112		sppd dalam/luar	Data perjalanan dinas dalam dan luar negeri pejabat/pegawai Biro Keuangan	Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Pelaksanaan Perjalanan Dinas - Nama pegawai yang melakukan perjalanan dinas - NIP pegawai yang melakukan perjalanan dinas - Tujuan pelaksanaan perjalanan dinas

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					- Daerah/negara tujuan - Tanggal SPD - Nomor SPD - Tanggal SPT - Nomor SPT
113		Kontrak pengadaan barjas	Data perkembangan kontrak pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perdagangan	Internal	- Nama Unit - Pagu anggaran - Nilai Kontrak - Tanggal Kontrak - Rencana pembayaran per termin (Rp) - Tanggal penyampaian data kontrak ke KPPN - Realisasi pembayaran per termin (Rp)
114		Data rencana kas	Data rencana kas bendahara	Rekening korang bendahara	- Tanggal penarikan kas - Jumlah penarikan kas

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					- Bulan penarikan kas
115		Data pengelolaan BMN	Data pengelolaan dan penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian Perdagangan, termasuk BMN yang dikelola oleh perwakilan Kementerian Perdagangan di luar negeri	Aplikasi SIMAK-BMN dan Aplikasi SIMAN	- Tanggal SP2D - Nomor SP2D - Nama BMN - Jenis/Merk - Volume - Harga Satuan - Harga Perolehan - Tanggal Perolehan - Status Penggunaan
116		Data Penerimaan Negara Bukan Pajak	Data Penerimaan Bukan Pajak di lingkungan kementerian Perdagangan	- internal - Aplikasi TRPNBP Versi 4.2 - Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)	- Nama Unit pengelola PNBP - Kode Unit pengelola PNBP - Kode Akun - Nama Akun - Jenis Jasa

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					- Volume - Tarif - Tanggal Penerimaan - Pagu PNBPN - Target PNBPN - Persentase Ijin Penggunaan - Tipe Billing - Nama user - Nama Wajib Bayar/Wajib Setor - Periode - Tanggal Bayar - Kode Bank/Pos - NTPB - NTB/NTP - Kode Penerimaan - Mata Uang - Setoran
117				Pengembalian TP/TGR oleh	Dokumen Kartu Pengawasan atas

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
		Tuntutan Perbendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Data penyelesaian kerugian negara pada Kementerian Perdagangan	pihak terkait setiap bulan	Angsuran Kerugian negara - Kuantitas angsuran - Tahun angsuran - Nominal angsuran - NTPN - Tanggal Angsuran Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara - Unit kerja - Nama pegawai - Jenis kerugian - Rincian kerugian - Tahun kejadian - Jumlah kerugian - Angsuran SKTJM

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah yang telah diangsur - Sisa kerugian - Tahun mulai angsur - Keterangan
118		SK KPA	Data penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran pada kementerian Perdagangan	Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Unit kerja - Nama KPA Lama - NIP KPA Lama - Nama KPA Baru - NIP KPA Baru - Jabatan - Alamat Kantor
119		Data gaji	Data gaji seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal kemendag	Aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat)	<ul style="list-style-type: none"> - Nama pegawai - NIP pegawai - Pangkat/Gol - Unit kerja - Jumlah anggota keluarga (Suami dan Anak) - Nominal gaji pokok

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					<ul style="list-style-type: none"> - Tunjangan-tunjangan - Jumlah gaji kotor - Potongan - Jumlah gaji bersih - Tunjangan kinerja - Uang makan - Uang Lembur
120		Data laporan keuangan	Data Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan (termasuk perwakilan Kementerian Perdagangan di Luar Negeri)	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi SAIBA Aplikasi SIMAK BMN 	<ul style="list-style-type: none"> - Nama satker - Periode Pelaporan - Neraca - Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
					- Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan BMN
121		Data e-audit	Pangkalan data untuk penyimpanan data pemeriksaan BPK, konsep temuan BPK, dan tindak lanjut temuan BPK	Internal	- Dokumen tindak lanjut temuan BPK - Dokumen Pemeriksaan BPK - Laporan Hasil Pemeriksaan - Konsep temuan BPK
122	Biro Hukum	regulasi			
123		PP tentang perdagangan	data informasi PP	sudah bentuk permendag	
124		buku himpunan PP di bidang perdagangan	buku 1 tahun sekali terbit	internal	
125		abstraksi PP tentang	rangkuman dari suatu peraturan	Permendag	
126		jendela informasi Hukum	jurnal, tulisan dan artikel	seluruh kementerian	
127		buku-buku hukum		eksternal dan internal, daerah	
128	Biro Umum	surat masuk	masuk ke kemendag	eksternal	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
129		surat keluar			
130		pengadaan barang dan jasa	infor barjas, pengadaan, penawaran sampai selesai	SPSE	
131		data ruang rapat	penggunaan ruang rapat (auditorium 1,2,3, anggrek dan dahlia)	internal	
132		SPPD, BMN, SPM, BAST	semua terkait dengan BMN	SPPD, BAST dan SPM	
133		exit-permit	data permohonan pejabat yang akan ke luar negeri	surat masing2 unit	
134	Biro Hubungan Masyarakat	Peraturan Keterbukaan Informasi Publik			
135	Biro Advokasi Perdagangan	Data sekunder	Analisa hukum	WTO DSB Report	
136	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan	Data Pameran	data peserta yang ikut pameran dalam negeri	langsung	
137		data peserta (<i>database alumni</i>)	informasi profil peserta, pengalaman pelatihan, sudah ekspor atau belum; jenis produk nya	langsung peserta	
138		data program pelatihan	infromasi penyelenggaraan pelatihan	perencanaan	
139		data fasilitator	informasi profil pelatih	rekrutment	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
140		perpustakaan	berbagai macam buku	berbagai macam sumber	
141	Pusat Penanganan Isu Strategis	Sistem Manajemen Dokumen (e-report)	Laporan dari Perwakilan Perdagangan Luar Negeri yang terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Bulanan, Market Brief, Market Intelligence, Adhoc, Kasus-Kasus hambatan perwakilan di Luar Negeri	Atdag, ITPC, Kondag, & KDEI	
142		Sistem Evaluasi Kinerja Perwakilan Perdagangan Luar Negeri	Data Capaian Target IKU (Indikator Kinerja Utama) Perwakilan Perdagangan Luar Negeri	Atdag, ITPC, Kondag, & KDEI	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
143	Pusat Data dan Sistem Informasi	Data Ekspor dan Impor Indonesia	Data ekspor dan impor Indonesia berdasarkan HS 2, HS 4, HS 6, HS 10 digit	BPS	<ul style="list-style-type: none"> - HS 2007 - HS 2 digit - HS 4 digit - HS 6 digit - BTKI 2012 - Deskripsi HS - Kode BEC - Kode Migas/Non Migas - Kode sektor - Uraian sektor - Kode Pelabuhan - Kode Negara - Nilai Ekspor tahun 2004-2016 - Volume ekspor tahun 2004-2016 - Nilai impor tahun 2004-2016 - Volume impor tahun 2004-2016
144		Profil Indikator Ekonomi Makro (120 Negara)	Bunga Deposito, Forward Rates, Suku Bunga Antar Bank, Lending Rates, Surat Hutang Pemerintah dan	CEIC <i>database</i>	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
			Securitas Lainnya, Perkembangan Suku Bunga dan Nilai Tukar Internasional, Suku Bunga Swap, Moneter, Pasar Modal dan Berjangka, Perkembangan Harga dan Bursa Komoditi, Pendapatan Nasional, Produksi, Penjualan, Pemesanan, Inventory dan Pengapalan, Konstruksi & Properti, Keuangan Negara, Kependudukan dan Pasar Tenaga Kerja, Perdagangan Dalam Negeri dan Survei Rumah Tangga, Laju Inflasi, Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran, Moneter, Perkembangan Suku Bunga & Nilai Tukar, Penanaman Modal, Pariwisata, Pasar Modal		

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
145		Indonesia- <i>Money</i>	Market Overview, Spot Rates and Indices, Forwards & Deposits, Fixings, SBI, Currency Interest Rate Swaps, Bank Indonesia (Transaction/Conversion Rates, BI, Reference Rates), News and Analysis (Indonesian Money News, Reuters Forex Polling)	REUTERS XTRA-3000 dan REUTERS KNOWLEDGE	
146		Indonesia- <i>Equity</i>	Market Overview Jakarta S.E. Sector Chains Key Jakarta Indices Displays Market Statistic Jakarta Broker Statistic Jakarta Market Statistic Surabaya		
147		Indonesia - <i>Fixed Income</i>	Government Bond Chain Stock Exchange Prices for Government Bank Indonesia Certificate Stock Exchange Prices for Corporate		

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
			News & Analysis (All Reuters Debt, Money and Debt News-Indonesia)		
			Benchmark (Reuters Benchmark, Surabaya SE Benchmark)		
148		Data <i>Commodity</i>	Commodity Index		
			LME Information (3 Months Price)		
			Precious Metals		
			Softs		
			Commodity News (Top Commodities Market News, Latest LME Report)		
149		Data ekspor dan Impor Dunia (12 Negara)		GTIS	
150		Data Metal Bulletin	Metal Bulletin Harian	Metal Bulletin	
			Metal Bulletin Magazine		
			Metal Bulletin Archive		
151		Data ASIAN Metal	Akses Berita yang up to date dan real time secara Online serta daftar harga dari berbagai Jenis Metal	ASIAN Metal	
152			World Consumer Prices	IFS CD-ROM	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
		Data Indikator Ekonomi Dunia	World Export, f.o.b World Foreign Exchange World Gold World Gross Domestic Product, Real World Import Unit Values/Import Prices World Import, c.i.f World Reserve Position in the Fund World SDR Holdings World Total Fund Credit & Loans Outstanding World Total Reserves World Total Reserves minus Gold		
153		Data Ekspor dan Impor Dunia	Advanced Economies Exports and Imports Developing Asia Exports & Imports Emerging & Developing Economies Exports & Imports Europe Exports & Imports	DOTS CD_ROM	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
			Middle East & North Africa Exports & Imports Sub-Saharan Africa Exports & Imports Western Hemisphere Exports & Imports World Exports & Imports		
154		informasi ringkasan perdagangan dan Tarif	Data Negara - Negara Importir dan Eksportir dalam perdagangan barang/Produk Data Kelompok Produk/Barang yang diekspor dan diimpor oleh Negara-negara lain Data Tarif yang dikenakan oleh Negara-negara lain untuk perdagangan barang/Produk Data Indikator Perdagangan, seperti; Revealed Comparative Advantage (RCA), World Growth, Pertumbuhan Negara dan lain-lain Data negara-negara Mitra dagang utama	WITS Comtrade	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
			Data Kelompok Produk utama yang di ekspor oleh Negara-negara lain		
			Data Indikator Pembangunan seperti GDP, GNI per kapita, neraca perdagangan sebagai persentase dari PDB dan Lain		
155		GTAP Data base	Data Makro Ekonomi yang baru untuk Tahun 2004 dan 2007	GTAP Data Base	
			Data Perdagangan baru untuk Tahun 2004 dan 2007		
			Data perlindungan baru untuk Tahun 2007		
			New Time-Series Data Perdagangan Bilateral dari 1995-2009		
			Peningkatan Layanan data Perdagangan Bilateral untuk Tahun 2004 dan 2007		
			Peningkatan Data Energi untuk Tahun 2004 dan 2007		

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
			Revisi OECD dukungan Domestik untuk Tahun 2004 dan 2007 Pembaharuan subsidi ekspor data untuk Tahun 2007 Perbaikan Revisi Pajak di sector Pertanian dan Energi Informasi tambahan tentang Kontribusi I-O tabel Dekomposisi Tarif (dalam ad valorem dan spesifik) dan OECD Data Pembayaran dukungan domestik (dalam berbagai jenis pembayaran berdasarkan tingkat decoupling dan basis) Emisi CO2 dataset diintegrasikan ke dalam basis data inti		
156		Jurnal Internasional		JSTOR	
157	Biro Perencanaan	Data Restra	Laporan terkait data rencana strategis Kemendag 2015-2019 yg di dalamnya berisi indikaror	Kemendag	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
			indikator yang ada di setiap unit eselon satu dan dua		
158		Data Kontrak Kinerja	Data Kontrak Kinerja adalah laporan terkait iku dan indikator eselon I dan II yang di perjanjikan	Kemendag	
159		Data Renja	Data Renja adalah data rencana kerja sebagai bahan penyusunan RKA KL satker	Kemendag	
160		Data RKA	Kumpulan Data rencana kerja anggaran satker di lingkungan kemendag	Kemenkeu	
161		Laporan Kinerja Kementerian	Laporan akuntabilitas kementerian perdagangan sebagai laporan pengukuran Kinerja Kementerian	Kemendag	
162		Laporan DAK	Laporan DAK adalah laporan hasil progres pelaksanaan pemantauan pasar, gudang dan metrologi yang bersumber dari dana alokasi khusus		
163		Sistem Emonitoring	Aplikasi Yang menyediakan data anggaran beserta realisasinya	Span Kemenkeu	

NO	UNIT ESELON	JENIS DATA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	ELEMEN DATA
164		Sistem DAK Online	Aplikasi Pelaporan progres pelaksanaan DAK dan data profil pasar	Kabupaten/kota	
165	KADI	Kinerja Kasus	Kinerja kasus yang telah diselidiki atau yang masih diselidiki	<ul style="list-style-type: none"> - PMK terkait pengenaan BMAD - Laporan Akhir hasil penyelidikan - Essential Facts hasil penyelidikan - Notifikasi 	
167	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Data LHP	data laporan hasil pemeriksaan	auditor	
168		Data Tindak Lanjut	data tindak lanjut hasil pemeriksaan	auditor	
169		Data temuan dan rekomendasi	data temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	auditor	

Lampiran 5 Arsitektur Data Target

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
1	MOT-01. Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan	MOT-01.01. Undang-Undang Perdagangan	MOT-01.01.CFM.01.SOP.01 Perencanaan Penyusunan Undang-Undang Bidang Perdagangan	-	Rencana Penyusunan Undang-Undang
			MOT-01.01.CFM.01.SOP.02 Persiapan Pembentukan Undang-Undang Bidang Perdagangan	-	Rancangan Undang-Undang
			MOT-01.01.CFM.01.SOP.03 Pengajuan Rancangan Undang-Undang	-	Undang-Udang
		MOT-01.02. Kepesertaan Pembahasan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	MOT-01.02.CFM.01.SOP.01 Kepesertaan Pembahasan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Laporan Hasil Pembahasan
		MOT-01.03. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perdagangan	MOT-01.03.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan	-	Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
		MOT-01.04. Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan	MOT-01.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan	-	Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan
		MOT-01.05. Peraturan Kepala BAPPEBTI	MOT-01.05.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Kepala BAPPEBTI	Rencana Penyusunan Undang-Undang	Peraturan Kepala BAPPEBTI, Surat Edaran Kepala BAPPEBTI
		MOT-01.06. Peraturan Di Bidang Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kemendag	MOT-01.06.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan di Bidang Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kemendag	-	-
		MOT-01.07. Penyusunan Perjanjian	MOT-01.07.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Perjanjian	-	Perjanjian
2	MOT-02 Pengamanan Pasar Dalam Negeri	MOT-02.01 Pengawasan Barang dan Jasa	MOT-02.01.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Pendaftaran Lembaga Penilaian	Data LsPro, Ruang Lingkup LsPro, SPPT SNI	<i>Check List</i> Hasil Pengecekan Dokumen, Surat Penolakan Pendaftaran LPK (apabila dokumen pendukung tidak lengkap dan/atau tidak benar), Surat Keputusan Pendaftaran LPK

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
			MOT-02.01.CFM.02.SOP.01 Pengawasan Kinerja LPK Terdaftar	Data Lspro yang Sudah Terdaftar/Teregister , Ruang Lingkup Lspro, SPPT SNI	Rekapitulasi Data (produk yang akan diambil, daerah pengambilan, petugas), Surat Tugas, Nota Pembelian Contoh, Tanda Terima Pengiriman Contoh dari Laboratorium Uji, Sertifikat Hasil Pengujian, Rekap dan Telaah Hasil Pengujian, Daftar LPK yang Dicabut Pendaftarannya dan LPK yang Masih Terdaftar, Laporan Pengawasan Kinerja LPK
			MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang yang SNI nya Diberlakukan Wajib	SPPT SNI, API/NIB dan Surat Kuasa	Formulir Tanda Terima Pendaftaran NPB/NRP/TPP SIR, Berkas/Dokumen Pendukung NPB, Surat Penolakan NPB (apabila Dokumen Pendukung Tidak Lengkap dan/atau Tidak Benar, Surat NPB yang Telah Diterbitkan.

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
		MOT-02.02 Penyediaan Standar Acuan	MOT-02.02.CFM.01.SOP.01 Perumusan SNI Jasa Bidang Perdagangan	Rekomendasi Komtek, Data Calon Tim Perumus, CV dan Lembar Komitmen Calon Anggota Komtek, Konsep RSNI1, Konsep RSNI2, Konsep RSNI 3.	Usulan PNPS, SK Tim Perumus, Usulan anggota Komtek 03-03 Jasa Bidang Perdagangan, dokumen RSNI1, RSNI2, RSNI3
		MOT-02.03 Koordinasinasional Perlindungan Konsumen	MOT-02.03.CFM.01.SOP.01 Koordinasi Nasional Perlindungan Konsumen	-	-
		MOT-02.04 Pemberdayaan Konsumen	MOT-02.04.CFM.01.SOP.01 Pembentukan dan Penguatan BPSK	-	-
			MOT-02.04.CFM.01.SOP.02 Aktivasi LPKSM	-	-
			MOT-02.04.CFM.02.SOP.01 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Konsumen	Data pengadu, data pelaku usaha, data kronologis	Laporan tindak lanjut hasil pengaduan
			MOT-02.04.CFM.02.SOP.03 Edukasi Konsumen Cerdas	-	-

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
		MOT-02-05 Pengawasan Barang dan Jasa Di Pasar	MOT-02.05.CFM.01.SOP.01 Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar	Data pemetaan objek pengawasan (komoditi, daerah pengawasan), penugasan personil, data tabel hasil pengawasan	Laporan hasil pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan (apresiasi, teguran, rekomendasi pencabutan izin perdagangan, perintah penarikan dan/atau pemusnahan barang, penyidikan)
		MOT-02-06 Pelayanan Kemetrolgian	MOT-02.06.CFM.01.SOP.01 Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik Untuk UTTP	Data Pelanggan, Dokumen Persyaratan, Draf Surat Izin Tipe, <i>Digital Signature</i>	Sertifikat Izin Tipe/Tanda Pabrik
			MOT-02.06.CFM.02.SOP.01 Pengujian UTTP, Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi	Data Pelanggan, Data Order/Alat, Data Lab, Data Penguji, Data Hasil Pengujian, Draf SKHP, <i>Digital Signature</i>	Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
3	MOT-03 Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok & Penguatan Jaringan Distribusi	MOT-03.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok	Daftar provinsi, data pasar, komoditas, data harga, data stok	Laporan perkembangan harga dan stok Bapokting
		MOT-03.02 Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok & Penguatan Jaringan Distribusi	MOT-03.02.CFM.01.SOP.01 Penataan Jaringan Distribusi	Data Pasar, Data Persyaratan, dkk	Data Pasar revitalisasi, data anggaran, dkk
4	MOT-04 Peningkatan Ekspor Non Migas	MOT-04.01 Pengembangan Pasar Ekspor	MOT-04.01.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Pasar Ekspor	Data Negara, Data Produk, Neraca Perdagangan, Data Perdangan Competitor, Data dari Market Research, Analisa SWOT	Laporan Produk Ekspor, Laporan <i>Summary Market Intelligence</i>
			MOT-04.01.CFM.01.SOP.02 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Pasar dan Produk Ekspor	-	-
5		MOT-04.02 Pengembangan Produk Ekspor	MOT-04.02.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Produk Ekspor	-	Informasi produk potensial ekspor Indonesia dan analisa produk pesaing di pasar

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
					ekspor, Katalog Produk dan Profil Produk;
6		MOT-04.03 Pengembangan Citra	MOT-04.03.CFM.01.SOP.01 Promosi	Data Eksportir dan Produk	Kontak dagang dan <i>inquiry</i>
7		MOT-04.04 Penanganan Tuduhan <i>Dumping</i> , Subsidi, <i>Safeguard</i>	MOT-04.04.CFM.01.SOP.01 Penanganan Tuduhan <i>Dumping</i>	Negara penuduh, Kode/HS, Jenis tuduhan/tanggal inisiasi, Negara yang dituduh dan Perusahaan Indonesia yang dituduh, Status (Dalam Proses, Dikenakan, Dihentikan), Keterangan kasus, Tanggal Notifikasi, Tanggal Inisiasi, Periode investigasi, Review, Tanggal Review, Otoritas, Petitioner, Perusahaan	List hambatan perdagangan, Matriks hambatan perdagangan dan rekapitulasi penanganan hambatan perdagangan. Profil Hambatan Perdagangan per Negara Penuduh, Komoditi, HS Code, Jenis Tuduhan (<i>Dumping</i> , Subsidi & Safeguard), Tanggal Inisiasi, Status (Dikenakan, Dihentikan maupun dalam Proses), Terhitung Masa Tanggal (TMT) Notifikasi awal penyelidikan kasus maupun penerapan Bea Masuk Impor

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				Importir, Eksportir Indonesia yang Dituduh, Ekspor Indonesia ke Negara Tujuan, Respon terhadap Kuisisioner, Provisional Measure, Final Measure.	
8			MOT-04.04.CFM.02.SOP.01 Penanganan Tuduhan Subsidi	Negara penuduh, Kode/HS, Jenis tuduhan/tanggal inisiasi, Negara yang dituduh dan Perusahaan Indoesia yang dituduh, Status (Dalam Proses, Dikenakan, Dihentikan), Keterangan kasus, Tanggal Notifikasi, Tanggal Inisiasi, Periode investigasi,	List hambatan perdagangan, Matriks hambatan perdagangan dan rekapitulasi penanganan hambatan perdagangan. Profil Hambatan Perdagangan per Negara Penuduh, Komoditi, HS Code, Jenis Tuduhan (<i>Dumping</i> , Subsidi & Safeguard), Tanggal Inisiasi, Stutus (Dikenakan, Dihentikan maupun dalam Proses), Terhitung Masa Tanggal (TMT) Notifikasi Awal Penyelidikan Kasus Maupun Pengenaan Bea Masuk Impor

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				<i>Review, Tanggal Review, Otoritas, Petitioner, Perusahaan Importir, Eksportir Indonesia yang Dituduh, Ekspor Indonesia ke Negara Tujuan, Respon terhadap Kuisisioner, Provisional Measure, Final Measure.</i>	
9			MOT-04.04.CFM.03.SOP.01 Penanganan Tindakan <i>Safeguard</i>	Negara penuduh, Kode/HS, Jenis tuduhan/tanggal inisiasi, Negara yang dituduh dan Perusahaan Indoesia yang dituduh, Status (Dalam Proses, Dikenakan, Dihentikan),	List hambatan perdagangan, Matriks hambatan perdagangan dan rekapitulasi penanganan hambatan perdagangan. Profil Hambatan Perdagangan per Negara Penuduh, Komoditi, HS Code, Jenis Tuduhan (<i>Dumping, Subsidi & Safeguard</i>), Tanggal Inisiasi, Stutus (Dikenakan, Dihentikan maupun dalam

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				Keterangan kasus, Tanggal Notifikasi, Tanggal Inisiasi, Periode investigasi, Review, Tanggal Review, Otoritas, Petitioner, Perusahaan Importir, Eksportir Indonesia yang Dituduh, Ekspor Indonesia ke Negara Tujuan, Respon terhadap Kuisisioner, Provisional Measure, Final Measure.	Proses), Terhitung Masa Tanggal (TMT) Notifikasi awal penyelidikan kasus maupun pengenaan Bea Masuk Impor
10			MOT-04.04.CFM.04.SOP.01 <i>Dispute Settlement</i>	Negara penuduh, Kode/HS, Jenis tuduhan/tanggal inisiasi, Negara yang dituduh dan Perusahaan Indoesia yang	List hambatan perdagangan, Matriks hambatan perdagangan dan rekapitulasi penanganan hambatan perdagangan. Profil Hambatan Perdagangan per Negara Penuduh, Komoditi, HS Code,

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				<p>dituduh, Status (Dalam Proses, Dikenakan, Dihentikan), Keterangan kasus, Tanggal Notifikasi, Tanggal Inisiasi, Periode investigasi, Review, Tanggal Review, Otoritas, Petitioner, Perusahaan Importir, Eksporir Indonesia yang Dituduh, Ekspor Indonesia ke Negara Tujuan, Respon terhadap Kuisisioner, Provisional Measure, Final Measure.</p>	<p>Jenis Tuduhan (<i>Dumping</i>, Subsidy & Safeguard), Tanggal Inisiasi, Status (Dikenakan, Dihentikan maupun dalam Proses), Terhitung Masa Tanggal (TMT) Notifikasi awal penyelidikan kasus maupun pengenaan Bea Masuk Impor.[PB.08] Pelayanan penerbitan SKA yang tertib, efektif dan efisien serta memenuhi ketentuan dalam kesepakatan perjanjian internasional</p>
11		MOT-04.05 Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif	MOT-04.05.CFM.01.SOP.01 Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif	Negara penuduh, Kode/HS, Jenis tuduhan/tanggal	List hambatan perdagangan, Matriks hambatan perdagangan dan rekapitulasi

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				<p>inisiasi, Negara yang dituduh dan Perusahaan Indoesia yang dituduh, Status (Dalam Proses, Dikenakan, Dihentikan), Keterangan kasus, Tanggal Notifikasi, Tanggal Inisiasi, Periode investigasi, Review, Tanggal Review, Otoritas, Petitioner, Perusahaan Importir, Eksportir Indonesia yang Dituduh, Ekspor Indonesia ke Negara Tujuan, Respon terhadap Kuisisioner, Provisional</p>	<p>penangan hambatan perdagangan. Profil Hambatan Perdagangan per Negara Penuduh, Komoditi, HS Code, Jenis Tuduhan (<i>Dumping</i>, Subsidy & Safeguard), Tanggal Inisiasi, Status (Dikenakan, Dihentikan maupun dalam Proses), Terhitung Masa Tanggal (TMT) Notifikasi awal penyelidikan kasus maupun pengenaan Bea Masuk Impor.</p>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				Measure, Final Measure.	
12			MOT-04.05.CFM.02.SOP.01 penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	Negara penuduh, Kode/HS, Jenis tuduhan/tanggal inisiasi, Negara yang dituduh dan Perusahaan Indoesia yang dituduh, Status (Dalam Proses, Dikenakan, Dihentikan), Keterangan kasus, Tanggal Notifikasi, Tanggal Inisiasi, Periode investigasi, Review, Tanggal Review, Otoritas, Petitioner, Perusahaan Importir, Eksportir Indonesia yang	List hambatan perdagangan, Matriks hambatan perdagangan dan rekapitulasi penanganan hambatan perdagangan. Profil Hambatan Perdagangan per Negara Penuduh, Komoditi, HS Code, Jenis Tuduhan (<i>Dumping</i> , Subsidy & Safeguard), Tanggal Inisiasi, Status (Dikenakan, Dihentikan maupun dalam Proses), Terhitung Masa Tanggal (TMT) Notifikasi awal penyelidikan kasus maupun penenaan Bea Masuk Impor., sertifikat online, Lowongan JPT

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				Dituduh, Ekspor Indonesia ke Negara Tujuan, Respon terhadap Kuisisioner, Provisional Measure, Final Measure.	
13		MOT-04.06 Pengawasan Mutu Barang Olah Komoditi Ekspor (Bokor)	MOT-04.06.CFM.01.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Olah Komoditi Ekspor (Bokor)	Data Ekspertir Bokor, Data Pedagang dan Data Petani, Data Sentra Produksi, Data Ekspor Komoditi Ekspor, Data Persyaratan Mutu Tujuan Ekspor	Standar Acuan Komoditi Ekspor, Kuesioner Pengawasan Mutu Bokor, Tanda Terima Contoh Bokor Untuk Diuji, Hasil Uji Lab, Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Lab, Rekomendasi/Informasi Ke Pelaku Usaha Terkait Hasil Pengawasan Mutu Bokor
14			MOT-04.06.CFM.01.SOP.02 Penerbitan Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR	Data SPPT SNI SIR, Data Perusahaan	Tanda terima pendaftaran TPP, berkas/dokumen pendukung, berkas TPP yang sudah diverifikasi, surat penolakan TPP (apabila dokumen

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
					pendukung tidak lengkap dan/atau tidak benar), Surat TPP SIR yang telah diterbitkan.
15		MOT-.04.07 Standar Acuan Fisik Komoditi & Pemantauan Mutu Komoditi Ekspor	MOT-04.07.CFM.01.SOP.01 penyusunan & Pengesahan Standar Buku Contoh Karet	Data Tim Penilai, Data Perusahaan Karet di Indonesia Beserta Jenis Karet Yang Diproduksi, Data Jumlah Buku Yang Diperlukan, Daftar Contoh Karet Yang Akan Dibeli Berdasarkan Jenis dan Perusahaan Karet, Data <i>Stakeholder</i> Penerima Buku Contoh Karet	SK Tim Penilai Contoh Karet Konvensional, Daftar Contoh Karet yang Akan Dibeli Berdasarkan Jenis dan Perusahaan Karet, Surat Pembelian Contoh Karet, Surat Tugas Petugas Pengambil Contoh (PPC), Data Contoh Karet yang Lulus dan Tidak Lulus Penilaian, Data Buku Contoh Karet yang Telah Disahkan, Tanda Terima Pengiriman Buku Contoh Karet
16	MOT-05 perbaikan Iklim Usaha Perdagangan	MOT-05.01 pengendalian Ekspor dan Impor	MOT-05.01.CFM.01.SOP 01 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Ekspor-Impor	-	Laporan Evaluasi

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
		MOT-05.02 Perbaikan Iklim Usaha Dalam Negeri	MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perijinan / Non Perijinan Kepada Dunia Usaha	BINUS: - BAPOKTING: Data distributor, data komoditas, data stok berjalan DITFAS: Dokumen Persyaratan: NPWP, <i>Bill of Lading</i> / <i>Airway Bill</i> , dan informasi tentang spesifik barang.	BINUS: - BAPOKTING: - Data stok DITFAS: Data SKA
		MOT-05.03 Peningkatan Nilai Tambah Produk	MOT-05.03.CFM.01.SOP.01 Peningkatan Nilai Tambah Produk	Data produk, data pelaku usaha dan data legalitas	Laporan jumlah UKM
		MOT-05.04 Perdagangan Yang Berkelanjutan	MOT-05.04.CFM.01.SOP.01 Harga Patokan Ekspor (HPE)	-	Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE)
		MOT-05.05 Peningkatan Peran	MOT-05.05.CFM.01.SOP 01 Pengusulan Kawasan	Form Usulan Pembentukan KEK	Dokumen usulan KEK

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
		Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus	Ekonomi Khusus (Dalam Hal Usulan Dari Pemerintah)		
			MOT-05.05.CFM.02.SOP 01 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Di KEK	Laporan/dokumen tertulis realisasi penerbitan perijinan oleh Administrator KEK, Laporan realisasi penerbitan perijinan dalam bentuk softcopy yang disampaikan melalui Inatrade, dan Dokumen perijinan yang diterbitkan	Keputusan dalam menentukan kebijakan perijinan perdagangan, Keputusan dalam memberikan sanksi kepada Administrator KEK yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman yang diberikan, Kualitas pelayanan di bidang penerbitan perijinan dalam rangka pembentukan KEK yang lain.
		MOT-05.06 Pengembangan Fasilitasi Ekspor - Impor	MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) Untuk Barang Ekspor Indonesia	Profil Perusahaan, dokumen Persyaratan: NIB, NPWP, SIUP.	Penerbitan Perizinan secara elektronik secara cepat kepada pelaku usaha melalui Inatrade dengan <i>Digital Signature</i>

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
		MOT-05.07 Pembinaan dan Pengawasan PBK, SRG, dan PI	MOT - 05.07.CFM.01.SOP.01 Pembinaan PBK, SRG dan PI	Rencana pembinaan di bidang PBK/SRG/PL, data pemohon perizinan di bidang PBK/SRG/PL	Persetujuan lembaga dan pelaku usaha di bidang PBK/SRG/PL
17			MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PL	Rencana pengawasan di bidang PBK/SRG/PL, data profil, transaksi pelaku usaha dan lembaga di bidang PBK/SRG/PL	Informasi transaksi, profil, dan pelaporan pelaku usaha di bidang PBK/SRG/PL, sebaran data gudang SRG
			MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01 Pengembangan PBK, SRG dan PL	Rencana pengembangan tahunan di bidang PBK/SRG/PL	Rekomendasi pengembangan PBK, SRG, PL
			MOT-05.08 Pemulihan Iklim Usaha Perdagangan	MOT-05.08.CFM.01.SOP.01 Penyelidikan Tindakan Anti <i>Dumping</i>	Formulir permohonan untuk pemohon, kuesioner (untuk produsen/eksportir,

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				industri dalam negeri, dan importir).	BMADS/BMAD, dan BMADS/BMAD
			MOT-05.08.CFM.02.SOP.01 Penyelidikan Tindakan Imbalan	Formulir permohonan untuk pemohon, kuesioner (untuk produsen/eksportir, industri dalam negeri, dan importir).	Inisiasi, Laporan Sementara, Essential facts (laporan yang memuat data-data utama), Laporan Akhir Hasil Penyelidikan, Rekomendasi BMIS/BMI, dan BMIS/BMI
			MOT-05.08.CFM.03.SOP.01 Penyelidikan <i>Safeguard</i>	-	Submisi/Posisi Indonesia, Profil kasus, Siaran pers dan Laporan Penanganan Kasus
18	MOT-06 Pengembangan Akses Pasar	MOT-06.01 Diplomasi Perdagangan	MOT-06.01.CFM.01.SOP.01 <i>Leading Sector</i> Perundingan Internasional	Data negara, data komoditas, data perundingan, data posisi runding, data <i>Stakeholder</i> , data profil ekonomi(statistik perdagangan), data	Hasil perundingan (dokumen hasil sidang, pengesahan, kesepakatan perundingan), posisi runding, informasi kerja sama perdagangan internasional

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				delegasi, data kegiatan (dokumen hasil sidang, pengesahan, kesepakatan perundingan), data <i>factsheet</i>	
			MOT-06.01.CFM.01.SOP.02 Menghadiri dan/Melakukan Perundingan Sidang Internasional	Data negara, data komoditas, data perundingan, data posisi runding, data <i>Stakeholder</i> , data profil ekonomi(statistik perdagangan), data delegasi, data kegiatan (dokumen hasil sidang, pengesahan, kesepakatan perundingan), data <i>factsheet</i>	Hasil perundingan (dokumen hasil sidang, pengesahan, kesepakatan perundingan), posisi runding, informasi kerja sama perdagangan internasional

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
			MOT-06.01.CFM.01.SOP.03 Usulan Pengesahan Perjanjian dan / atau Kesepakatan Perjanjian Internasional	Data negara, data komoditas, data perundingan, data posisi runding, data <i>Stakeholder</i> , data profil ekonomi(statistik perdagangan), data delegasi, data kegiatan (dokumen hasil sidang, pengesahan, kesepakatan perundingan), data <i>factsheet</i>	Hasil perundingan (dokumen hasil sidang, pengesahan, kesepakatan perundingan), posisi runding, informasi kerja sama perdagangan internasional
19	MOT - 07 Teknologi Informasi & Komunikasi (Tik)	MOT-07.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	MOT - 07.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Data: inventaris <i>server</i> , inventaris perangkat (+ <i>end of life</i>)	Laporan pemantauan jaringan dan infrastruktur
		MOT-07.02 Pengelolaan dan Pelayanan Permintaan Data	MOT - 07.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan dan Pelayanan Permintaan Data	Data: HS, pelabuhan, negara,	Data ekspor, data impor, data inflasi, data indikator makro

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				provinsi, jumlah, nilai	ekonomi, harga nasional dan internasional
		MOT-07.03 Pengelolaan Aplikasi	MOT - 07.03.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Aplikasi	-	-
		MOT-07.04 Pengelolaan Keamanan Informasi	MOT - 07.04.CFM.01.SOP.01 pengelolaan Keamanan Informasi	-	-
20	MOT-08 pelayanan Informasi dan Publikasi	MOT-08.01 Pengelolaan Informasi, Publikasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	MOT-08.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	-	Laporan kegiatan publikasi dan produk hasil publikasi.
			MOT-08.01.CFM.01.SOP.02 Publikasi	-	-
		MOT-08.01.CFM.02.SOP.01 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Data Peserta Sosialisasi/Bimtek, Data Narasumber, Data Silabus/Bimtek	Surat Undangan Bimtek/Sosialisasi, Surat Permintaan Narasumber, Surat Tugas Panitia/Narasumber/Moderator, SK Panitia dan Panitia/Narasumber/Moderator, Laporan Bimtek/Sosialisasi	

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
21		MOT-08.02 Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan	MOT-08.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan	Formulir permintaan informasi Formulir pengaduan	Dokumentasi penyediaan/penyampaian informasi Dokumentasi tanggapan atas pengaduan
22		MOT-08.03 Pelayanan Perpustakaan	MOT-08.03.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perpustakaan	-	-
23		MOT-08.04 Pengelolaan Komunikasi Dalam Situasi Krisis	MOT-08.04.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Komunikasi Dalam Situasi Krisis	-	-
24	MOT - 09 Riset dan Pengembangan	MOT - 09.01 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan	MOT - 09.01.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Kajian	TOR Kajian, Rencana Operasional Penelitian, Data tim penelitian, data sekunder dan primer	Laporan hasil kajian, rekomendasi hasil kajian
25		MOT -10.02 Pengelolaan K3L	MOT -10.01.CFM.02.SOP.01 Pengelolaan K3L	-	Laporan

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
		MOT -10.03 Pengelolaan Keprotokolan	MOT -10.01.CFM.02.SOP.01 Pengelolaan Keprotokolan	-	Susunan Acara (<i>rundown</i>)
		MOT -10.04 Pengelolaan BMN	MOT -10.04.CFM.01.SOP.01 Perencanaan dan Pengadaan Barang & Jasa	Formulir usulan paket pekerjaan, Formulir daftar dan jadwal paket, Kerja dan Syarat-syarat	Hasil evaluasi dan usulan calon pemenang, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Surat penetapan pemenang lelang, Pengumuman pemenang lelang, Tanggapan atas sanggahan/banding (jika ada), Surat penyerahan penetapan pemenang lelang kepada KPA/PPK, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Kontrak perjanjian kerja, Salinan dokumen lelang sampai dengan kontrak perjanjian kerja.
			MOT -10.04.CFM.01.SOP.02 Penatausahaan BMN	-	-
			MOT -10.04.CFM.01.SOP.03	-	-

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
			penggunaan dan Pemanfaatan BMN		
			MOT -10.04.CFM.01.SOP.04 Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN	-	-
26	MOT-11 Pengelolaan SDM	MOT-11.01 Pengadaan SDM	MOT-11.01.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Formasi Pegawai	Data profil pegawai, Data rekap pegawai pensiun, berhenti, meninggal dunia, dan pindah, data rekap jumlah pegawai per unit kerja, susunan jabatan structural dan fungsional, daftar kebutuhan pegawai perwakilan Luar Negeri	formasi pegawai tahun berjalan, Surat Menteri Perdagangan tentang Formasi Pegawai
			MOT-11.01.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Rekrutmen Cpns	Formasi pegawai tahun berjalan, data pelamar	pengumuman hasil ujian tertulis, informasi kelulusan CPNS, Usulan NIP, SK

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
					Pengangkatan CPNS, data calon CPNS yang lolos
			MOT-11.01.CFM.01.SOP.03 Pengangkatan PNS	-	-
		MOT-11.02 Pembinaan dan Pengembangan Sdm	MOT-11.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Kinerja Pegawai	-	-
			MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Perdagangan	Data Analisa Kebutuhan Diklat Aparatur, Kurikulum dan silabus Diklat Aparatur, CV peserta diklat, CV Widyaiswara, Data nilai peserta (kuesioner, <i>Pretest</i> , <i>Post test</i>),	Hasil Analisa Kebutuhan Diklat Aparatur, Modul dan bahan tayang, Data peserta/alumni diklat, Sertifikat Diklat, Laporan dan evaluasi penyelenggaraan diklat, Laporan Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pasca Diklat
27			MOT-11.02.CFM.01.SOP.03 Pengelolaan Jabatan Fungsional	Data JFT, formulir DUPAK, formulir PAK, formasi pegawai tahun berjalan	abk JFT, SK Tim Penilai AK, sertifikat kelulusan diklat, sertifikat kompetensi, Berita Acara PAK, SK Pengangkatan, DUPAK, PAK, SK Pengangkatan

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
					Pertama/impassing/Kenaikan Jenjang/Jabatan, Sk Pembebasan Sementara, SK pengangkatan Kembali, SK Pemberhentian
28			MOT-11.02.CFM.02.SOP.01 Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	Formulir isian usulan pengajuan kasus dari unit terkait	BAP Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin, LHP Kasus, SK Pemberhentian, Surat Rekomendasi, dan Penyelesaian kasus
29			MOT-11.02.CFM.03.SOP.01 Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag	Surat Usulan Mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, Daftar Penguji Mutu Barang yang akan Naik Jenjang Jabatan	Surat Keputusan Pembentukan Panitia/ Tim Teknis/ Tim Penguji Uji Kompetensi, Sertifikat kelulusan uji kompetensi, Surat Keterangan telah mengikuti uji kompetensi, Laporan Pelaksanaan Uji Kompetensi, Daftar Fungsional Penguji Mutu Bar ang yang kompeten

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
30			MOT-11.02.CFM.03.SOP.02 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag	Surat Usulan Penetapan Angka Kredit, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang	Data rekapitulasi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, Data rekapitulasi Penetapan Angka Kredit (PAK), Konsep Usulan Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang, Konsep Usulan Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, Konsep Surat Keputusan Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
			MOT-11.02.CFM.03.SOP.05 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag	Data Penguji Mutu Barang, Daftar Permasalahan atau Kebijakan Jabatan	Laporan <i>Monitoring/Evaluasi</i> Hasil Pelaksanaan Bimbingan/ Pertemuan Teknis

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				Fungsional Penguji Mutu Barang	
31			MOT-11.02.CFM.04.SOP.01 Pelaksanaan Forum / Event Internasional	Surat Tawaran Kegiatan	Surat Ijin/Surat Tugas/Surat Belajar ke Luar Negeri
32		MOT-11.03 Pengembangan SDM <i>Stakeholder</i> Perdagangan	MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat <i>Stakeholder</i> Perdagangan	Data Analisa Kebutuhan Diklat Non Aparatur, Kurikulum dan silabus Diklat Non Aparatur, CV peserta diklat, CV Narasumber Diklat Non Aparatur, Data nilai peserta (<i>Pretest, Post test</i>), Data kuesioner penyelenggaraan diklat, Data Kuesioner <i>Monitoring</i> dan evaluasi Pasca Diklat	Hasil Analisa Kebutuhan Diklat Non Aparatur, Modul dan bahan tayang, Data peserta/alumni diklat, Sertifikat Diklat, Laporan dan evaluasi penyelenggaraan diklat, Laporan Hasil Monev Pasca Diklat

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
33		MOT-11.04 Administrasi dan Informasi Kepegawaian	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian	-	-
34		MOT-11.05 Pengembangan Standar Kompetensi	MOT-11.05.CFM.01.SOP.01 pengembangan Standar Kompetensi	-	-
35		MOT-11.06 <i>Assessment Center</i>	MOT-11.06.CFM.01.SOP.01 <i>Assessment Center</i>	-	-
36		MOT-11.07 Pengelolaan Sdm Perwakilan Perdagangan Di Luar Negeri	MOT-11.07.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan SDM Perwakilan Perdagangan Di Luar Negeri	Data profil pegawai, data pelamar, kompetensi/persyaratan menduduki jabatan perwakilan	Daftar peserta yang lolos, SK Penempatan perwakilan LN
37	MOT-12 Layanan Hukum	MOT-12.01 Pemberian Bantuan Hukum Litigasi	MOT-12.01.CFM.01.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Di Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara	-	Surat Tanggapan Mediasi / Akta Perdamaian, Eksepsi / Jawaban, Duplik, Akta Bukti, Putusan / Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan, Peninjauan

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
					Kembali, Kontra Memori Peninjauan Kembali
			MOT-12.01.CFM.02.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Konstitusi	-	Menyiapkan data, alat bukti dan informasi, mempersiapkan Keterangan Pemerintah, menyiapkan Saksi Ahli bersama Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait permohonan Hak Uji Materil yang akan diajukan di Mahkamah Konstitusi
			MOT-12.01.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Agung	-	Jawaban Termohon, Akta Bukti
		MOT-12.02 Pemberian Pelayanan Hukum Non Litigasi	MOT-12.02.CFM.01.SOP.01 Pemberian Konsultasi dan Telaah Hukum (<i>Legal Opinion</i>) Bidang Perdagangan	-	Memberikan konsultasi hukum melalui media telepon pada Stakeholders/Pelaku Usaha yang memerlukan pendapat hukum
38			MOT-12.02.CFM.01.SOP.02 Pemberian Konsultasi dan	Peraturan Presiden, Peraturan Menteri	Opini hukum & Pendampingan hukum

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
			Opini Hukum Bidang Perdagangan Internasional	terkait dengan Perdagangan Internasional, <i>Legal Text World Trade Organization draf convention, agreement, protocol, treaty, arrangement, atau Memorandum of Understanding</i>	
39			MOT-12.02.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Dalam Rangka Pengamanan Peraturan Nasional Di Bidang Perdagangan Internasional	Peraturan Presiden, Peraturan Menteri terkait dengan Perdagangan Internasional, <i>Legal Text World Trade Organization draf convention, agreement, protocol, treaty, arrangement, Memorandum of Understanding, Putusan dan Rekomendasi Panel,</i>	Opini hukum & Pendampingan hukum

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				dan <i>Submission</i> (dokumen gugatan/ pembelaan) yang sifatnya terbuka	
40			MOT-12.02.CFM.04.SOP.01 Pemberian Opini Hukum Terkait Kesesuaian Kebijakan Negara Mitra Dagang Dengan Komitmen Perjanjian Perdagangan Internasional	Peraturan Presiden, Peraturan Menteri terkait dengan Perdagangan Internasional, <i>Legal Text World Trade Organization draf convention, agreement, protocol, treaty, arrangement, atau Memorandum of Understanding</i>	Opini hukum & Pendampingan hukum
41	MOT-13 pengelolaan Rencana & Anggaran	MOT-13.01 Penyusunan Rencana Kerja	MOT-13.01.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan	Indikator kegiatan, target indikator yang akan dicapai	Rencana Strategis
			MOT-13.01.CFM.02.SOP.01 Penetapan Rencana Kerja	Matriks rancangan awal renja, Program	Rencana Kerja

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				yang mendukung Prioritas Nasional, Program yang mendukung Program Tematik	
			MOT-13.01.CFM.02.SOP.02 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Rancangan Anggaran Biaya tiap kegiatan, <i>Term of Reference</i> Kegiatan	DIPA
		MOT-13.02 Pengelolaan Keuangan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.01 Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan	-	-
			MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran	Data SPP UP, SPP TU, SPP GU, SPP LS, SP2D UP, SP2D TU, SP2D GU, SP2D LS, Pajak, PNB, Pengembalian	- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Laporan Realisasi, Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas - Surat Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas
			MOT-13.02.CFM.01.SOP.03 Revisi DIPA/RKA-KL		

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
			MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan	Data terkait pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan	Kompilasi data terkait pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
		MOT-13.03 Evaluasi dan Pelaporan	MOT-13.03.CFM.01.SOP.01 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Data Anggaran Kegiatan, Data Realisasi Anggaran per kegiatan, Progress pengerjaan kegiatan	Laporan Kinerja (Bulanan, Triwulanan)
			MOT-13.03.CFM.01.SOP.02 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Data perjanjian kinerja, data anggaran kegiatan, realisasi kegiatan	Laporan Akuntabilitas Kinerja (Kementerian, Es I, Es II)
		MOT-13.04 PENGELOLAAN PNBP	MOT-13.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan PP Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
			MOT-13.04.CFM.01.SOP.02 Perencanaan Target PNBPN & Penetapan PAGU	-	-
			MOT-13.04.CFM.01.SOP.03 Revisi Target dan PAGU PNBPN	-	-
		MOT-13.05 Administrasi Bantuan Luar Negeri Di Kementerian Perdagangan	MOT-13.05.CFM.01.SOP.01 Administrasi Pinjaman Luar Negeri MOT-13.05.CFM.01.SOP.02 Administrasi Hibah Yang Direncanakan	Surat Perjanjian, dana Hibah, Program Kegiatan hibah, dokumen BAST, nomor <i>register</i> hibah	Laporan Hibah yang Direncanakan Kepada Kemenkeu
			MOT-13.05.CFM.01.SOP.03 Administrasi Hibah Langsung	Surat Perjanjian, dana Hibah, Program Kegiatan hibah, dokumen BAST, nomor <i>register</i> hibah	Laporan Hibah Langsung Kepada Kemenkeu
42	MOT-14 Penataan Organisasi	MOT-14.01 Penataan Organisasi	MOT - 14.01.CFM.01.SOP.01 Analisis Beban Kerja	Formulir Data Beban Kerja Norma Waktu Produk Berdasarkan Norma Proses Tahapan	Hasil Analisa Beban Kerja Jabatan Hasil Analisa Beban Kerja Unit Standar Norma Bobot Tugas

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				Formulir Data Beban Kerja Norma Waktu Produk Berdasarkan Norma Pelayanan Formulir Inventarisasi Pemangku Jabatan Formulir Tabulasi Data Norma Waktu Berdasarkan Proses Tahapan Formulir Tabulasi Data Norma Waktu Berdasarkan Norma Pelayanan Formulir Rekapitulasi Jumlah Beban Kerja	Peta Jabatan

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				Berdasarkan Produk Formulir Perhitungan Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efisiensi Jabatan (EJ) dan Prestasi Kerja Formulir Perhitungan Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efisiensi Unit (EU) dan Prestasi Kerja Unit Formulir Standar Norma Waktu Produk Berdasarkan Norma Proses Tahapan	

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				Formulir Standar Norma Waktu Produk Berdasarkan Norma Pelayanan	
				Formulir Laporan Volume Kerja Produk Berdasarkan Norma Proses Tahapan	
				Formulir Laporan Volume Kerja Produk Berdasarkan Norma Pelayanan	
				Formulir Laporan Jumlah Pemangku Jabatan	

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
			MOT - 14.01.CFM.01.SOP.02 Penataan Kelembagaan	Naskah, <i>draf</i> akhir tentang perubahan ortaker	Naskah Akademis Perubahan Organisasi Permendag tentang Perubahan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Perdagangan RI.
			MOT - 14.01.CFM.01.SOP.03 Analisa dan Evaluasi Jabatan	Formulir Uraian Jabatan, Formulir Informasi Faktor Jabatan Struktural, Formulir Informasi Faktor Jabatan Fungsional Umum, Formulir Informasi Faktor Jabatan Fungsional Tertentu, Formulir Hasil Evaluasi Jabatan Struktural, Formulir Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Umum, dan Formulir Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu	Uraian Jabatan, Informasi Faktor Jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan.

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
43	Mot-15 Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Manajemen dan Pengawasan	MOT-15 Pengelolaan Manajemen Kinerja	MOT-15.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Manajemen Kinerja	Formulir Matriks Renja	Laporan Kuartal <i>Balanced Score Card</i> (BSC)
44		MOT-15.02 Pengelolaan Tinjauan Manajemen	MOT-15.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Tinjauan Manajemen	-	Bahan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat, Bahan Rapat Pimpinan, Bahan Rapat Sidang Kabinet, Bahan Rapat Koordinasi dan Bahan Rapat Adhoc
45		MOT-15.03 Pengawasan Internal	MOT-15.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan pengawasan internal	Data auditor, program kerja pengawasan, data obyek pemeriksaan(unit/d arah), data anggaran, data kertas kerja audit, data temuan, data rekomendasi, data	Laporan audit, laporan tindak lanjut pengawasan, laporan tindak lanjut pengaduan, laporan Monitoring dan Evaluasi manajemen risiko

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				tindak lanjut pengawasaan, data kodering (data kodefikasi temuan), data pengaduan, data tindak lanjut pengaduan, data manajemen risiko (belum ada sistemnya untuk menampung data)	
46			MOT-15.03.CFM.02.SOP.01 pelaksanaan Review Laporan Keuangan	Data auditor, program kerja pengawasaan, data obyek pemeriksaan(unit/d aerah), data anggaran, data kertas kerja audit, data temuan, data rekomendasi, data tindak lanjut pengawasaan, data	Laporan audit, laporan tindak lanjut pengawasaan, laporan tindak lanjut pengaduan, laporan Monitoring dan Evaluasi manajemen risiko

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				kodering (data kodefikasi temuan), data pengaduan, data tindak lanjut pengaduan, data manajemen risiko (belum ada sistemnya untuk menampung data)	
47			MOT-15.03.CFM.02.SOP.02 pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Lembar Kriteria Evaluasi (LKE)	Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
48			MOT-15.03.CFM.03.SOP.01 Pelaksanaan Wilayah Tertib Administrasi (WTA)	Data auditor, program kerja pengawasan, data obyek pemeriksaan(unit/d daerah), data anggaran, data kertas kerja audit, data temuan, data rekomendasi, data tindak lanjut	Laporan audit, laporan tindak lanjut pengawasan, laporan tindak lanjut pengaduan, laporan Monitoring dan Evaluasi manajemen risiko

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				pengawasan, data koding (data kodefikasi temuan), data pengaduan, data tindak lanjut pengaduan, data manajemen risiko (belum ada sistemnya untuk menampung data)	
49			MOT-15.03.CFM.03.SOP.02 Pelayanan Pengaduan Masyarakat	-	-
50		MOT-15.04 Pengukuran dan Pengelolaan Kepuasan Stakeholder	MOT-15.04.CFM.05.SOP.01 Pelaksanaan Survei Kepuasan Stakeholder	Kuisisioner, Indeks Kepuasan Pelanggan, dan Laporan Survey Kepuasan Pelanggan	Kuisisioner, Indeks Kepuasan Pelanggan, dan Laporan Survey Kepuasan Pelanggan
51		MOT-15.05 Pengendalian Dokumen	MOT-15.05.CFM.05.SOP.01 Pengendalian Dokumen	Formulir Daftar Dokumen Terkendali,	Surat Keputusan Penunjukkan PIC, Draf Dokumen Level I, Draf Final

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
				Formulir Daftar Distribusi Dokumen, dan Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen	Dokumen Level I, Dokumen Level I, Daftar Dokumen Terkendali (Dokumen Level I), Master Dokumen Level I, Draf Dokumen Level II, Draf Final Dokumen Level II, Dokumen Level II, Daftar Dokumen Terkendali (Dokumen Level, Master Dokumen Level II, Draf Dokumen Level III dan IV, Draf Final Dokumen Level III 14. Dokumen Level III dan IV, Daftar Dokumen Terkendali (Dokumen Level III dan IV), Salinan Daftar Dokumen Level III dan IV dan <i>softcopy</i> Dokumen Level III dan IV, Daftar Distribusi Dokumen (Dokumen Level I dan II), Daftar Distribusi Dokumen (Dokumen Level III dan IV), Berita Acara Pemusnahan Dokumen, Draf Perubahan Dokumen Level I dan II, Surat

No	Proses Bisnis - Level 0	Proses Bisnis - Level 1	Proses Bisnis - Level 2	Jenis Data	
				Input	Output
					Permohonan Perubahan Dokumen Level I dan II, Draf Usulan Perubahan Dokumen Level I dan II
		MOT-15.06 Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Program Khusus	MOT-15.05.CFM.06.SOP.01 Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Program Khusus	Formulir Matriks Progress Kebijakan	

Lampiran 6 Pemetaan Fungsi Terhadap Layanan dan Proses Bisnis

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
MOT-01. Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan	MOT-01.01. Undang-Undang Bidang Perdagangan	Biro Hukum	Membantu menyiapkan perencanaan penyusunan Undang-Undang Bidang Perdagangan untuk dimasukkan ke dalam Pogram Legislasi Nasional	Administrasi Pemerintahan	MOT-01.01.CFM.01.SOP.01 Perencanaan Undang-Undang Perdagangan Penyusunan Bidang
		Biro Hukum	Mengkoordinasikan penyampaian perencanaan penyusunan Undang-Undang Bidang Perdagangan untuk dimasukkan ke dalam Pogram Legislasi Nasional dengan Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Publik	MOT-01.01.CFM.01.SOP.01 Perencanaan Undang-Undang Perdagangan Penyusunan Bidang
		Biro Hukum	Melakukan Pembahasan RUU	Layanan Publik	MOT-01.01.CFM.01.SOP.02

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			Bidang Perdagangan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian teknis terkait dan menyampaikan RUU bidang Perdagangan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan Harmonisasi		Persiapan Undang-Undang Perdagangan Pembentukan Bidang
		Biro Hukum	Membantu membuat konsep Permohonan Surat Presiden untuk diserahkan kepada Sekretaris Jenderal	Administrasi Pemerintahan	MOT-01.01.CFM.01.SOP.03 Pengajuan Rancangan Undang-Undang
	MOT-01.02. Kepesertaan Pembahasan Harmonisasi Peraturan	Biro Hukum	Menyusun laporan hasil rapat pembahasan bersama unit teknis	Administrasi Pemerintahan	MOT-01.02.CFM.01.SOP.01 Kepesertaan Pembahasan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
	Perundang-Undangan				
	MOT-01.03 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan	Biro Hukum	Melakukan pembahasan bersama Sekretaris Jenderal, Eselon I, Eselon II serta menyampaikan net Rancangan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Bidang Perdagangan kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal	Administrasi Pemerintahan	MOT-01.03.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan
		Biro Hukum	Melakukan pembahasan antar Kementerian serta menyampaikan net Konsep Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan	Layanan Publik	MOT-01.03.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			<p>kepada Sekretaris Jenderal untuk dilaporkan kepada Menteri Perdagangan dan isampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan proses harmonisasi</p>		
	<p>MOT-01.04. Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan</p>	<p>Biro Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelaahan konsep Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan berdasarkan aspek hukum dan legal <i>drafing</i> 2. Membuat Salinan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan untuk diteruskan ke 	<p>Administrasi Pemerintahan</p>	<p>MOT-01.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan</p>

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			Unit Eselon II pemrakarsa		
		Biro Hukum	Melakukan pembahasan konsep Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan bersama Pejabat Eselon II Kementerian Perdagangan, Sekretaris Jenderal/Pejabat Eselon I, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait	Layanan Publik	MOT-01.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan
	MOT-01.05. Peraturan Kepala BAPPEBTI	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Pengarsipan/digitalisasi dokumen PERKA (Penyusunan Peraturan Kepala BAPPEBTI)	Administrasi Pemerintahan	MOT-01.05.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Kepala BAPPEBTI

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			List peraturan kepala yang diterbitkan oleh (diseminasi produk hukum) Kepala BAPPEBTI	Layanan Publik	MOT-01.05.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Kepala BAPPEBTI
	MOT-01.06. Peraturan Di Bidang Jabatan Fungsional Di Bawah Pembinaan Kemendag	Biro Kepegawaian	Penyusunan Peraturan di Bidang Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag	Administrasi Pemerintahan	MOT-01.06.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Di Bidang Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag
	MOT-01.07. Penyusunan Perjanjian	Biro Hukum	Melakukan penelaahan konsep perjanjian	Administrasi Pemerintahan	MOT-01.07.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Perjanjian
MOT-02 Pengamanan Pasar Dalam Negeri	MOT-02.01 Pengawasan Barang dan Jasa	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Distribusi user manual berbentuk e-file	Layanan Publik	MOT-02.01.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian
		Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Melaksanakan kegiatan sinkronisasi LPN dengan <i>stakeholder</i>	Layanan Publik	MOT-02.01.CFM.02.SOP.01 Pengawasan Kinerja LPK Terdaftar

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
		Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan <i>stakeholder</i>	Layanan Publik	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang yang SNI nya Diberlakukan Wajib
	MOT-02.02 Penyediaan Standar Acuan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Menyampaikan RSNI1, RSNI2, dan RSNI3 ke <i>stakeholder</i> melalui <i>website</i> sispk.bsn.go.id	Layanan Publik	MOT-02.01.CFM.01.SOP.01 Perumusan SNI Jasa Bidang Perdagangan
	MOT-02.03 Koordinasi Nasional Perlindungan Konsumen	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	Memberikan pembinaan dan pengawasan sesuai pasal 29 dan 30 UUPK	Layanan Publik	MOT-02.03.CFM.01.SOP.01 Koordinasi Nasional Perlindungan Konsumen
	MOT-02.04 Pemberdayaan Konsumen	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	Channel/saluran pengaduan untuk menyampaikan pengaduan, pertanyaan dan informasi atas permasalahan yang sedang terjadi	Layanan Publik	MOT-02.04.CFM.02.SOP.01 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Konsumen

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
	MOT-02-05 Pengawasan Barang dan Jasa Di Pasar	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981	Layanan Publik	MOT-02.05.CFM.01.SOP.01 Pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar
	MOT-02-06 Pelayanan Kemetrologian	Direktorat Metrologi	Memfasilitasi Penerbitan Serifikasi Izin Tipe/Tanda Pabrik (IT/ITP), Penerbitan Rekomendasi Impor Barang, Penerbitan Surat Keterangan Barang Tidak Wajib	Layanan Publik	Ijin Tipe dan Ijin Tanpa Pabrik untuk UTP

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			Izin Tipe, Penerbitan Label Tipe		
			Memfasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKP)	Layanan Publik	Pengujian UTTP, Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi
MOT-03 Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok & Penguatan Jaringan Distribusi	MOT-03.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Layanan Harga dan Stok Bapokting	Layanan Publik	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok
	MOT-03.02 Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok & Penguatan Jaringan Distribusi	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi proses dinas pada kab/kota di seluruh indonesia yang membidangi perdagangan 2. Fasilitasi pengelolaan pasar dan Dinas pada kab/kota di seluruh indonesia yang 	Layanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. MOT-03.02.CFM.01.SOP.01 Penataan Jaringan Distribusi/ Pengembangan Sarana Distribusi 2. Pengelolaan Sarana Distribusi (Permendag 08/2016) 3. Kerja Sama Logistik (Permendag 08/2016) 4. Perdagangan Antar Pulau dan Perbatasan (Permendag 08/2016)

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			<p>membidangi perdagangan</p> <p>3. Dinas pada kab/kota di seluruh indonesia yang membidangi perdagangan dan Dinas Perhubungan yang membidangi Gerai Maritim</p> <p>4. Layanan pelatihan input laporan perdagangan antarpulau, layanan penggunaan dashboard SIPAP Nasional, layananpelatihan input data pada SIPAP Nasional</p>		<p>5. Pengawasan Sarana Distribusi dan Perdagangan Antar Pulau (Permendag 08/2016)</p>

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			5. Dinas pada kab/kota di seluruh indonesia yang membidangi perdagangan		
MOT-04 Peningkatan Ekspor Non Migas	MOT-04.01 Pengembangan Pasar Ekspor	Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	Proses <i>Market Intelligent</i> (Martel)	Administrasi Pemerintahan	MOT-04.01.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Pasar Ekspor
		Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	Peta Pasar, Diseminasi Informasi Pasar Ekspor	Layanan Publik	MOT-04.01.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Pasar Ekspor
		Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Pasar dan Produk Ekspor	Layanan Publik	MOT-04.01.CFM.01.SOP.02 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Pasar dan Produk Ekspor
	MOT-04.02 Pengembangan Produk Ekspor	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor	Layanan Pengembangan beserta monitoring dan evaluasi produk/jasa calon eksportir	Layanan Publik	MOT-04.02.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Produk Ekspor

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
	MOT-04.03 Pengembangan Citra	Direktorat Pengembangan Produksi dan Citra	Layanan Promosi Internasional	Layanan Publik	MOT-04.03.CFM.01.SOP.01 Promosi
	MOT-04.04 Penanganan Tindakan <i>Dumping</i> , Subsidi, <i>Safeguard</i>	Direktorat Pengamanan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Penanganan Tindakan <i>Dumping</i> 2. Fasilitasi Penanganan Tindakan Subsidi 3. Fasilitasi Penanganan Tindakan <i>Safeguard</i> 4. Fasilitasi Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif 	Layanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. MOT-04.04.CFM.01.SOP.01 penanganan Tindakan <i>Dumping</i> 2. MOT-04.04.CFM.02.SOP.01 Penanganan Tindakan Subsidi 3. MOT-04.04.CFM.03.SOP.01 Penanganan Tindakan <i>Safeguard</i> 4. MOT-04.04.CFM.04.SOP.01 <i>Dispute Settlement</i>
	MOT-04.05 Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif	Direktorat Pengamanan Perdagangan	1. Fasilitasi Penanganan Hambatan Non Tarif	Layanan Publik	1. MOT-04.05.CFM.01.SOP.01 Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			2. Fasilitasi Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan		2. MOT-04.05.CFM.02.SOP.01 Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan
	MOT-04.06 Pengawasan Mutu Barang Olah Komoditi Ekspor (Bokor)	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/FGD/Perrek dengan <i>stakeholder</i> terkait mutu BOKOR	Layanan Publik	MOT-04.06.CFM.01.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Olah Komoditi Ekspor (BOKOR)
			Permintaan <i>confirmation letter</i> terkait SIR	Layanan Publik	MOT-04.06.CFM.01.SOP.02 Penerbitan Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR
	MOT-.04.07 Standar Acuan Fisik Komoditi & Pemantauan Mutu Komoditi Ekspor	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Mendistribusikan buku contoh karet ke <i>stakeholder</i>	Layanan Publik	MOT-04.07.CFM.01.SOP.01 Penyusunan & Pengesahan Standar Buku Contoh Karet
MOT-05 perbaikan Iklim Usaha Perdagangan	MOT-05.01 pengendalian Ekspor dan Impor	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor	<i>Monitoring</i> dan evaluasi ekspor-impor	Administrasi Pemerintahan	MOT-05.01.CFM.01.SOP 01 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Ekspor dan Impor
		Direktorat Ekspor Produk	Fasilitasi Pelaporan hasil evaluasi	Administrasi Pemerintahan	MOT-05.01.CFM.01.SOP 01

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
		Industri dan Pertambangan	kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri		<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Ekspor dan Impor
		Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	Fasilitasi Pelaporan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Administrasi Pemerintahan	MOT-05.01.CFM.01.SOP 01 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Ekspor dan Impor
		Direktorat Impor	Fasilitasi Pelaporan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Administrasi Pemerintahan	MOT-05.01.CFM.01.SOP 01 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Ekspor dan Impor
	MOT-05.02 Perbaikan Iklim Usaha Dalam Negeri	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor	Fasilitasi media elektronik yang menghubungkan <i>Stakeholder</i> penerbitan SKA, dan membantu mempercepat proses penerbitan SKA	Layanan Publik	MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perijinan/ Non Perizinan Kepada Dunia Usaha

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
		Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Layanan Data Distributor Bapok dan Stok	Administrasi Pemerintahan	MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perijinan/Non Perijinan Kepada Dunia Usaha
		Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi	Fasilitasi <i>call center</i> , konsultasi, layanan bagi pakai data perizinan dengan OSS, perizinan	Layanan Publik	MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perijinan/Non Perijinan Kepada Dunia Usaha
	MOT-05.03 Peningkatan Nilai Tambah Produk	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Fasilitasi layanan Pendistribusian Data	Administrasi Pemerintahan	MOT-05.03.CFM.01.SOP.01 Peningkatan Nilai Tambah Produk
			Layanan transfer <i>knowledge</i> dan layanan legalitas usaha	Layanan Publik	MOT-05.03.CFM.01.SOP.01 Peningkatan Nilai Tambah Produk
	MOT-05.04 Perdagangan Yang Berkelanjutan	Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	Fasilitasi proses penetapan HPE berdasarkan harga rata-rata pada bursa internasional	Layanan Publik	MOT-05.04.CFM.01.SOP.01 Harga Patokan Ekspor (HPE)
	MOT-05.05 Peningkatan Peran Sektor Perdagangan	Langsung ditangani oleh Kementerian	Memberikan pedoman teknis bagi pengusul	Administrasi Pemerintahan	MOT-05.05.CFM.01.SOP 01

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
	Di Kawasan Ekonomi Khusus	Perdagangan dan Dewan Nasional (Satuan Kerja terkait belum teridentifikasi)	mengenai tata cara, pengusulan KEK Memberikan gambaran mengenai mekanisme proses seleksi usulan sampai dengan penetapan lokasi KEK		Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (Dalam Hal Usulan Dari Pemerintah)
		Langsung ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan Dewan Nasional (Satuan Kerja terkait belum teridentifikasi)	SOP belum teridentifikasi	SOP belum teridentifikasi	MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 <i>Monitoring Dan Evaluasi Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Di Kek</i>
	MOT-05.06 Pengembangan Fasilitas Ekspor - Impor	Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor	Fasilitasi pelayanan penerbitan dokumen SKA kepada pelaku usaha melalui sistem E-SKA, Memfasilitasi	Layana Publik	MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) Untuk Barang Ekspor Indonesia

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			Penjualan <i>form</i> SKA di IPSKA.		
	MOT-05.07 Pembinaan dan Pengawasan SRG, dan PI dan PBK,	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Layanan Pengelolaan profil Pelaku Usaha PBK, SRG, PLK	Administrasi Pemerintahan	MOT - 05.07.CFM.01.SOP.01 Pembinaan PBK, SRG dan PI
		Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Layanan perizinan PBK, layanan persetujuan SRG, layanan penyelenggaraan PLK (pendaftaran peserta, transaksi), Layanan informasi publik	Layanan publik	MOT - 05.07.CFM.01.SOP.01 Pembinaan PBK, SRG dan PI
		Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Layanan pengawasan lembaga, pelaku usaha dan transaksi PBK, layanan pengawasan SRG, pengawasan data transaksi PLK	Administrasi Pemerintahan	MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PL

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
		Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Layanan pelaporan lembaga, pelaku usaha PBK, Layanan pelaporan lembaga SRG	Layanan publik	MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PL
		Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Layanan pengkajian produk dan kelembagaan PBK/SRG/PLK	Administrasi Pemerintahan	MOT - 05.07.CFM.03.SOP.01 Pengembangan PBK, SRG dan PL
		Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Layanan informasi publik	Layanan publik	MOT - 05.07.CFM.03.SOP.01 Pengembangan PBK, SRG dan PL
	MOT-05.08 Pemulihan Iklim Usaha Perdagangan	Biro Advokasi Perdagangan (Komite Anti Dumping Indonesia (KADI))	Penyelidikan tindakan anti dumping	Layanan publik	MOT-05.08.CFM.01.SOP.01 Penyelidikan Tindakan Anti Dumping
	Biro Advokasi Perdagangan (Komite Anti Dumping)	Penyelidikan Tindakan Imbalan	Layanan publik	MOT-05.08.CFM.02.SOP.01 Penyelidikan Tindakan Imbalan	

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
		Indonesia (KADI)			
		Biro Advokasi Perdagangan (Komite Anti Dumping Indonesia (KADI))	Penyelidikan <i>Safeguard</i>	Layanan publik	MOT-05.08.CFM.03.SOP.01 Penyelidikan <i>Safeguard</i>
MOT-06 Pengembangan Akses Pasar	MOT-06.01 Diplomasi Perdagangan	Sekretariat Ditjen	Memfasilitasi persiapan posisi runding Indonesia di semua sektor, konsultasi publik, informasi publik, sosialisasi hasil perundingan dan kesepakatan perdagangan internasional	Layanan publik	MOT-06.01.CFM.01.SOP.01 Leading sector perundingan perdagangan internasional
		Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	Layanan perundingan bidang internasional	Administrasi Pemerintahan	MOT-06.01.CFM.01.SOP.02 Menghadiri dan melakukan perundingan bidang internasional

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
		Sekretariat Ditjen	Informasi publik, penerjemahan, sosialisasi	Layanan publik	MOT-06.01.CFM.01.SOP.03 Usulan pengesahan perjanjian dan/atau kesepakatan perjanjian internasional
MOT - 07 Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)	MOT-07.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat Data dan Sistem Informasi	Layanan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Administrasi Pemerintahan	MOT - 07.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi
	MOT-07.02 Pengelolaan dan Pelayanan Permintaan Data	Pusat Data dan Sistem Informasi	Memfasilitasi Pengelolaan Dan Pelayanan Permintaan Data	Administrasi Pemerintahan	MOT - 07.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Dan Pelayanan Permintaan Data
	MOT-07.03 Pengelolaan Aplikasi	Pusat Data dan Sistem Informasi	Memfasilitasi Pengelolaan Aplikasi	Administrasi Pemerintahan	MOT - 07.03.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Aplikasi
	MOT-07.04 Pengelolaan Keamanan Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi	Memfasilitasi Pengelolaan Keamanan Informasi	Administrasi Pemerintahan	MOT - 07.04.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Keamanan Informasi

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
MOT-08 pelayanan Informasi dan Publikasi	MOT-08.01 Pengelolaan Informasi, Publikasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Biro Hubungan Masyarakat	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek	Layanan Publik	MOT-08.01.CFM.02.SOP.01 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
		Biro Hubungan Masyarakat	Layanan Publikasi	Layanan Publik	MOT-08.01.CFM.01.SOP.02 Publikasi
		Biro Hubungan Masyarakat	Memfasilitasi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Layanan Publik	MOT-08.01.CFM.02.SOP.01 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
	MOT-08.02 Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan	Biro Hubungan Masyarakat	Memfasilitasi Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak Dan Elektronik	Layanan Publik	MOT-08.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak Dan Elektronik
	MOT-08.03 Pelayanan Perpustakaan	Biro Hubungan Masyarakat	Memfasilitasi Pelayanan Perpustakaan	Layanan Publik	MOT-08.03.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perpustakaan
MOT-08.04 Pengelolaan Komunikasi Dalam Situasi Krisis	Biro Hubungan Masyarakat	Layanan Komunikasi	Layanan Publik	MOT-08.04.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Komunikasi Dalam Situasi Krisis	
MOT - 09	MOT - 09.01 Pengkajian dan Pengembangan	Badan Pengkajian dan	Pemberian rekomendasi kebijakan kepada	Administrasi Pemerintahan	MOT - 09.01.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Kajian

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis	
Riset dan Pengembangan	Kebijakan Perdagangan	Pengembangan Perdagangan	Pimpinan atau Unit Teknis Kementerian Perdagangan			
MOT – 10 Pengelolaan Administrasi dan Umum	MOT -10.01 Pengelolaan Arsip	Biro Umum	Layanan Pengelolaan Arsip	Administrasi Pemerintahan	MOT -10.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Arsip	
	MOT -10.02 Pengelolaan K3L	Biro Umum	Memfasilitasi Pengelolaan K3L	Administrasi Pemerintahan	MOT -10.01.CFM.02.SOP.01 Pengelolaan K3L	
	MOT -10.03 Pengelolaan Keprotokolan	Biro Umum	Pengelolaan Keprotokolan	Administrasi Pemerintahan	MOT -10.01.CFM.02.SOP.01 Pengelolaan Keprotokolan	
	MOT-10.04 Pengelolaan BMN		Biro Keuangan	Koordinasi terkait penatausahaan BMN	Administrasi Pemerintahan	MOT-10.04.CFM.01.SOP.02 Penatausahaan BMN
				Koordinasi terkait penggunaan dan pemanfaatan BMN	Administrasi Pemerintahan	MOT-10.04.CFM.01.SOP.04 Penggunaan dan Pemanfaatan BMN
				Koordinasi terkait penghapusan dan pemindahtanganan BMN	Administrasi Pemerintahan	MOT-10.04.CFM.01.SOP.04 Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN
	MOT-11	MOT-11.01	Biro Kepegawaian	Penyusunan Formasi Pegawai	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.01.CFM.01.SOP.01

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
Pengelolaan SDM	Pengadaan SDM				Penyusunan Formasi Pegawai
		Biro Kepegawaian	Pengangkatan PNS	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.01.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Rekrutmen CPNS
		Biro Kepegawaian	Pelaksanaan Rekrutmen CPNS	Layanan Publik	MOT-11.01.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Rekrutmen CPNS
		Biro Kepegawaian	Memfasilitasi Penyusunan Formasi Pegawai	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.01.CFM.01.SOP.03 Pengangkatan PNS
	MOT-11.02 Pembinaan dan Pengembangan SDM	Biro Kepegawaian	Memfasilitasi Pengelolaan Kinerja Pegawai	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Kinerja Pegawai
		Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perdagangan	Memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kementerian Perdagangan	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kementerian Perdagangan
		Biro Kepegawaian	Memfasilitasi Pengelolaan Jabatan Fungsional	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.02.CFM.01.SOP.03 Pengelolaan Jabatan Fungsional
		Biro Kepegawaian	Memfasilitasi Penjatuhan Hukuman Disiplin	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.02.CFM.02.SOP.01

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil		Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
		Unit pembina Jabfung	Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Uji Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.02.CFM.03.SOP.01 Uji Kompetensi Jabatan Fungsional dibawah Pembinaan Kemendag
		Unit pembina Jabfung	Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional penguji mutu barang	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.02.CFM.03.SOP.02 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah Pembinaan Kemendag
		Unit pembina Jabfung	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kebijakan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.02.CFM.03.SOP.05 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Jabatan Fungsional dibawah Pembinaan Kemendag
		Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan	Memfasilitasi Pelaksanaan Forum/ <i>Event</i> Internasional	Layanan Publik	MOT-11.02.CFM.04.SOP.01 Pelaksanaan Forum/ <i>Event</i> Internasional
		MOT-11.03	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan	Memfasilitasi Pelaksanaan Diklat	Administrasi Pemerintahan

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
	Pengembangan SDM <i>Stakeholder</i> Perdagangan	Perdagangan, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	<i>Stakeholder</i> Perdagangan		Pelaksanaan Diklat <i>Stakeholder</i> Perdagangan
	MOT-11.04 Administrasi dan Informasi Kepegawaian	Biro Kepegawaian	Pengembangan Standar Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
	MOT-11.05 Pengembangan Standar Kompetensi	Biro Kepegawaian	Memfasilitasi Pengembangan Standar Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.05.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Standar Kompetensi
	MOT-11.06 <i>Assessment Center</i>	Biro Kepegawaian	<i>Assessment Center</i>	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.06.CFM.01.SOP.01 <i>Assessment Center</i>
	MOT-11.07 Pengelolaan Sdm Perwakilan Perdagangan Di Luar Negeri	Biro Kepegawaian	Pengelolaan SDM Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.07.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Sdm Perwakilan Perdagangan Di Luar Negeri
MOT-12 Layanan Hukum	MOT-12.01	Biro Hukum	Mempelajari dan mengumpulkan bahan/data yang terkait	Administrasi Pemerintahan	MOT-12.01.CFM.01.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Di Badan Peradilan

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
	Pemberian Pelayanan Hukum Non Litigasi		gugatan/permohonan yang diberikan, serta melakukan koordinasi dengan unit Eselon I dan Eselon II yang digugat		Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara
		Biro Hukum	Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang digugat	Layanan Publik	MOT-12.01.CFM.01.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Di Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara
		Biro Hukum	Menyiapkan data, alat bukti dan informasi, mempersiapkan Keterangan Pemerintah, menyiapkan Saksi Ahli bersama Eselon I, Eselon II, Eselon III terkait permohonan Hak Uji Materiil yang akan diajukan di	Administrasi Pemerintahan	MOT-12.01.CFM.02.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Konstitusi

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			Mahkamah Konstitusi		
		Biro Hukum	Menyiapkan data, alat bukti dan informasi, mempersiapkan Keterangan Pemerintah, menyiapkan Saksi Ahli bersama Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait permohonan Hak Uji Materiil yang akan diajukan di Mahkamah Konstitusi	Layanan Publik	MOT-12.01.CFM.02.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Konstitusi
		Biro Hukum	Menyiapkan data, alat bukti dan informasi, menyiapkan Jawaban Permohonan dan Akta Bukti, menyampaikan	Administrasi Pemerintahan	MOT-12.01.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Agung

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			Jawaban dan Akta Bukti terkait Hak Uji Materiil peraturan perundang-undangan bersama dengan Eselon I, Eselon II, Eselon III ke Mahkamah Agung		
		Biro Hukum	Menyiapkan data, alat bukti dan informasi, menyiapkan Jawaban Permohonan dan Akta Bukti, menyampaikan Jawaban dan Akta Bukti terkait Hak Uji Materiil peraturan perundang-undangan bersama dengan Kementerian / Lembaga Pemerintah Non		MOT-12.01.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Agung

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			Kementerian ke Mahkamah Agung		
	MOT-12.02 Pemberian Bantuan Hukum Litigasi	Biro Hukum	Memfasilitasi Konsultasi dan Telaah Hukum (<i>Legal Opinion</i>) Bidang Perdagangan	Administrasi Pemerintahan Layanan Publik	MOT-12.02.CFM.01.SOP.01 Pemberian Konsultasi dan Telaah Hukum (<i>Legal Opinion</i>) Bidang Perdagangan
		Biro Advokasi Perdagangan	Memfasilitasi Pemberian Konsultasi dan Opini Hukum Bidang Perdagangan Internasional	Administrasi Pemerintahan Layanan Publik	MOT-12.02.CFM.01.SOP.02 Pemberian Konsultasi dan Opini Hukum Bidang Perdagangan Internasional

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
		Biro Advokasi Perdagangan	Memfasilitasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Rangka Pengamanan Peraturan Nasional Di Bidang Perdagangan Internasional	Administrasi Pemerintahan Layanan Publik	MOT-12.02.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Dalam Rangka Pengamanan Peraturan Nasional Di Bidang Perdagangan Internasional
		Biro Advokasi Perdagangan	Memfasilitasi pemberian Opini Hukum Terkait Kesesuaian Kebijakan Negara Mitra Dagang Dengan Komitmen Perjanjian Perdagangan Internasional	Administrasi Pemerintahan Layanan Publik	MOT-12.02.CFM.04.SOP.01 pemberian Opini Hukum Terkait Kesesuaian Kebijakan Negara Mitra Dagang Dengan Komitmen Perjanjian Perdagangan Internasional
MOT-13 pengelolaan Rencana & Anggaran	MOT-13.01 Penyusunan Rencana Kerja	Biro Perencanaan	Memfasilitasi koordinasi penyusunan renstra	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.01.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			Memfasilitasi koordinasi penyusunan rencana kinerja, bimtek Penyusunan Rencana Kinerja, Input data renja ke Aplikasi KRISNA, dan Penelitian Rencana Kinerja	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.01.CFM.02.SOP.01 Penetapan Rencana Kerja
			Memfasilitasi koordinasi penyusunan RKA, Penelitian RKA, dan Koordinasi Revisi RKA	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.01.CFM.02.SOP.02 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
	MOT-13.02 Pengelolaan Keuangan	Biro Keuangan	Memfasilitasi penyusunan SK pengelola keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.-2.CFM.01.SOP01 Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan
	Penyediaan data realisasi anggaran dan data monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran		

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			anggaran Kementerian Perdagangan		
			Koordinasi penyusunan laporan keuangan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, pendampingan pemeriksaan BPK- RI	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan
	MOT-13.03 Evaluasi dan Pelaporan	Biro Perencanaan	Fasilitasi layanan iput data <i>Monitoring</i>	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.03.CFM.01.SOP.01 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Program
			Memfasilitasi layanan koordinasi Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.03.CFM.01.SOP.02 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
	MOT-13.04 PENGELOLAAN PNBP	Biro Keuangan	Koordinasi terkait revisi PP tarif PNBP	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan PP tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			Koordinasi terkait perencanaan target dan Pagu PNB	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.04.CFM.01.SOP.02 Perencanaan target PNB & penetapan Pagu
			Koordinasi terkait revisi target dan Pagu PNB	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.04.CFM.01.SOP.03 Revisi target dan Pagu PNB
	MOT-13.05 Administrasi Bantuan Negeri Kementerian Perdagangan	Biro Perencanaan	Memfasilitasi layanan Koordinasi Administrasi Hibah yang direncanakan	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.05.CFM.01.SOP.02 Administrasi Hibah Yang Direncanakan
			Memfasilitasi layanan Koordinasi Administrasi Hibah Langsung	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.05.CFM.01.SOP.03 Administrasi Hibah Langsung
MOT-14 Organisasi	Penataan MOT-14.01 Penataan Organisasi	Biro Kepegawaian	Analisis Beban Kerja	Administrasi Pemerintahan	MOT-14.01.CFM.01.SOP.01 Analisis Beban Kerja
		Biro Kepegawaian	Penataan Kelembagaan	Administrasi Pemerintahan	MOT-14.01.CFM.01.SOP.02 Penataan Kelembagaan
		Biro Kepegawaian	Analisa dan Evaluasi Jabatan	Administrasi Pemerintahan	MOT-14.01.CFM.01.SOP.03 Analisa dan Evaluasi Jabatan

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis	
MOT-15 Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Manajemen dan Pengawasan	MOT-15-01 Pengelolaan Manajemen Kinerja	Biro Perencanaan	Memfasilitasi Pengelolaan Manajemen Kinerja	Administrasi Pemerintahan	MOT-15.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Manajemen Kinerja	
	MOT-15.02 Pengelolaan Tinjauan Manajemen	Biro Perencanaan	Memfasilitasi Pengelolaan Tinjauan Manajemen	Administrasi Pemerintahan	MOT-15.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Tinjauan Manajemen	
	MOT-15.03 Pengawasan Internal	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Memfasilitasi layanan Audit	Administrasi Pemerintah	MOT-15.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal
				Memfasilitasi Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	Administrasi Pemerintah	MOT-15.03.CFM.02.SOP.01 Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
				Memfasilitasi proses pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Administrasi Pemerintah	MOT-15.03.CFM.02.SOP.02 Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
				Memfasilitasi proses pengawasan lainnya (WTA, Pengaduan internal/WBS (<i>Whistle Blowing System</i>), SPIP)	Administrasi Pemerintah	MOT-15.03.CFM.03.SOP.01 Pelaksanaan Wilayah Tertib Administrasi (WTA)

Fungsi	Sub Fungsi	Unit Bisnis	Dukungan Layanan	Jenis Layanan	Dukungan Probis
			(Sistem Pengendalian Intern Pemerintah))		
		Semua unit kerja (Pusat Layanan Pengaduan)	Memfasilitasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Layanan Publik	MOT-15.03.CFM.03.SOP.01 Pelayanan Pengaduan Masyarakat
	MOT-15.04 Pengukuran dan Pengelolaan Kepuasan Stakeholder	Semua Unit Kerja	Layanan <i>survey</i> kepuasan pelanggan masyarakat terhadap kinerja pelayanan di lingkungan Kementerian Perdagangan.	Layanan Publik	MOT-15.04.CFM.05.SOP.01 Pelaksanaan Survei Kepuasan Stakeholder
	MOT-15.05 Pengendalian Dokumen	Biro Kepegawaian	Memfasilitasi Pengendalian Dokumen	Administrasi Pemerintah	MOT-15.05.CFM.05.SOP.01 Pengendalian Dokumen
	MOT-15.06 Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Program Khusus	Biro Hukum	Memfasilitasi Koordinasi Implementasi Kebijakan Dan Program Khusus	Administrasi Pemerintah	MOT-15.05.CFM.06.SOP.01 Koordinasi Implementasi Kebijakan Dan Program Khusus

Lampiran 7 Pemetaan Fungsi Bisnis Terhadap Aplikasi dan Jenis Layanan

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
MOT-01. Pengelolaan Peraturan Perundang- Undangan	MOT-01.01. Undang- Undang Bidang Perdagangan	-	-	-	-
	MOT-01.02. Kepesertaan Pembahasan Harmonisasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-
	MOT-01.03 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan	<i>Website</i> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Melakukan pembahasan bersama Sekretaris Jenderal, Eselon I, Eselon II serta menyampaikan net Rancangan Peraturan Pelaksana Undang- Undang Bidang Perdagangan kepada Menteri Perdagangan	Administrasi Pemerintahan	MOT-01.03.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Bidang Perdagangan

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			melalui Sekretaris Jenderal		
		Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Melakukan pembahasan antar Kementerian serta menyampaikan net Konsep Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan kepada Sekretaris Jenderal untuk dilaporkan kepada Menteri Perdagangan dan disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan proses harmonisasi	Layanan Publik	MOT-01.03.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan
	MOT-01.04. Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan	Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	- Melakukan penelaahan konsep Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan berdasarkan aspek hukum dan legal <i>drafting</i> - Membuat Salinan Peraturan/Keputusan	Administrasi Pemerintahan	MOT-01.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			Menteri Perdagangan untuk diteruskan ke Unit Eselon II pemrakarsa		
		<i>Website</i> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Melakukan pembahasan konsep Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan bersama Pejabat Eselon II Kementerian Perdagangan, Sekretaris Jenderal/Pejabat Eselon I, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait	Layanan Publik	MOT-01.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan
	MOT-01.05. Peraturan Kepala BAPPEBTI	Digitalisasi peraturan	Pengarsipan/digitalisasi dokumen PERKA (Penyusunan Peraturan Kepala BAPPEBTI)	Administrasi Pemerintahan	MOT-01.05.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Kepala Bapebbti
	MOT-01.06. Peraturan Di Bidang Jabatan Fungsional Di Bawah Pembinaan Kemendag	Aplikasi Manajemen Jabatan	Informasi dan pendaftaran bidding Jabatan Eselon I dan II	Administrasi Pemerintahan	MOT-01.06.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Di Bidang Jabatan Fungsional Di bawah Pembinaan Kemendag

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
	MOT-01.07. Penyusunan Perjanjian	<i>Website</i> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Melakukan penelaahan konsep perjanjian	Administrasi Pemerintahan	MOT-01.07.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Perjanjian
MOT-02 Pengamanan Pasar Dalam Negeri	MOT-02.01 Pengawasan Barang dan Jasa	-	-	-	-
	MOT-02.02 Penyediaan Standar Acuan	-	-	-	-
	MOT-02.03 Koordinasi nasional Perlindungan Konsumen	-	-	-	-
	MOT-02.04 Pemberdayaan Konsumen	Portal Konsumen Nasional dan Portal Bangsa Buatan Indonesia	<i>Channel</i> /saluran pengaduan untuk menyampaikan pengaduan, pertanyaan dan informasi atas permasalahan yang sedang terjadi	Layanan Publik	MOT-02.04.CFM.02.SOP.01 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Konsumen

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
		Siswa SPK	Channel/saluran pengaduan untuk menyampaikan pengaduan, pertanyaan dan informasi atas permasalahan yang sedang terjadi	Layanan Publik	MOT-02.04.CFM.02.SOP.01 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Konsumen
	MOT-02-05 Pengawasan Barang dan Jasa Di Pasar	Post Border	Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981	Layanan Publik	MOT-02.05.CFM.01.SOP.01 Pengawasan Barang dan Jasa Yang Beredar di Pasar
	MOT-02-06 Pelayanan K metrologian	Aplikasi Perizinan Online (SPPK)	Penerbitan Sertifikasi Izin Tipe/Tanda Pabrik (IT/ITP) Penerbitan Rekomendasi Impor Barang (contoh alat	Layanan Publik	MOT-02.06.CFM.01.SOP.01 Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik untuk UTTP

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)), Penerbitan Surat Keterangan Barang Tidak Wajib Izin Tipe, Penerbitan Label Tipe		
		Sistem Informasi Pelayanan UPTP IV	Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKP)	Layanan Publik	MOT-02.06.CFM.02.SOP.01 Pengujian UTTP, Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi
		Sistem Informasi Pelayanan Metrologi Nasional	Pelaporan Bulanan Tera/ Tera Ulang, Laporan Retribusi, Pemantauan Pelaporan Unit Metrologi Legal (UML)	-	Pelaporan Tera/ Tera Ulang (SOP yang tercantum pada Permendag No 8 Tahun 2016)
		e-Assessment (Unit Metrologi Legal)	Pelaporan Penilaian/ Surveillance Uml	Eksternal	Penilaian dan Surveillance Unit Metrologi Legal
MOT-03 Menjaga Ketersediaan Bahan	MOT-03.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok	Sistem Pemantuan Pasar Kebutuhan pokok (SP2KP)	Layanan Data Harga dan Stok Bapokting	Layanan Publik	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
Pokok & Penguatan Jaringan Distribusi	MOT-03.02 Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok & Penguatan Jaringan Distribusi	Sistem Informasi P asar Rakyat	Fasilitasi pengelolaan pasar dan Dinas pada kab/kota di seluruh indonesia yang membidangi perdagangan	Layanan Publik	MOT03.02.CFM.01.SOP.01 Penataan JaringanDistribusi/ pengembangan sarana distribusi
MOT-04 Peningkatan Ekspor Non Migas	MOT-04.01 Pengembangan Pasar Ekspor	<i>Websitesite</i> Membership Services	Memfasilitasi proses pendaftaran Membership	Layanan Publik	MOT-04.01.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Pasar Ekspor
		<i>Websitesite</i> <i>Database</i> Ekspor dan Importir	Mengelola data terkait eksportir dan importir	Layanan Publik	MOT-04.01.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Pasar Ekspor
		Aplikasi Peta Pasar	Memberikan informasi terkait lokasi peta pasar	Layanan Publik	MOT-04.01.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Pasar Ekspor
	MOT-04.02 Pengembangan Produk Ekspor	<i>Database</i> Hambatan Perdagangan	Melayani proses terkait Tuduhan Subsidi	Layanan Publik	MOT-04.04.CFM.02.SOP.01 Penanganan Tuduhan Subsidi
	MOT-04.03 Pengembangan Citra	<i>Websitesite</i> TEI	-	Layanan Publik	MOT-04.03.CFM.01.SOP.01 Promosi

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
	MOT-04.04 Penanganan Tuduhan <i>Dumping</i> , Subsidi, <i>Safeguard</i>	<i>Database</i> Hambatan Perdagangan	Melayani proses terkait Tindakan <i>Safeguard</i>	Layanan Publik	MOT-04.04.CFM.03.SOP.01 Penanganan Tindakan <i>Safeguard</i>
	MOT-04.05 Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif	<i>Database</i> Hambatan Perdagangan	Fasilitasi Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	Layanan Publik	MOT-04.05.CFM.02.SOP.01 Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan
		<i>Database</i> Hambatan Perdagangan	Fasilitasi Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	Layanan Publik	MOT-04.05.CFM.01.SOP.01 Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif
	MOT-04.06 Pengawasan Mutu Barang Olah Komoditi Ekspor (Bokor)				
	MOT-.04.07 Standar Acuan Fisik Komoditi & Pemantauan Mutu Komoditi Ekspor				
MOT-05 perbaikan Iklim Usaha Perdagangan	MOT-05.01 pengendalian Ekspor dan Impor				

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
	MOT-05.02 Perbaikan Iklim Usaha Dalam Negeri	SIPT (Sistem Perizinan Informasi Terpadu)	Call center, konsultasi, layanan bagi pakai data perizinan dengan OSS, perizinan	Layanan Publik	BINUS: MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perijinan /Non Perijinan Kepada Dunia Usaha
		Aplikasi Logo Waralaba (QR Code)	Call center, konsultasi, layanan bagi pakai data perizinan dengan OSS, pemrosesan perizinan waralaba dan MLM	Layanan Publik	Binus: Distribusi Langsung (SOP yang tercantum pada Permendag No 8 Tahun 2016)
		Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT)	Call Center, Konsultasi, Layanan Bagi Pakai Data Perizinan Dengan OSS, Perizinan	Layanan Publik	MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perijinan/Non Perijinan Kepada Dunia Usaha
		Sistem Penerbitan Surat Keterangan Asal / E-SKA	Fasilitas media elektronik yang menghubungkan Stakeholder penerbitan SKA, dan membantu mempercepat proses penerbitan SKA	Layanan Publik	MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perijinan / Non Perijinan Kepada Dunia Usaha

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
		Sistem Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan / E-Trade Financing	Fasilitasi pelaku usaha untuk melakukan pengajuan pembiayaan kepada perbankan nasional	Layanan Publik	Sistem pembiayaan dan pembayaran (Permendag Nomor 8 Tahun 2016)
	MOT-05.03 Peningkatan Nilai Tambah Produk	Portal Etalase Produk Indonesia	Layanan Pendistribusian Data	Administrasi Pemerintahan	MOT05.03.CFM.01.SOP.01 Peningkatan Nilai Tambah Produk
Layanan transfer <i>knowledge</i> & layanan legalitas usaha		Layanan Publik			
Portal-Indonesia.Id		Layanan Pendistribusian Data	Internal dan Layanan Publik	MOT-05.03.CFM.01.SOP.01 Peningkatan Nilai Tambah Produk	
Layanan transfer <i>knowledge</i> & layanan legalitas usaha					
	MOT-05.04 Perdagangan Yang Berkelanjutan				
	MOT-05.05 Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus				

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
	MOT-05.06 Pengembangan Fasilitasi Ekspor - Impor	Aplikasi Distribusi SKA	Memfasilitasi Pelayanan Penerbitan Dokumen SKA	Layanan Publik	MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) Untuk Barang Ekspor Indonesia
		E-Payment	Memfasilitasi Pelayanan Penerbitan Dokumen SKA	Layanan Publik	MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) Untuk Barang Ekspor Indonesia
		E-Blanko	Memfasilitasi Pelayanan Penerbitan Dokumen SKA	Layanan Publik	MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) Untuk Barang Ekspor Indonesia
		Inatrade	Fasilitasi pelayanan penerbitan dokumen SKA kepada pelaku usaha melalui sistem E-SKA,	Eksternal	MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			Memfasilitasi Penjualan form SKA di IPSKA.		(Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia 10
	MOT-05.07 Pembinaan dan Pengawasan PBK, SRG, dan PI				
	MOT-05.08 Pemulihan Iklim Usaha Perdagangan	-	-	-	-
MOT-06 Pengembangan Akses Pasar	MOT-06.01 Diplomasi Perdagangan	Aplikasi MIS			
		Website Ditjen PPI			
		Website FTA Center			
		IORA WEB Trade			
MOT - 07 Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)	MOT-07.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi				
	MOT-07.02 Pengelolaan dan				

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
	Pelayanan Permintaan Data				
	MOT-07.03 Pengelolaan Aplikasi				
	MOT-07.04 Pengelolaan Keamanan Informasi				
MOT-08 pelayanan Informasi dan Publikasi	MOT-08.01				
	Pengelolaan Informasi, Publikasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis				
	MOT-08.02 Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan				
	MOT-08.03 Pelayanan Perpustakaan				
	MOT-08.04 Pengelolaan				

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
	Komunikasi Dalam Situasi Krisis				
MOT - 09 Riset dan Pengembangan	MOT - 09.01 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan	-	-	-	-
MOT - 10 Pengelolaan Administrasi dan Umum	MOT -10.01 Pengelolaan Arsip				
	MOT -10.02 Pengelolaan K3L				
	MOT -10.03 Pengelolaan Keprotokolan				
	MOT-10.04 Pengelolaan BMN	Persediaan	Koordinasi terkait penatausahaan BMN	Layanan Administrasi Pemerintahan	MOT-10.04.CFM.01.SOP.02 Penatausahaan BMN
		SIMAN	Koordinasi terkait penatausahaan BMN	Layanan Administrasi Pemerintahan	MOT-10.04.CFM.01.SOP.02 Penatausahaan BMN

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			Koordinasi terkait penggunaan dan pemanfaatan BMN	Layanan Administrasi Pemerintahan	MOT-10.04.CFM.01.SOP.03 Penggunaan dan Pemanfaatan BMN
			Koordinasi terkait penghapusan dan pemindahtanganan BMN	Layanan Administrasi Pemerintahan	MOT-10.04.CFM.01.SOP.04 Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN
		SIMAK	Koordinasi terkait penatausahaan BMN	Layanan Administrasi Pemerintahan	MOT-10.04.CFM.01.SOP.02 Penatausahaan BMN
			Koordinasi terkait penggunaan dan pemanfaatan BMN	Layanan Administrasi Pemerintahan	MOT-10.04.CFM.01.SOP.03 Penggunaan dan Pemanfaatan BMN
			Koordinasi terkait penghapusan dan pemindahtanganan BMN	Administrasi Pemerintahan	MOT-10.04.CFM.01.SOP.04 Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN
MOT-11 Pengelolaan SDM	MOT-11.01 Pengadaan SDM	Aplikasi Rekrutmen	Layanan Pelaksanaan Rekrutmen CPNS	Layanan Publik	MOT-11.01.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Rekrutmen CPNS
			Pengangkatan PNS	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.01.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Rekrutmen CPNS

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
	MOT-11.02 Pembinaan dan Pengembangan SDM	e-Dupak Kemetrolagian	Pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.02.CFM.03.SOP.02 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah Pembinaan Kementrian Perdagangan
		Aplikasi Tunjangan Kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Kinerja Pegawai
		Aplikasi Penilaian Kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Kinerja Pegawai
		Aplikasi Pendaftaran Beasiswa Kemendag	Pelaksanaan Forum/ <i>Event</i> Internasional	Layanan Publik	MOT-11.02.CFM.04.SOP.01 Pelaksanaan Forum/Event Internasional
		Aplikasi Perpustakaan <i>Website</i> Pusdiklat	Inventarisasi kebutuhan diklat Pusat, Penyusunan kurikulum dan silabus dengan bidang terkait di Pusdiklat dan widyaiswara, Penyusunan dan pengajuan KAK dan RAB	Adminstrasi Pemerintahan	MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementeriaan Perdagangan

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			<p>antara Unit pusdiklt dengan Biro Perencanaan Kemendag, Penyusunan Modul Diklat, Persiapan Penyelenggaraan diklat di Puskidlat, Pelaksanaan tata cara pengadministrasian diklat, evaluasi penyelenggaraan diklat, penyusunan Laporan penyelenggaraan diklat, Monev pasca diklat di lingkungan Kemendag, Pengembangan Program Diklat</p>		
			<p>Analisi Kebutuhan Diklat, Penyusunan kurikulum dan silabus Bidang Non Aparatur Puskidlat, Penyusunan Proposal Diklat (TOR dan Pedoman), Perumusan Program Diklat Non</p>		

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			Aparatur, Persiapan Penyelenggaraan diklat Non Aparatur, Perekrutan Peserta Diklat, Perekrutan pengajar diklat, Pelaksanaan Diklat, Pemantauan Pelaksanaan Diklat, Penyusunan Laporan diklat, evaluasi pasca diklat.		
			Inventarisasi kebutuhan diklat Daerah, Penyusunan kurikulum dan silabus dengan lembaga konsultan, Penyusunan dan pengajuan KAK dan RAB antara Dirjen Anggaran Kemenkeu, Persiapan Penyelenggaraan diklat di luar Pusdiklat (daerah), evaluasi penyelenggaraan	Layanan Publik	MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Perdagangan

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			<p>diklat dengan lembaga pembina (LAN, Lembaga Teknis Lainnya), Monev pasca diklat di Dinas Perindustrian/Perdagangan Daerah, Pengembangan Program Diklat dengan lembaga lain,</p> <p>Analisi Kebutuhan Diklat bersama Narasumber, Penyusunan kurikulum dan silabus dengan Tim Ahli, Sosialisasi dan promosi Diklat melalui media cetak maupun elektronik, Perekrutan Peserta Diklat, Perekrutan Pengajar Diklat, Pelaksanaan Diklat, evaluasi pasca diklat dengan tim ahli, Layanan Pasca Diklat dengan tim ahli</p>		<p>MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Perdagangan</p>

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
	MOT-11.03 Pengembangan SDM <i>Stakeholder</i> Perdagangan	Aplikasi Perpustakaan <i>Website</i> Pusdiklat	Inventarisasi kebutuhan diklat Pusat, Penyusunan kurikulum dan silabus dengan bidang terkait di Pusdiklat dan widyaiswara, Penyusunan dan pengajuan KAK dan RAB antara Unit pusdiklt dengan Biro Perencanaan Kemendag, Penyusunan Modul Diklat, Persiapan Penyelenggaraan diklat di Pusdiklat, Pelaksanaan tata cara pengadministrasian diklat, evaluasi penyelenggaraan diklat, penyusunan Laporan penyelenggaraan diklat, Monev pasca diklat di lingkungan Kemendag, Pengembangan Program Diklat	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Stakeholder Perdagangan

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan kurikulum dan silabus Bidang Non Aparatur Puskdiklat, Penyusunan Proposal Diklat (TOR dan Pedoman), Perumusan Program Diklat Non Aparatur, Persiapan Penyelenggaraan diklat Non Aparatur, Perekrutan Peserta Diklat, Perekrutan pengajar diklat, Pelaksanaan Diklat, Pemantauan Pelaksanaan Diklat, Penyusunan Laporan diklat, evaluasi pasca diklat.		
		Aplikasi Perpustakaan <i>Website</i> Puskdiklat	Inventarisasi kebutuhan diklat Daerah, Penyusunan kurikulum dan silabus dengan	Layanan Publik	MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Stakeholder Perdagangan

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			lembaga konsultan, Penyusunan dan pengajuan KAK dan RAB antara Dirjen Anggaran Kemenkeu, Persiapan Penyelenggaraan diklat di luar Pusdiklat (daerah), evaluasi penyelenggaraan diklat dengan lembaga pembina (LAN, Lembaga Teknis Lainnya), Monev pasca diklat di Dinas Perindustrian/Perdagangan Daerah, Pengembangan Program Diklat dengan lembaga lain,		
			Analisi Kebutuhan Diklat bersama Narasumber, Penyusunan kurikulum dan silabus dengan Tim Ahli, Sosialisasi dan promosi Diklat melalui media cetak maupun elektronik, Perekrutan		

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			Peserta Diklat, Perekrutan Pengajar Diklat, Pelaksanaan Diklat, evaluasi pasca diklat dengan tim ahli, Layanan Pasca Diklat dengan tim ahli		
	MOT-11.04 Administrasi dan Informasi Kepegawaian	Aplikasi Pengajuan Cuti Online	Pengembangan Standar Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
		Aplikasi Restrukturisasi SIPEG	Pengembangan Standar Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
		Aplikasi SIPEG	Pengembangan Standar Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
		Aplikasi Sistem Recovery Database SIPEG	Pengembangan Standar Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
		Back Office ROPEG	Pengembangan Standar Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
		Database Restrukturisasi SIPEG	Pengembangan Standar Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
		Redesain Sistem Informasi ASN	Pengembangan Standar Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
		Aplikasi SIASN Mobile berbasis android	Pengembangan Standar Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
		Aplikasi dashboard fingerprint monitoring SIAP	Pengembangan Standar Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
		Aplikasi SIASN Mobile berbasis iOS	Pengembangan Standar Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
		Aplikasi Administrasi Pensiun Online	Pengembangan Standar Kompetensi	Administrasi Pemerintahan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
	MOT-11.05 Pengembangan Standar Kompetensi				

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
	MOT-11.06 <i>Assessment Center</i>				
	MOT-11.07 Pengelolaan Sdm Perwakilan Perdagangan Di Luar Negeri				
MOT-12 Layanan Hukum	MOT-12.01 Pemberian Pelayanan Hukum Non Litigasi				
	MOT-12.02 Pemberian Bantuan Hukum Litigasi	Aplikasi Basis Data Terkait Perjanjian Perdagangan Internasional (<i>Website Rovodag</i>)	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan	MOT-12.02.CFM.01.SOP.02 Pemberian Konsultasi dan Opini Hukum Bidang Perdagangan Internasional
					MOT-12.02.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Dalam Rangka Pengamanan Peraturan Nasional di Bidang Perdagangan Internasional

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
					MOT-12.02.CFM.04.SOP.01 Pemberian Opini Hukum Terkait Kesesuaian Kebijakan Negara Mitra Dagang dengan Komitmen Perjanjian Perdagangan Internasional
		Aplikasi Kuisisioner <i>Online</i>	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan	MOT-12.02.CFM.01.SOP.02 Pemberian Konsultasi dan Opini Hukum Bidang Perdagangan Internasional
					MOT-12.02.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Dalam Rangka Pengamanan Peraturan Nasional di Bidang Perdagangan Internasional
					MOT-12.02.CFM.04.SOP.01 Pemberian Opini Hukum Terkait Kesesuaian Kebijakan Negara Mitra Dagang dengan Komitmen

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
					Perjanjian Perdagangan Internasional
MOT-13 pengelolaan Rencana Anggaran	MOT-13.01 Penyusunan Rencana Kerja	Sistem Raker Kemendag	Koordinasi penyusunan Rencana Kinerja	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.01.CFM.02.SOP.01 Penetapan Rencana Kerja
		Sistem Informasi Manajemen Penganggaran	Penelitian RKA	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.01.CFM.02.SOP.02 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
	MOT-13.02 Pengelolaan Keuangan	SIPEG	Penyusunan SK Pengelola Keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan	I Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.01 Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan
	e-Rekon	Koordinasi terkait penyusunan Laporan Keuangan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, pendampingan pemeriksaan BPK-RI	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan	
	RKA-K/L	Penyediaan data realisasi anggaran dan data Monitoring dan Evaluasi	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Relasi Anggaran	

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan		
			Koordinasi penyusunan Keuangan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, pendampingan pemeriksaan BPK-RI	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan
		KRISNA	Penyediaan data realisasi anggaran dan data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran
			Koordinasi penyusunan Keuangan, pendampingan penyusunan laporan	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			keuangan, pendampingan pemeriksaan BPK-RI		
		e-Monev	Penyediaan data realisasi anggaran dan data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran
			Koordinasi terkait penyusunan Laporan Keuangan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, pendampingan pemeriksaan BPK-RI	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan
		SAS	Penyediaan data realisasi anggaran dan data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			Koordinasi terkait penyusunan Laporan Keuangan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, pendampingan pemeriksaan BPK-RI	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan
		SISKA	Penyediaan data realisasi anggaran dan data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran
			Koordinasi terkait penyusunan Laporan Keuangan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, pendampingan pemeriksaan BPK-RI	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan
		OMSPAN	Penyediaan data realisasi anggaran dan data Monitoring dan Evaluasi	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan		
			Koordinasi terkait penyusunan Laporan Keuangan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, pendampingan pemeriksaan BPK-RI	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan
		SISMON TERPA	Penyediaan data realisasi anggaran dan data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran
			Koordinasi terkait penyusunan Laporan Keuangan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, pendampingan pemeriksaan BPK-RI	Administrasi Pemerintahan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
	MOT-13.03 Evaluasi dan Pelaporan	Aplikasi E-Monitoring (Pelaporan Kinerja)	Layanan entry data e-Monitoring	Admistrasi Pemerintahab	MOT-13.03.CFM.01.SOP.01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
		Aplikasi Pelaporan Progress DAK Fisik	Layanan entry data e-Monitoring	Admistrasi Pemerintahab	MOT-13.03.CFM.01.SOP.01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
		e-Filling	Layanan entry data e-Monitoring	Admistrasi Pemerintahab	MOT-13.03.CFM.01.SOP.01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
		e-Box	Koordinasi Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Admistrasi Pemerintahab	MOT-13.03.CFM.01.SOP.02 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
MOT-13.04 PENGELOLAAN PNBP					
MOT-13.05 Administrasi Bantuan Luar Negeri Di Kementerian Perdagangan					

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
MOT-14 Penataan Organisasi	MOT-14.01 Penataan Organisasi	Aplikasi ABK Penyusunan	Analisa dan Evaluasi Jabatan	Administrasi Pemerintah	MOT-14.01.CFM.01.SOP.01 Analisis Beban Kerja
MOT-15 Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Manajemen dan Pengawasan	MOT-15-01 Pengelolaan Manajemen Kinerja				
	MOT-15.02 Pengelolaan Tinjauan Manajemen				
	MOT-15.03 Pengawasan Internal	Sistem / Aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan	Memfasilitasi layanan Audit	Administrasi Pemerintah	MOT-15.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal
		E-SIMPPEL (sistem informasi pelaporan kinerja perwakilan)	Memfasilitasi <i>Monitoring</i> , Evaluasi	Administrasi Pemerintah	MOT-15.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal
		<i>Wistle Blowing System</i> (WBS)	Memfasilitasi proses pengawasan lainnya (WTA, Pengaduan internal/WBS (<i>Whistle Blowing System</i>), SPIP	Administrasi Pemerintah	MOT-15.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
			(Sistem Pengendalian Intern Pemerintah))		
		Website Itjen	Memfasilitasi proses pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Administrasi Pemerintah	MOT-15.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal
		LHKASN (Laporan Harta Kekayaan ASN)	Memfasilitasi proses <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	Administrasi Pemerintah	MOT-15.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal
		LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Negara)	Memfasilitasi proses <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	Administrasi Pemerintah	MOT-15.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal
	MOT-15.04 Pengukuran dan Pengelolaan Kepuasan Stakeholder				
	MOT-15.05 Pengendalian Dokumen	Aplikasi Administrasi Berkas Digital	Layanan Doumentasi	Administrasi Pemerintah	MOT-15.05.CFM.05.SOP.01 Pengendalian Dokumen
		Aplikasi Manajemen Jabatan	Analisa dan Evaluasi Jabatan	Administrasi Pemerintah	MOT-14.01.CFM.01.SOP.03 Analisa dan Evaluasi Jabatan

Fungsi	Sub Fungsi	Nama Sistem Informasi	Layanan	Jenis Layanan	Proses Bisnis Terkait
	MOT-15.06 Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Program Khusus				

Lampiran 8 Arsitektur Aplikasi Kemendag Saat Ini

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
SETJEN	Biro Perencanaan	Aplikasi E- <i>Monitoring</i> (Pelaporan Kinerja)	Administrasi	Aktif	MOT-13.03.CFM.01.SOP.01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
	Biro Perencanaan	Aplikasi Pelaporan Progress DAK Fisik	Administrasi	Aktif	MOT-13.03.CFM.01.SOP.01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
	Biro Perencanaan	<i>E-Filling</i>	Administrasi	Aktif	MOT-13.03.CFM.01.SOP.01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
	Biro Perencanaan	Sistem Informasi JFP	Administrasi	Aktif	Belum teridentifikasi
	Biro Perencanaan	e-Box	Administrasi	Aktif	MOT-13.03.CFM.01.SOP.02 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
	Biro Perencanaan	Sistem Raker Kemendag	<i>Website/Portal</i> Berita	Aktif	MOT-13.01.CFM.02.SOP.01 Penetapan Rencana Kerja
	Biro Perencanaan	Sistem Informasi Manajemen Penganggaran	Administrasi	Aktif	MOT-13.01.CFM.02.SOP.02 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
	Biro Perencanaan	Sistem Informasi <i>Training</i> Luar Negeri	Administrasi	Tidak Aktif	MOT-13.05.CFM.01.SOP.03 Administrasi Hibah Langsung
	Biro Perencanaan	Sistem Pengelolaan dan Penganggaran Satker	Administrasi	Tidak Aktif	MOT-13.01.CFM.02.SOP.02 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Biro Perencanaan	Sistem <i>Review</i> Kemendag	Administrasi	Dihapuskan	MOT-13.01.CFM.02.SOP.02 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi Administrasi Berkas Digital	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak Aktif	MOT-15.05.CFM.05.SOP.01 Pengendalian Dokumen
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi Tata Naskah Ropeg	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak Aktif	-
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	<i>Database</i> Aplikasi Tata Naskah Ropeg	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak Aktif	-
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi Pendaftaran Beasiswa Kemendag	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik	Aktif, Tidak digunakan	MOT-11.02.CFM.04.SOP.01 Pelaksanaan Forum Internasional / <i>Event</i>

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi ABK Penyusunan	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik	Aktif, Tidak digunakan	MOT-14.01.CFM.01.SOP.01 Analisis Beban Kerja
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi Administrasi Pensiun Online	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik	Aktif, Tidak digunakan	MOT-14.01.CFM.01.SOP.03 Analisa dan Evaluasi Jabatan
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi Manajemen Jabatan	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik	Aktif, Tidak digunakan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Analisa dan Evaluasi Jabatan
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi Pengajuan Cuti Online	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik	Aktif, Tidak digunakan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi Penilaian Kinerja	Belum terdapat proses klasifikasi	Aktif, Tidak digunakan	MOT-11.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Kinerja Pegawai

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
			berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik		
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi Rekrutmen	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak Aktif	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi Restrukturisasi SIPEG	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik	Aktif, Tidak digunakan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi SIPEG	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak Aktif	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi Sistem Recovery Database SIPEG	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari	Aktif, Tidak digunakan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
			form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik		
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi Tunjangan Kinerja	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik	Aktif, Tidak digunakan	MOT-11.02.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Kinerja Pegawai
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Back Office ROPEG	Belum terdapat proses klasifikasi berdasarkan data yang diperoleh dari form <i>assessment</i> dan inventaris elektronik	Aktif, Tidak digunakan	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	<i>Database</i> Restrukturisasi SIPEG	Administrasi	Aktif	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Redesain Sistem Informasi ASN	Administrasi	Aktif	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi SIASN <i>Mobile</i> berbasis android	Administrasi	Aktif	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi <i>dashboard fingerprint monitoring</i> SIAP	Administrasi	Aktif	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Aplikasi SIASN Mobile berbasis iOS	Administrasi	Aktif	MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kepegawaian
	Biro Keuangan	Aplikasi Revisi Anggaran Kemendag	Administrasi	Tidak Aktif	-
	Biro Keuangan	Aplikasi Web dan Integrasi SISKAKemendag	Administrasi	Aktif, Tidak digunakan	-
	Biro Keuangan	SIPEG	Administrasi	Aktif	MOT-13.02.CFM.01.SOP.01 Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan
	Biro Keuangan	SIMAN	Administrasi	Aktif	MOT-10.04.CFM.01.SOP.02 Penatausahaan BMN
	Biro Keuangan				MOT-10.04.CFM.01.SOP.03 Penggunaan dan Pemanfaatan BMN
	Biro Keuangan				MOT-10.04.CFM.01.SOP.04 Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN
	Biro Keuangan	SIMAK	Administrasi	Aktif	MOT-13.02.CFM.01.SOP.01 Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan
	Biro Keuangan	SAIBA	Administrasi	Aktif	MOT-13.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan PP tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak
	Biro Keuangan	Persediaan	Administrasi	Aktif	MOT-10.04.CFM.01.SOP.02 Penatausahaan BMN

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Biro Keuangan	e-Rekon	Administrasi	Aktif	MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan
	Biro Keuangan	RKA-K/L	Administrasi	Aktif	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran
	Biro Keuangan				MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan
	Biro Keuangan	KRISNA	Administrasi	Aktif	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran
	Biro Keuangan				MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan
	Biro Keuangan	e-Monev	Administrasi	Aktif	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran
	Biro Keuangan				MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan
	Biro Keuangan	SAS	Administrasi	Aktif	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran
	Biro Keuangan				MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan
	Biro Keuangan	SISKA	Administrasi	Aktif	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran
	Biro Keuangan				MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan
	Biro Keuangan	OMSPAN	Administrasi	Aktif	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran
	Biro Keuangan				MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Biro Keuangan	SISMON TEPPRA	Administrasi	Aktif	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran
	Biro Keuangan				MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan
	Biro Hukum	Aplikasi Arsip Persuratan Biro Hukum	Substansi	Tidak Aktif	-
	Biro Hukum	Websitesite Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Substansi berupa portal web	Aktif	MOT-01.03.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan
					MOT-01.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan
					MOT-01.07.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Perjanjian
	Biro Umum	SI Manajemen Dokumen (e-Doc)	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	Software Asset Database	Administrasi	Aktif, Tidak digunakan	Pelaksanaan koordinasi manajemen database aset Barang Milik Negara (BMN), standar pelaksanaan manajemen, dan utilitas aset negara (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Biro Umum	Romum Portal	Administrasi	Tahap pengembangan	Pelaksanaan koordinasi kerumahtangaan, dan pemeliharaan sarana prasarana serta pengamanan Kementerian (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	e-Disposisi	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi ketatausahaan Kementerian (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	File Sharing Pimpinan	Administrasi	Tidak Aktif	Pelaksanaan koordinasi ketatausahaan Kementerian (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	SIPEG	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi ketatausahaan Kementerian (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	SIMAN	Administrasi	Aktif	Persiapan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi perlengkapan Kementerian (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
					Pelaksanaan koordinasi manajemen <i>database</i> aset Barang Milik Negara (BMN), standar pelaksanaan manajemen, dan utilitas aset negara (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	SIMAK	Administrasi	Aktif	<p>Pelaksanaan koordinasi manajemen <i>database</i> aset Barang Milik Negara (BMN), standar pelaksanaan manajemen, dan utilitas aset negara (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)</p> <p>Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)</p>
	Biro Umum	SAIBA	Administrasi	Aktif	<p>Pelaksanaan koordinasi manajemen <i>database</i> aset Barang Milik Negara (BMN), standar pelaksanaan manajemen, dan utilitas aset negara (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)</p> <p>Pengelolaan serta penataan aset Sekretariat Jenderal (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)</p>

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Biro Umum	Persediaan	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi manajemen <i>database</i> aset Barang Milik Negara (BMN), standar pelaksanaan manajemen, dan utilitas aset negara (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
					Pengelolaan serta penataan aset Sekretariat Jenderal (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	e-Rekon	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi manajemen <i>database</i> aset Barang Milik Negara (BMN), standar pelaksanaan manajemen, dan utilitas aset negara (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
					Pengelolaan serta penataan aset Sekretariat Jenderal (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	RKAKL	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	KRISNA	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
					(Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	e-Monev	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	SPRINT	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	SAS	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	SISKA	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	OMSPAN	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	e-SPT	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Biro Umum	SIMPEL	Administrasi	Aktif	MOT-10.03.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Keprotokolan
	Biro Umum	SPSE	Administrasi	Aktif	MOT-10.04.CFM.01.SOP.01 Perencanaan dan Pengadaan Barang & Jasa
	Biro Umum	e-Katalog	Administrasi	Aktif	MOT-10.04.CFM.01.SOP.01 Perencanaan dan Pengadaan Barang & Jasa
	Biro Umum	SiRUP	Administrasi	Aktif	MOT-10.04.CFM.01.SOP.01 Perencanaan dan Pengadaan Barang & Jasa
	Biro Umum	EntryPass	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	Falco	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	<i>Visitor Management System</i>	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	TNDE	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
					(Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Umum	e-Billing	Administrasi	Aktif	Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Biro Hubungan Masyarakat	Aplikasi Pelayanan Informasi (PPID)	Layanan Publik	Aktif	MOT-08.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik
	Biro Hubungan Masyarakat	Aplikasi Perpustakaan Kemendag	Administrasi	Aktif	MOT-08.01.CFM.01.SOP.01
	Biro Hubungan Masyarakat	Websitesite Perpustakaan Kemendag	Website/Portal Berita	Aktif	Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik
	Biro Hubungan Masyarakat	(PDSI: <i>Software</i> Aplikasi Perpustakaan)	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	MOT-08.01.CFM.01.SOP.01
	Biro Hubungan Masyarakat	<i>Software</i> printer barcode	Administrasi	Aktif	Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik
	Biro Hubungan Masyarakat	<i>Software</i> RFID card reader	Administrasi	Aktif	MOT-08.01.CFM.01.SOP.01
	Biro Hubungan Masyarakat	Pengembangan <i>database</i> (PDSI: Pengembangan <i>database</i>)	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
		kepegawaian pusat humas)			
	Biro Hubungan Masyarakat	Pembuatan portal web	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
	Biro Hubungan Masyarakat	(PDSI: Pemutakhiran <i>Database</i> Pelayanan Informasi)	-	Aktif, Tidak digunakan	-
	Biro Hubungan Masyarakat	PDSI: <i>Redisign Website</i> Kemendag (sebelumnya tidak ada nama sistem yg tercatat)	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
	Biro Hubungan Masyarakat	SMS Gateway Biro Humas	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
	Biro Advokasi Perdagangan	Aplikasi Basis Data Terkait Perjanjian Perdagangan Internasional	Substansi	Aktif	MOT-12.02.CFM.01.SOP.02 Pemberian Konsultasi dan Opini Hukum Bidang Perdagangan Internasional
	Biro Advokasi Perdagangan	(<i>Websitesite</i> Rovodag)			MOT-12.02.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Dalam Rangka Pengamanan Peraturan Nasional Di Bidang Perdagangan Internasional

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
					MOT-12.02.CFM.41.SOP.01 Pemberian Opini Hukum Terkait Kesesuaian Kebijakan Negara Mitra Dagang Dengan Komitmen Perjanjian Perdagangan Internasional
	Biro Advokasi Perdagangan	Aplikasi Kuisisioner Online	Administrasi	Aktif	MOT-12.02.CFM.01.SOP.02 Pemberian Konsultasi dan Opini Hukum Bidang Perdagangan Internasional
					MOT-12.02.CFM.03.SOP.01 Pemberian Bantuan Hukum Dalam Rangka Pengamanan Peraturan Nasional Di Bidang Perdagangan Internasional
					MOT-12.02.CFM.41.SOP.01 Pemberian Opini Hukum Terkait Kesesuaian Kebijakan Negara Mitra Dagang Dengan Komitmen Perjanjian Perdagangan Internasional
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan	Intranet	-	Tidak Aktif	-
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan	Aplikasi Perpustakaan	Administrasi	Aktif	MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Perdagangan

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
					MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Stakeholder Perdagangan
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan	Websitesite Pusdiklat	Website/Portal Berita	Aktif	MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Perdagangan
					MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Stakeholder Perdagangan
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan	SIPELAT	-	Tidak Aktif, tidak digunakan	-
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan	Open Journal System	Website	Aktif	MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Perdagangan
					MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Stakeholder Perdagangan
	Pusat Penanganan Isu Strategis	Software BSC PB VIEWS 8.2	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
	Pusat Penanganan Isu Strategis	Intranet	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
	Pusat Penanganan Isu Strategis	Sistem Evaluasi Perwakilan	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
	Pusat Data dan Sistem Informasi	Intranet	-	Tidak Aktif, Tidak Digunakan	-

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Pusat Data dan Sistem Informasi	E-SIMPPEL (sistem penilaian perwakilan perdagangan LN)	Substansi	Aktif	MOT-07.01.CFM.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (Sistem Jaringan dan Infrastruktur)
	Pusat Data dan Sistem Informasi	Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Kemendag	Adminisrasi	Aktif	Layanan Dukungan Teknis
	Pusat Data dan Sistem Informasi	Sistem Gateway (OSS)	Substansi	Aktif	MOT-07.01.CFM.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (Sistem Jaringan dan Infrastruktur)
	Pusat Data dan Sistem Informasi	<i>Websitesite</i> Kemendag	<i>Website/Portal</i> Berita	Aktif	Layanan Dukungan Teknis
	Pusat Data dan Sistem Informasi	Perwakilan Kemendag	Wbsite/Portal Berita	Aktif	Layanan Dukungan Teknis
	Pusat Data dan Sistem Informasi	PDSI One Stop Service	Administrasi	Aktif	?
	Pusat Data dan Sistem Informasi	Post Border	Substansi	Aktif	MOT-02.05.CFM.01.SOP.01 Pengawasan Barang dan Jasa Yang Beredar di Pasar
	Pusat Data dan Sistem Informasi	Aplikasi Integrasi Data Sistem Informasi Perdagangan	Substansi	Aktif	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Pusat Data dan Sistem Informasi	LPSE Kemendag (modul pelaporan)	Administrasi	Aktif, Tidak Digunakan	-
	Pusat Data dan Sistem Informasi	Aplikasi Pengelolaan Data dengan Daerah	Substansi	Aktif	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik
	Pusat Data dan Sistem Informasi	Pelayanan Data Mandiri (PAMAN)	Substansi	Aktif	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik
	Pusat Data dan Sistem Informasi	Sipeda	Layanan Publik	Aktif	MOT-07.02.CFM.01 Pengelolaan dan Pelayanan Permintaan Data (data dan informasi)
	Pusat Data dan Sistem Informasi	Tikda	Substansi	Aktif	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik
	Pusat Data dan Sistem Informasi	Tikra	-	Aktif	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik
	Pusat Data dan Sistem Informasi	TNDE Mobile	Administrasi	Aktif	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik
	Pusat Data dan Sistem Informasi	TakTik	Administrasi	Aktif	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik
	Pusat Data dan Sistem Informasi	SISTER	Substansi	Aktif	MOT-07.02.CFM.01 Pengelolaan dan Pelayanan Permintaan Data (data dan informasi)

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Pusat Data dan Sistem Informasi	SIPO	Perizinan	Aktif, Tidak Digunakan	Informasi Perusahaan (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
	Pusat Data dan Sistem Informasi	API Online	Layanan Publik		Layanan Dukungan Teknis
	Pusat Data dan Sistem Informasi	EXIM/IPT	Website/Portal Berita	-	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik
	Pusat Data dan Sistem Informasi	Inatrade	Layanan Publik		Layanan Dukungan Teknis
	Pusat Data dan Sistem Informasi	E-SKA	Layanan Publk		Layanan Dukungan Teknis
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian	Website Akademi Metrologi	Portal Web	Aktif	Pengembangan Teknologi Kemetrologian
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian	Website PPSDK	Portal Web	Aktif	Pengembangan Teknologi Kemetrologian
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian	Aplikasi <i>management internet access</i>	Administrasi	Tidak Aktif	-
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian	SISKA aplikasi sistem keuangan	Administrasi	Tidak Aktif	-
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian	sistem administrasi keuangan	Administrasi	Aktif, Tidak digunakan	-

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian	sistem registrasi online (registrasi fungsional)	Substansi	Aktif	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian	sistem registrasi online (registrasi teknis)	Substansi	Aktif	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian	aplikasi siakad	Substansi	Aktif	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian	Aplikasi simpegab PPSDK	Substansi	Aktif	-
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian	Sistem aplikasi perjalanan	Administrasi	Aktif	-
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian	PDSI: Sistem Perpustakaan	Administrasi	Aktif	Pengembangan Teknologi Kemetrolgian
PDN	Sekretariat DitJen. PDN	Sistem Kearsipan / E-Filling PDN	-	Aktif, Tidak digunakan	-
		Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT)	Layanan Publik	Aktif	MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perijinan /Non Perijinan Kepada Dunia Usaha
		Website DJPDN	Website/Portal Berita	Aktif	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
		SUDAPEG	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
		SIPAD	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
		SIM Harga dan Pasokan	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
		Monitoring Perdagangan Daerah	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
		Aplikasi Android iOS	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
		Aplikasi Sistem Informasi Manajemen	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi		Aplikasi Sinkronisasi Data dan Info P3A dan Keagenan	Substansi	Aktif (tidak digunakan)	Distribusi Tidak Langsung (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
		Aplikasi Logo Waralaba (QR Code)	Substansi	Aktif	BINUS: Distribusi Langsung dan Waralaba (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik		Aplikasi Pelaporan Manajemen Gudang	Substansi	Tidak Aktif	-
		Sistem Pelaporan Minuman Beralkohol Online	Substansi	Tidak Aktif	-

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
		Sistem Informasi Pasar Rakyat	Substansi	Aktif	MOT-03.02.CFM.01.SOP.01 Penataan Jaringan Distribusi/ Pengembangan Sarana Distribusi. Pengelolaan Sarana Distribusi (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016) Pengawasan Sarana Distribusi dan Perdagangan Antar Pulau (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
		Sistem Pendataan Omset Pasar	Substansi	Aktif	Pengelolaan Sarana Distribusi (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
		Sistem Manajemen Dokumen	Administrasi	Tidak Aktif	-
		SIPAP	Substansi	Aktif	Perdagangan antar pulau dan perbatasan (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)
		Aplikasi Manifest Domestik	Substansi	Aktif	Perdagangan antar pulau dan perbatasan (Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016)

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
		Sistem Informasi Gerai Maritim	Substansi	Aktif	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik
	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Aplikasi Sistem Informasi Pasar Tradisional	Substansi	Aktif	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok [Informasi Pasar]
	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Aplikasi Bawang Merah	Substansi	Aktif	MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perijinan/Non Perijinan Kepada Dunia Usaha [Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri dan Perikanan Kelautan]
	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Aplikasi Pengendalian dan Sistem Pelaporan Online Harga dan Stok (SP2KP)	Substansi	Aktif	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok
	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Aplikasi Pasar Induk Kramat Jati	Substansi	Aktif	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok
	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Mobile SP2KP	Substansi	Aktif	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok
	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Sibapok	Substansi	Aktif	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok
	Direktorat P3DN	Portal Etalase Produk Indonesia	Portal Website	Aktif	MOT-05.03.CFM.01.SOP.01 Peningkatan Nilai Tambah Produk

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
PKTN	Sekretariat Ditjen PKTN	Sistem Informasi Keuangan	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
	Sekretariat Ditjen PKTN	Website Ditjen PKTN	Website/Portal Berita	Aktif	Informasi profil, publikasi serta berita di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga
	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	Portal Konsumen Nasional	Substansi	Aktif	MOT-02.04.CFM.02.SOP.01 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Konsumen
	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	Siswa SPK	Substansi	Aktif	
	Direktorat Metrologi	Sistem Informasi Pelayanan UPTP IV	Substansi	Aktif	MOT-02.06.CFM.02.SOP.01 Pengujian UTTP, Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi
	Direktorat Metrologi	Aplikasi Perizinan Online (SPPK)	Perizinan, Substansi	Aktif	MOT-02.06.CFM.01.SOP.01 Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik Untuk UTTP
	Direktorat Metrologi	FLOCALC.net with FLOXL.net.Kelton ALL	Substansi	Aktif	Belum terdapat informasi yang memadai terkait korelasi proses bisnis dan sistem informasi ini
	Direktorat Metrologi	e-Dupak Kemetrologian	Administrasi	Aktif	MOT-11.02.CFM.03.SOP.02 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional di bawah Pembinaan Kemendag
	Direktorat Metrologi	e-Assessment (Unit Metrologi Legal)	Substansi	Aktif	PB.X04

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
					Penilaian dan <i>surveillance</i> Unit Metrologi Legal
	Direktorat Metrologi	Database Kepegawaian Kemetrologian	Administrasi	Aktif	Belum terdapat informasi yang memadai terkait korelasi proses bisnis dan sistem informasi ini
	Direktorat Tertib Niaga	Aplikasi Penerbitan K3L	Substansi	Aktif	Baru akan dirilis, status di anggap aktif
	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Post Border	Substansi	Aktif	MOT-02.05.CFM.01.SOP.01 Pengawasan Barang dan Jasa Yang Beredar di Pasar
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Aplikasi Dokumen Mutu	Administrasi	Aktif	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Yang SNI-nya Diberlakukan Wajib
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	SISKA Dit. Standalitu	Administrasi	Aktif	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Yang SNI-nya Diberlakukan Wajib
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	SISKA Balai Penguji Mutu Barang	Administrasi	Aktif	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Yang SNI-nya Diberlakukan Wajib
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	SISKA Balai Kalibrasi	Administrasi	Aktif	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Yang SNI-nya Diberlakukan Wajib
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	SISKA Balai Sertifikasi	Administrasi	Aktif	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Yang SNI-nya Diberlakukan Wajib

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Sistem Pengendalian Konsistensi Mutu Barang	Layanan Publik	Aktif	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Yang SNI-nya Diberlakukan Wajib
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Aplikasi SPB Impor Pelaporan		Tidak Aktif, Tidak digunakan	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Yang SNI-nya Diberlakukan Wajib
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Sistem Informasi Sertifikasi	Substansi	Aktif	MOT-02.02.CFM.01.SOP.01 Perumusan Sni Jasa Bidang Perdagangan
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Sistem Pengolah Data Profisiensi		Tidak Aktif, Tidak digunakan	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Yang SNI-nya Diberlakukan Wajib
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Aplikasi LPK Online	Layanan Publik	Aktif	MOT-02.01.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian MOT-02.01.CFM.02.SOP.01 Pengawasan Kinerja LPK Terdaftar
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Aplikasi NRP	Layanan Publik	Aktif	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Yang SNI-nya Diberlakukan Wajib
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Aplikasi SPB Impor		Tidak Aktif, tidak digunakan	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Yang SNI-nya Diberlakukan Wajib

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Database PMB	Website/Portal Berita	Aktif	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Yang SNI-nya Diberlakukan Wajib
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Database Pengelolaan Perpustakaan Standalitu	Administrasi	Aktif	-
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Inatrimis	Website/Portal Berita	Aktif	-
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Websitesite Balai Sertifikasi	Website/Portal Berita	Aktif	-
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Websitesite BPMB	Website/Portal Berita	Aktif	-
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Sistem E-DUPAK Jafung PMB	Administrasi	Aktif	MOT-11.02.CFM.03.SOP.02 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag MOT-11.02.CFM.03.SOP.05 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Database Jejaring Kerja PMB	-	Tidak aktif, Tidak digunakan	MOT-11.02.CFM.03.SOP.02 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag MOT-11.02.CFM.03.SOP.05 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	ATB Lainnya (<i>Websitesite</i> PPMB)	-	Tidak aktif, Tidak digunakan	-
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Pengembangan <i>Websitesite</i> PPMB	-	Tidak aktif, Tidak digunakan	-
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Update <i>Database</i> Perpustakaan	-	Tidak aktif, Tidak digunakan	-
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Aplikasi Layanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Administrasi	Aktif	-
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Aplikasi NPB (nama di BMN: Sistem Aplikasi NRP)	Layanan Publik	Aktif	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang yang SNI-nya Diberlakukan Wajib

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Teknis Kalibrasi	Layanan Publik	Aktif	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Yang SNI-nya Diberlakukan Wajib
DAGLU	Sekretariat Ditjen DAGLU	Aplikasi Distribusi SKA	Substansi	Aktif	MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) untuk Barang Ekspor Indonesia
	Sekretariat Ditjen DAGLU	Websitesite Ditjen Daglu	Portal Website	Aktif	-
	Sekretariat Ditjen DAGLU	Apikasi CaLK dan CaLBMN	Substansi	Aktif	-
	Sekretariat Ditjen DAGLU	E-Payment	Substansi	Aktif	MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) untuk Barang Ekspor Indonesia
	Sekretariat Ditjen DAGLU	E-Blanko	Substansi	Aktif	MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) untuk Barang Ekspor Indonesia
	Sekretariat Ditjen DAGLU	Portal Komite	-	-	-
	Sekretariat Ditjen DAGLU	Sistem Informasi dan Pelaporan Dekonsentrasi	Portal Website	Tidak Aktif	-

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
		Perdagangan Luar Negeri Daerah			
	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor	Inatrade	Perizinan	Aktif	MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) Untuk Barang Ekspor Indonesia
		Sistem Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan / E-Trade Financing	Substansi	Aktif	Sistem pembiayaan dan pembayaran (Permendag Nomor 8 Tahun 2016)
		Sistem Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Perizinan	Aktif	MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perizinan / Non Perizinan Kepada Dunia Usaha
	Direktorat Pengamanan Perdagangan	<i>Database</i> Hambatan Perdagangan	<i>Database</i>	Tidak Aktif (saat ini menggunakan MS. office)	MOT-04.04.CFM.01.SOP.01 Penanganan Tuduhan <i>Dumping</i> MOT-04.04.CFM.02.SOP.01 Penanganan Tuduhan Subsidi MOT-04.04.CFM.03.SOP.01 Penanganan Tindakan <i>Safeguard</i> MOT-04.04.CFM.04.SOP.01 <i>Dispute Settlement</i> MOT-04.05.CFM.01.SOP.01 Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
					MOT-04.05.CFM.02.SOP.01 Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan
PPI	Sekretariat Ditjen PPI	<i>Websitesite</i> SPIP (Sistem Informasi Perundingan)	Substansi	Aktif, Belum Optimal Digunakan	MOT-06.01.CFM.01.SOP.01 <i>Leading Sector</i> Perundingan Perdagangan Internasional
					MOT-06.01.CFM.01.SOP.02 Menghadiri dan/Melakukan Perundingan Sidang Internasional
					MOT-06.01.CFM.01.SOP.03 Usulan Pengesahan Perjanjian dan/ atau Kesepakatan Perjanjian Internasional
	Sekretariat Ditjen PPI	SIMDOK	Administrasi	Tidak Aktif	-
	Sekretariat Ditjen PPI	Aplikasi MIS	Substansi	Aktif	MOT-06.01.CFM.01.SOP.01 <i>Leading Sector</i> Perundingan Perdagangan Internasional
					MOT-06.01.CFM.01.SOP.02 Menghadiri dan/Melakukan Perundingan Sidang Internasional
					MOT-06.01.CFM.01.SOP.03 Usulan Pengesahan Perjanjian dan/ atau Kesepakatan Perjanjian Internasional
	Sekretariat Ditjen PPI	<i>Websitesite</i> Ditjen PPI	Portal	Aktif	Tata Usaha Ditjen PPI

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Sekretariat Ditjen PPI	Websitesite FTA Center	Substansi	Aktif	Tata Usaha Ditjen PPI
	Sekretariat Ditjen PPI	IORA WEB TRADE	Substansi	Aktif	inter-gov organization di negara pinggiran lautan hindia
PEN	Sekretariat Ditjen PEN	Aplikasi SPPD	Administrasi	Aktif	Perjalanan Dinas
	Sekretariat Ditjen PEN	Aplikasi Perencanaan		Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
	Sekretariat Ditjen PEN	E-Filling System	Administrasi	Aktif	Aplikasi untuk disposisi
	Dit. Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor (PPIE)	Websitesite Ditjen PEN	Portal Web	Aktif	Website Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
	Dit. Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor (PPIE)	Websitesite Membership Services	Portal Web	Aktif	MOT-04.01.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Pasar Ekspor
	Dit. Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor (PPIE)	Websitesite Database Ekspor dan Importir	Substansi	Aktif	MOT-04.01.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Pasar Ekspor
	Dit. Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor (PPIE)	Aplikasi Peta Pasar	Portal Web	?	MOT-04.01.CFM.01.SOP.01 Pengembangan Pasar Ekspor
	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	Aplikasi Perpustakaan Balai Besar PPEI	Administrasi	Aktif	MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Stakeholder Perdagangan

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	SISKA Balai Besar PPEI	Tidak terdapat keterangan	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	Websitesite Balai Besar PPEI	Website/Portal Berita	Aktif	Sistem informasi yang berisi informasi dan pendaftaran pelatihan di PPEI, beserta informasi lainnya
	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	Websitesite Kegiatan Promosi	Website/Portal Berita	Aktif	MOT-04.03.CFM.01.SOP.01 Promosi
	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	Website Portal dan Aplikasi	Website/Portal Berita	Aktif	Tidak terdapat keterangan
	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	Sistem Simulasi Ekspor Impor	Substansi	Aktif	MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Stakeholder Perdagangan
	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	E-Learning	Substansi	Aktif	MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Stakeholder Perdagangan

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	Aplikasi Kartu Kendali Widyaiswara	Substansi	Aktif	MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Stakeholder Perdagangan
	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	Aplikasi Peserta dan Pelatihan PPEI	Layanan Publik	Aktif	MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Stakeholder Perdagangan
	Dit. Promosi dan Citra	Aplikasi Penyusunan E-Dokumen	-	Aktif, Tidak digunakan	MOT-04.03.CFM.01.SOP.01 Promosi
	Dit. Promosi dan Citra	Website TEI	Website/Portal Berita	Aktif	MOT-04.03.CFM.01.SOP.01 Promosi
	Direktorat Pengembangan Produk Ekspor	Website Indonesia Design Development Center (IDDC)	Website/Portal Berita	Aktif	
ITJEN	Inspektorat Jenderal	Sistem / Aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan.	Substansi	Aktif	Pelaksanaan Pengawasan Internal
	Inspektorat Jenderal	Website Itjen	Portal Website	Aktif	Pelaksanaan Pengawasan Internal
	Inspektorat Jenderal	Whistle Blowing System (WBS) yang merupakan fitur dari web itjen	Substansi	Aktif	Pelaksanaan Pengawasan Internal

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Inspektorat Jenderal	LHKASN (Laporan Harta Kekayaan ASN)	Memiliki wewenang untuk update and read	Aktif	Pelaksanaan Pengawasan Internal
	Inspektorat Jenderal	LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Negara)	Hanya sebagai <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	Aktif	Pelaksanaan Pengawasan Internal
	Inspektorat Jenderal	E-SIMPPEL (sistem informasi pelaporan kinerja perwakilan)	Hanya sebagai <i>Monitoring</i> dan Evaluasi, tidak memiliki wewenang untuk melakukan create, read, update, delete, (CUD)	Aktif	Pelaksanaan Pengawasan Internal
BAPPEBTI	BAPPEBTI-Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Fisik	Sistem Pengolah Data Transaksi	Substansi	Aktif	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PL
	BAPPEBTI-Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Fisik	Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi - Sistem Perdagangan Alternatif (SPTT-SPA)	Substansi	Aktif	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PL
	BAPPEBTI-Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar	Sistem Informasi Pelaku Usaha (Profiling)	Substansi	Aktif	MOT - 05.07.CFM.01.SOP.01 Pembinaan PBK, SRG dan PL

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	BAPPEBTI-Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar	Sistem Perizinan Online PBK	Layanan Publik	Aktif	MOT - 05.07.CFM.01.SOP.01 Pembinaan PBK, SRG dan PL
	BAPPEBTI-Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar	Aplikasi Persetujuan PTT dan Kontrak	Substansi	Aktif	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PL
	BAPPEBTI-Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Pemeliharaan dan Operasional Sistem Informasi Pasar Lelang Online	Substansi	Aktif	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PL
	BAPPEBTI-Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Pembangunan Sistem Pelaporan Pasar Lelang Komoditas	Substansi	Aktif	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PL
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Aplikasi <i>Website</i> Services BAPPEBTI	-	Aktif	Tidak terdapat informasi terkait
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Integrasi Sistem Aplikasi BAPPEBTI	Substansi	Tidak terdapat informasi terkait	Tidak terdapat informasi terkait

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Aplikasi Pemetaan Pelaku Pasar	Substansi	Aktif	Tidak terdapat informasi terkait
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Aplikasi Pendaftaran Ujian Profesi	Sub	Aktif	MOT - 05.07.CFM.01.SOP.01 Pembinaan PBK, SRG dan PL
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Aplikasi Penunjang Data Statistik PBK			
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Aplikasi PNBK			
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Sistem Informasi Harga Komoditi			
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Sistem Pelaporan Rekening MT940			
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Aplikasi Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka	Substansi	Aktif	MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PI
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Sistem Pengaduan Online	Substansi	Aktif	MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PI

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Aplikasi SRG Mobile	Substansi	Aktif	MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PI
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Sistem Persetujuan Pelaku Usaha SRG secara Elektronik	Substansi	Aktif	MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PI
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Sistem Manajemen Audit	Substansi	Aktif	MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PI
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Digitalisasi peraturan	Substansi	Aktif	MOT-01.05.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Kepala Bapebbti
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Sistem Pelaporan Lembaga SRG	Substansi	Aktif	MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PI
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Sistem Pengawasan Lembaga SRG	Substansi	Aktif	MOT - 05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG dan PI
	Data Dari Awal Tahun 2019 (sekretariat BAPPEBTI)	Websitesite BAPPEBTI	-	Aktif	Tidak ditemukan informasi terkait
	Sekretariat BPPP	Jurnal Elektronik BILP	Substansi	Aktif	SOP: Mikro Pengelolaan Buletin ilmiah Litbang perdagangan
	Sekretariat BPPP	Websitesite BP3	Portal Web	Aktif	SOP: Mikro

Direktorat	Unit Kerja	Nama Sistem Elektronik	Klasifikasi	Status	Proses Bisnis Terkait
					Pengelolaan Buletin ilmiah Litbang perdagangan
	Sekretariat BPPP	Website konferensi BP3	Substansi	Aktif	SOP: Mikro <i>Call for Paper</i> dan Konferensi Internasional
	BSML II	Sistem Persuratan	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
	BSML II	Sistem unit kemetrolgian	-	Tidak Aktif, Tidak digunakan	-
	BSML IV	SI Liter	Tidak terdapat informasi terkait	Aktif	Membantu Inventarisasi dan monitoring pelayanan Fasilitasi Tera / Tera Ulang di wilayah BSML Regional IV
	BSML IV	Aplikasi Verifikasi/Kalibrasi BSML Reg IV	Substansi	Aktif	?

Lampiran 9 Target Arsitektur Aplikasi Umum

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Hukum	JDIH (Internal)	Aplikasi Umum	Biro Hukum	MOT-01.03.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan	JDIH yang dimaksud adalah JDIH internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut
					MOT-01.04.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan	
					MOT-01.07.CFM.01.SOP.01 Penyusunan Perjanjian	
Administrasi Pemerintahan	Monitoring & Evaluasi	E-SIMPPEL (Sistem Penilaian Perwakilan Perdagangan n LN)	Aplikasi Umum	PDSI	MOT-07.01.CFM.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (Sistem Jaringan dan Infrastruktur)	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Layanan Sistem Informasi	PDSI One Stop Service	Aplikasi Umum	PDSI	N/A	Aplikasi internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut
Administrasi Pemerintahan	Perpustakaan	Aplikasi Perpustakaan	Aplikasi Umum	Biro Hubungan Masyarakat	MOT-08.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Aplikasi Kemendag yang berasal dari eksternal Instansi Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Layanan Publik	PPID & Humas	PPID	Aplikasi Umum	Biro Hubungan Masyarakat	MOT-08.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Aplikasi internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut
					MOT-08.03.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perpustakaan	
Layanan Publik	PPID & Humas	PPID Mobile	Aplikasi Umum	Biro Hubungan Masyarakat	MOT-08.01.CFM.01.SOP.01 Pengelolaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Aplikasi internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut
					MOT-08.03.CFM.01.SOP.01	

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
					Pelayanan Perpustakaan	
Layanan Publik	PPID & Humas	Publikasi Non Ilmiah	Aplikasi Umum	Biro Hubungan Masyarakat		Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Layanan Publik	Pengaduan Publik	LAPOR	Aplikasi Umum	Biro Hubungan Masyarakat		
Administrasi Pemerintahan	Pengadaan	SIRUP*	Aplikasi Umum	Biro Umum	MOT-10.04.CFM.01.SOP.01 Perencanaan dan Pengadaan Barang & Jasa	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintah	Manajemen Aset	SIMAN*	Aplikasi Umum	Biro Keuangan	MOT-10.04.CFM.01.SOP.02 Penatausahaan BMN	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
					MOT-10.04.CFM.01.SOP.03 Penggunaan dan Pemanfaatan BMN	
					MOT-10.04.CFM.01.SOP.04	

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
					Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN	
Administrasi Pemerintah & Layanan Publik	Pengadaan	SPSE*	Aplikasi Umum	Biro Umum	MOT-10.04.CFM.01.SOP.01 Perencanaan dan pengadaan barang dan jasa	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintah	Pengadaan	E-Katalog*	Aplikasi Umum	Biro Umum	MOT-10.04.CFM.01.SOP.01 Perencanaan dan pengadaan barang dan jasa	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintah	Manajemen Aset	Persediaan*	Aplikasi Umum	Biro Keuangan	MOT-10.04.CFM.01.SOP.02 Penatausahaan BMN	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintah	Manajemen SDM	E-Dupak Metrologi*	Aplikasi Umum	Direktorat Metrologi	MOT-11.02.CFM.03.SOP.02 Penilaian dan Pendapatan Angka	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis. Termasuk dalam

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
					Kredit Jabatan Fungsional di bawah Pembinaan Kemendag	kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintahan
Administrasi Pemerintah	Manajemen SDM	E-Dupak PMB*	Aplikasi Umum	Distantalitu	MOT-11.02.CFM.03.SOP.02 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis. Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintahan
					MOT-11.02.CFM.03.SOP.05 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kemendag	pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintahan

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Perpustakaan	Aplikasi Perpustakaan	Aplikasi Umum	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan	MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Perdagangan	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
					MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Stakeholder Perdagangan	
Administrasi Pemerintahan	Kepegawaian	E-Learning	Aplikasi Umum	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Stakeholder Perdagangan	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	Perencanaan & Penganggaran	Aplikasi SATUDJA	Aplikasi Umum	Biro Perencanaan	MOT-11.02.CFM.04.SOP.01 Pelaksanaan Forum/ Event Internasional	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	Perencanaan & Penganggaran	Sistem Raker Kemendag	Aplikasi Umum	Biro Perencanaan	MOT-11.02.CFM.04.SOP.01	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
					Pelaksanaan Forum/ Event Internasional	mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintah	Manajemen Aset	SIMAK BMN*	Aplikasi Umum	Biro Keuangan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.01 Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintah	Keuangan	E-Rekon*	Aplikasi Umum	Biro Keuangan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintah	Perencanaan dan Penganggaran	RKAKL*	Aplikasi Umum	Biro Keuangan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
					MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan	
Administrasi Pemerintah	Keuangan	SAS*	Aplikasi Umum	Biro Keuangan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
					MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan	sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintah	<i>Monitoring dan Evaluasi</i>	E-Monitoring*	Aplikasi Umum	Biro Perencanaan	MOT-13.03.CFM.01.SOP.01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Aplikasi internal Kemendag yang masuk ke dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE. Dapat melakukan pengembangan pada aplikasi yang sudah ada dengan mengikuti persyaratan peraturan pemerintah yaitu Perpres No. 95 Tahun 2018
Administrasi Pemerintah	<i>Monitoring dan Evaluasi</i>	E-Monev*	Aplikasi Umum	Biro Keuangan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintah	Keuangan	SAIBA*	Aplikasi Umum	Biro Keuangan	MOT-13.04.CFM.01..SOP.01 Penyusunan PP tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Keuangan	SISKA*	Aplikasi Umum	Biro Keuangan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, namun aplikasi ini termasuk dalam kategori aplikasi dalam ruang lingkup percepatan SPBE sesuai Perpres 95 Tahun 2018 □ Potensi Pemanfaatan Aplikasi Umum Berbagi Pakai Secara Nasional
					MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan	
Administrasi Pemerintah	Kepegawaian	SIPEG	Aplikasi Umum	Biro Keuangan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.01 Penetapan pejabat pengelolaan keuangan	Aplikasi internal Kemendag yang masuk ke dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE. Dapat melakukan pengembangan pada aplikasi yang sudah ada dengan mengikuti persyaratan peraturan pemerintah yaitu Perpres No. 95 Tahun 2018
Administrasi Pemerintah	Perencanaan & Penganggaran	KRISNA*	Aplikasi Umum	Biro Keuangan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE Nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah pusat
					MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan	

Type Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Type Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintah	Monitoring & Evaluasi	OM-SPAN*	Aplikasi Umum	Biro Keuangan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran	Termasuk dalam aplikasi umum percepatan SPBE Nasional, statusnya dalam moratorium artinya pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah pusat
					MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan	
Administrasi Pemerintah	Pengadaan	SISMON TEPRA*	Aplikasi Umum	Biro Keuangan	MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 Realisasi Anggaran	Termasuk dalam aplikasi umum percepatan SPBE Nasional, statusnya dalam moratorium artinya pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah pusat
					MOT-13.02.CFM.01.SOP.04 Penyusunan Laporan Keuangan	

Administrasi Pemerintahan	Pengawasan – Pengaduan Internal	WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)	Aplikasi Umum	Itjen	Pelaksanaan pengawasan internal	Aplikasi internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut
Administrasi Pemerintahan	Kepegawaian	SIPEG	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 – Pelaksanaan koordinasi ketatausahaan Kementerian	Aplikasi internal Kemendag yang masuk ke dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE. Dapat melakukan pengembangan pada aplikasi yang sudah ada dengan mengikuti persyaratan peraturan

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
						pemerintah yaitu Perpres No. 95 Tahun 2018
Administrasi Pemerintahan	Manajemen Aset	SIMAN*	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 – Persiapan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi perlengkapan Kementerian Permendag No. 8 Tahun 2016 – Pelaksanaan koordinasi manajemen <i>database</i> aset Barang Milik Negara (BMN), standar pelaksanaan manajemen, dan utilitas negara	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE Nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah pusat
Administrasi Pemerintahan	Manajemen Aset	SIMAK*	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 – Pelaksanaan koordinasi manajemen <i>database</i> aset Barang Milik Negara (BMN), standar pelaksanaan manajemen, dan utilitas negara	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
					Permendag No. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro	
Administrasi Pemerintahan	Keuangan	SAIBA*	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan koordinasi manajemen <i>database</i> aset Barang Milik Negara (BMN), standar pelaksanaan manajemen, dan utilitas aset negara	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
					Permendag No. 8 Tahun 2016 - Pengelolaan serta penataan aset Sekretariat Jendral	
Administrasi Pemerintahan	Keuangan	E-Rekon*	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan koordinasi manajemen <i>database</i> aset Barang Milik Negara (BMN), standar pelaksanaan manajemen, dan utilitas aset negara	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
					Permendag No. 8 Tahun 2016 - Pengelolaan serta penataan aset Sekretariat Jendral	
Administrasi Pemerintahan	Perencanaan dan Penganggaran	KRISNA*	Aplikasi Umum	Biro Umum	Peremendag No. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintahan	Monitoring dan Evaluasi	E-Monev*	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintah	Perencanaan dan Penganggaran	RKAKL*	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintah	Keuangan	SAS*	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional,

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
					koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro	statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintah	Keuangan	SISKA*	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintah	Monitoring dan Evaluasi	OM-SPAN*	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintahan	Pengelolaan Arsip/Naskah Dinas	Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Kemendag	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 - Layanan Dukungan Teknis	Aplikasi E-Arsip/ <i>Filling</i> (Naskah Dinas) Kemendag memerlukan pengembangan lebih lanjut Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan ada beberapa aplikasi terkait naskah dinas, namun TNDE telah dipilih untuk kemudian digunakan di seluruh satuan kerja terkait di Kemendag

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Keuangan	E-SPT*	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 – Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintahan	Manajemen Aset	SPRINT	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 – Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintahan	Manajemen Aset	E-BILLING	Aplikasi Umum	Biro Umum	Permendag No. 8 Tahun 2016 – Pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro	Aplikasi Kemendag yang berasal dari eksternal Instansi, terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis.
Administrasi Pemerintahan	Manajemen Aset	Aplikasi Layanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Aplikasi Umum	Distandalitu	N/A	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis. Masuk dalam kategori aplikasi statusnya dalam moratorium sehingga apabila

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
		Gedung Kantor				terdapat pengembangan menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintahan	Manajemen Aset	CaLBMN*	Aplikasi Umum	Setjen Daglu	N/A	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintahan	Keuangan	CaLK*	Aplikasi Umum	Setjen Daglu	N/A	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintahan	Manajemen Aset	LHKASN*	Aplikasi Umum	Itjen	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintah
Administrasi Pemerintahan	Manajemen Aset	LHKPN*	Aplikasi Umum	Itjen	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
						umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintan
Administrasi Pemerintahan	Monitoring & Evaluasi	E-SIMPPEL*	Aplikasi Umum	Itjen	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis
Layanan Publik	Reformasi Birokrasi	RB Kemendag	Aplikasi Umum	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis
Layanan Publik	Jurnal Ilmiah	Jurnal Ilmiah Perdagangan	Aplikasi Umum	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i>	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag yang memerlukan pengembangan lebih lanjut

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
				dan inventaris elektronik		
Administrasi Pemerintahan	Manajemen Kinerja	E-SAKIP*	Aplikasi Umum	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintan
Administrasi Pemerintahan	Manajemen SDM	SAPK BKN*	Aplikasi Umum	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintan

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Manajemen SDM	SKP Online*	Aplikasi Umum	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintan
Administrasi Pemerintahan	Manajemen SDM	Absensi	Aplikasi Umum	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag yang memerlukan pengembangan lebih lanjut

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Manajemen SDM	Aplikasi Perjalanan Dinas	Aplikasi Umum	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Administrasi Pemerintahan	Keuangan	SILABI*	Aplikasi Umum	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintan
Administrasi Pemerintahan	Keuangan	K2PN*	Aplikasi Umum	Tidak terdapat informasi	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
				terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	<i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintan
Administrasi Pemerintahan	Keuangan	Simponi*	Aplikasi Umum	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Termasuk dalam kategori aplikasi umum percepatan SPBE nasional, statusnya dalam moratorium sehingga pengembangan aplikasi umum menunggu percepatan yang terintegrasi dari pemerintan

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Monitoring & Evaluasi	Sistem Monitoring KSP (Kator Staf Presiden)	Aplikasi Umum	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi Kemendag yang berasal dari eksternal Instansi Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	Monitoring & Evaluasi	Aplikasi Monitoring Isu Strategis	Aplikasi Umum	N/A	N/A	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Administrasi Pemerintahan	Monitoring & Evaluasi	Aplikasi Project Management	Aplikasi Umum	N/A	N/A	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Monitoring & Evaluasi	Aplikasi Laporan Hasil Tindak Lanjut	Aplikasi Umum	Itjen	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Aplikasi Kemendag yang berasal dari eksternal Instansi Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	Monitoring & Evaluasi	Aplikasi Pelaporan DAK Fisik	Aplikasi Umum	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi Kemendag yang berasal dari eksternal Instansi Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis

Lampiran 10 Target Arsitektur Aplikasi Khusus

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Layanan Publik	Layanan Publik PKTN	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Teknis Kalibrasi	Aplikasi Khusus	Distandalitu	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang yang SNI-nya Diberlakukan Wajib	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis Terintegrasi dalam SIMPKTN
Administrasi Pemerintahan	Standarisasi dan Pengendalian Mutu	Sistem Informasi Sertifikasi	Aplikasi Khusus	Distandalitu	MOT-02.02.CFM.01.SOP.01 Perumusan SNI jasa bidang perdagangan	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis Terintegrasi dalam SIMPKTN
Layanan Publik	Layanan Publik Konsumen dan Tertib Niaga PKTN	Portal Konsumen Nasional	Aplikasi Khusus	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	MOT-02.04.CFM.02.SOP.01 Pelayanan informasi dan pengaduan konsumen	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis. Pada aplikasi ini terdapat rencana untuk mengikutsertakan aplikasi ini dalam konsolidasi sistem SIM PKTN
Layanan Publik	Layanan Publik Konsumen dan Tertib Niaga PKTN	Aplikasi LPK Online	Aplikasi Khusus	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	MOT-02.01.CFM.SOP.01 Pelayanan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis. Pada aplikasi ini terdapat rencana untuk mengikutsertakan aplikasi ini dalam konsolidasi sistem SIM PKTN

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
					MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Kinerja LPK Terdaftar	
Layanan Publik	Layanan Publik Konsumen dan Tertib Niaga PKTN	Aplikasi SPB Impor	Aplikasi Khusus	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	MOT-02.01.CFM.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang yang SNI-nya Diberlakukan Wajib	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis. Pada aplikasi ini terdapat rencana untuk mengikutsertakan aplikasi ini dalam konsolidasi sistem SIM PKTN
Administrasi Pemerintahan	PKTN	Aplikasi Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP)	Aplikasi Khusus	Direktorat Metrologi	MOT-02.06.CFM.02.SOP.01 Pengujian UTPP, verifikasi standar ukuran dan kalibrasi	Diperlukan perbaikan/Pengembangan fitur, <i>digital signature</i> , integrasi dengan SIMPONI, e-lab terkait pencatatan dokumen cerapan pengujian Dan terkait aplikasi ini terdapat rencana untuk mengikutsertakan aplikasi ini dalam konsolidasi sistem SIM PKTN
Administrasi Pemerintahan	Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga	Sistem Pengendalian Konsistensi Mutu Barang	Aplikasi Khusus	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang yang SNI-nya Diberlakukan Wajib	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis Terintegrasi dalam SIMPKTN

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Standarisasi dan Pengendalian Mutu	Aplikasi Dokumen Mutu	Aplikasi Khusus	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang yang SNI-nya Diberlakukan Wajib	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis Terintegrasi dalam SIMPKTN
Administrasi Pemerintahan	Ekspor Impor/ Perdagangan Luar Negeri	Post Border	Aplikasi Khusus	Pusat Data dan Sistem Informasi	MOT-02.05.CFM.01.SOP.01 Pengawasan Barang dan Jasa Yang Beredar di Pasar	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Layanan Publik	Perijinan Perdagangan	Perijinan Online Metrologi (SPPK)	Aplikasi Khusus	Direktorat Metrologi	MOT-02.06.CFM.01.SOP.01 Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik Untuk Uttp	Aplikasi ini berpotensi untuk dihapuskan atau dikonsolidasikan Kembali pada SIMPKTN
Layanan Publik	Perjanjian Perdagangan	Aplikasi NRP & NPB <i>Online</i>	Aplikasi Khusus	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu	MOT-02.01.CFM.03.SOP.01 Pengawasan Mutu Barang Yang SNI-nya Diberlakukan Wajib	Aplikasi NRP & NPB <i>Online</i> Kemendag memerlukan pengembangan lebih lanjut Terintegrasi dalam SIMPKTN

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Layanan Publik	Sarana Distribusi dan Logistik	Sistem Informasi Pasar Rakyat	Aplikasi Khusus	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik	MOT-03.02.CFM.01.SOP.01 Penataan Jaringan Distribusi/ Pengembangan Sarana Distribusi	Diperlukan pengembangan terkait fitur: interface yang terintegrasi, penambahan modul profil pasar tugas pembantuan, Penambahan Modul Profile Pasar Tugas Pembantuan, dan fitur <i>people nearby</i>
Administrasi Pemerintahan	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Sistem Informasi Harga Barang Pokok (SIBAPOK)	Aplikasi Khusus	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis Terintegrasi dengan SP2KP
Administrasi Pemerintahan	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Aplikasi Sistem Informasi Pasar Tradisional	Aplikasi Khusus	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok (Informasi Pasar)	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis Terintegrasi dengan SP2KP
Administrasi Pemerintahan	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Aplikasi Pengendalian dan Sistem Pelaporan Online Harga dan Stok (SP2KP)	Aplikasi Khusus	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis. Terkait aplikasi ini terdapat rencana untuk mengikutsertakan aplikasi ini dalam terintegrasi secara data atau fungsi dengan sistem SIM PKTN

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Mobile Apps SP2KP	Aplikasi Khusus	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Aplikasi Pasar Induk Kramat Jati	Aplikasi Khusus	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 Stabilisasi Harga Bahan Pokok	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis. Terkait aplikasi ini terdapat rencana untuk mengikutsertakan aplikasi ini dalam konsolidasi sistem SP2KP
Layanan Publik	Perijinan Perdagangan	Perijinan Perdagangan Dalam Negeri (SIPT)	Aplikasi Khusus	Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perijinan /Non Perijinan Kepada Dunia Usaha	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintah	Dashboard Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Aplikasi Bawang Merah	Aplikasi Khusus	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 Pelayanan Perijinan /Non Perijinan Kepada Dunia Usaha	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis. Terkait aplikasi ini terdapat rencana untuk mengikutsertakan aplikasi ini dalam konsolidasi sistem SP2KP
Layanan Publik	Data, Informasi dan Statistik Perdagangan	Etalase Produk Indonesia	Aplikasi Khusus	Direktorat P3DN	MOT-05.03.CFM.01.SOP.01	Aplikasi internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
					Peningkatan Nilai Tambah Produk	
Layanan Publik	Perjanjian Perdagangan	E-Payment dan E-Blanko	Aplikasi Khusus	Sekretarit Ditjen Daglu	MOT-05.06.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) untuk Barang Ekspor Indonesia	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis. Terkait aplikasi ini terdapat rencana untuk mengikutsertakan aplikasi ini dalam integrasi sistem SI peningkatan ekspor
Administrasi Pemerintahan	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Aplikasi Pendaftaran Uji Profesi	Aplikasi Khusus	Bappebti	MOT-05.07.CFM.01.SOP.01 Pembinaan PBK, SRG, dan PL	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis Terintegrasikan pada PBK
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Aplikasi Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka	Aplikasi Khusus	Bappebti	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG, dan PL	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis Terintegrasikan pada sistem PBK
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan	Aplikasi SRG Mobile	Aplikasi Khusus	Bappebti	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG, dan PL	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
	Pasar Lelang Komoditas					
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Sistem Pelaporan Lembaga SRG	Aplikasi Khusus	Bappebti	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG, dan PL	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Sistem Persetujuan Pelaku Usaha SRG	Aplikasi Khusus	Bappebti	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG, dan PL	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Sistem Manajemen Audit	Aplikasi Khusus	Bappebti	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG, dan PL	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis Terintegrasi dengan Sistem PLK
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan	Sistem Informasi Pasar Lelang Online	Aplikasi Khusus	Bappebti	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG, dan PL	Aplikasi internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
	Pasar Lelang Komoditas					
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Sistem Informasi Pelaku Usaha (Profilling)	Aplikasi Khusus	Bappebti	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG, dan PL	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Aplikasi persetujuan PTT dan Kontrak	Aplikasi Khusus	Bappebti	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG, dan PL	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Sistem Pelaporan Pasar Lelang Komuditas PL	Aplikasi Khusus	Bappebti	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG, dan PL	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintah	Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Fisik	Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi, Sistem Perdagangan	Aplikasi Khusus	Bappebti – Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Fisik	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG, dan PL	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
		Alternatif (SPTT-SPA)				Berpotensi untuk terintegrasi pada sistem PBK atau PLK
Administrasi Pemerintah	Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Fisik	Sistem Pengolah Data Transaksi	Aplikasi Khusus	Bappebti – Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Fisik	MOT-05.07.CFM.02.SOP.01 Pengawasan PBK, SRG, dan PL	<p>Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis</p> <p>Berpotensi dapat diintegrasikan dengan Sistem PBK</p>
Layanan Publik	Perizinan dan Perdagangan	SISTER	Aplikasi Khusus	PDSI	MOT-07.02.CFM.01 Pengelolaan dan Pelayanan Permintaan Data (data dan informasi)	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Layanan Publik	Perizinan dan Perdagangan	SIPEDA	Aplikasi Khusus	PDSI	MOT-07.02.CFM.01 Pengelolaan dan Pelayanan Permintaan Data (data dan informasi)	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	Pusat Data dan Sistem Informasi	Aplikasi Manajemen Layanan	Aplikasi Khusus	PDSI	MOT-07.02.CFM.01 Pengelolaan dan pelayanan permintaan data (data dan informasi)	Aplikasi internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Ekspor Impor Perdagangan Luar Negeri	Sistem Simulasi Ekspor Impor	Aplikasi Khusus	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan diklat stakeholder perdagangan	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	Ekspor Impor Perdagangan Luar Negeri	Sistem Fasilitasi Pembiayaan Perdagangan /E-Trade Financing	Aplikasi Khusus	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor	Permendag No. 8 Tahun 2016 – Sistem pembiayaan dan pembayaran	Aplikasi internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut
Administrasi Pemerintahan	Ekspor Impor Perdagangan Luar Negeri	SI Perundingan Internasional	Aplikasi Khusus	PPI	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut
Administrasi Pemerintahan	Ekspor Impor Perdagangan Luar Negeri	SI Laporan Surveyor Terintegrasi	Aplikasi Khusus	N/A	N/A	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Administrasi Pemerintahan	Ekspor/Impor Perdagangan Luar Negeri	Tikra	Aplikasi Khusus	PDSI	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Ekspor/Impor Perdagangan Luar Negeri	Tikda	Aplikasi Khusus	PDSI	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	Ekspor/Impor Perdagangan Luar Negeri	EXIM	Aplikasi Khusus	PDSI	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis
Layanan Publik	Perizinan dan Perdagangan	E-SKA	Aplikasi Khusus	PDSI	Layanan Dukungan Teknis	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis. Mengintegrasikan dengan SI EXIM
Layanan Publik	Perizinan dan Perdagangan	SIPO	Aplikasi Khusus	PDSI	Layanan Dukungan Teknis	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis. Mengintegrasikan dengan OSS dan aplikasi perizinan melalui Gateway
Layanan Publik	Layanan Publik PDN	Portal Bangsa Buatan Indonesia	Aplikasi Khusus	Direktorat P3DN,	MOT-05.03.CFM.01.SOP.01	Aplikasi internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
				Sekretaris DJPDN, PDSI	Peningkatan Nilai Tambah Produk	
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Aplikasi Pemetaan Pelaku Pasar	Aplikasi Khusus	Bappebti	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis Berpotensi terintegrasi dengan Sistem PBK atau PLK
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Aplikasi Penunjang Data Statistik PBK	Aplikasi Khusus	Bappebti	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Sistem Informasi Harga Komoditi	Aplikasi Khusus	Bappebti	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Sistem Pelaporan Rekening MT940	Aplikasi Khusus	Bappebti	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Aplikasi Pelaporan Keuangan Elektronik PBK	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Sistem Pelaporan Direktur Kepatuhan PBK	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan	Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT)	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form</i>	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
	Pasar Lelang Komoditas			berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	<i>assessment</i> dan inventaris elektronik	bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Modul Pengawasan Transaksi SPA PBK	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Administrasi Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Aplikasi Pengawasan Pelaku Usaha	Aplikasi Khusus	Bappebti	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Administrasi Pemerintahan	Bina Usaha dan Pelaku Distribusi	Aplikasi Sinkronisasi Data dan Info P3A dan Keagenan	Aplikasi Khusus	Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi	Permendag No. 8 Tahun 2016 – Distribusi Tidak Langsung	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis Selanjutnya akan diintegrasikan dengan SIPT

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	Bina Usaha dan Pelaku Distribusi	Aplikasi Edukasi E-Commerce	Aplikasi Khusus	N/A	N/A	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait Berpotensi untuk dihapus atau digabungkan dengan aplikasi Bangsa Buatan Indonesia
Administrasi Pemerintahan	Sarana Distribusi dan Logistik	Sistem Pendataan Omset Pasar	Aplikasi Khusus	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik	Permendag No. 8 Tahun 2016 – Pengelolaan Sarana Distribusi	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	Sarana Distribusi dan Logistik	Sistem Pemantauan Harga, Stock dan Gudang	Aplikasi Khusus	N/A	N/A	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Administrasi Pemerintahan	Pusat Data dan Sistem Informasi	Aplikasi Pemetaan Probis dan Inventaris Data	Aplikasi Khusus	PDSI	N/A	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Administrasi Pemerintahan	Pusat Data dan Sistem Informasi	PDSI Center	Aplikasi Khusus	PDSI	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan	Aplikasi internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut berupa tracking status,

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
					berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	dashboard history terbaru (penyelesaian permasalahan), pemisahan insiden layanan/keamanan
Administrasi Pemerintahan	Pusat Data dan Sistem Informasi	Aplikasi Audit TI	Aplikasi Khusus	PDSI	N/A	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Administrasi Pemerintahan	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Aplikasi Laporan Realisasi B2 (Barang Berbahaya)	Aplikasi Khusus	N/A	N/A	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Administrasi Pemerintahan	PKTN	e-Assessment (Unit Metrologi Legal	Aplikasi Khusus	Direktorat Metrologi	Penilaian dan <i>surveillance</i> unit metrologi legal	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	PKTN	SI Liter	Aplikasi Khusus	BSML IV	Membantu inventarisasi dan monitoring pelayanan fasilitasi tera/tera ulang di wilayah BSML Regional IV	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Administrasi Pemerintahan	PKTN	SI Ketertelusuran Standar	Aplikasi Khusus	N/A	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	PKTN	SI Pengawasan Kemetrolgian	Aplikasi Khusus	N/A	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	PKTN	Flocal	Aplikasi Khusus	Direktorat Metrologi	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	PKTN	Aplikasi Penerbitan K3L	Aplikasi Khusus	Direktorat Tertib Niaga	Baru akan dirilis, status di anggap aktif	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	PKTN	Aplikasi Pelaporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Aplikasi Khusus	N/A	N/A	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
						bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Administrasi Pemerintahan	PKTN	Aplikasi Verifikasi/ Kalibrasi	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	PKTN	Aplikasi Lims (<i>Laboratory</i>)	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Administrasi Pemerintahan	PKTN	Sistem Informasi Balai Kalibrasi	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi Internal Kemendag yang sudah ada, fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis
Layanan Publik	Perijinan Perdagangan	Inatrade	Aplikasi Khusus	PDSI	Layanan dukungan teknis	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis. Terkait aplikasi ini terdapat rencana untuk mengikutsertakan aplikasi ini dalam

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
						konsolidasi sistem OSS dan perijinan lain melalui Gateway
Layanan Publik	Perijinan Perdagangan	Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK Online)	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis. Terkait aplikasi ini terdapat rencana untuk mengikutsertakan aplikasi ini dalam konsolidasi OSS dan aplikasi perizinan melalui Gateway
Layanan Publik	Perijinan Perdagangan	Angka Pengenal Importir (API Online)	Aplikasi Khusus	PDSI	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis. Terkait aplikasi ini terdapat rencana untuk mengikutsertakan aplikasi ini dalam konsolidasi OSS dan aplikasi perizinan melalui Gateway
Layanan Publik	Perijinan Perdagangan	Perijinan Pergudangan	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Terkait fungsi aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung keberjalanan proses bisnis. Terkait aplikasi ini terdapat rencana untuk mengikutsertakan aplikasi ini dalam konsolidasi sistem SIM PKTN dan SIPT
Layanan Publik	Data, Informasi dan Statistik Perdagangan	Satu Data Perdagangan (kemendag.data.go.id)	Aplikasi Khusus	N/A	N/A	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
						bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Layanan Publik	Ekspor Impor/ Perdagangan Luar Negeri	Aplikasi Indonesia Trade Digital Promotion	Aplikasi Khusus	N/A	N/A	Termasuk dalam aplikasi internal Kemendag yang akan dikembangkan untuk dapat mendukung proses bisnis sesuai dengan permintaan Satuan Kerja terkait
Layanan Publik	Ekspor Impor/ Perdagangan Luar Negeri	IORA Web Trade	Aplikasi Khusus	Sekretariat Ditjen PPI	<i>Inter-gov organization</i> di negara pinggiran lautan Hindia	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis
Layanan Publik	Layanan Publik PKTN Terintegrasi	Sistem Informasi Persyaratan Teknis (Inatrimis)	Aplikasi Khusus	Distandalitu	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis
Layanan Publik	Layanan Publik PKTN Terintegrasi	Sistem PMB (Pengujian Mutu Barang)	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Layanan Publik	Layanan Publik PKTN Terintegrasi	Sistem Sertifikasi Produk dan Personil	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis
Layanan Publik	Layanan Publik PKTN Terintegrasi	TPP <i>Online</i>	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis
Layanan Publik	Layanan Publik PKTN Terintegrasi	Sistem Pelayanan Kalibrasi	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Layanan Publik	Layanan Publik PKTN Terintegrasi	SISWA SPK	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis
Layanan Publik	Layanan Publik PKTN Terintegrasi	Portal Perlindungan Nasional Kondumen	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis
Layanan Publik	Layanan Publik PKTN Terintegrasi	Pendaftaran Kartu Purna Jual/Garansi	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Layanan Publik	Layanan Publik PKTN Terintegrasi	Sistem Tera/ Tera Ulang & Pengawasan	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis
Layanan Publik	Layanan Publik PKTN Terintegrasi	Pendaftaran K3L	Aplikasi Khusus	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis
Layanan Publik	Sarana Distribusi dan Logistik	Aplikasi Manifest Domestik	Aplikasi Khusus	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik	Permendag No. 8 Tahun 2016 Perdagangan Antar Pulau dan Perbatasan	Aplikasi internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut

Tipe Layanan	Kelompok Aplikasi	Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	User	Fungsi Bisnis Terkait	Deskripsi
Layanan Publik	Sarana Distribusi dan Logistik	Sistem Informasi Gerai Maritim	Aplikasi Khusus	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik	Tidak terdapat informasi terkait yang di dapatkan berdasarkan <i>form assessment</i> dan inventaris elektronik	Aplikasi internal Kemendag, aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut
Layanan Publik	Sarana Distribusi dan Logistik	SIPAP	Aplikasi Khusus	Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik	Permendag No. 8 Tahun 2016 Perdagangan Antar Pulau dan Perbatasan	Aplikasi internal Kemendag, fungsi pada aplikasi ini masih dianggap memadai dalam mendukung proses bisnis

Lampiran 11 Deskripsi Usulan SOP TI

No	Nama SOP TI	Deskripsi Umum
1.	Penyusunan dan <i>Review</i> Rencana Induk	Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Induk SPBE (RISPBE) untuk menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan strategi organisasi, perancangan arsitektur dan tata kelola TI sesuai kebutuhan organisasi serta evaluasi pencapaian implementasi portofolio dan <i>roadmap</i> program dan proyek TI
2.	Manajemen Anggaran dan Biaya TI	Menjadi acuan unit TI dalam menyusun RKKL dengan mengacu kepada Rencana induk SPBE (RISPBE) dan hasil identifikasi kebutuhan bisnis, memberikan panduan kepada fungsi perencanaan TI dalam melakukan konsolidasi dan prioritasasi seluruh usulan rencana anggaran dan biaya TI organisasi berdasarkan arahan Pengarah TI serta memberikan panduan kepada Pelaksana TI dalam melakukan reuiu atas seluruh usulan anggaran dan biaya TI organisasi yang diajukan dan menyelaraskannya dengan strategi organisasi
3.	Manajemen SDM TI	Menjadi acuan dalam mengelola SDM TI meliputi proses perencanaan dan rekrutmen, pengembangan karir, dan pelatihan

No	Nama SOP TI	Deskripsi Umum
4.	Manajemen Relasi TI	Menjadi acuan dalam pengelolaan relasi antara TI dengan unit bisnis dalam menyelaraskan strategi TI dengan strategi bisnis untuk mencapai tujuan organisasi
5.	Manajemen Perjanjian Layanan TI	Menjadi acuan yang digunakan dalam rangka memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh TI mencapai target yang disepakati dengan unit bisnis
6.	Manajemen Pihak Ketiga TI	Menjadi acuan dalam pengelolaan pihak ketiga dalam rangka menjamin pelaksanaan layanan TI yang didukung oleh pihak ketiga berjalan sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati bersama dalam kontrak
7.	Manajemen Kualitas TI	Menjadi acuan yang digunakan dalam rangka penjaminan kualitas proses tata kelola dan manajemen TI.
8.	Manajemen Risiko TI	Menjadi acuan dalam mengelola Risiko TI meliputi proses asesmen risiko, penyusunan rencana penanganan risiko dan <i>monitoring</i> dan reviu risiko
9.	Manajemen Pengamanan Informasi	Menjadi acuan yang digunakan dalam rangka memastikan bahwa aset informasi terlindungi dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, baik untuk mencegah atau meminimalisasi munculnya insiden ataupun meminimalkan dampak dari insiden yang sudah terjadi
10.	Manajemen Proyek TI	Menjadi acuan dalam mengelola Proyek TI meliputi proyek akuisisi dan pengembangan aplikasi, implementasi infrastruktur, dan konsultasi

No	Nama SOP TI	Deskripsi Umum
11.	Manajemen Ketersediaan dan Kapasitas TI	Menjadi acuan dalam memastikan tingkat kapasitas dan ketersediaan layanan TI sesuai dengan tingkat layanan TI yang disetujui bersama antara TI dengan pelanggan
12.	Manajemen Perubahan TI	Menjadi acuan dalam mengelola perubahan TI meliputi pembuatan dan klasifikasi permintaan perubahan, pelaksanaan implementasi dan rencana <i>back-out</i> hingga notifikasi perubahan
13.	Manajemen Pengetahuan TI	Menjadi acuan dalam mengelola pengetahuan TI dengan memastikan agar pengarsipan dan <i>retrieval</i> pengetahuan dijalankan dengan cara yang efisien
14.	Manajemen Aset TI	Menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aset TI Organisasi
15.	Manajemen Konfigurasi TI	Menjadi acuan dalam mengelola konfigurasi TI sehingga layanan TI dapat terselenggara dengan baik
16.	Manajemen Operasi TI	Menjadi acuan dalam mengelola operasional aset-aset TI agar bekerja optimal dalam penyampaian layanan TI terkait, termasuk di dalamnya proses untuk pemeliharaan, perlindungan serta <i>monitoring</i> aset
17.	Manajemen Permintaan Layanan dan Insiden TI	Menjadi acuan yang digunakan dalam rangka memastikan bahwa tingkat kualitas dan ketersediaan layanan TI dapat terpelihara dengan baik sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tingkat layanan TI serta dapat

No	Nama SOP TI	Deskripsi Umum
		mengembalikan operasional layanan TI ke kondisi normal dalam waktu yang disepakati
18.	Manajemen Permasalahan TI	Menjadi acuan dalam rangka mencegah munculnya permasalahan dan insiden-insiden yang ditimbulkannya, meminimalkan terulangnya insiden serta meminimalkan dampak dari insiden yang tidak dapat dicegah
19.	Manajemen Kontinuitas TI	Menjadi acuan dalam mengelola kontinuitas TI dalam rangka memelihara IT <i>DRP (Disaster Recovery Plan)</i> sebagai bagian dari <i>BCP (Business Continuity Plan)</i> , melakukan <i>Risk</i> dan <i>Business Impact Analysis (BIA)</i> secara reguler agar profil risiko selalu terkini, dan memastikan kecukupan mekanisme pemulihan dan kontinuitas agar sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi
20.	Manajemen Kinerja TI	Menjadi acuan yang digunakan dalam rangka memastikan bahwa terjadi keselarasan tujuan mulai dari <i>level</i> strategis sampai dengan unit/individu TI, mengidentifikasi inisiatif yang relevan untuk pencapaian tujuan tersebut, serta menentukan indikator kinerja utama beserta targetnya
21.	Manajemen Kepatuhan TI	Menjadi acuan yang digunakan dalam rangka memastikan termitigasinya risiko kepatuhan Teknologi Informasi terhadap peraturan, hukum dan regulasi yang berlaku terkait TI

No	Nama SOP TI	Deskripsi Umum
22.	Manajemen Kendali Internal TI	Menjadi acuan dalam mengelola proses pengendalian internal TI yang meliputi proses penyusunan Rencana Audit TI, pelaksanaan Audit TI, dan penyusunan Laporan Hasil Audit TI
23.	Penunjukan Kepemilikan Data	Menjadi acuan dalam penetapan kepemilikan data yang ada di lingkungan Kemendag
24.	Permintaan Perubahan Data	Menjadi acuan dalam penyusunan dan implementasi perubahan data di lingkungan Kemendag
25.	Penyelesaian Permasalahan Data	Menjadi acuan dalam penanganan isu data yang ada di lingkungan Kemendag dan memberikan solusi terhadap permasalahan isu data tersebut
26.	Perubahan Kebijakan dan Standar Data	Menjadi acuan dalam penyusunan hingga penetapan kebijakan dan standar mengenai data
27.	Perubahan Meta Data	Menjadi acuan dalam perubahan meta data hingga persetujuan dalam perubahan meta data di lingkungan Kemendag

28.	Asesmen Kualitas Data	Menjadi acuan dalam melakukan asesmen kualitas data yang ada di lingkungan Kemendag
29.	Pembersihan Data	Menjadi acuan dalam melakukan pembersihan data di lingkungan Kemendag
30.	Perencanaan Audit TIK	Menjadi acuan dalam melakukan kegiatan perencanaan audit TIK di lingkungan Kemendag
31.	Pelaksanaan Audit TIK	Menjadi acuan dalam menugaskan pegawai dan pelaksanaan audit TIK di kategori Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan TIK
32.	Pemantauan dan Evaluasi Hasil Audit TIK	Menjadi acuan dalam menindaklanjuti, memantau, dan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan audit TIK serta pelaporan audit TIK

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

MUHAMMAD LUTFI